

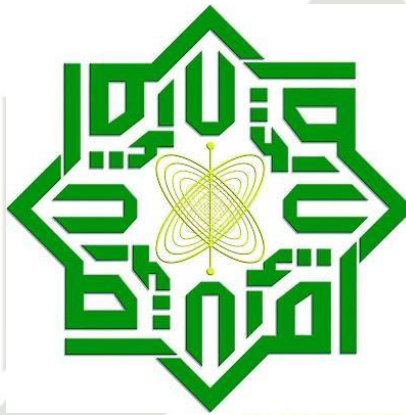
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REAKTUALISASI *MAQASHID AL-SYARI'AH* KE DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)



OLEH:

AGUS SAPUTERA
NIM. 3149 5106 500

Promotor:
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Co. Promotor:
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2021 M



Lembaran Pengesahan

Nama : Agus Saputera
Nomor Induk Mahasiswa : 31495106500
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Reaktualisasi Maqashid Al-Syariah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji III

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji IV

Dr. Zailani, M.A.
Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Promotor / Penguji VI

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Ket. Promotor / Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 03 Agustus 2021

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

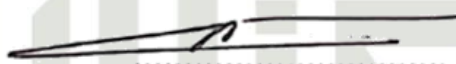


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul “ Reaktualisasi Maqashid Al-Syari’ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia “ yang ditulis oleh Sdr. Agus Saputera, NIM 31495106500, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 30 Juni 2021 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. Afrizal M, MA


Tanggal:

Sekretaris
Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D


Tanggal:

Penguji Utama
Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA


Tanggal:


Penguji I
Dr. Zulkayandri, MA


Tanggal:

Penguji II/Promotor
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA


Tanggal:

Penguji III/ Co. Promotor
Dr. Sumni Neli, M. Ag


Tanggal:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumli Nelli, M, Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

NOTA DINAS

Terhadap : Disertasi Saudara
Agus Saputera

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap hal Disertasi saudara:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Agus Saputera |
| NIM | : 31495106500 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul | : Reaktualisasi Muqashid Al-Syar'uh Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2021
Co. Promotor,

Dr. Jumli Nelli, M, Ag
NIP: 195402121981031007

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Triserasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: "Reaktualisasi Maqashid Al-Syari'ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia", yang ditulis oleh:

Nama : Agus Sapendra
NIM : 31495196599
Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang ujian Terbuka (Ujian Praraja Terbuka) Pada
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekimbaru, Juli 2021
Prof. Dr. H. Alisiddin Kado, MA
NIP: 195402121981031007

Ca. Praraja

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 197206282005012004

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsyiyah)
Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 197206282005012004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Saputera
 NIM. : 3149 5106 500
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagansiapi/28 Agustus 1969
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: "REAKTUALISASI *MAQASHID AL-SYAR'AH* KE DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2021
 Yang membuat pernyataan,


 Agus Saputera



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS PROMOTOR..... | ii |
| NOTA DINAS CO. PROMOTOR | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP | iv |
| PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA..... | v |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR SINGKATAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penjelasan Istilah | 19 |
| C. Permasalahan | 20 |
| 1. Identifikasi Masalah | 20 |
| 2. Pembatasan Masalah..... | 21 |
| 3. Rumusan Masalah | 22 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 22 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 22 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 23 |
| E. Tinjauan Penelitian yang Relevan | 23 |
| F. Metode Penelitian | 32 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 32 |
| 2. Sumber Data..... | 34 |
| 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data..... | 34 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 36 |
| BAB II MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM..... | 38 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|------------|
| A. | Pengertian Maqashid Al-Syari'ah | 38 |
| | 1. Pengertian Maqashid | 38 |
| | 2. Pengertian Al-Syari'ah | 39 |
| | 3. Pengertian Pengertian Maqashid Al-Syari'ah | 40 |
| B. | Perkembangan Maqa>shid Al-Sya>ri'ah | 68 |
| | Klasifikasi Maqa>shid Al-Sya>ri'ah | 99 |
| | Kriteria Maqa>shid Al-Sya>ri'ah | 117 |
| | Metode-Metode Untuk Mengetahui Maqa>shid Al-Sya>ri'ah | 177 |
| | Kedudukan Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam Hukum Islam | 193 |
| | 1. Hubungan Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dengan Dalil-dalil Hukum lainnya ... | 193 |
| | 2. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dan Hubungannya dengan Nash (teks) | 195 |
| | 3. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dan Hubungannya dengan Ijtihad | 201 |
| G. | Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam beberapa Bidang Hukum | 205 |
| | 1. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam Bidang Hukum Ibadah | 205 |
| | 2. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam Bidang Hukum Keluarga Islam | 212 |
| | 3. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam Bidang Hukum Perdata..... | 217 |
| | 4. Maqa>shid Al-Sya>ri'ah dalam Bidang Hukum Pidana Islam..... | 221 |
| BAB III KONSEP HAK ASASI MANUSIA NASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA ISLAM | | 224 |
| A. | Konsep Dasar Hak Asasi Manusia..... | 224 |
| | 1. HAM: Antara Wacana dan Realita | 224 |
| | 2. Perkembangan Pemikiran HAM | 227 |
| B. | Sumber dan Sejarah Hak Asasi Manusia | 241 |
| | Konstruksi Konsep Hak Asasi Manusia..... | 261 |
| | 1. Konsep Hak Asasi Manusia Nasional | 255 |
| | 2. Problematika Partikularisme dan Universalisme Hak Asasi Manusia.... | 293 |
| | Hak Asasi Manusia Dalam Islam..... | 306 |
| | 1. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia | 306 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|------------|
| 2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia | 307 |
| 3. Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Hadits | 309 |
| 4. Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah | 309 |
| 5. Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia..... | 310 |
| BAB IV. IMPLEMENTASI MAQASHID AL-SYARI'AH KE DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA... | |
| A. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)..... | 313 |
| B. Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..... | 363 |
| BAB V. PENUTUP..... | 387 |
| A. Kesimpulan..... | 387 |
| B. Saran..... | 389 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|---|
| Cet. | : Cetakan |
| Hlm. | : Halaman |
| H | : Tahun Hijriyah |
| H.R. | : Hadits Riwayat |
| Q.S. | : al-Qur'an Surat |
| KDRT | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| PA | : Pengadilan Agama |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| UU | : Undang-undang |
| DUHAM | : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsonan

| Huruf arab | Huruf latin | Huruf arab | Huruf latin |
|------------|-------------|------------|--------------------|
| ب | b | هـ | h |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | ts | ي | y |
| ج | j | ا | tidak dilambangkan |
| ح | h | | |
| خ | kh | | |
| د | d | | |
| ذ | dz | | |
| ر | r | | |
| ز | z | | |
| س | s | | |
| ش | sy | | |
| ص | sh | | |
| ض | dh | | |
| ط | th | | |
| ظ | zh | | |
| ع | ‘ | | |
| غ | gh | | |
| ف | f | | |
| ق | q | | |
| ك | k | | |
| ل | l | | |
| م | m | | |
| ن | n | | |
| و | w | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © a. Vocal Panjang (*mad*) â = aa
b. Vocal panjang (*mad*) î = ii
c. Vocal Pancang (*mad*) û = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya الامة ditulis al-‘ammah.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a. Misalnya شريعة (syari’ah), kasrah ditulis i, misalnya الجبال (al-jibali), dan dhammah ditulis u, misalnya ظلوما (dzuluman).

4. Vokal Rangkap

او ditulis aw, وُو ditulis uw, أي ditulis ay, اى ditulis iy.

5. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah yang dimatikan ditulis h, misalnya عربية ditulis ‘arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia baku, seperti mait, bila dihidupkan ditulis t, misalnya المينة ditulis al-maitatu.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan syamsiyyah, ditulis al, misalnya المسلم ditulis al-Muslim, الدار ditulis al-dar. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis Abdullah.

7. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan.

ABSTRAK

Judul Disertasi ini adalah “Reaktualisasi Maqashid Al-Syari’ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan HAM di Indonesia jumlahnya sudah memadai, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pelanggaran HAM masih terjadi secara signifikan, karena UU HAM yang ada belum mampu mengakomodir pelaksanaan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah konsep undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang bersumber dari nilai-nilai ajaran dan moral Islam yang berlandaskan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan yang dikenal dengan Maqashid al-Syari’ah. Sehingga terwujud perlindungan, pemajuan, pengakuan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaktualisasi implementasi Maqashid al-Syari’ah ke dalam UU HAM di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data utama dalam penelitian hukum kepustakaan disebut bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer seperti al-Qur’an dan Hadits, Undang-Undang HAM, dan bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik analisa-kualitatif dengan metode *content analysis* atau yang sering disebut sebagai kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui informasi yang diperoleh secara objektif dan sistematis dari objek yang diteliti.

Dari analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai *Maqashid al-Syari’ah*, secara umum sudah tercermin dalam UU PKDRT (UU No. 23 tahun 2004). Lima aspek (*dharurat al-khamsah*) yang dikandung *Maqashid al-Syari’ah* sudah termanifestasikan dalam materi muatan undang-undang tersebut, meskipun batasan dan pengaturannya belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan syari’at Islam. Hal ini terjadi karena perbedaan batasan mengenai kekerasan, penetapan sanksi pidana, dan aspek-aspek lainnya, sehingga berdampak secara ekonomi dan sosial akibat ketentuan sanksi dalam UU tersebut.

Dari isi materi muatan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa secara umum UU ini sudah sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dikandung dalam Maqashid al-Syari’ah. Hanya saja perumusan dan penjabarannya secara terperinci dan khusus sesuai situasi, kondisi, dan keadaan anak, masih harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, perlu revisi peraturan perundang-undangan tentang HAM melalui undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan turunannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

عنوان هذه الأطروحة هو "إعادة تدقيق مقاصد الشريعة" في قانون حقوق الإنسان في إندونيسيا". القانوني البت حكم أو تهلق حقوق الإنسان في إندونيسيا عددها كان كافيًا، ولكن هناك بعض نقاط الضعف في تشريدها. ال تزال هناك حاجة لدرجة حقوق الإنسان، ألن قانون حقوق الإنسان الحالي لا يضمن فاعليته على

تأكيد تنفيذ حقوق الإنسان في إندونيسيا. لذلك، من الضروري صياغة مفهوم لقانون حقوق الإنسان الذي يُنتج من قيم التعاليم والأخلاق الإسلامية التي تعتمد على المصالحة وتجنب الضرر، والمفروضة باسم مقاصد الشريعة. من أجل تدقيق مجاية حقوق الإنسان وتعزيزها والعرفان بها وإعمالها في إندونيسيا.

أهداف من هذا البحث هو معرفة تنفيذ إعادة تدقيق مقاصد الشريعة في قانون حقوق الإنسان في إندونيسيا، وخاصة القوانين لرقم 23 لسنة 2004 بشأن منع العنف السري، والقانون لرقم 23 لسنة 2002 بشأن

مداية الطفل.

نوع البحث القانوني المستخدم في كتابة هذه الأطروحة هو بحث مكتيب، أي البحث الذي يتم من خلال بحث المصادق المكتوبة. تسمى مصادر البيانات الرئيسية في البحث القانوني المكتيب المصادق المكتوبة، والتي تشمل المصادق المكتوبة الأولية مثل القرآن والحديث، وقوانين حقوق الإنسان، والمصادق المكتوبة المكتوبة التي تدعم هذا

البحث. وتحليل البيانات، من استخداهم طريقة التحليل النوعي مع طريقة تحليل المصادق أو ما يشار إليه غالبًا باسم دراسة المصادق، وهي تقنية تستخدم لاستنتاج البحث من خلال الملاحظات التي من الحصول عليها

بشكل موضوعي ومنهجي من المصادق المكتوبة.

تحليل البيانات، من الحصول على نتائج البحث التالية. انعكست مبادئ وقيم مقاصد الشريعة بشكل عام في قانون منع العنف السري (قانون رقم 23 لعام 2004). الضرورة إلامسة الواردة في مقاصد الشريعة تتجلى في مادة المصادق هذا القانون، على الرغم من أن ال يمكن القول بأن الحدود والحدودات تتوافق

إللكامل مع ما تؤده الشريعة الإسلامية. يحدث هذا بسبب الاختلافات في الحدود فيما يتعلق بالعنف،

ومزيد العقوبات الجنائية، وجوانب أخرى، حيث يمكن أن يكون هناك أثر اقتصادي واجتماعي كعقوبة إللكام

العقوبات في هذا القانون.

من محتوى المصادق الواردة في مواد القانون لرقم 23 لسنة 2002 بشأن مجاية الطفل، يمكن الاستنتاج أن هذا القانون بشكل عام يراعى مع المبادئ والقيم الواردة في مقاصد الشريعة. ولكن الصياغة والتفصيل التفصيل

ولابد حديد وضوابط حالة الطفل وشأنه وطرقه، ال بد أن يتم تكييفه مع العصر.

لذلك، من الضروري تعديلات قانوني التشريع المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القوانين الوزارية والقوانين الإقليمية ومشتقاتها.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The title of this dissertation is “Re-actualization of *Maqashid Al-Shari’ah* into Human Rights Law in Indonesia.” There are sufficient laws on human rights in Indonesia, but there are still some weaknesses in their implementation. Significant human rights violations still occur because the existing human rights law has been unable to accommodate the implementation of human rights in Indonesia. Therefore, it is necessary to formulate law concepts on human rights that originate from the values of Islamic teachings and morals based on benefit and avoid harm, known as *Maqashid Al-Shari’ah* to realize the protection, promotion, recognition, and fulfillment of human rights in Indonesia.

The purpose of this study was to determine the implementation of the re-actualization of *Maqashid al-Shari’ah* into the Human Rights Law in Indonesia, especially Law no. 23 of 2004 on Prevention of Domestic Violence and Law no. 23 of 2002 on Child Protection.

The type of legal research used in writing this dissertation is library research conducted by researching library materials. The primary data sources in the legal research literature are called legal materials, including the primary legal materials (Quran, Hadith, and Human Rights Laws) and secondary legal materials. Meanwhile, to analyze the data, this research used qualitative-analysis techniques with content analysis methods to conclude information obtained objectively and systematically from the object being study.

From the data analysis, the research results indicated the principles and values of *Maqāshid al-Syarī’ah*, in general, have been reflected in the PKDRT Law (UU No. 23 of 2004). Furthermore, the material content of the laws has manifested the five aspects in *Maqashid al-shari’ah*. Despite the fact, there are incomplete limits and arrangements based on Islamic laws. In addition, it is a result of boundaries differences regarding violence, the determination of criminal sanctions, and other aspects. Therefore, it generates economic and social impacts as a consequence of the sanctions provisions in the law.

From the material of the articles in Law no. 23 of 2002 on child protection, this law has reflected the principles and values contained in *Maqashid al-Syariah*. Nevertheless, the detailed formulation and elaboration based on the circumstances of the children require adaption to current development.

Therefore, it is necessary to revise the laws on human rights through ministerial regulations, regional regulations, and their derivatives.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah *subhānahu wa ta'āla* menurunkan syariah Islam melalui utusan-Nya Nabi Muhammad *shalallāhu 'alaihi wa sallam* dengan tujuan tertentu, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Karena melalui Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal, manusia dituntun di segala aspek kehidupannya di dunia dalam rangka mencapai kemaslahatan kehidupan yang utama yaitu di akhirat kelak.

Itulah sebabnya, maka Islam meletakkan tanggungjawab utama di pundak manusia yang harus diembannya sebagai khalifah Allah *subhānahu wa ta'āla* di muka bumi ini, yaitu sebagai hamba Allah (Q. S. Adh-Dharyat (51): 56) dan khalifah pemakmur bumi (Q. S. Hud: 61). Keduanya mempunyai hubungan yang erat antara dunia dan akhirat, sehingga manusia tidak lepas dari nilai-nilai Islam (syariat) dalam aktivitasnya di muka bumi untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu akhirat. Kedua tujuan tersebut sesungguhnya terangkum dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

Oleh karena itu, *Maqāshid Al-Syarī'ah* menjadi penting dalam melakukan kajian terhadap syariah Islam (hukum Islam). *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad *shalallāhu 'alaihi wa sallam* (al-Qur'an dan Sunnah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jasser Auda, *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang merupakan sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral itu dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.¹ Bahkan *Maqāshid Al-Syarī'ah* merupakan bagian terdalam dari inti agama Islam atau malah agama Islam itu sendiri.²

Kajian teori *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāshid al-Syarī'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah *shlallāhu 'alaihi wa sallam*, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqāshid Al-Syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas

¹ Jasser Auda, *Maqāsid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in* (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2008), hlm. 7, 32 dan 49.

² Ahmad al-Raisuni, *al-Bahs fi Maqasid al-Syari'ah: Nasy'atuhi wa Tatawwuruhi wa Mustaqbaluhu*, makalah disampaikan dalam seminar tentang "Maqasyid Syariah" di London tanggal 1-5 Maret 2005.

landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³

Dalam diskusi mengenai hukum Islam, teori *Maqashid* sejak lama sudah ada pada generasi pertengahan. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*. Yang *dharuriyat* dibagi lagi kedalam *hifzh al-dīn* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-‘irdh* (perlindungan kehormatan). Pengertian *daruriyat* mengacu pada keenam kebutuhan utama tersebut. Artinya, *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka hidupnya akan menjadi terancam. *Hajiyat* berarti kebutuhan antara yang terkait dengan kebutuhan umum, tidak sampai pada tingkat *daruriyat*. Sementara *tahsiniyat* berarti hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan utama dan kebutuhan antara; di dalamnya terdapat tujuan untuk memperoleh kepantasan atau keutamaan.⁴

Sebagai contoh misalnya penerapan *Maqāshid Al-Syarī'ah dharuriyat* (kebutuhan pokok) tentang *hifzh al-‘aql*. Kehidupan manusia akan mengalami bahaya jika akal/pikiran mereka tertimpa bahaya. Maka, Islam melarang seseorang meminum khamar (minuman keras), karena dapat merusak akal/pikirannya. Begitu juga dalam hal *hifzh al-māl*, kehidupan manusia akan

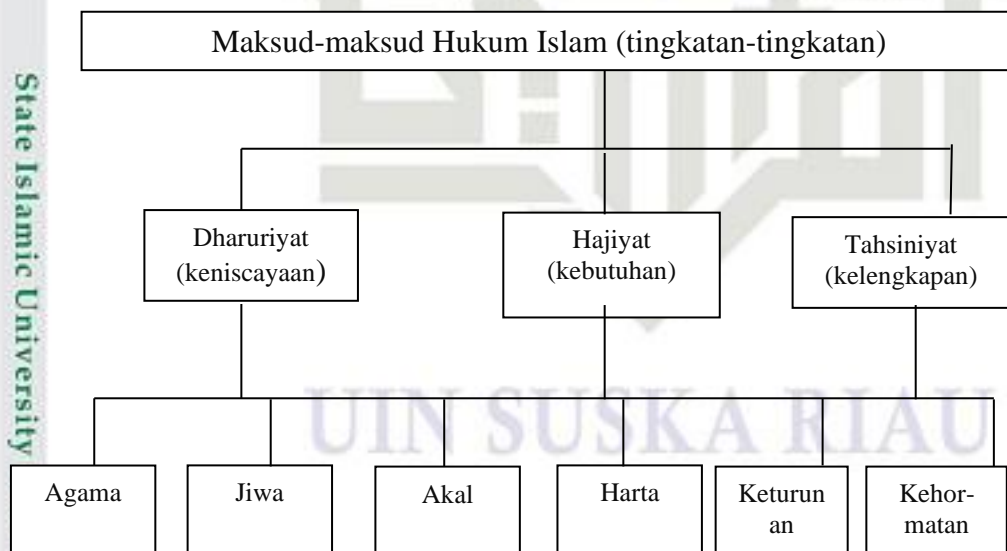
³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009.

⁴ Abdullah bin Bayyah, *Alaqah Maqasid al-Syari'ah bi Usul al-Fiqh* (London: Markaz Dirasat Maqasid al-Syariah al-islamiyah, 2000), hlm. 23-24.

mengalami bahaya jika terjadi krisis keuangan. Maka, Islam melarang praktik riba, penimbunan barang dagangan, dan praktik penipuan yang lainnya.

Sementara contoh *hajiyāt* adalah kebutuhan manusia terhadap perkawinan. Islam hanya mendorong untuk menerima kebutuhan ini dan mengaturnya. Terpenuhi tidaknya kebutuhan yang satu ini, bukan terkait dengan kehidupan dan kematian seseorang; kehidupan manusia tidak akan mengalami bahaya hanya karena ada diantara mereka tidak kawin.

Sedangkan *tahsiniyāt* menjadi sekedar kebutuhan pelengkap, seperti kebutuhan terhadap pakaian yang bagus dan kebutuhan terhadap rumah yang indah. Begitulah konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hirarkis atas dasar pertimbangan ke-*dharurat*-an. Hirarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Maqāshid Al-Syarī'ah dapat dijadikan sebagai prinsip universal (*al-ushūl al-kullī*) untuk menghindari pertentangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) antara makna literal dengan makna konteks. Ia menjadi metode jalan tengah antara pertentangan

dalil itu agar tidak terikat kaku pada teks atau terlepas bebas dengan kepentingan konteks. *Maqashid Al-Syari'ah* hadir dalam rangka keluar dari ketegangan itu, tidak tenggelam dalam ungkapan lafal tetapi pada saat yang sama mampu mewujudkan maksud teks dalam situasi yang sah sesuai dengan kehendak Sang Pembuat syariah.⁵

Jadi *maqāshid* harus difungsikan sebagai landasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadits). Dalam konteks pengambilan keputusan hukum Islam, *maqashid* harus dikedepankan. Dan untuk itu, Jasser Auda mengusulkan sebuah prinsip:

“*tadūru al-ahkām al-syar‘iyyah al-‘amaliyah ma’a maqāshidiha wujudan wa’adāman kamā tadūru ma’a ‘ilaliha wujudan wa ‘adaman*”.⁶ Yang maksudnya adalah keberadaan atau ketiadaan hukum itu bersama dengan tujuan pensyari’atannya diterima sepanjang dapat diketahui ada tidaknya ‘*illat*’ (sebab, tujuan, alasan, dan motif).

Setidaknya, praktik pengambilan keputusan hukum dengan mempertimbangkan *Maqāshid al-Syarī’ah* seperti itu pernah dilakukan pada zaman para sahabat Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Diceritakan, ketika penaklukan Irak, Syam dan Mesir, khalifah Umar bin Khattab menolak untuk membagikan tanah negeri yang ditaklukkan sebagai *ghanimah* kepada para panglima perang umat Islam, di antara mereka adalah Saad bi Abi Waqas di Irak, Abu Ubaidah di Syam dan Amr bin Ash di Mesir. Keputusan yang dilakukan khalifah Umar untuk tidak membagikan tanah ini berdasarkan pertimbangan

⁵ Jasser Auda, *Op. cit.*, hlm. 16-17. Menurut Jasser Auda, teori *naskh* juga terjebak pada *ta’arudal-adillah*, karena di sana ada dalil yang menasakh dan dalil yang dinasakh. Atas dasar inilah, dia menolak teori *naskh*, dan menggantikannya dengan teori *maqāsid*.

⁶ *Ibid.*, hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemaslahatan publik, yaitu supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kalangan hartawan (*aghniyā'*) saja tetapi terjadi pemerataan, tidak hanya pada generasi sahabat tetapi juga generasi sesudahnya.

Contoh lain yang dapat diketengahkan di sini adalah persoalan *diyāt*.

Diyāt al-tahsiniyat pada masa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* ditetapkan dalam bentuk seratus ekor unta. Meskipun Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* telah menentukan bentuk *diyāal-tahsiniyat* yang harus dibayarkan, tetapi khalifah Umar sepeninggal beliau mengubahnya sesuai dengan jenis harta yang berkembang di tempat. Untuk di tanah jazirah (Arab) berupa binatang unta, di wilayah Syam dan Mesir diberlakukan *diyāt* dalam bentuk emas, sementara di wilayah Irak diubah dalam bentuk uang setempat. Keputusan yang dilakukan khalifah Umar untuk mengubah bentuk *diyāt* yang harus dibayarkan ke dalam ukuran-ukuran lainnya ini, semata-mata mengacu dan mempertimbangkan situasi setempat atau aspek *maqāshid*.⁷

Dari berbagai contoh peristiwa hukum yang didasarkan atas nilai kemaslahatan (teori *Maqāshid al-Syarī'ah*) yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam*, sahabat, *tābi'in*, *tābi' tabi'in* dan *salāfus sholeh*, jika dikaitkan dengan situasi keindonesiaan dan kekinian, teori *maqāshid* tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau bahkan pertimbangan utama dalam proses pembentukan hukum (pembuatan undang-undang) di Indonesia dan sekaligus mengevaluasi undang-undang yang sudah ada. Sebab tidak sedikit ditemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat

⁷ *Ibid.*, hlm. 43.



ini yang mesti direvisi dan bahkan harus dicabut karena tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat akibat dari kurangnya memperhatikan aspek *Maqāshid al-Syarī'ah* ini.

Atas alasan itulah, maka perlu ada konsep pembaruan HAM yang diatur dalam Undang-Undang sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perbenturan, pengabaian dan bahkan pelanggaran HAM.

Pendekatan berbasis *Maqāshid al-Syarī'ah* sangat relevan diaplikasikan terhadap isu hak-hak asasi manusia khususnya jika istilah *Maqāshid al-Syarī'ah* dikontekstualisasi (diaktualisasikan) dan diberi peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam. Topik-topik hak asasi manusia dan *Maqashid* membutuhkan penelitian lebih lanjut dalam rangka memecahkan problem inkonsistensi yang ditegaskan oleh beberapa peneliti dalam tataran aplikasi”.⁸

Memang diskursus tentang Hak Asasi Manusia selalu hangat diperbincangkan sejak berabad-abad silam hingga dewasa ini. Isu penegakan dan pelanggaran HAM selalu menjadi perhatian internasional. Tak jarang agama dijadikan sebagai kambing hitam dari beberapa kasus pelanggaran HAM di dunia ini, pasalnya beberapa doktrin hukum Islam dituding *nir-kemanusiaan* dan diskriminatif, misalnya *Qishash* dan pembunuhan *murtadd*.

Diskursus hukum Islam dan HAM menjadi salah satu tema utama perdebatan akademis dalam studi hukum Islam. Apalagi terdapat tuduhan bahwa Islam merupakan agama yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai HAM, seiring isu HAM yang sedang *booming* di berbagai belahan dunia dengan kebangkitan

⁸ Muhammad Usman Salih, *al-Islam huwa Nizam Syamil li Himayat wa Ta'ziz Huquq al-Islam* (Makalah di International Conference on Islam and Human Rights, Khourtum, 2006).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan masyarakat sipil (*civil society*) di lapisan bawah. Namun, pada aras yang berbeda, agama juga diklaim sebagai pioner penegakan HAM. Kenyataan inilah yang mau tidak mau menimbulkan kesan bahwa HAM Islam yang berlandaskan *Maqāshid al-Syarī'ah* itu tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan HAM pada masa kini yang nota benenya bersumber dari HAM Barat.

Dalam kaitan itu, maka hampir semua negara yang ada di dunia ini telah meratifikasi konsep HAM dalam kerangka konstitusional. Negara Barat dan sebagian negara Timur telah menjadikan HAM Barat sebagai *umbrella constitution*, sementara negara Timur dalam hal ini adalah negara dengan mayoritas muslim juga tidak mau ketinggalan untuk meratifikasi konsep HAM yang ada dalam Islam sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi Kairo.⁹

Oleh karena itu, tanpa memandang Barat dan Timur, sesungguhnya isu penegakan HAM merupakan sebuah konsensus umat manusia demi terciptanya perdamaian dunia. Namun persoalan yang sering meletup ke permukaan adalah diferensiasi standar dan orientasi HAM versi Barat dan versi Timur (Islam), yang kemudian menjadi dua kutub besar yang *dikotomis*, dari dulu hingga kini.

Perjalanan yang panjang tersebut mengindikasikan bahwa perhatian umat manusia tentang HAM sangat besar dan tidak pernah usang. Catatan sejarah telah mengabadikan bahwa regulasi HAM mempunyai peran yang sangat vital dalam menjamin terpenuhinya HAM, sekaligus sebagai kontrol terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM dari masa ke masa.

⁹ Jazim Hamidi, dalam mujaid kumkelo, moh. Anas kholis dan fiqh vredian aulia ali, *fiqh ham: ortodoksi dan liberalisme has asasi manusia dalam islam*. Malang: setara press, 2015, hlm. xi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi yang diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan pribadi atau berekspresi tersebut, dalam Pasal 23 ayat (2) UU itu menyebutkan, “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

UUD 1945 dengan tegas memasukkan hak atas rasa aman ini dalam Pasal 28A-28I. Juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30 tentang HAM, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan Pasal 35, “setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

Memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki adalah berbanding



lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula tanpa melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa.

Sebagai contoh misalnya yang terjadi seperti pelanggaran HAM berupa perlakuan semena-mena terhadap golongan lemah di kalangan perempuan dan anak-anak, perdagangan perempuan dan anak (*women and children trafficking*), perburuan anak, penculikan dan perdagangan organ-organ tubuh khususnya anak-anak dan seterusnya.

Kasus-kasus bernuansa HAM di beberapa wilayah di tanah air dalam beberapa tahun terakhir ini dan riak-riak konflik yang mengiringinya tersebut, setidaknya menunjukkan bahwa ada perbedaan penafsiran tentang prinsip dan pelaksanaan HAM di kalangan masyarakat.

Dari contoh-contoh kasus ini setidaknya dengan jelas memperlihatkan benang merah bahwa sesungguhnya telah terjadi perbedaan persepsi masing-masing pihak yang berbenturan kepentingan dalam menafsirkan dan melaksanakan HAM yang berakibat kepada pelanggaran HAM, baik antar perorangan, kelompok bahkan antar negara dengan masyarakat. Dalam hal inilah maka regulasi tentang HAM yang baik dan berlaku universal bagi semua golongan menjadi suatu keniscayaan dalam suatu negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Nomor: 6/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan antara lain: (1) bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional tentang *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) selaras dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya; (2) bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampadan sampai sekarang belum ada konsensus kesamaan pemahaman penafsiran dan penerapan HAM, sehingga masing-masing negara dimungkinkan untuk memberikan penafsiran dan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan susila serta perundang-undangan yang berlaku; (3) bahwa pasal-pasal dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebebasan individu dan mengabaikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab; (4) bahwa adanya beberapa pasal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang tidak selaras atau bertentangan dengan Agama Islam, yakni: a. pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam mencari jodoh, perkawinan dan perceraian; b. pasal 18 tentang kebebasan berganti agama; c. pasal 23 tentang pekerjaan. (5) bahwa oleh karena itu, MUI perlu menetapkan fatwa tentang batas-batas pelaksanaan HAM. (6) bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Kairo tahun 1996 tentang HAM.¹⁰

Dalam perkembangannya terkait dengan pengaturan dan penerapan HAM oleh negara-negara Islam, setidaknya ada tiga bentuk pola yang diterapkan. Yang pertama adalah negara Islam yang menyatakan bahwa semua pengaturan mengenai HAM sudah terangkum dalam al-Qur'an dan masyarakat pada zaman

¹⁰Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000 tahun 2000 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rasulullah *shalallāhu ‘alaihi wasallam*. Yang *kedua* adalah negara Islam yang mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui ataupun diubah secara menyeluruh. Adapun yang *ketiga* adalah negara Islam yang mencoba tampil moderat yakni berupaya mencari sebuah solusi tentang HAM yang bahan-bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan zaman modern.¹¹

Sedangkan di Indonesia sendiri, sebagai salah satu negara Islam di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, penerapan HAM diakomodir dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan, baik semenjak masa orde lama, orde baru, reformasi, dan sampai saat ini.

Di masa Orde Lama, sejarah bangsa Indonesia mencatat, bahwa Konstitusi Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar sepuluh tahun di Indonesia, dalam kurun waktu 1949-1959, justru memuat pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal berbicara tentang Hak Asasi Manusia, dari pasal 7 sampai pasal 33.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang isinya hampir seluruh isinya serupa dengan Konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950. Dalam UUDS 1950 pasal-pasal tersebut juga terdapat pada bagian V yang berjudul Hak-

¹¹Abdul Azizi Dahlan et.al. (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Jakarta: 2001, hlm. 497-498.

hak dan Kebebasan Dasar Manusia terdapat dua puluh delapan pasal, yaitu dari pasal 7 sampai pasal 34.¹²

Sedangkan di masa orde baru dan reformasi, ketentuan dasar tentang Hak-hak Asasi Manusia diatur antara lain dalam: (1) UUD 1945 (sesudah amandemen tahun 1999-2002) dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan (4) Undang-Undang lainnya terkait Hak Asasi Manusia.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dimaksud untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan keamanan seseorang (antara lain pasal-pasal mengenai pembunuhan, perampasan kemerdekaan, perampasan dan pengancaman, penculikan dan sebagainya). Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut identik dengan ketentuan pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Selanjutnya di dalam KUHP terdapat larangan untuk perdagangan budak (Pasal 324-327 KUHP) yang identik dengan pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang. Di samping pasal-pasal tersebut masih terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yaitu larangan memeras/memaksa pengakuan atau keterangan dari seseorang dengan menggunakan sarana paksaan dan pasal-pasal yang menyangkut penganiayaan

¹²Suradji, Pularjono (Ed). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta:PT. Tata Nusa, 2000, hlm. 88-94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang dapat diselaraskan dengan pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Delik-delik terhadap harta benda dan pencabutan hak hanya berdasarkan undang-undang sangat identik dengan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹³

Tidak seorang pun yang dapat ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang, selanjutnya dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan.¹⁴

Hal tersebut senada dengan asas yang terkandung dalam KUHP khususnya pasal 1 ayat 1. Ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) atau yang lebih dikenal dengan bahasa Latin *nullum delictum nulla oena sine praevia ge poenali*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu hanya merupakan tindak pidana jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum tindak pidana itu terjadi.¹⁵

Asas legalitis bertujuan untuk melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan yang memidana seseorang dengan tidak adanya peraturan pidana terlebih dahulu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan

¹³ Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan oranglain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas hartanya secara sewenang-wenang.

¹⁴ Lihat Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lihat pula Pasal 15 ayat (1) International Covenant on Civil and PolitivalRights.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaya. Hukum Pidana 1. Armico, Bandung: 1990, hlm. 74-75.



dibolehkan serta ancaman-ancaman pidananya dituliskan terlebih dahulu secara jelas dalam sebuah peraturan, sehingga orang-orang yang dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan-perbuatan mana yang dibolehkan.

Pada masa pasca Reformasi, terdapat juga undang-undang terkait Hak Asasi Manusia di antaranya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Hak dan Kewajibannya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Pengadilan Terhadap Pelanggar HAM, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta undang-undang lainnya. Semua Undang-Undang ini mengatur secara khusus jenis-jenis hak-hak asasi manusia yang bermuara ke tujuan akhir yaitu untuk menjamin keberadaan harkat martabat dan kemuliaan manusia serta keharmonisan lingkungannya.

Pengaturan tentang HAM juga dapat dilihat dalam Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan beberapa Undang-Undang HAM lainnya

Meskipun undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan HAM di Indonesia jumlahnya sudah lebih dari memadai, namun di sisi lain masih dijumpai banyak kelemahan dalam aplikasinya. Dapat dikatakan bahwa secara umum peraturan perundang-undangan tersebut dianggap belum mampu mengakomodir pelaksanaan HAM di Indonesia.

Terjadinya kasus-kasus penelantaran, pengabaian dan pelanggaran HAM sebagaimana telah disebutkan contohnya di atas seperti KDRT, penyiksaan, mutilasi, pembunuhan, penodaan agama, persekusi, perdagangan orang (*human trafficking*), perdagangan organ tubuh, prostitusi, pedofili, sodomi, pemerkosaan,

eksploitasi perempuan dan anak, perburuan anak dan sebagainya, menjadi alasan kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam materi muatan UU HAM, sehingga diharapkan penerapan HAM di Indonesia membuahkan hasil yang signifikan. Tujuannya agar jangan terjadi penafsiran, penjabaran, dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM yang tidak komprehensif. Dan terhindar dari praktik penegakan HAM oleh aparaturnya atau penyelenggara negara yang inkonsisten atau berstandar ganda.

Disamping kasus-kasus HAM di atas, dan yang tidak bisa dilupakan juga adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi catatan kelam sejarah perjalanan HAM di Indonesia, antara lain bisa disebutkan: Penembakan Misterius (1982-1986), Pembantaian Talang Sari Lampung (1989), Tragedi Rumoh Geudong di Aceh (1989-1998), Peristiwa Mahasiswa Trisakti (1998), Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Tragedi Semanggi I dan II (1998-1999), Tragedi Simpang Kertas Kraft di Aceh (1999), Peristiwa Wasior Manokwari di Papua (2001), Kasus Wamuna di Papua (2003), Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan (2003), dan yang terkini, terjadi di awal tahun 2021 adalah penembakan anggota laskar FPI yang masih menyisakan persoalan HAM besar yang belum tuntas serta beberapa contoh lainnya.

Apabila rangkaian peristiwa dan persoalan HAM di atas dikaitkan dengan pelaksana, pelaku, dan korban HAM itu sendiri, di mana komposisi terbesar (mayoritas) penduduk adalah beragama Islam yaitu sekitar 260 juta jiwa (lebih kurang 85%), maka perlu dikembangkan dan dirumuskan sebuah konsep undang-undang tentang Hak Asasi Manusia atau mengatur Hak Asasi Manusia yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bersumber dari nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah*. Harapannya adalah agar upaya penerapan nilai-nilai tersebut ke dalam UU HAM mampu dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia yang hidup di wilayah NKRI, sehingga bisa menjamin terciptanya perlindungan, pemajuan, pengakuan, dan pemenuhan HAM. Sebab nilai-nilai tersebut berlandaskan atas kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan baik di dunia maupun akhirat. Nilai-nilai itulah di dalam syariat Islam dikenal dengan nama *Maqāshid al-Syarī'ah*.

Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* tersebut dapat dirumuskan dan dijabarkan secara tepat dan benar menjadi sebuah konsep yang diterapkan ke dalam Undang-Undang HAM atau terkait HAM, tentunya tidak akan terjadi lagi pelanggaran HAM yang signifikan di Indonesia. Maka dalam konteks inilah perlu dilakukan reaktualisasi nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam penjabaran dan pelaksanaan HAM demi terjaminnya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bagi manusia.

Sesuai prinsip yang dikandungnya, *Maqāshid al-Syarī'ah* itu bersifat universal, fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat kini dan akan datang serta jauh dari sifat kaku, tekstual, parsial dan terbatas, namun tidak menyimpang dari pokok-pokok syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Karena sifatnya yang fleksibel dan dinamis tersebut, maka sangat terbuka lebar pintu penyesuaian dan pembaruan nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* atau disebut juga reaktualisasi *Maqāshid al-Syarī'ah* yang kemudian



diimplementasikan ke dalam UU HAM. Dengan diterapkannya reaktualisasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang yang mengatur HAM atau terkait HAM ini, maka diharapkan bisa menjadi solusi dalam menjawab berbagai persoalan HAM di Indonesia selama ini.

Maka berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengajukan disertasi yang diberi judul: “Reaktualisasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

B. Penjelasan Istilah

Penjelasan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Reaktualisasi, artinya adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan, menghidupkan kembali, penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.¹⁶
2. Implementasi artinya adalah pelaksanaan.
3. *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah maksud/tujuan inti syariat yang ditetapkan oleh Allah *subhānahu wa ta'āla* yang secara umum bertujuan untuk memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan masalah dan menghindarkan mafsadat baik di dunia maupun akhirat.
4. Hak-hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati,

¹⁶ <http://kbbi.web.id/reaktualisasi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷

2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas, mengatur dan berkaitan dengan hak asasi manusia (baik diatur dalam UU maupun diatur dengan UU), termasuk UUD 1945 setelah amandemen, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.

C. Permasalahan

Uraian permasalahan dalam penelitian ini mencakup di antaranya identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Terjadinya kasus pelanggaran HAM pada perempuan dan anak, seperti eksploitasi perempuan dan anak, perdagangan orang dan organ-organ tubuh khususnya anak-anak, KDRT, mutilasi, pedofili, perburuan anak, penculikan dan sebagainya.
- b. Terjadinya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi catatan kelam sejarah perjalanan HAM di Indonesia, antara lain bisa disebutkan: Penembakan Misterius (1982-1986), Pembantaian Talang Sari Lampung (1989), Tragedi Rumoh Geudong di Aceh (1989-1998), Peristiwa Mahasiswa Trisakti (1998), Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Tragedi Semanggi I dan II (1998-1999), Tragedi Simpang Kertas Kraft di Aceh (1999), Peristiwa Wasior Manokwari di

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Papua (2001), Kasus Wamuna di Papua (2003), Tragedi Jambu Keupok di Acah Selatan (2003), dan penembakan anggota laskar FPI yang masih menyisakan persoalan HAM besar yang belum tuntas.

2. Pembatasan Masalah

Masalah pokok yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai reaktualisasi implementasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun sebelumnya perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penulisan disertasi ini agar diperoleh keseragaman konsep terhadap hal yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis membatasi obyek penelitian hanya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum keluarga (*Ahwāl al-Syakhshiyah*), yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Alasan dipilihnya undang-undang yang disebutkan di atas, karena ia sudah mencakup dan mewakili pokok-pokok hak asasi manusia yang ada dalam UU HAM, khususnya berkaitan HAM keluarga, perempuan, dan anak, di mana secara eksplisit berkorelasi langsung dengan hukum keluarga (*Ahwāl al-Syakhshiyah*) di Indonesia. Meskipun demikian, secara substansial inti dari semua Undang-Undang yang ada di Indonesia dibuat dalam rangka mengatur perlindungan,

penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM baik langsung maupun tidak langsung.

3. Rumusan Masalah

Jadi berdasarkan pembatasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah tentang implementasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia; yaitu perbuatan mengaktualisasikan, menyegarkan, membarukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* untuk diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dengan berdasar kepada kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari masalah pokok di atas dapat diuraikan menjadi tiga sub-masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) yaitu:

1. Bagaimanakah konsep *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep HAM Nasional dan HAM Islam?
3. Bagaimanakah Implementasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 3 (tiga) masalah pokok yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, menjelaskan konsep *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam hukum Islam; *kedua*, menjelaskan konsep HAM Nasional dan



HAM Islam; dan *ketiga*, menjelaskan implementasi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mencari rumusan dan formulasi yang tepat dalam pembentukan, penerapan, maupun revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengimplementasikan nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam undang-undang di Indonesia khususnya undang-undang yang berkaitan dengan Hak-hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
- c. Hasil penelitian ini juga sangat penting untuk menambah kontribusi legislasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dan memperkuat bukti bahwa hukum Islam sangat relevan diimplementasikan kedalam hukum nasional.
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut terutama berkaitan dengan penerapan *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam bidang hukum Islam.

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sejumlah penelitian tentang topik *maqāshid* telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum isu tersebut maupun yang menyinggungnya secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

spesifik dalam tema *mashlahat*, beserta implementasinya. Di antara tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut antara lain:

Tulisan Muwaffiq Jufri yang berjudul Nuansa Maqashid al-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terbit tahun 2017.¹⁸ Karya ilmiah ini bertujuan untuk membuktikan bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam karena telah diatur secara tegas bahwa salah-satu tujuan dalam beragama ialah tegaknya martabat kemanusiaan. Tulisan ini mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi umatnya sehingga diperlukan pengaturan dan penegakan HAM dalam kontek negara hukum Indonesia.

Karya Dian Putri Ayu berjudul Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Th. 2014 dan RUKHP yang diterbitkan pada tahun 2019.¹⁹ Perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsāqan Ghafizhan*), mengandung nilai-nilai transendental (ilahiyah), dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suaminya dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan alat legitimasi atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap istri yang seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara-

¹⁸ Jufri, Muwaffiq, Nuansa Maqashid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vo. 14, 2017.

¹⁹ Putri, Ayu Dian, Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2019), 229-256, 1(2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

can yang ma'ruf dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan inilah, menjelaskan bahwa dalam upaya penanganan istri korban kekerasan dalam rumah tangga harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap teramainya 5 (lima) prinsip utama dalam islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Karya M. Hasbi Umar berjudul Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, diterbitkan tahun 2019.²⁰ Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhan kelengkapan lainnya.

Karya Samsidar yang berjudul Bentuk-bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al- Syari'ah, terbit tahun 2017.²¹ Penelitian ini memberi gambaran bahwa bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam adalah perlindungan atas pemberian nafkah lahir batin, perlindungan pemenuhan atas hak-haknya berupa perlakuan baik serta hak memperoleh ilmu pengetahuan bermanfaat. Selain itu, perlindungan atas kekerasan fisik, psikis, dan seksualitas. Dalam pandangan maqasid al-Syari'ah, bentuk perlindungan terhadap istri dikategorikan sebagai pemeliharaan akal, jiwa

²⁰ M. Hasbi Umar dan Ma'ani B, Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Risalah* (2018) 17(02).

²¹ Samsidar, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al- Syari'h " *Jurnal Supremasi XII* (2017): 78-89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keturunan sebagai wujud dari al-maqasid al-Syari'ah dalam tingkatan dharuriyah.

Karya Budi Rahmat Hakim dan Herlinawati berjudul *Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, terbit tahun 2021.²² Islam memperkenalkan konsep pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mengacu pada ayat-ayat substantif (ushuliyah), sekaligus menjadi tujuan umum/dasar syariah (maqashid al-syariah). Dalam konteks kehidupan rumah tangga terdapat beberapa aturan dasar yang diketengahkan Al Quran sebagai jaminan kemaslahatan bagi seorang istri untuk terhindar dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menemukan gagasan kemaslahatan yang digariskan syariat dalam relevansinya dengan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam makna yang luas sebagai penegakkan prinsip keadilan, hak asasi, dan perlindungan hidup sebagai perwujudan maqashid al-syariah. Dalam memahami beberapa ayat, sering dipermasalahkan penafsiran yang cenderung memberi keutamaan kepada laki-laki dan mengecilkan perempuan. Padahal sesungguhnya ayat-ayat ini tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan, ia hanya merujuk pada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*), bahkan umumnya mempunyai riwayat sabab al-nuzul, jadi sifatnya sangat historis. Umumnya ayat-

²² Budi Rahmat Hakim dan Herlinawati Herlinawati, "Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid Al-Syariah)," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, No. 1 (April 4, 2021), accessed June 23, 2021, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4577>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat seperti ini dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum (maqashid) ayat-ayat esensial yang juga menjadi tema sentral al-Qura'an.

Karya Zikri Darussamin berjudul *Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah, terbit tahun 2019.²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan *marital rape* sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, marital rape masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami masyarakat. Secara komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perpektif hukum Islam dalam memandang persoalan marital rape dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqur'an dan hadis serta argumen-argumen di sekitarnya, dan menganalisisnya dalam konteks maqāsid al-syarī'ah. Di akhir penelitian ditemukan bahwa *marital rape* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Karya Gema Etika Muhammad N yang berjudul Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, terbit tahun 2017.²⁴ Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang

²³ Darussamin, Z., "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syari'Ah," *Al-Ahwal* 1, No. 1 (2019): 84–98.

²⁴ Gema Etika Muhammad, "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Progam Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu- Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri," (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga hanya diwarnai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satunya tindak penelantaran. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menekan angka tindak penelantaran yang terjadi di masyarakat. Di dalam UU tersebut, dibahas mengenai pencegahan, perlindungan, hingga sanksi pidana bagi para pelakunya.

Secara umum, aturan-aturan yang terdapat dalam UU PKDRT sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, hanya saja ada ketentuan yang dianggap sebagai langkah progresif, yaitu tentang pemidanaan pelaku penelantaran.

Dalam perspektif hukum Islam, adanya aturan pidana perbuatan penelantaran bisa dibenarkan. Posisi pemerintah yang bertindak sebagai ulul amri berhak memberikan aturan-aturan takzir bagi warganya. Takzir memang diberikan untuk jarimah yang tidak diatur secara tegas dalam nash, dan penelantaran sendiri merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. UU PKDRT juga legal secara hukum Islam, karena aspek kemaslahatan yang melekat padanya. Syariat Islam memang diturunkan untuk kemaslahatan manusia.

Karya Toha Andiko yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), terbit tahun 2017.²⁵ Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) merupakan bagian khusus dari hukum pidana di Indonesia. Disebut khusus karena tindak pidana KDRT diatur tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004. Kesulitan muncul dalam penyelesaian KDRT ini akibat pemahaman yang sempit bahwa masalah keluarga adalah ruang privat yang tabu dibicarakan. Pada satu sisi, tujuan dari dibuatnya UU No. 23 Tahun 2004 ini dianggap baik karena sebagai upaya preventif untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dalam rumah tangga agar terjaga dari tindak kekerasan oleh anggota keluarga. Sekaligus sebagai upaya penjeratan bagi pelaku kekerasan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun, dalam pengaturan yang sangat rinci tersebut, ada kriteria kekerasan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu sulit juga untuk membatasi ukurannya dan membuktikannya. Kriteria kekerasan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja, dalam rinciannya ada yang tidak sesuai seperti tindakan suami yang menggauli istrinya dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Padahal, dalam ajaran Islam isteri merupakan *haqq al-intifa'* suami yang bisa dimanfaatkan oleh suami selama isteri tidak ada halangan syar'i untuk berhubungan badan. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan isteri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka isteri di sini telah melakukan *nusyūz*, dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya. Sedangkan sanksi yang diterapkan pada tindakan

²⁵ Toha Andiko, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Toha Andiko Dkk," *Manhaj* 3, no. 3 (2017): 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dalam rumah tangga meliputi penjara atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004, pada dasarnya juga sudah sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam yaitu zawajir (efek jera) dan ta'dib (pembelajaran).

Karya Ramin Abdul Wahid berjudul *Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam*, terbit tahun 2015.²⁶ Hak-hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dicabut. Semua negara dan umat manusia seharusnya dapat menerima konsep-konsep HAM, karena rumusannya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai budaya bangsa dan agama yang beragam. Syari'at Islam sendiri mempunyai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah* mengandung lima hak paling asasi yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat al-khoms*) yaitu hak hidup, pemeliharaan akal, penjagaan keturunan, pengakuan terhadap hak milik (harta) dan kebebasan beragama. Nabi Muhammad saw sendiri dalam memimpin masyarakat Madinah telah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi tersebut. Terdapat lebih banyak persamaan daripada perbedaan antara prinsip-prinsip HAM internasional, nasional dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia menurut perspektif Islam.

Karya Dede Kania berjudul *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and*

²⁶ Wahid, Ramin Abdul. *Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Salam*, vol. 12, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulations), terbit tahun 2015.²⁷ Hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, di antaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Karya A. Risnawaty Widayani berjudul *Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang RI Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, terbit tahun 2013.²⁸ Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam, mulai kekerasan fisik, psikis, ekonomi bahkan seksual, mulai dari intensitas ringan, sedang bahkan berat. Dogma agama yang salah, kultur serta kepribadian menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁷ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015): 716-734.

²⁸ A. Risnawaty Widayani, "Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang RI Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah, (2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

disahkan dengan berdalih untuk melindungi kaum isteri dari kesewenangan suami. Namun pasal-pasal yang termuat justru cenderung bertentangan dengan hukum Islam. *Maqāshid al-Syarī'ah*, sebagai doktrin hukum Islam memberikan sudut pandang serta konsep hukum terhadap pasal-pasal tersebut agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Dengan mencermati secara ringkas penelitian terdahulu seputar topik *Maqāshid al-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia seperti dikemukakan di atas, maka sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang secara khusus dan spesifik membahas tentang penerapan *Maqāshid Al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu karya ilmiah yang diajukan ini relevan dan signifikan untuk dijadikan Disertasi promosi doktoral penulis dalam bidang hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber data utama dalam penelitian hukum kepustakaan disebut bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer (utama), bahan hukum sekunder (pelengkap), dan bahan hukum tertier (penjelas).²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, naskah akademis, rancangan undang-undang, dan karya para ahli, ulama, dan sebagainya. Dan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks, dan seterusnya.

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Atau hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian hukum normatif tersebut mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum.³⁰

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³¹

Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penulis menggambarkan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia ditinjau dalam perspektif *Maqashid al-*

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 14.

³¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.



Syari'ah, dan bagaimana pula seharusnya penerapan *Maqashid al-Syari'ah* ke dalam UU HAM.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah data kepustakaan (data sekunder), karena itu disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.³²

Bahan hukum yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (utama) seperti al-Qur'an dan Hadits, UUD 1945, dan Undang-Undang tentang HAM;
- b. Bahan hukum sekunder (pelengkap) dan tertier (petunjuk) seperti hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal, buku-buku karya ulama, kitab-kitab fiqh, teks keagamaan, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.³³ Bahan hukum atau Sumber data tersebut selain berbentuk dokumen tercetak (*printed material*), ada juga dokumen elektronik/internet (*ebook* dan *ejournal*).

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan metode atau teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik

³² Salim HS dan Erlic Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 16.

³³ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12-14.

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada lainnya.³⁴

Metode atau teknik dokumentasi ini melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis, kemudian mengkaji, membandingkan, menganalisis dan menyimpulkannya. Metode lainnya adalah pendekatan historis, yaitu untuk menelaah dan mengungkap latar belakang pemikiran dan filosofis yang mendasari lahirnya Undang-Undang tentang hak asasi manusia dan menelaahnya dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik analisa-kualitatif dengan metode *content analysis* atau yang sering disebut sebagai kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui informasi yang diperoleh secara objektif dan sistematis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini, dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah teks. Konten analisis merupakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.³⁵

Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif (data berupa informasi yang tidak dapat diangkakan) maka data tersebut akan dianalisis secara

³⁴ Salim HS dan Erlic Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

kualitatif pula, dengan langkah-langkah sebagai dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri sebagai berikut:³⁶

- a. Mendeskripsikan gagasan (pandangan) yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah hak asasi manusia;
- b. Membahas dan memberikan interpretasi terhadap pandangan yang telah dideskripsikan, yaitu menjelaskan konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM dan menurut hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*);
- c. Melakukan studi analisis terhadap serangkaian pandangan dalam bentuk perbandingan dan hubungan, yaitu membandingkan antara konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang dan *Maqashid Al-Syari'ah*, serta mencari hubungan antara keduanya;
- d. Menyimpulkan hasil penelitian. Yaitu menganalisis dan memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada disertasi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam, perkembangan *Maqashid Al-Syari'ah*, klasifikasi *Maqashid Al-Syari'ah*, dan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam beberapa bidang Hukum Islam.

³⁶ Lihat Jujun S. Suriasumantri. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan," dalam Masruhu dan M. Deden Ridwan (ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: PUSJARLIT, 1998, hlm. 45-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga membahas tentang Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Sumber dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Konstruksi Konsep Hak Asasi Manusia, dan HAM dalam Islam

Bab keempat memaparkan Implementasi *Maqāshid Al-Syarī'ah* ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari dua bagian. Pertama, kesimpulan dan temuan yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan. Kedua, saran-saran yang penulis kemukakan sebagai implikasi dari kesimpulan dan temuan penelitian, terutama terkait reaktualisasi *Maqāshid Al-Syarī'ah* ke dalam UU HAM di Indonesia. Saran ini terbagi kepada saran-saran yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis.

BAB II

MAQASHID AL SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maqāshid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid*

Kata *maqāshid* merupakan istilah yang sangat populer dalam kajian fiqh atau hukum Islam. Terdapat banyak istilah atau nama yang digunakan untuk menyebut *maqashid*. Di antaranya, *qashd al-syārī' bi al-ḥukm* (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn Rusyd, al-'Amidi, Ibn Taimiyah, dan Ibn al-Qayyim), *Ghard al-syārī'* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Sarkhasi, Ibn al-Arabi, dan al-Syaukani), *ma arāda al-syārī' bi al-ḥikam* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Syafi'i, al-Jassas dan Ibn al-Qayyim), *ma tasawwafa al-syari' ilaih* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Saiwasi), *munasabat al-qiyās* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Ghozali, al-Razi, dan al-'Amidi), *al-ḥikmah* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Ghazali dan al-Razi), *al-maslahah* (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn Qudamah, al-'Amidi, Ibn al-Qayyim dan al-Zurqani), *al-maslahah al-mursalah* (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Gazali).³⁷

Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*. Ia berasal dari akar kata *qashada* yang berarti “mendatangi sesuatu” dan “sesuatu itu menjadi berkumpul”. Jika dikatakan “*aqshadahu al-sahma*” berarti panah itu mengenai

³⁷ Jasser Auda, *Fiqh Maqasid: Inayah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha* (London: al-Ma'had al Alami li al-Fikr al-islami, 2007), cet. III, hlm. 47-48.



sasarannya, dan jika dinyatakan “*al-naqah al-qashid*” berarti unta itu gemuk (karena dipenuhi daging).³⁸

Sementara itu, Ibn Manzur menyebutkan kata *qashada* berarti lurus, tegak dan atau tidak menyimpang (*istaqama* dan ‘*adala*).³⁹ Sesuatu yang dilemparkan (seperti anak panah) akan mengenai sasaran yang dituju jika mengikuti jalan yang lurus. Jadi, cakupan *semantic* dari kata *qashada* meliputi “mendatangi sesuatu”, “menjadi berkumpul” (mengenai sasaran) dan “tidak melenceng” (lurus). Syeikh Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa pengertian *maqāṣid* mencakup dua pengertian. Yaitu, tujuan (*al-ḥadaf* atau *alghāyah*) dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah saw.⁴⁰

2. Pengertian *al-Syari’ah*

Syari’at secara bahasa yang berarti: *Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan*.⁴¹

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah, misalnya tidak termasuk dalam pengertian syariat. Syaikh al-Azhar, Mahmoud Syaltut, misalnya memberikan pengertian bahwa syari’ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah *subḥānahu wa ta’āla* untuk dipedomani manusia

³⁸ Abu al-Husein Ahmad bin Faris bin Zakariyyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), vol. V, h. 95.

³⁹ Lihat materi *q - s - d* dalam Muhammad bin Mukarrom bin Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. VIII, hlm. 353.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Syari’ah Inda al-Syaikh al-Qardawi* (Qatar: t.p., 2007), hlm. 42.

⁴¹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴²

Ali al-Sayis mengatakan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah *subhānahu wa ta'āla* untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁴³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa syari'ah adalah yaitu seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu secara tidak langsung memuat kandungan *Maqāshid al-Syarī'ah*.

3. Pengertian *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Menurut bahasa *Maqāshid Al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁴⁴ Sedangkan syari'ah secara bahasa yang berarti: *al-mawādhī' tahduru ila al-ma'*. Artinya: Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁴⁵

Syari'ah artinya adalah ketundukan yang ditandai dengan ibadah. Syari'ah adalah jalan dalam agama.⁴⁶ Dalam kitab *al-Hudud al-Aniqah* disebutkan,

⁴² Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syaria'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 12.

⁴³ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970, hlm. 8.

⁴⁴ Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, t.th., juz 8, hlm. 175.

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 140.

⁴⁶ Ali Muhammad bin Ali al-Jurjani, *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab. Cet I. 1405 H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Syari’ah adalah hal-hal yang Allah syari’atkan kepada para hambaNya dalam rangka menghamba kepadaNya. Syari’ah itu isinya adalah ketaatan, ibadah, balasan, dan hisab.”⁴⁷

Ali al-Sayis mengatakan bahwa syari’at adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah *subhānahu wa ta’āla* untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁴⁸ Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah, misalnya tidak termasuk dalam pengertian syariat. Syaikh al-Azhar, Mahmoud Syaltut, misalnya memberikan pengertian bahwa syari’ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁹

Ibn al-Qayyim al-Jauziah menegaskan bahwa syari’ah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari’at dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁵⁰

Hukum Islam mengakui kehormatan manusia, dan di sisi yang lain mengarahkannya kepada perwujudan kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukum

⁴⁷ Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshari Abu Yahya, *al-Hudud al-Aniqah*. Beirut: Dar al-Fiqr al-Mu’ashir, 1141 H.

⁴⁸ Ali al-Sayis, *loc. cit.*, hlm. 8.

⁴⁹ Mahmoud Syaltut, *loc. cit.*, hlm. 12.

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jauziah, *I’lam al-Muwaqqi’in*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, jilid III, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun tempat, membutuhkan hukum yang fleksibel.⁵¹

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia memiliki tujuan utama yakni untuk kemaslahatan hidup umat manusia.

Hukum-hukum yang ditetapkan Allah tidak ditetapkan kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan dan kemungkiran. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah tersebut dalam ruang lingkup kajian ushul fiqh disebut dengan *Maqāshid al-Syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syari'at Islam. Pengetahuan tentang *Maqāshid Al-Syari'ah* ini akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syari'ah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan.⁵²

Maqāshid Al-Syari'ah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia

⁵¹ Kebutuhan akan hukum yang responsif dan fleksibel seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziah dalam sebuah kaidah, bahwa hukum Islam itu berubah karena perubahan waktu, keadaan, adat, dan niat - sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 256.

⁵² Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 62.

adalah tujuan dari syari'ah, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *syāri'* (otoritas pembuat syari'ah, Allah dan Rasulullah).⁵³

Maqāshid Al-Syari'ah juga berarti konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersurat dan tersirat dalam al-Quran dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan akidah dan ibadah). Adapun cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan *ḍarūriāt* (primer), menyempurnakan kebutuhan *hājiāt* (sekunder) dan *taḥsiniāt* (tersier).⁵⁴

Untuk memperjelas makna dan kedudukan *maqāshid al-syari'ah*, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fiqh sebagaimana dijelaskan *al-Syāhibī* dan Ibnu Asyur, yaitu:

- a. *'Illat* adalah sifat yang zhohir (jelas), bisa diterapkan dalam setiap kondisi, yang menjadi acuan setiap hukum, seperti safar menjadi *'illat* disyari'atkannya sholat *qasar*.

⁵³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988, juz II, hlm. 1045.

⁵⁴ *Al-dharūriāt* yaitu masalah yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia, jika masalah ini tidak ada maka rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat dia akan mendapat siksa.

Al-hājiāt yaitu masalah yang keberadaannya akan menghilangkan kesempitan pada manusia. Contoh masalah jenis ini adalah disyariatkannya jual beli, sewa menyewa, disediakannya berbagai rukhsah bagi manusia dalam ibadah seperti mengqashar dan menjamak sholat bagi musafir, diwajibkannya menuntut ilmu agama, dan lain-lain.

Al-taḥsiniāt yaitu masalah yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Contoh masalah jenis ini adalah kewajiban bersuci thaharah, pengharaman makan makanan yang buruk dan kotor, dan sebagainya.

Bila terjadi perbenturan antara *al-ḍarūriāt*, *al-hājiāt*, dan *al-taḥsiniāt*, maka yang didahulukan adalah *al-dharūriāt*, kemudian *al-hājiāt*, baru yang terakhir *al-taḥsiniāt*. Lihat al-Juwaini, *al-Buḥān fī ushūl al-fiqh*. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiah, 1980, hlm. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Hikmah* adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakan suatu hukum, seperti berbuka puasa sebagai hikmah adanya kesulitan.
- c. *Mashlahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudaratannya.⁵⁵

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan dua hal penting:

- a. Setiap *Maqāshid* (tujuan) dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah setiap maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau mudarat yang dihindarkan. Jadi substansi *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah *mashlahat*.
- b. *Maqāshid al-Syarī'ah* sering dikenal juga dengan istilah *hikmah*.
- c. Jika *maqāshid al-Syarī'ah* berfungsi menguatkan isi hukum, maka 'illat berfungsi menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum, tidak ada hukum tanpa adanya 'illat.
- d. Dalam *maqāshid al-Syarī'ah* terdapat *maqāshid 'ammah*, yaitu tujuan-tujuan umum yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyāt al-khamsah* dan *Maqāshid khashah* yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.

Sesuai dengan definisi ini, maka *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai untuk merealisasikan masalah setiap manusia sekaligus terhindar dari mudaratnya. Sedangkan *maslahah* adalah hasil atau inti dari *maqāshid al-syarī'ah*. Jadi bisa dikatakan *maqāshid al-syarī'ah* adalah *mashlahah* dan *mashlahah* adalah *maqāshid al-syarī'ah* itu sendiri.

⁵⁵Ahmad Raisuni, *Nazhariyyatul Maqashid 'inda al imam al-Syatibi*, hlm. 5, dan Ismail Hani, *Nazhariyyatul Maqasid 'inda al imam Ibnu 'Ashur*, hlm. 114 dan 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan masalah merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari'* mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar dari keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah *subhānahu wa ta'ala*. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki, bukan oleh hawa nafsu manusia.⁵⁶

Norma hukum yang dikandung oleh teks-teks syariah pasti dapat mewujudkan *mashlahah*, sehingga tidak ada *mashlahah*, di luar petunjuk teks syariah, dan karena itu tidaklah valid pemikiran yang menyatakan maslahat harus diprioritaskan berlawanan dengan teks-teks syariah.⁵⁷ Maka maslahat pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.

Tujuan *al-Syari'* dalam menyebarkan *mashlahat* bagi legislasi yang dilakukannya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada obyek tertentu, tegasnya *mashlahat* menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan seluruh kasus. Imam *al-Syāthibī* menjelaskan ada lima bentuk *maqāshid al-syarī'ah* atau yang biasa disebut *maqāshid al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuha fī al-Tasyrī'*. T. tp.: Maṭba'at al-Sa'adah, 1983, hlm. 12-13.

⁵⁷ Husain Hamid Hisan. *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971, hlm. 607.

⁵⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th., jilid I, juz II, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. *Hifzh al-dīn* (melindungi agama);
2. *Hifzh al-nafs* (melindungi jiwa);
3. *Hifzh al-‘aql* (melindungi pikiran);
4. *Hifzh al-māl* (melindungi harta);
5. *Hifzh nasl* atau *hifzh al-nasab* (melindungi keturunan).

Kelima *maqāshid al-syarī’ah* atau *maqāshid al-khamsah/kulliyāt al-khamsah* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahat dan kepentingannya. Tingkatan tersebut ada tiga yaitu *dharuriat* (primer), *ḥajiat* (sekunder) dan *taḥsiniat* (tersier).⁵⁹

Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada telaah terhadap hukum-hukum *furu’* (cabang), bahwa seluruh hukum cabang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia. Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi semua hajat itu adalah maslahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkannya adalah mafsadat. Oleh karena itu seluruh ulama telah sepakat bahwa syariah diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut.⁶⁰

Sebagaimana penjelasan al-Syatibi: *Mashlahat* adalah memenuhi tujuan Allah yang ingin dicapai pada setiap makhlukNya. Tujuan tersebut ada 5 (lima) yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, hartanya, dan keturunannya. Setiap upaya yang bertujuan melindungi lima *maqāshid* ini, maka itu termasuk

⁵⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyatul Maqashid ‘inda al imam al-Syatibi*. Kairo: International Institute of Islamic Thought, cet. IV, 1416 H, hlm. 15. Al-Juwaini, *al-Burhān fī uṣūl al-fiqh*. Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiah, 1980, hlm. 295.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

mashlahat. Dan sebaliknya, setiap upaya bertujuan menghilangkan lima *maqāshid* ini, maka termasuk *mafsadat/mudharat*.⁶¹

Skema berikut menggambarkan substansi dan hubungan *maqāshid al-syarī'ah* dan *mashlahat* di atas:

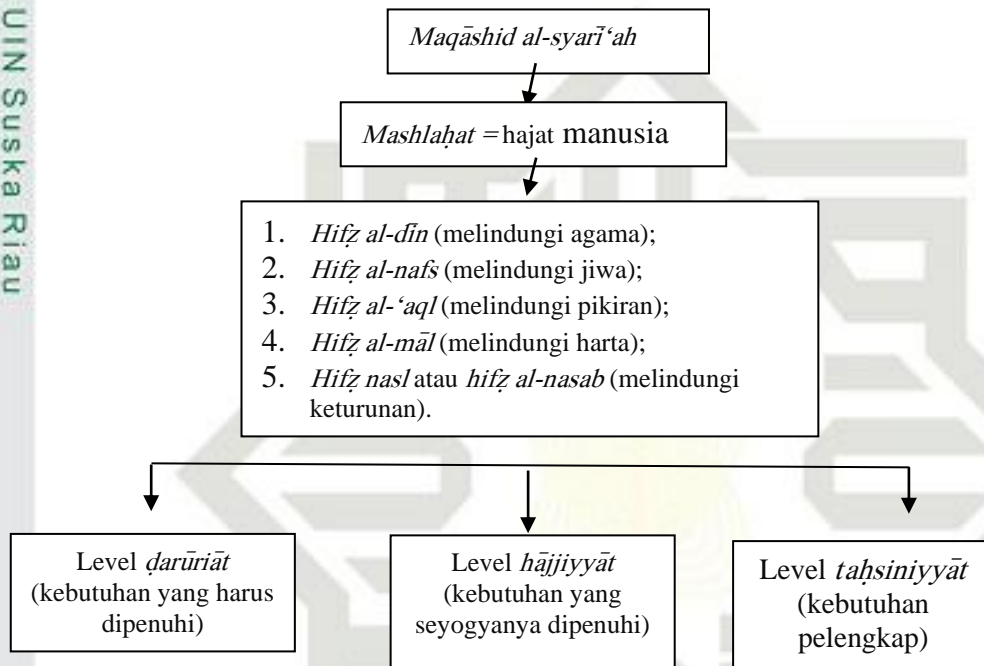


Diagram 1: Hubungan *maqāshid al-syarī'ah* dengan *mashlahat*, dan tingkatan-tingkatan *maqāshid al-syarī'ah*.

Hukum Islam (syariah) seluruhnya merupakan *mashlahah* yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *al-mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tegasnya tiada suatu hukum yang mengandung *al-mudharrah* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya, dan tiada suatu hukum yang mengandung *mashlahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.⁶²

⁶¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 1/286.

المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

⁶² Izzuddin ibn 'Abd al-Salam. *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabat al-Kutub al-Azhariyyah, 1994, juz I, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Izuddin ‘Abd al-Salam (w. 660 H), *mashlahat* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf’u* (kebermanfaatan), *al-husnu* (kebaikan).⁶³ Sementara itu Najamuddin al-Tusi (w.716 H) berpendapat bahwa makna *mashlahat* dapat ditinjau dari segi ‘*urf*’ dan ‘*syar’i*’. Dalam arti ‘*urf*’, maslahat adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan. Sedang dalam arti ‘*syar’i*’, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syar’i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁶⁴ Tegasnya *mashlahat* masuk dalam cakupan *maqāshid al-syarī’ah*.

Sementara itu menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, fondasi bangunan hukum Islam itu dipresentasikan oleh *mashlahat* yang ditujukan kepada kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam (*syari’ah*) menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan maslahat. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam.⁶⁵

Keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrin hukum Islam (Syariah) dengan perkembangan kehidupan

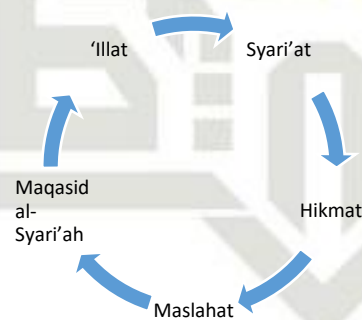
⁶³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁴ Najmuddin al-Tufi, *Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah*, hlm. 19. Lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Tūfī*, t.tp: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1964, hlm. 211.

⁶⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘ālamīn*. Kairo: Dār al-Hadīṡ, 2004, juz III, hlm. 5.

manusia lantaran ruh maslahat yang menggerakkannya.⁶⁶ Eksistensi *mashlahat* dalam hukum Islam (Syari'ah) memang tidak bisa dinafikan karena *al-mashlahat* dan *al-Syari'ah* telah bersenyawa dan bersatu, sehingga kehadiran *al-mashlahat* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syari'ah*.

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak *nash* al-Qur'an dan Hadits memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa Syariah senantiasa dilekati *hikmah* dan *'illat* yang bermuara kepada *maslahat*, baik bagi masyarakat maupun bagi orang perorangan.⁶⁷ Bahkan hukum Islam dimaksud bukan saja di bidang *mu'amalah* tetapi juga ibadah *ma'hdhah*. Jadi semua bidang hukum dengan bermacam norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadits berhulu dan sekaligus bermuara kepada *mashlahat* bagi kehidupan manusia.



Digram: Hubungan antara *'illat*, *syari'at*, *hikmah*, *mashlahat* dan *maqāshid al-syari'ah*

⁶⁶ Husain Hamid Hisan, *Fiqh al-Maṣlaḥah wa Taṭbiqatuhu al-Mu'āsirah*, hlm. 4. Dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer. Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, 1413 H, hlm. 4.

⁶⁷ Tahir ibn Asyur, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006, hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum dapat dikatakan bahwa 'illat adalah penyebab atau latar belakang diadakannya suatu syari'ah, meskipun ada syari'at yang tidak atau belum diketahui 'illatnya oleh manusia. Sedangkan hikmah adalah motivasi atau tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan syari'at yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Inilah yang menjadi tujuan utama diturunkannya syari'at atau disebut juga dengan *Maqāshid al-Syari'ah*.

Oleh karena itu hikmah menjadi hal penting dalam pensyari'atan suatu ibadah. Ilmuwan Hukum Islam (Ulama Ushul Fikih) mendefinisikan hikmah sebagai motivasi dalam pensyari'atan hukum dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Misalnya jual beli dibolehkan untuk mendapatkan manfaat bagi yang bertransaksi. Zina diharamkan untuk memelihara keturunan agar jelas asal-usulnya. Meminum khamar diharamkan untuk memelihara akal, membunuh tanpa alasan diharamkan guna memelihara nyawa, serta mencuri diharamkan dalam rangka menjaga harta. Demikian beberapa hal yang bisa disebutkan dan masih banyak contoh lainnya.

Para ahli ushul fikih tersebut berkesimpulan bahwa *hikmah* dari seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah *subhānahu wa ta'āla* adalah kemaslahatan itu sendiri. Namun dilihat dari segi kejelasan dan ukurannya, kemaslahatan itu bisa berbeda kualitas dan tingkatannya. Adakalanya ia bersifat jelas, dapat diukur, dan berlaku untuk semua orang, dan adakalanya berlaku sebaliknya sehingga sulit

ditangkap akal manusia, sehingga diperlukan pemikiran yang mendalam untuk mengetahui atau mencerna hikmahnya (berfilsafat).⁶⁸

Para ulama berpendapat bahwa intisari filsafat ada dalam al-Qur'an, tetapi al-Qur'an bukanlah buku filsafat. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa hikmah adalah rahasia tersembunyi dari pembuat syari'ah (*al-Syāri'*) yang bisa ditangkap oleh manusia melalui ilham yang dianugerahkan Allah kepada manusia ketika yang bersangkutan bersih dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Sementara filsafat adalah rahasia syari'at yang ditemukan manusia melalaui upaya penalaran akal. Jadi hikmah yang ditemukan oleh manusia itu bisa disebut sebagai filsafat syari'at atau filsafat Hukum Islam.⁶⁹

Di samping pemikiran *al-Syatibī* dengan *maqāshid al-khamsah* nya atau *kulliyātul al-khamsah*, ada juga Ibn al-Asyur (w. 1393 H) dengan *maqāshid al-syari'ah* versi yang lebih modern dan memperkenalkannya sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri melalui hasil pendalamannya terhadap kitab *al-muwāfaqāt* membagi pembahasan dalam tiga kerangka besar. Pertama, pembahasan mengenai penetapan tujuan syari'at, kebutuhan seorang ulama untuk mengetahui *maqāshid*, metode-metode penetapan dan tingkatannya. Kedua, membahas *maqāshid al-syari'ah 'amah (umum)*, ketiga, membahas *maqāshid al-syari'ah khāsshah* dengan segala macam kontekstualisasinya dalam ranah fikih muamalah.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 550.

⁶⁹ Alaidin Koto. *Hikmah Dibalik Perintah dan Larangan Allah*. Jakarta: Rajawali Presss, 2014, hlm. 5-6.

⁷⁰ Kebangkitan *maqashid* modern ditandai dengan dicetaknya kita *al-muwafaqat* untuk pertama kali di Tunisia tahun 1884. Pada tahun 1909 kitab tersebut kembali dicetak di



Pengetahuan tentang *Maqāshid al-syarī'ah*, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁷¹

Metode *istinbath* seperti *qiyās*, *istihsān*, *mashlahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāshid al-syarī'ah*, misalnya baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditemukan *maqāshid al-syarī'ah* nya yang merupakan alasan logis atau '*illat*'⁷² dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang diharamkannya minuman khamar (Q.S.Al-Maidah: 90). Dari hasil kajian para ulama ditemukan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* atau '*illat*' dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu

Kazan, salah satu kota terbesar di Rusia, kemudian dicetak di Mesir pada tahun 1922. Dari Mesir kemudian kitab tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Terjadilah dialektika intens antara ulama modern di berbagai belahan dunia dan al-Syatibi melalui *al-muwa>faq>ah*. Dari rentetan dialektis ini lahirlah fase baru, fase kebangkitan ilmu *maqāshid al-syarī'ah* di era modern yang melahirkan tokoh maqashid modern Tunisia, Muhammad Thahir ibn Asyur (w. 1973) dengan karyanya *maqāshid al-syarī'ah al-islāmiyah*.

⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015, hlm. 237-238.

⁷² 'Illat berarti suatu sifat yang konkrit yang terdapat pada pokok, yang karenanya hukum syara' ditetapkan dan atas dasar sifat tersebut cabang disamakan dengan pokok. (Lihar Muhammad ibn Abu Bakar al-Rozi, *Mukhtar al-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981, hlm. 451). Dalam kasus khamar di atas yang menjadi illat adalah sifat memabukkan. Untuk mengetahui 'illat, para ulama ushul fiqh menempuh beberapa cara sebagai berikut: 1. Melalui nash, seperti illat dalam pembagian harta rampasan perang kepada kelompok-kelompok tertentu agar harta kekayaan jangan beredar di kalangan orang-orang kaya (Q. S. al-Hasyr [59]: 7), 2. Melalui ijma', kesepakatan mujtahid bahwa yang menjadi 'illat perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta karena keadaannya yang belum cukup umur/kecil atau belum berakal sempurna, 3. Melalui jalan ijtihad. Seperti dalam contoh pengharaman khamar tadi, seorang mujtahid menyimpulkan bahwa yang paling tepat sebagai 'illat hukumnya adalah sifat memabukkan.



sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari zat yang memabukkan apabila dikonsumsi.⁷³

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyās*) bahwa setiap zat yang sifatnya memabukkan adalah hukumnya haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam satu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas. Artinya *qiyās* hanya bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *maqīs 'alaih* (tempat menqiyaskan). Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan tempat mengqiyaskan, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas (*dharūrīāt*, *hājīāt* dan *taḥsiniāt*), dalam hal ini dilakukan *mashlahah mursalah*. Dalam kajian ushul fiqh apa yang dianggap maslahat jika sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum

⁷³ Seperi diketahui, bahwa pengharaman khamar terjadi secara bertahap. Pertama: Awalnya khamar dibolehkan. "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl: 67). Kedua: Turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219) Ketiga: Turun ayat untuk melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (QS. An-Nisaa: 43) Keempat: Terakhir khamar diharamkan secara tegas. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*.

Apabila yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam teks atau melalui *qiyās*, kemudian karena dalam suatu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum atau lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus hanya dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan nama *istihsān*.

Metode penetapan hukum melalui *maqāshid al-syarī'ah* dalam praktik-praktik *istinbāth* tersebut, seperti *qiyās*, *istihsān*, *istishlāh (mashlahah mursalah)*, dan lainnya seperti *istishab*, *sadd al-dzarī'ah*, dan *'urf*, di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāshid al-syarī'ah*, juga oleh sebagian besar ulama usul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.⁷⁴

Diskursus *maqāshid al-syarī'ah* sebelum *al-Syāthibī* banyak berkuat pada persoalan *'illat* hukum dan *mashlahah* sebagai landasan perumusan hukum. Karena ketika itu ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fiqh* yang dieksplorasi oleh para ulama kalam termasuk diskursus *maqāshid al-syarī'ah*. Salah satunya hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

⁷⁴ Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 237-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syāthibī berpendapat bahwa *mashlahah* sebagai motif syariat diketahui melalui metode induktif, baik sebagai tema utama syariat secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara terperinci. *Al-Syātibī* memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya perintah *wudhu'* yang motifnya adalah ketakwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Maqāshid al-syarī'ah merupakan suatu usaha penegakkan *mashlahah* sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. *Al-Syāthibī* mengklasifikasikan studi *maqāsid al-syarī'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqāshid al-syarī'ah* atau tujuan Allah *subhānahu wa ta'ala* sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqāshidal-mukallāf* atau subjek hukum. Kemaslahatan sebagai *Maqāshid al-syarī'ah* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *mashlahah*. Meskipun demikian, *al-Syāthibī* menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Kemaslahatan masih bisa dipahami dan dibuka ruang diskursusnya. Masalah atau maqasid ini mencakup empat aspek pengertian:

- a. Pertama, Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syariat. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas dan keabsolutan masalah.
- b. Kedua, Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi bahasa dalam persoalan *taklīf*. Perintah yang merupakan bentuk *taklīf* harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman kultural. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek ini, *al-Syāṭhibī* menggunakan dua istilah *al-dalālah al-ashliyah* (pengertian esensial) dan *al-dalālah al-‘umūmiah* (pengertian umum).

- c. Ketiga, Syariat semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisis pengertian *taklīf* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- d. Keempat, Tujuan syariat membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah *subḥānahu wa ta’āla*. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, maslahat tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diberlakukan terhadap *al-qiyās* dan *al-istiḥsān*. Hendaknya para mujtahid berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang maslahat bagi masyarakat. Lebih dari itu *mashlahat* yang bersifat umum, asli dan mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariah, dan tidak bertentangan dengan teks syari’ah merupakan dasar, pijakan dan acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.⁷⁵

Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa maslahat dapat diaplikasikan sebagai dasar suatu ketetapan hukum, dan maslahat ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas

⁷⁵ Mohammad Hashim Kamali, “Fiqh and Adaptation to Social Reality” dalam *Jurnal The Muslim World*, 1996, vol. 86, no. 1, hlm, 72.



ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang menjadi basis doktrin *mashlahat*.⁷⁶

Konsep *mashlahat* sebagai inti *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad yang telah pernah dikemukakan oleh ulama-ulama *Ushul Fiqh*, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode *ijtihad* dengan memberi penekanan pada dimensi *maṣlahat*. Di samping itu pertimbangan *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat disebut sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam.⁷⁷

Konsep *mashlahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fiqh memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, yang nota bene mengandung landasan materil hukum yang "terbatas" mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *mashlahat* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fiqh mengembangkan konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks Syariah (al-Qur'an dan Hadits). Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *mashlahat* tergantung pada, terutama pola penalaran hukum berbobot *mashlahat* yang diterapkan pada ulama fiqh.⁷⁸

⁷⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996, hlm. 236-237.

⁷⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm, 168.

⁷⁸ Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory" dalam *Journal Islamic Law and Society*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005, hlm, v. 12, no. 2, hlm. 183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai sebuah kajian dalam hukum Islam sebenarnya sudah ada sejak al-Qur'an diturunkan dan Hadits disabdakan oleh Nabi Muhammad *ṣalallāhu 'alaihi wasallam*, karena *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan teks, tetapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tertera dalam ayat “*wa mā arsalnāka illa rahmatan li al-'ālamīn*”, bahwa Allah *subhānahu wa ta'āla* tidak mengutus RasulNya (dan menurunkan syariat) kecuali untuk kemaslahatan bagi sekalian alam. Namun pada tahap-tahap awal teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini mulai muncul pada tataran aplikatif, belum terbukukan sama sekali. Kemudian ketika keilmuan Islam semakin menuju kejayaannya (abad ke-3 hingga ke-5), maka lahirlah karaya-karya ulama, sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* pun mengalami masa-masa keemasan dan loncatan signifikan dari tataran aplikatif menjadi tersurat dalam kitab.⁷⁹

Ulama yang paling awal menggunakan istilah *Maqāṣhid* adalah al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320H), yakni dalam kitabnya *al-Shalātu wa maqāṣidihā*. Namun jika kita telusuri lebih jauh terhadap kitab-kitab klasik, maka akan ditemukan bahwa jauh sebelum al-Tirmidzi, sudah ada dalam kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik yaitu keterangan tentang penggunaan *maqāṣid* pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 240H) dengan karyanya yang sangat populer *al-Risālah*, di mana telah disinggung tentang *ta'lil al-aḥkām* (pencarian alasan sebuah hukum), sebagian *maqāṣhid al-kulliah* seperti *hifzh al-naṣl* dan *hifzh al-māl*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu *maqāṣhid*. Disusul kemudian oleh Abu Bakar Muhammad al-Kaffa al-kabir (w. 365 H)

⁷⁹ Harun al-Rasyid. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqāṣhid al-Syarī'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 69-71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitabnya *maḥasin al-syarī'ah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih bisa dipahami dan diterima oleh manusia. Dan ada juga beberapa ulama lain yang membahas tema maqasid seperti Abu Bakar al-Syasyi (w. 365 H), Abu al-hasan al-Amiri (w. 381 H), dan Ibn Bawaih al-Qumi (w. 387 H).

Kemudian pada abad ke-5 terdapat Imam al-Juwaini atau yang dikenal dengan panggilan Imam al-Haramain (w. 478H) dengan kitabnya *al-Burhan*. Menurut Imam al-Juwaini *maqāshid al-syarī'ah* mengalami transisi dari kerangka maqasid yang *juz'iyah* dan *tafṣīliah* menjadi maqasid yang *kulliyah* (universal), *'āmmah* (umum). Dan *ijmā'iah* (global). Maksud dari maqasid yang *juz'iyah* (parsial) dan *kulliah* (universal) sendiri dapat digambarkan secara sederhana, bahwa *juz'iyah* bersifat terbatas, hanya berhubungan dengan hukum dan peristiwa tertentu, ataupun personal tertentu. Berbeda dengan *kulliah* yang berlaku dalam segala aspek kehidupan.

Kemudian pada abad ke-6 al-Ghazali (w. 505 H) melalui kedua karyanya *al-mustasyfa* dan *syifā'* membahas beberapa metode untuk mengetahui maqasid, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqāshid al-syarī'ah* dari dua sisi, yaitu *al-wajid* (yang mengukuhkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga dari hal-hal yang bisa merusak dan menghilangkannya).

Kemudian berlanjut ke periode Imam al-Razi (w. 606 H), lalu Imam al-Amidi (w. 631 H), dan Izzudin ibn abd al-salam (w. 660 H), kemudian al-Qarafi (w. 684 H), al-Thufi (w. 716 H), Ibn al-Taimiah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam *al-Syāhibī* (w. 790 H).

Dalam masalah ini Imam *al-Syātibī* melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab karangannya *al-Muwāfaqāt*, ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqasid dalam satu juz dari kitabnya (seluruhnya 4 juz). Imam *al-Syātibī* mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari.⁸⁰

Al-Syātibī menyatakan bahwa dalam memahami *maqāshid al-syarī'ah* secara baik dan benar, ulama terbagi kepada tiga kelompok. *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zhahir lafazh* yang jelas. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk *qiyās*. Kelompok ini disebut dengan ulama *al-zhahiriah*. *Kedua*, ulama yang tidak menempuh pendekatan *zhahir lafaz* dalam mengetahui *maqāshid al-syarī'ah*. Kelompok ini terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* bukan dalam bentuk *zhahir* dan bukan pula yang dipahami dari tunjukan *zhahir lafazh* itu. *Maqāshid al-syarī'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan *zhahir lafazh*, yang terdapat dalam semua aspek syariah, sehingga tak seorangpun yang dapat berpegang dengan *zhahir lafazh* yang

⁸⁰ Imam al-Syatibi pada awalnya hendak memberi nama kitabnya *al-ta'rif bi asrar al-taklif* (rahasia-rahasia di balik perintah Allah bagi mukallaf). Namun berdasarkan kepada mimpi gunanya, al-Syatibi kemudian mengubah menjadi *al-Muwafaqat* yang berarti kesepakatan, karena memadukan dua mazhab yakni Mazhab Abu Hanifah dan Ibn al-Qasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan ia memperoleh pengertian *maqāshid al-syarī'ah*. Kelompok ini disebut ulama *al-bathiniah*, dan

- b. Kelompok yang berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian *lafazh*. Artinya *zhahir lafazh* tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan *zhahir lafazh* dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut '*ulamā al-muta'ammiqīn fī al-qiyās*. Ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zhahir lafazh* dan pertimbangan makna '*illat*) dalam suatu bentuk tidak merusak pengertian *zhahir lafazh* dan tidak pula merusak kandungan makna/ '*illat*, agar syariah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut '*ulamā al-rāsikhīn*'.⁸¹

Al-Syāhibī menjelaskan tentang *al-dharuriat al-kulliāt al-khams* (lima kebutuhan *al-dharuriat*), yakni:⁸² *hifzh al-dīn* (melindungi agama), *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzh al-'aql* (melindungi pikiran), *hifzh al-māl* (melindungi harta), *hifzh nasl* atau *hifzh al-nasab* (melindungi keturunan). Imam Sihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) telah menambahkan satu tujuan dasar lagi, yaitu *hifzh al-'arīd* (melindungi kehormatan diri).

Di samping *al-Syāhibī* dengan *maqāshid al-khamsah*nya, Ibn Asyur dengan *maqāshid al-syarī'ah* versi yang lebih modern hasil pendalamannya

⁸¹ Asafri Jaya Bakri, *Op. cit.*, 1996, hlm. 89-91.

⁸² Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*. Kahirah: Mustafa Muhammad, t. th., jilid II, hlm. 372-374.

terhadap kitab *al-muwāfaqāt*⁸³ membagi pembahasan dalam tiga kerangka besar. Pertama, pembahasan mengenai penetapan tujuan syari'at (*itsbāt al-maqāshid al-syari'ah*), kebutuhan seorang faqih (pakar hukum fikih) untuk mengetahui *maqāshid al-syari'ah*, metode-metode penerapannya dan tingkatan-tingkatannya (*thuruq itsbātiha wa marātibihā*); kedua membahas *maqāshid al-syari'ah 'ammah* (umum); ketiga, membahas *maqāshid al-syari'ah khasshah* (khusus) dengan segala macam kontekstualisasinya dalam ranah fikih mu'amalah.

Pengetahuan tentang *maqāshid al-syari'ah* seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khalaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kebahasaan.⁸⁴

Maqāshid al-syari'ah sebenarnya sudah ada sejak *nash* al-Qur'an diturunkan dan Hadits disabdakan oleh Nabi Muhammad karena *maqāshid al-syari'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tetapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercantum dalam ayat: “wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin”, bahwa Allah *subhānahu wa ta‘āla* menurunkan syari'atNya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya. Namun dalam tahap-tahap

⁸³ Kebangkitan maqasid modern ditandai dengan dicetaknya kitab *al-muwafaqat* untuk pertama kali di Tunisia pada tahun 1884 M. Pada tahun 1909 kitab tersebut kembali dicetak di Kazan, salah satu kota terbesar di Rusia, kemudian di Mesir pada tahun 1922 M. Dari Mesir kemudian kitab menyebar ke penjuru Jazirah Arab. Terjadi dialektika intens antara ulama modern di berbagai penjuru dunia dan al-Syatibi melalui *al-Muwafaqat*nya. Dari rentetan dialektis ini lahirlah fase baru, fase kebangkitan ilmu *maqāsid al-syari'ah* di era modern yang melahirkan tokoh *maqāsid* modern Tunisia, Muhammad Thahir bin Asyur (w. 1973 M) dengan karyanya *maqāsid al-syari'ah al-islāmiah*.

⁸⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. Gramedia: Jakarta, 2004, hlm. 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal teori *maqāshid al-syarī'ah* ini berkuat pada tataran aplikatif, belum terbukukan sama sekali. Kemudian ketika keilmuan Islam semakin menuju kejayaannya (abad ke-3 hingga abad ke-5), maka lahirlah karya-karya ulama, sehingga *maqāshid al-syarī'ah* pun mengalami masa-masa keemasan dan loncatan signifikan dari tataran aplikatif menjadi tersurat dalam kitab.⁸⁵

Ulama yang paling awal menggunakan istilah maqasid adalah al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320. H), yakni dalam bukunya *al-shalātu wa maqāshiduha*. Namun jika ditelusuri lebih lanjut kitab-kitab klasik, maka jauh sebelum al-Tirmidzi, yaitu Imam Malik dalam (w. 179. H) dalam kitabnya *Muwatha'* sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan *maqāshid* pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'ie (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *al-Risālah*, di mana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta'fīl al-ahkām* (alasan adanya suatu hukum), sebagian *maqāshid kulliah* seperti *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema *maqāshid*. Disusun kemudian oleh Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) dalam kitabnya *Mahāsin al-Syarī'ah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia, lalu Abu Bakar al-Syasyi (w. 365 H), Abul Hasan al-Amiri (w. 381 H), dan Bawaih al-Qumi (w. 387 H).

Kemudian pada abad ke-5 H terdapat al-Imam al-Juwaini atau yang terkenal dengan panggilan al-Imam al-Haramain (w. 478 H) dengan kitabnya *al-Burhān*. Dalam genggamannya ini *maqāshid al-syarī'ah* mengalami

⁸⁵ Harun al-Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transisi dari kerangka *maqāshid al-juz'iyyah* dan *tafshiliah* menjadi *maqāshid* yang *kulliah* (universal), *'ammah*, dan *ijmāliyah* (global). Maksud dari maqasid yang *juz'iyyah* (parsial) dan *kulliah* (universal) sendiri dapat digambarkan dengan simpel bahwa *juz'iyyah* adalah bersifat terbatas, hanya berhubungan dengan hukum tertentu dan peristiwa tertentu pula, seperti peristiwa yang hanya bersifat personal saja.

Berbeda dengan *kulliah*, ia berlaku dalam segenap aspek kehidupan. Kemudian pada abad ke-6 H, al-Ghazali (w. 505 H) melalui kedua karyanya *al-mustashfā* dan *syifā al-Ghafil* yang membahas beberapa metode untuk mengetahui *maqāsid*, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqāshid al-syarī'ah* dari dua sisi *al-wujūd* (yang mengukuhkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang merusak maupun menggagalkannya). Kemudian berlanjut ke periode Imam al-Razi (w. 606 H), lalu imam al-Amidi (w. 631 H), dan 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H), kemudian al-Qarafi (w. 684 H), al-Thufi (w. 716 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Qayyim al-Jauziah (w. 751 H), baru setelah itu disusun oleh Imam al-Syatibi. Setelah itu, *maqāsid* kembali mengalami kemunduran bahkan stagnasi.⁸⁶

Tabel 2: Imam-imam Perintis Pengkajian al-Maqasid sebelum abad V

| Nama Imam | Karya al-Maqāsid |
|--------------------------------|--|
| al-Tarmīzī al-Ḥakīm (w. 279 H) | <i>al-Ṣalāh wa maqāsiduha</i> <i>al-Ḥajj wa asrāruh</i> |

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 69-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abu Zayid al-Balkhi (w. 322 H) | <i>al-Ibānah ‘an ‘ilal al-Diyānah</i> <i>Maṣalih al-‘Abdan wa al-anfus</i> |
| al-Qaffal al-Kabīr Syayḥi (w. 365 H) | <i>Maḥasin al-Syarāi’</i> |
| Ibnu Bawayh al-Qummi (387 H) | <i>‘Ilal al-Syarāi’</i> |
| al-‘amirī al-Failasūf (w. 381 H) | <i>al-i’lām bi Manāqib al-Islām</i> |

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu *maqāshid al-Syarī’ah*, Imam *al-Syātibī* melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam *al-Syāhibī* bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercacar dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqasid ini dalam satu juz (bab), yaitu pada juz dua dari empat juz kitabnya. Melalui *al-Muwafaqat* ini konsep atau teori *maqāshid al-syarī’ah* dibahas secara sistematis. *Al-Syāhibī* juga mengembangkan dan memperluas apa yang dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqasid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam *al-Syāhibī* dalam ilmu *maqāshid al-Syarī’ah*, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqasid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqāshid al-Syarī’ah* ini lebih jauh, hingga Ibn ‘Asyur

(1393 H) pada akhirnya mempromosikan *maqāshid al-Syarī'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.⁸⁷

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, dan *maqāshid al-Syarī'ah* terkandung di dalam nash-nash tersebut. Untuk menggali *maqāshid al-Syarī'ah* tersebut seseorang paling tidak harus memiliki antara lain yaitu memiliki pengetahuan Bahasa Arab. Seseorang yang akan memahami al-Qur'an termasuk kandungan *maqāshid al-Syarī'ah* nya, menurut *al-Syāhibī* harus memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab termasuk pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Penunjukan *al-Syāhibī* terhadap ayat-ayat al-Qur'an tampaknya dimaksudkan bahwa al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan berkembang dalam kalangan bangsa Arab baik dari segi lafal maupun susunannya. Sebagai contoh *al-Syāhibī* menyebutkan bahwa orang-orang Arab adakalanya menggunakan lafal 'ām dengan tujuan *khaṣ*. Adakalanya pada lafadz 'ām itu hanya menunjuk pada arti 'ām pada satu segi dan *khash* pada segi lain.⁸⁸

Berdasarkan atas tingginya bahasa al-Qur'an, maka pengetahuan tentang bahasa Arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-Qur'an. Pengetahuan dan kemampuan memahami bahasa Arab dalam memahami al-Qur'an (aspek syari'atnya) bagi *al-Syāhibī* menjadi tolak

⁸⁷Imam al-Syatibi awalnya hendak member nama "*al-ta'rif bi asrār al-taklīf*" (rahasia-rahasia dibalik perintah Allah bagi mukallaf). Namun berdasarkan mimpi dari gurunya, al-Syatibi kemudian mengubah menjadi *al-Muwāfaqāt* yang berarti kesepakatan. Ini disebabkan kitab ini isinya adalah memadukan dua mazhab besar yakni mazhab Abu Hanifah dan Ibn al-Qasim.

⁸⁸*Al-Muwāfaqāt* II, hlm. 65.

untuk pemahaman syaria't itu sendiri. Pandangan *al-Syāhibī* ini agaknya dapat diperkuat dengan pendapat Fazlurrahman yang menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an secara tepat diperlukan pengetahuan tentang bahasa Arab termasuk tentang idiom-idiom yang dipakai pada masa Nabi salallahu 'alaihi wasallam.⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah menyatakan dengan tegas bahwa seluruh ulama Ushul Fiqh sepakat terhadap keharusan adanya kemampuan bahasa Arab bagi orang yang ingin mendalami dan menggali kandungan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang diturunkan dalam bahasa Arab.⁹⁰

B. Perkembangan *Maqāshid Al-Syarī'ah*

1. Fase Kelahiran *Maqāshid al-Syarī'ah*

Sebagaimana kita pahami bersama *maqāshid al-Sharī'ah* bahwa puncak tujuan pensyariaan hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Untuk melihat sejarah awal munculnya *maqāshid al-Syarī'ah* maka pengamatan kita tertuju pada tujuan-tujuan syariat yang disampaikan oleh al-Qur'an, sebagai sumber kewahyuan, yang mewakili maksud dan kehendak Allah SWT. dalam menciptakan aturan-aturan hukum Islam. Sedangkan pihak pertama yang mengkaji *maqāshid al-Sharī'ah* tidak lain adalah Rasulullah Saw. Sebab beliau orang pertama yang paling mengerti dan memahami tentang segala maksud dan tujuan diturunkannya wahyu yang berisi syariat untuk dijalankan oleh umat manusia.

⁸⁹ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, hlm. 48.

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl Fiqh*. Mesir: Darul Fikr al-Arabi, 1958, hlm. 380.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah SWT. beruasa penuh untuk menciptakan segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Kemudian Allah SWT. menciptakan dunia seisinya bukan untuk bermain-main, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang *ḥaqq* menurut Allah SWT.⁹¹ Maka demikian pula dengan keberadaan hukum Islam, pasti mempunyai maksud dan tujuan atas pensyariatannya

Al-Syāhibī menjelaskan, bahwa tujuan-tujuan pensyariatan secara menyeluruh terkandung di dalam al Qur'an. Tujuan-tujuan pensyariatan tersebut mengarah kepada satu puncak tujuan, yaitu untuk mengantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia akhirat baik pada tingkatan primer (*dharūriyyāt*), sekunder (*ḥākiyyāt*) maupun tersier (*taḥsīnāt*)⁹² Al-Syāhibī juga memastikan bagi siapa saja yang ingin tahu tentang hukum Islam secara utuh dan ingin menelisik tujuan-tujuan filosofianya, maka hendaknya merujuk kepada al-Qur'an dengan cara *istigra'*. membaca seluruh ayat-ayatnya mulai dari aspek eksplisit hingga pada aspek implisit, tanpa ada pengurangan pada bagian-bagiannya⁹³

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan secara eksplisit mengenai tujuan-tujuan umum pensyariatan, di antaranya:⁹⁴

1. Tujuan Allah SWT. mengutus para Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan risalah yang dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁹¹Di antaranya QS al-Mu'minūn 115, QS. Ali Imrān 191, dan OS Al-Dukhān: 39

⁹²Abu Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, jilid 3m hlm.368

⁹³Ibid. jilid 3, him 345

⁹⁴Nūr al-Dīn al-Khādim, al-Ijtihād al-Maqāsidi: Hummiyyatuhu Dawābituhu Majālātuhu, jilid 1, Silsilah kitab al-Ummah, Vol 65, Tahun 18, (Qatar: Wuzārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyyah, Agustus-April 1998), hlm. 69.

“Tiadalah Kami mengutus-mu (Muhammad *shalallāhu ‘alaihi wasallam* melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya’: 107).

2. Tujuan Allah SWT. menurunkan kitab suci al. Qur'an kepada Nabi Muhammad *shalallāhu ‘alaihi wasallam* adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk jalan kehidupan manusia:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (QS. al-Isra: 9)

3. Tujuan Allah SWT. menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada Allah”. (QS. Adh-Dhariyyat: 56)

Selain itu, ada pula beberapa ayat yang menjelaskan tujuan-tujuan penyariatannya ibadah, seperti perintah shalat adalah untuk membentuk kepribadian manusia yang baik (QS al-‘Ankabūt. 45). diperintahkan zakat untuk mensucikan jiwa manusia dan harta bendanya (QS. al Tawbah: 103), diperintahkan puasa agar menjadi bertakwa (QS. al-Baqarah. 183), dan diperintahkan beribadah haji yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (QS. al-Hajj: 27-28).



Tujuan-tujuan syariat dalam al-Qur'an di atas dipahami sepenuhnya oleh Nabi Muhammad *shalallāhu 'alaihi wasallam* selaku utusan Allah SWT. Kemudian diterjemahkan melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan yang beliau lakukan. Sebab, peran dan fungsi keRasulan tidak lain adalah untuk menjelaskan dan mengejawantahkan esensi al-Qur'an kepada umat manusia perihal tuntunan syariat sebagai petunjuk kehidupan.⁹⁵ Allah SWT. berfirman:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl: 44)

Apabila peran dan fungsi kerasulan itu adalah untuk menjelaskan dan mengejawantahkan esensi al-Qur'an, maka apa yang menjadi maksud dan tujuan al-Qur'an juga menjadi maksud dan tujuan Sunnah.⁹⁶ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peran dan fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an adalah meliputi dua fungsi utama. Pertama: Sunnah menyebutkan pernyataan hukum yang sama dengan yang disebutkan oleh al-Qur'an. Dan kedua: Sunnah menjelaskan dan merinci pernyataan hukum yang dinyatakan al-Qur'an secara global. Kehadiran Sunnah Nabi tidak mungkin menyatakan ketetapan hukum baru yang sama sekali tidak terkandung di dalam al-Qur'an.⁹⁷

⁹⁵ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Usūl al-Fiqhm*, (Kairo: Maktabah al- Da’wah al-Islāmiyyah Shabāb al-Azhar, cet. 8, t. th), hlm. 38.

⁹⁶ Nūr al-Dīn al khādimī, *al-Ijtihad al-maqṣdī: Hujjiyyatuhu Dawāṭuhu Majālātuhu*, jilid 1, hlm. 78.

⁹⁷ Mustafā Šibā’ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Wāzān, 2000), hlm. 420.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lihat juga Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kaoro: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, cet. ke-8, 1990, hlm. 39-40. Menurutnya paling tidak ada tiga fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an bila dilihat hubungan antara keduanya:

- a. Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa al-Qur'an. Misalnya tentang sholat, puasa, zakat, haji, larangan syirik, sumpah palsu, larangan durhaka, larangan membunuh, larangan bersumpah palsu, dan berbagai perkara baik berbentuk perintah maupun larangan yang ditunjukkan oleh keduanya (al-Qur'an dan Sunnah).
- b. Menjelaskan dan memberikan rincian pelaksanaan ajaran yang bersifat global yang dibawa al-Qur'an. Seperti menjelaskan cara sholat dan jumlah rakaatnya, kadar zakat, manasik haji, pengharaman riba, dan lain-lain.
- c. Sunnah kadang-kadang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan oleh al-Qur'an. Sementara perkara tersebut tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, maka dengan demikian Sunnah menjelaskannya, seperti haram hukumnya mengumpulkan wanita dan bibinya sekaligus sebagai istri, pengharaman memakai sutra atau emas. Haram memakan hewan buas (bercakar), dan sebagainya.

⁹⁸Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, hlm, 40

⁹⁹Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*, jilid 4, hlm. 24.



2. Fase Pertumbuhan *Maqāshid al-Syari'ah*

a. Masa Sahabat dan *Tabi'in*

Pemikiran *maqāshid al-Shari'ah* yang tumbuh di masa kehidupan para Sahabat dan Tabi'in adalah berupa penerapan rasio sebagai dalil hukum. Penerapan rasio sebagai dalil hukum ini biasa disebut dengan istilah *ijtihad al-Ra'yi*. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ahmad.

Bahwasannya golongan Sahabat melakukan penetapan hukum Islam dengan mengacu kepada dalil-dalil wahyu sebagaimana masyhur di kalangan mereka, namun mereka juga mengacu kepada dalil rasio dan menerapkan *qiyās* (analogi). Menurut imam Ahmad, menggunakan rasio sebagai dalil hukum merupakan upaya *ijtihad* yang berbasis *maqāshid al-Sharī'ah*.¹⁰⁰ Karena cara kerja dalil rasio adalah mengacu kepada nilai-nilai universal yang menjadi tujuan umum pensyariaan yang terkandung di dalam dalil syariat. Dalil rasio di zaman Sahabat diwujudkan dalam dunia hal:

1. Untuk menjawab problematika baru yang tidak direspon dalil-dalil wahyu. Seperti *ijtihad* Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan al-Qur'an, kodifikasi *mushaf* al-Qur'an yang dilakukan Uthmān, kebijakan 'Umar menstandarisasi harga komoditas pasar, kebijakan Uthman memberi jatah waris kepada seorang istri yang dicerai suaminya dengan talak tiga saat suami dalam kondisi sekarat.
2. Untuk menafsirkan dan mengaktualisasi pernyataan dalil-dalil wahyu. Seperti kebijakan Umar untuk tidak memotong tangan pencuri pada

¹⁰⁰Nūr al-Dīn al-Khādīmī. *"Ilm Maqāsid al-Shar'iyyah"*, hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

musim peceklik, menambah cambukan peminum khamr dari 40 kali menjadi 80 kali, 'Umar juga tidak memberikan hak zakat kepada *mu'allaf*, termasuk juga pada penafsiran ayat waris terk masalah *gharrawayn*.¹⁰¹

Penerapan ijtihad rasio semakin berkembang di akhir periode Sahabat, yaitu setelah mereka tersebar ke beherags wilayah karena perluasan dakwah Islam. Munculnya aliran pemikiran hukum Islam, yaitu *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl Hadits*, banyak memegang peran dalam pengemban ijtihad rasio ini. Hal ini pun akhirnya berlanjut di masa Tabi'in. Ibrāhīm al-Nakhī seorang Tabi'in dari aliran *Ahl al-Ra'yi* pernah berkata: "sesungguhnya hukum-hukum Allah SWT. itu mempunyai tujuan-tujuan, yaitu berupa hikmah-hikmah dan kemaslahat an-kemaslahatan yang diperuntukkan bagi kita (manusia).¹⁰²

b. Di Masa Imam-Imam Mujtahid

Abad kedua Hijriyah adalah masa kehidupan imam-imam mujtahid yang kemudian melahirkan madzhab madzhab fiqh, seperti madzhab Hanafī, Mālikī, Shāfi'ī, Hanbalī. Zhāhirī, Shī'ah Ja'fariyyah dan Zaydiyyah serta beberapa yang lainnya. Di tangan para imam mujtahid ini mulai terbangun konsep pemikiran hukum Islam berupa teori-teori penetapan hukum Islam (*ushūl al-Fiqh*). Para ahli mengamati bahwa dari teori-teori hukum Islam yang dibangun oleh para imam mujtahid tersebut banyak memuat pemeliharaan nilai-nilai *maqāshid al-Syarī'ah*. Hanya saja terma *maqāshid* masih belum diwacanakan secara konseptual tetapi

¹⁰¹Khalifah Bā Bakar al-Hasan, *Falsafah Maqāsid al-Tashrī'fī al-Fiqh al-Islāmī*, 29. *Nūr al-Dīn al-Khādimī*, *al-Ijtihād al-Maqāsidī: Huyyarubu Dawābituhu Majālātuhu* jilid 1, hlm 95-100

¹⁰²Nūr al-Dīn al-Khādimī, *Ilm Maqāsid al-Shar'iyyah*, hlm. 55.

sudah tereduksi pada setiap teori-teori hukum Islam yang mereka rumuskan, baik itu pada metode penafsiran teks dan pada metode-metode ijihad rasional.

Dalam melakukan penafsiran teks-teks wahyu dapat dipastikan bahwa semua imam mujtahid melibatkan pengamatan *maqāshid al-Shari'ah* untuk dapat mengungkap makna teks yang sesuai dengan maksud dan tujuan syariat.¹⁰³ Jangkauan pengamatan *maqāshid* dalam penafsiran teks yang dilakukan imam-imam mujtahid tersebut tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh watak ideologi dan potensi keilmuan mereka masing-masing.¹⁰⁴

Sedangkan untuk metode-metode ijihad rasional atau yang dikenal dengan istilah *al-Adillah al-Ijtihādiyyah* (dalil dalil ijihad) merupakan teori-teori penetapan hukum yang dimunculkan dari makna universal yang terkandung didalam al-Qur'an dan Sunnah. Makna universal yang dimaksud adalah tujuan pensyariatan hukum Islam yang berupa pencapaian maslahat bagi manusia. Untuk itu, imam-imam mujtahid merumuskan serangkaian dalil-dalil ijihad, dengan tujuan agar setiap upaya pencapaian maslahat tersebut benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan syariat. Dengan kata lain, dalil-dalil ijihad rasional

¹⁰³ 'Abd Allah ibn Bayyah, *'Alāqah Maqāsid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 43

¹⁰⁴ Al-Shātibī, sebagaimana yang dikutip Ibn Bayyah, menyebutkan ada tiga model penafsiran para mujtahid dalam menafsirkan teks-teks wahyu dengan kecenderungannya terhadap maqāsid al-Sharī'ah **Pertama:** Aliran tekstual (*Zāhiriyyah*), Yaitu penafsiran yang lebih mengacu kepada pernyataan literal dari teks-teks wahyu tanpa mengamati makna makna implisit yang terkandung di dalam teks. Aliran ini meyakini maqāsid al-Sharī'ah hanya dapat terungkap berdasarkan bentuk pernyataan dari teks secara literal. **Kedua:** Aliran Implisitisme (*Bāṭiniyyah*): Yaitu penafsiran yang lebih mengacu kepada makna makna implisit yang terkandung di dalam teks walaupun makna-makna tersebut keluar dari pernyataan literal. Aliran ini meyakini *maqāsid* al-Sharī'ah hanya dapat terungkap melalui perenungan mendalam terhadap sebuah pernyataan teks. **Ketiga:** Aliran moderat (*Wasāṭiyyah*); Yaitu penafsiran yang menggabungkan antara analisa terhadap pernyataan literal dan makna implisit yang terkandung di dalam teks. Aliran ini meyakini *maqāsid* al-Sharī'ah dapat terungkap apabila makna-makna implisit tidak keluar dari pernyataan literal, sedangkan pernyataan literal butuh dipahami secara komperhensif. Aliran ini banyak diikuti dan diterapkan oleh mayoritas ulama. 'Abd Allah ibn Bayyah, *'Alāqah Maqāsid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 43.



merupakan cara bagi imam-imam mujtahid untuk mengimplementasi *maqāshid al-Syarī'ah* ke ranah hukum praktis.

Adapun dalil-dalil ijtiḥad rasional yang berkembang di masa imam-imam ini meliputi: *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *mashālih mursalah*, *'urf* dan *sad al-dzarā'i*.

Walaupun dalil dalil ijtiḥad ini tidak mendapatkan kesepakatan di kalangan mujtahid, namun mereka satu suara untuk mendukung kemaslahatan sebagai acuan untuk menjawab problematika baru yang tidak direspon oleh dalil-dalil wahyu.¹⁰⁵

3. Fase Perkembangan *Maqāshid al-Syarī'ah*

Pada fase ini *maqāshid al-Syarī'ah* mulai dimunculkan pada kajian-kajian keislaman seperti di dalam *ushūl al-Fiqh*, *fiqh*, dan *tafsir*. Setidaknya ada dua wacana *maqāshid* yang berkembang pada fase ini, yaitu: (a) wacana tentang hikmah hikmah dan rahasia-rahasia hukum Islam mulai muncul di abad ke-3 Hijriyyah, dan (b) wacana tentang konsep maslahat dan tingkatan tingkatannya yang mulai muncul di abad ke-5 Hijriyyah.

Menurut al-Raysūnī, terma *maqāshid* dimunculkan pertama dalam kajian hukum Islam; dengan menyebut istilah khusus *maqāshid* sebagaimana makna terminologi kajian ini, ialah sejak hadirnya seorang ahli fiqh bermadzhab Hanafi yang juga dikenal sebagai filosof sufi bernama al-Hakim al-Turmudhi (w. 320 H).¹⁰⁶ Menurut al-Raysūnī, al-Hakim patut diakui sebagai tokoh pertama yang

¹⁰⁵Prinsip pencapaian maslahat menjadi acuan dasar untuk merumuskan dalil-dalil rasional. Baca lebih jauh pada bab 1 mengenai hubungan antara *maqāsid al-Sharī'ah* dengan dalil-dalil hukum.

¹⁰⁶Nama lengkapnya Abū 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Alī al-Hakīm al-Turmudhī.

membuka pintu dialog *maqāshid* walaupun masih sebatas wacana hikmah dan rahasia pensyariatan di bidang hukum ibadah.¹⁰⁷

Adapun beberapa ulama yang menyumbangkan pemikiran *maqāshid* dalam bentuk wacana hikmah, rahasia dan hekekat pensyariatan ialah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a) Abū ‘Abdullah al-Hakīm al-Turmudhī (w. 320 H.), karyanya: *al-Shalāh wa Maqāshiduhā, ‘Ilal al Syarī’ah wa ‘Ilal al-Ubūdiyyah*
- b) Abū Manşūr al-Māturīdī (w. 333 H.), karyanya: *Ma’khudz al-Syarā’i’*
- c) Abū Bakr al-Qafāl al-Shāshī al-Kabīr (w. 365 H.). karyanya: *Maḥāsīn al-Syarī’ah*
- d) Abū Bakar al-Abharī (w. 375 H.) karyanya: *Mas’alah al-Jawāb wa al-Dalā’il wa al-Ilal*
- e) Abū Bakar al-Bāqilānī (w. 403 H.), karyanya: *al-Taqrīb wa al-Irsyād, al-Ahkām wa al-‘Ilal* dan *al-Bayān ‘an Farā’id al-Dīn wa Syarā’i’ al-Islām*
- f) ‘Abd al-Wahhāb al-Baghdādī Al-Qādī (w. 422 H.), karyanya: *Al-Furūq al-Fiqhiyyah wa Syarah al-Risālah li al-Syāfi’i*
- g) Abū Bakar al-Sarkhashī (w. 483 H.), karyanya: *Ushūl al-Sarkhashī*
- h) Abū Bakar ibn al-‘Arabī (w. 543 H.), karyanya: *Aḥkām al-Qur’ān*
- i) Abū ‘Abdullah al-Bukhārī (w. 546 H.), karyanya: *Maḥāsīn al-Islām*.

¹⁰⁷ Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid’inda al-Shātibī*, hlm. 40

¹⁰⁸ Ibid., hlm. 40-45. Lihat juga- Muhammad Abū Fāris, *al-Madkhal ilā Ditrāsah ‘Ilm Maqāsid al-Sharī’ah al-Islamiyyah*, (Bayrūt: Dar Ibn Hazm, 2012), hlm. 50-53. Umar ibn Ṣalih, *Maqāsid al-Sharī’ah ‘inda al- Imām al- Izz ibn ‘Abd al-Salām*, (Oman: Dar al-Nafa’is, 2003), hlm.

Setelah berkembangnya *maqāshid al-Syarī'ah* dalam wacana hikmah, rahasia dan hekekat pensyariatan, kemudian muncullah menjadi batu loncatan munculnya wacana konsep maslahat dan tingkatan-tingkatannya seperti *dhaarūriyyāt* (kemaslahatan primer), *hājiyyāt* (kemaslahatan sekunder) dan *tahsiniyyāt* (kemaslahatan tersier). Wacana ini mencuat pada abad ke-5 hingga permulaan abad ke-8 Hijriyah dari kalangan ahli *Ushūl al-Fiqh*, tetapi wacananya masih berupa kerangka kerangka dasar yang belum terkonsep sistematis. Adapun beberapa tokoh yang mewacanakan *maqāshid* di abad kelima hingga awal abad kedelapan Hijriyyah adalah sebagai berikut:

- a. Abū al-Ma'ālī al-Juwaynī/ Imam Haramayn (w. 478 H.)

Al-Juwaynī sangat layak dianggap sebagai tokoh pertama yang meletakkan teori dasar *maqāshid*, walaupun teorinya masih belum disajikan secara utuh dan sistematis. Dalam bab *qiyās* dari kitabnya yang berjudul *al-Burhān*, ia menjelaskan masalah 'illal (alasan-alasan fundamental pensyariatan) dan *usūl* (dasar-dasar hukum) yang merupakan embrio dari teori maslahat.

Ada lima pembagian illal dan *ushul* yang dijelaskan al Juwayni, yaitu: (a) Ashl atau dasar perkara yang terkait kepentingan primer (*dhaarūriyyāt*), seperti pada wilayah peradilan memberikan sanksi *qishāsh* bagi pembunuh, alasannya demi melindungi nyawa manusia. (b) Dasar perkara yang terkait kepentingan umum (*al-Hājah al-'Ammah*) yang tidak sampai ke tingkat primer, seperti munculnya hukum sewa menyewa adalah untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu melakukan jual-beli. (c) Dasar perkara yang tidak sampai pada tingkat primer ataupun kepentingan umum, perkara ini berlaku sebagai penambah

keutamaan (*mukarramāt*), misalnya bersuci menghilangkan *ḥadats*. (d) Dasar perkara yang bukan bersandar kepada kebutuhan umum ataupun primer, namun jika dilakukan akan menghasilkan manfaat, seperti mengamalkan perintah sunnah. (e) Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan maksud, tujuan dan ‘*illat*’nya secara pasti, perkara ini tidak tergolong tingkatan primer, kebutuhan umum, ataupun penambah keutamaan, seperti melakukan ibadah *maḥdhah*.¹⁰⁹

Klarifikasi al-Juwayni tentang lima tingka maslahat di atas pada intinya menunjuk kepada tiga tingkat kemaslahatan sebagaimana umumnya diakui para ulama. Pada poin (c) dan (d) pada dasarnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, yaitu tingkatan *mukarramāt*. Sedangkan poin (e) merupakan perkara yang tidak bisa terungkap ‘*illah*’nya, yaitu sebagai perkara dogmatis (*ta’abbudī*) yang tidak masuk katagorisasi pembagian ‘*illah*’.¹¹⁰ Dengan demikian, katagorisasi *illah* kemaslahatan menurut al-Juwayni hanya ada tiga yaitu daruriyyat, hajiyyat dan mukarramat atau tahsiniyyat dalam bahasa *al-Syathibi*.

b. Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w. 505 H.)

Al-Ghazālī dikenal sebagai mujadidd terkemuka yang banyak menulis karya ilmiah seperti filsafat, *fiqh*, *ushūl al Fiqh*, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah Islam tersebut ia digelar *ḥujjah al-Islām*, sang pembela Islam. Teori *maqāshid al-Syarī’ah* ditulis secara bertahap, mula-mula pada karyanya *Syifā’ al Ghafīl*, dan disempurnakan pada *al-Mustashfā fī ‘Ilm al-Ushūl*.

¹⁰⁹ Abū al-Ma’āfi al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Anṣār, 1990), hlm. 923-945

¹¹⁰ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid ‘inda al-Shātibī*, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Syifā' al-Ghālī*, al-Ghazālī membahas teori *maqāshid* pada bahasan metode penarikan illah. Menurutnya ukuran *maqāshid* harus sesuai (*munāsib*) dengan kemaslahatan. Maslahat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya atau kerusakan. Maslahat yang menjadi tujuan syariat tersebut oleh al-Ghazālī dibagi menjadi dua: kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Untuk kemaslahatan dunia terbagi menjadi empat pemeliharaan, yaitu: *hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-'Aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-Bidh* (pemeliharaan kehormatan) dan *hifzh al-Māl* (pemeliharaan harta).¹¹¹

Sedangkan dalam *al-Mustashfā*, al-Ghazālī membagi maslahat menurut tingkatannya ke dalam tiga tingkatan: *dharūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsiniyyāt* atau *tazayyunāt*, yang mana tiga tingkatan ini saling melengkapi.¹¹² Untuk maslahat *darūriyyāt*, al-Ghazālī tidak lagi memisahkan antara maslahat agama dan dunia. Menurut al-Raysuni, rupanya al-Ghazālī sudah memahami betul antara kemaslahatan agama dan dunia yang pada hakekatnya adalah satu, yaitu bermuara pada kemaslahatan agama untuk kepentingan manusia.¹¹³ Oleh sebab itu, al-Ghazālī langsung menegaskan lima jenis maslahat daruriyyat dengan tata urutan: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹⁴

c. Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H.)

¹¹¹ Abū Ḥamid Muhammad al-Ghazālī, *Shifā' al-Ghālī fī Bayān al-Shibh wa al-Mukhayyal wa al-Ta'līl*, (Baghdad: Matba'ah al-Irshād, 1971). hlm. 159-161.

¹¹² Ibid., hlm. 288

¹¹³ Ahmad al-Raysūni, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Shātībī*, hlm. 56.

¹¹⁴ Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazālī, *Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran *maqāshid al-Syarī'ah* al-Rāzī terangkum dalam karya *al-Maḥshūl fī 'Ilm Ushūl al-Fiqh*. Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab, yaitu *al-Burhān* karya *al-Juwaynī*, *al-Mustashfā* karya *al-Ghazālī* dan *al-Mu'tamad* karya Abū Ḥusayn al-Bashrī (w. 436 H.).¹¹⁵ Sebagaimana al-Ghozālī, al-Rāzī pun melakukan pembagian maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Hanya saja al-Rāzī tidak mengikuti al-Ghazālī mengenai tata urutan lima perkara dalam kategori *dharūriyyāt*, bahkan al-Rāzī pun tidak menetapkan tata urutan yang paten secara hirarkis. Al-Rāzī menyebutkan dua model tata urutan lima pemeliharaan *dharūriyyāt*, yaitu:

Model pertama: Jiwa → harta → keturunan → agama → akal¹¹⁶

Model kedua: Jiwa → akal → agama → harta → keturunan¹¹⁷

d. Sayf al-Dīn al-Amidī (w. 631 H.)

Karya ilmiah al-Amidī yang memuat pemikiran *maqāshid al-Syarī'ah* adalah berjudul *al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām*, kitab ini juga merupakan ringkasan dari *al-Burhān*, *al-Mustashfā* dan *al-Mu'tamad*. Teori *maqāshid* dituangkan al-Amidī pada bab *al-Tarjīh bayn al-Aqīsah* (Penimbangan antar *Qiyās*). Dalam kitab ini al-Amidī sudah mulai merumuskan skala prioritas atas tingkatan-tingkatan maslahat. Ia menyatakan bahwa *maqāshid dharūriyyāt* lebih prioritas daripada *ḥājīyyāt*, dan keduanya lebih prioritas daripada *taḥsīniyyāt*.¹¹⁸

¹¹⁵ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Shātibī*, hlm. 57.

¹¹⁶ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Maḥshūl fī 'Ilm Ushūl al-Fiqh*, jilid 2, (Riyadh: Jāmo'ah Muḥammad ibn Su'ūd, 1981), hlm. 217-218 dan 612. 30 Ibid., jilid 2, hlm. 612.

¹¹⁷ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Shātibī* hlm. 57.

¹¹⁸ Sayf al-Dīn al-Amidī, *al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām*, jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), hlm. 376.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada tata urutan lima maslahat *dharūriyyāt* secara mendasar al-Rāzī menyebutkan tata urutan al-Ghazālī, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹⁹ Namun al-Amidī tidak menetapkannya sebagai suatu kelaziman. Menurut tata urutan *dharūriyyāt al-Khams* itu mengikuti skala prioritas menurut cara pandang seorang mujtahid terhadap kedudukan dan kondisi hukum. Misalnya bagi seorang musafir boleh meringkas shalat dan bagi orang sakit pun boleh tidak berpuasa, karena persoalan agama mengedepankan asas toleransi dan kemudahan, sedangkan persoalan jiwa cenderung tidak bisa ditoleransi dan sifatnya mendesak.

Menurut al-Amidī, memprioritaskan jiwa daripada agama bukan berarti harus menempatkan jiwa sebagai maslahat pertama. Karena pada dasarnya agama telah menjamin kemaslahatan bagi jiwa manusia, sehingga pemeliharaan jiwa merupakan cabang dari pemeliharaan agama. Lalu al-Amidī menegaskan bahwa maslahat jiwa lebih prioritas daripada maslahat keturunan, dan maslahat keturunan lebih prioritas daripada maslahat akal, baru yang terakhir adalah harta. Sehingga tata urutan lima *dharūriyyāt* menurut al-Amidī secara gradual ialah: agama → jiwa → keturunan → akal → harta.¹²⁰

e. Abū Amr ibn Uthmān ibn Amr/Ibn al-Hājib (w. 646 H.)

Pemikiran Ibn al-Hājib tentang *maqāshid al-Syarī'ah* tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Muntahā al-Wushūl wa al-Amal fī 'Ilal al-Ushūl wa al-Jadal*. Kitab tersebut merupakan ringkasan dari kitab *al-Ihkām* karya al-Amidī. Ibn al-Hājib menyatakan bahwa tujuan hukum Islam ada dua macam: tujuan

¹¹⁹Ibid., jilid 3, hlm. 394.

¹²⁰Ibid., jilid 4, hlm. 380.

primer (*dharūriyyah*) dan tujuan sekunder (*ḥājīyyah*). Adapun tujuan primer (*darūriyyah*) merupakan kebutuhan pokok manusia dan ditempatkan pada posisi paling tinggi, seperti lima bentuk maslahat yang selalu dipelihara oleh semua agama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan tujuan sekunder (*ḥājīyyah*) adalah segala kebutuhan manusia yang tidak pokok seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.¹²¹

Kemudian Ibn al-Ḥāḥib menjelaskan skala prioritas dari bentuk-bentuk maslahat di atas menurut tingkatannya. Ia pun mengkritik formasi al-Amidī yang lebih memprioritaskan pemeliharaan keturunan daripada akal. Menurut Ibn al-Ḥāḥib, semestinya adalah mendahulukan pemeliharaan akal, karena keberadaan akal menentukan keberlakuan hukum (*manāth al-Taklīf*).¹²² Dengan demikian tata urutan *daruriyyāt al-Khams* menurut Ibn al-Hajib seperti halnya yang dilakukan al-Amidī, mereka berdua mengikuti tata urutan al-Ghazālī.

f. ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H.)

‘Izz al-Dīn atau yang sering ditulis al-‘Izz terbilang sebagai ulama yang paling banyak menulis kitab *maqāshid al-Syarī’ah* secara khusus. Di antara karya al-‘Izz yang hingga kini tersebar luas ialah kitab *maqāshid al-Shalāh*, *Maqāshid al-Shawm*, *Maqāshid al-Mukallafīn*, dan sebuah kitab yang khusus memuat teori dasar *maqāshid* yaitu berjudul *Qawā'id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*.

Pada kitab *Qawā'id al-Ahkām*, al-‘Izz menyebutkan sebuah statemen tentang puncak tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan, baik

¹²¹ Ibn al-Ḥāḥib, *Muntahā al-Wuṣūl wa al-Amal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 182.

¹²² *Ibid.*, hlm. 227-228.

berupa pencegahan atas segala kerusakan (*dar'u al-Mafāsīd*) maupun pencapaian maslahat (*jalb al-Mashālih*).¹²³ Sebagaimana para ahli usu sebelumnya, al-'Izz menyinggung teori dasar tentang *maqāshid* walaupun tidak secara terperinci sebab ia lebih banyak membahas *maqāshid* dari hukum-hukum partikular.

Al-'Izz mengakui ada dua katagori maslahat, yaitu maslahat akhirat dan maslahat dunia. Maslahat akhirat menurut al-'Izz adalah: memperoleh pahala dan selamat dari siksa, mafsadatnya adalah sebaliknya yaitu menerima siksa dan kehilangan pahala. Sedangkan maslahat dunia adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada pemenuhan maslahat primer (*dharūriyyāt*), sekunder (*hājiyyāt*) dan tersier (*tatimmāt*), kemudian mafsadat dunia adalah yang berlawanan dengan pemenuhan tiga maslahat tersebut.¹²⁴

g. Nāshir al-Dīn al-Baidhāwī (w. 685 H.)

Al-Bayḍāwī mengutarakan pemikiran *maqāshid* dalam kitabnya yang berjudul *Minhāj al-Wushūl ila 'Ilm al-Ushūl*. Al Bayḍāwī membagi *maqāshid al-Sharī'ah* menjadi dua katagori, yaitu *maqāshid* akhirat dan *maqāshid* dunia. Untuk *maqāshid* akhirat dicontohkan seperti kesucian jiwa (*tazkiyyah al-Nafs*). Sedangkan untuk *maqāshid* dunia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: (a) *maqāshid dharūriyyāh* pada tingkat pertama yang berisi lima pemeliharaan maslahat, (b) *maqāshid maṣlāhiyyah* pada tingkat kedua yang dicontohkan dengan pengangkatan wali bagi anak kecil, dan (c) *maqāshid taḥsīniyyah* pada tingkat ketiga yang dicontohkan dengan pengharaman sesuatu yang menjijikkan.

¹²³Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Jayl, 2002), hlm. 11.

¹²⁴Ibid., jilid 2, hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klarifikasi al-Bayḍāwī di atas pada dasarnya sepandangan dengan para ahli *uṣūl* sebelumnya yang membagi maslahat sebagai *maqāshid al-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan: *dharūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Dari tingkatan kedua yang diistilahkan al-Bayḍāwī sebagai *maqāḥid mashlāhī* adalah semakna dengan maslahat *ḥājiyyāt*. Namun di sini al-Baydhāwī berbeda dengan para *uṣūliyyūn* sebelumnya dalam menentukan tata urutan *dharūriyyāt al-Khams*, menurutnya adalah: Jiwa→agama→akal→harta→keturunan.¹²⁵

h. Shihāb al-Dīn al-Qarāfi (w. 684 H.)

Barangkali dikatakan konsep al-'Izz tentang *maqāshid* masih terlalu global, namun kehadiran al-'Izz telah melahirkan anak didik, yaitu al-Qurāfi sebagai pakar *maqāsid* pertama yang memunculkan konsep *dharūriyyāt al-Sitt* (enam maslahat primer) dari konsep lama berupa *dharūriyyāt al-Khams*. Al-Qurāfi menuangkan pemikiran *maqāshid* dalam kitabnya *Anwār al-Burūq fī Abwāb al-Furūq* dan *Syarḥ Tanqīh al-Fushul*.

Al-Qurāfi menerjemahkan dan menguraikan pernyataan sang guru tentang konsep *maqāshid*. Dalam *Sharḥ Tanqīh* al-Qurāfi menjelaskan tiga tingkatan maslahat: pertama *dharūriyyāt*, kedua *ḥājiyyāt* dan yang ketiga *tatimmāt*. Dari tiga tingkatan maslahat ini maka tingkatan pertama lebih didahulukan dari yang kedua, dan tingkatan kedua lebih didahulukan dari yang ketiga. Lalu al-Qurāfi menjelaskan perinciannya:

¹²⁵Nāsir al-Dīn al-Bayḍāwī, *"Minḥāj al-Wuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl"*, dalam Muhammad ibn Hasan al-ʿAdakhshī, *Manāḥij al-Uqūl fī 'Ilm al-Uṣūl* (Ḥāshiyah), Jilid. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tingkatan pertama, seperti *kulliyyāt al-Khams* atau *dharūriyyāt al-Khams* yang ditambah satu yaitu *hifzh al-'Ird* (pemeliharaan kehormatan). Adapun tata urutan enam *dharūriyyāt* tersebut adalah: jiwa→ agama→ keturunan→ akal→ harta →kehormatan.
2. Tingkatan kedua; seperti seorang wali menikahkan anak perempuannya yang belum cukup umur, karena pernikahannya bukan termasuk perkara *dharūriyyāt* tetapi kebutuhan menuntut seorang wali menikahkannya demi menghindari kecerobohan atau kerusakan.
3. Tingkatan ketiga; berupa sesuatu yang mengantarkan kepada akhlak terpuji, seperti mengharamkan hal-hal yang menjijikkan dan menghindari sesuatu yang dapat memunculkan syahwat.¹²⁶

Selain tiga tingkatan masalah di atas, al-Qurafi juga menjelaskan korelasi antara tujuan hukum (*maqāshid*) dan perkara yang mengantarkan kepada tujuan hukum (*wasā'il*). Menurut al-Qurafi, keberadaan *maqāsid* dan *wasā'il* saling berkorelasi dan menentukan status hukum, sehingga dituntut adanya kejelasan dan ketepatan dalam mengamati gejala hukum.

- i. Taqī al-Dīn Ahmad ibn Taymiyyah (w. 728 H.)

Sosok Ibn Taymiyyah seperti sosok al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, pemikiran *maqāshid al-Syarī'ah* lebih banyak diwacanakan pada fatwa-fatwa hukum partikular. Sedangkan penjelasannya tentang konsep *maqāshid* lebih ditampilkan secara global. Menurut al-Raysūnī, ada tiga tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di era modern, yaitu

¹²⁶Shihāb al-Dīn al-Qarāfī, *Sharḥ Tangīḥ al-Fuṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 351.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ibn Taymiyyah bersama Ibn al-Qayyim muridnya, al-'Izz bersama al-Qurāfi muridnya, dan al-Syāhibī.¹²⁷

Dalam fatwanya Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa. hukum Islam disyariatkan untuk meraih kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghindari kerusakan dan meminimisasi kerusakan tersebut. Tujuan terbesar ini ditujukan untuk terwujudnya kebaikan dunia akhirat dengan mencegah timbulnya kerusakan dunia-akhirat.¹²⁸ Pada bagian lain dijelaskan cara untuk mengetahui tujuan besar pensyariatan tersebut dengan melakukan *ta'fīl al-Ahkām bi al-Awṣāf al-Munāsibah* (menganalisa alasan-alasan fundamental pensyariatan melalui sifat-sifat hukum yang sesuai). Kemaslahatan secara garis besar, menurut Ibn Taymiyyah sebagaimana konsep *maqāshid* para ulama sebelumnya, yaitu terbagi menjadi dua: kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan akhirat ditunjukkan pada hukum-hukum yang mengarah kepada pembentukan karakter jiwa dan akhlak manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia ditunjukkan kepada pemeliharaan lima kemaslahatan, yang meliputi: jiwa, harta, keturunan, akal, agama.¹²⁹

Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang teori dasar *maqāshid* ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H.). Ibn al-Qayyim mengembangkan teori dasar gurunya tersebut melalui karya karya ilmiahnya. Dalam karyanya *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah* dan *Zād al-Ma'ād* Ibn al-Qayyim berbicara mengenai filosofi pemberlakuan hukum syariat bagi

¹²⁷ Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Shātibī*, hlm. 65

¹²⁸ Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Ribat: Dār al-Ma'ārif, t.th.), hlm. 45

¹²⁹ Ibid., jilid 32, hlm. 234.



manusia, tujuan hakiki atas penciptaan alam, dan mengenai tujuan umum kemaslahatan. Kemudian dalam kitab *Syifā' al-'Alīl li Tibyān al-Hikam wa al-Ta'ālī* Ibnu al-Qayyim memberikan kritik terhadap pihak-pihak yang mengingkari konsep penarikan 'illah dalam hukum. Sedangkan kitabnya yang berjudul *I'lām al-Mawqif 'in* lebih banyak menguraikan kaidah-kaidah *Sad al-Zharā'i'* (tindakan preventif timbulnya mafsadat) dan *al-Hyal* (politisasi hukum).¹³⁰

Dari uraian sejarah *maqāshid* pada fase perkembangan di atas kita dapat melihat dengan jelas adanya tahapan tahapan pemikiran yang mengantarkan kepada terbangunnya teori dasar *maqāshid al-Syarī'ah*. Para *ushūliyyūn* sebelum masa al-Juwaynī lebih banyak mewacanakan *maqāshid* hukum-hukum partikular di beberapa bidang hukum Islam hingga mencapai pada kesimpulan umum bahwa pensyariatan hukum Islam mempunyai tujuan, maksud dan alasan-alasan filosofis di balik ketetapan-ketetapan hukumnya. Namun sejak masa al Juwayni mulai terwacana konsep kemaslahatan sebagai puncak *maqāshid al-Syarī'ah*.

Kita telah membaca bersama, para *ushūliyyūn* menyampaikan konsep kemaslahatan tersebut sudah mendekati tampilan yang sistematis. Mereka mengklarifikasi kemaslahatan kepada tiga tingkatan gradatif, mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah; *dhāruriyyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*. Hanya saja pada perincian hal-hal yang tergolong sebagai kemaslahatan *dhāruriyyāt* banyak terjadi perbedaan menyangkut tata urutan. Adanya perbedaan tata urutan *dhāruriyyāt al-Khams* dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing ulama dalam memahami *maqāshid* agama sebagai tujuan yang paling mendasar dan yang

¹³⁰Muhammad Abū Fāris, *al-Madkhal ilā Ditrāsah 'Ilm Maqāsid al Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 73.

sifatnya universal, namun secara umum mereka semua mengikuti tata urutan al-Ghazālī.¹³¹ Dengan demikian dapat kita katakan bahwa tidak ada aturan baku perihal tata urutan *dhāruriyyāt al-khams*, sehingga membuka pintu ijtihad untuk merelevansikannya dengan kondisi zaman dan kedalaman analisa filosofi seorang mujtahid.

4. Fase Kematangan Konsep *Maqāshid al-Syari'ah*

Fase ini disebut sebagai fase kematangan *maqāshid al Syarī'ah* karena pada fase ini *maqāshid* mulai ditampilkan dalam formasi kajian khusus. Fase ini merupakan lanjutan dari sejarah perkembangan *maqāshid* sebelumnya yang sudah tampil dalam bentuk teori dasar. Hampir tidak ada pihak yang menyangkal apabila Abū Ishāq al-Shāthibī (w. 790 H.) dinobatkan sebagai Bapak *maqāshid al Syarī'ah*. Karena dari tangan seorang mujtahid asal Andalusia (Spanyol) inilah kajian *maqāshid* mulai ditampilkan secara utuh, metodologis dan sistematis.¹³²

Adapun sumbangsih besar al-Shatibi dalam mengkonsepkan *maqāshid al-Syari'ah* adalah sebagai berikut:

Pertama, al-Shāthibī menuliskan kajian *maqāshid* pada bab khusus di bagian kedua kitab *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syari'ah*. Penyajian ini merupakan formasi baru dari format lama yang hanya disiratkan pada pembahasan teori qiyas, penarikan illah dan konsep kemaslahatan. Kehadiran formasi baru ini cukup mengejutkan para ulama yang hidup di masa al-Syathibī, hingga tuduhan “si

¹³¹Baca lebih jauh diskusi perbedaan tata urutan *darūriyyāt al-Khams* secara mentail dalam Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah, *Nahwa Talil maqāsid al Sharī'ah*, hlm. 28-48.

¹³²Al-Shatibi dilahirkan dan dibesarkan di kota Ghamatah, sekarang merupakan wilayah bagian dari Negara Andalusia (Spanyol). Ada pula pendapat yang menyatakan lahir di kota Shatibah (Sativa) yang juga wilayah bagian dari Asbaniah Spanyol. Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid inda al-Shāthibī*, hlm. 108.

penyusun bid'ah" ditujukan kepada al-Syathibī, karena dianggap telah memporak-porandakan konstruksi *ushūl al-Fiqh* yang sudah mapan.¹³³

Evolusi sebuah ilmu selalu berjalan seiring dengan perkembangan akal manusia dan pergeseran zaman. Inovasi al-Shāhibī merupakan pengembangan dari teori dasar *maqāshid* dari para *ushūliyyūn* sebelumnya terutama dari al-Ghazālī, al-'Izz dan muridnya al-Qurāfī. Ideologi madzhab Mālikī yang didoktrinkan guru al-Shāhibī yang bernama al-Maqurī (w. 759 H.) berpengaruh besar dalam membentuk pemikiran sang murid.¹³⁴ Seperti paradigma tentang: asas hukum Islam bersifat rasional, prioritas mencegah kerusakan daripada meraih kemaslahatan, prioritas mendahulukan kemaslahatan global daripada kemaslahatan parsial, merupakan bagian dari karakteristik pemikiran madzhab Mālikī.¹³⁵

Kedua, al-Syāhibī melakukan sistematisasi konsep *maqāshid*. Di tangan para *ushūliyyūn* sebelum al-Syāhibī terma *maqāshid* belum tersaji secara sistematis. Namun dalam *al-Muwafāqāt* kita bisa mengamati sistematika konsep *maqāshid* yang cukup baik. Al-Syāhibī membagi *maqāshid al-Syarī'ah* menjadi dua macam: *maqāshid al-Syarī'* (tujuan- tujuan Allah dan *maqāshid al-Mukallaf* (tujuan-tujuan manusia).

Ketiga, Al-Syāhibī menambahkan beberapa topik-topik penting dalam pembahasan *maqāshid* dan sekaligus melakukan pengembangan lebih luas dalam

¹³³Hamadi al-'Abidi, *al-Shātibī wa Maqāsid al-Sharī'ah*. (Dumaskus: Dār Qutaybah, 1992), hlm. 131. 69

¹³⁴Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid Inda al-Shātibī*, hlm. 25.

¹³⁵Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Rabī'ah. *Ilm Maqāsid al Sharī'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahad al-Waṭāni, 2002), hlm. 69.

konsep *maqāshid* dalam ijtiḥad praktis. Topik tambahan tersebut yaitu mengenai metode untuk mengungkap *maqāsid* dari sumber sumbernya yang ia tulis dengan judul bab "*qashd al-Syārī fī wadh' al-Syarī'ah li al-Iḥām*." ¹³⁶ Sedangkan pengembangan *maqāshid* lebih terarah kepada upaya menjelaskan sinergitas antara *maqāshid* dengan dalil-dalil usuliyyah dan hukum hukum partikularnya. ¹³⁷

Sumbangsih inilah yang kemudian menjadi modal besar untuk perkembangan *maqāshid* di masa modern dan kontemporer yang menjadikannya sebagai perangkat metodologi ijtiḥad secara lebih mandiri. Konsep *maqāshid* akan tampil menjadi metodologi penetapan hukum alternatif ketika *Ushūl al-Fiqh* normatif tidak lagi mampu menyapa zaman.

5. Fase Kemandirian *Maqāshid Al-Syarī'ah* sebagai disiplin ilmu

Fase kemandirian yang dimaksud adalah tampilnya kajian *Maqāshid al-syarī'ah* sebagai kajian yang independen. Fase ini dapat juga kita sebut sebagai fase kehadiran kedua, atau fase rekonstruksi *Maqāshid al-syarī'ah* menjadi sebuah disiplin ilmu. Dikatakan demikian, karena pada fase ini kajian *Maqāshid* bukan saja terwacana secara konseptual sebagai kajian tentang nilai-nilai hukum Islam, tetapi kajian *Maqāshid* dilengkapi dengan kelengkapan metodologi dan diperkuat dengan pijakan ontologisnya. Evolusi *Maqāshid* dari kajian tentang nilai-nilai hukum Islam menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri ini diprakarsai oleh sejumlah sarjanawan muslim di era modern dan kontemporer, yaitu pada permulaan abad 20 dan 21 Masehi. Fase ini boleh dianggap sebagai kelanjutan

¹³⁶ Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2, hlm. 101. Lihat juga dalam Abū Ishāq al-Shātibī, *al-I'tisām*, jilid 2, hlm. 293 297.

¹³⁷ Aḥmad al-Raysūnī. *Nazariyyah al-Maqāsid* 'inda al-Shātibī, hlm. 335.



sejarah perkembangan *Maqāshid* pasca al-Shātibī walaupun terpaut lima abad lamanya.¹³⁸

Adapun ide-ide rekonstruksi *Maqāshid* yang diwacanakan oleh para sarjanawan muslim yang mencuat di era mellinial saat ini secara umum dapat kita klasifikasi menjadi tiga arah pembaharuan.

Pertama: Rekontruksi *Maqāshid* dalam bentuk sistematisasi ulang pada topik-topik bahasannya dan aktualisasi pada beberapa teori. Model rekonstruksi ini diproyeksikan untuk menghadirkan *Maqāshid* sebagai disiplin ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu *Ushūl al-Fiqh*. Upaya rekonstruksi ini diprakarsai oleh Muhammad Tāhir ibn ‘Ashūr dan Allāl al-Fasī.

Ibn ‘Ashūr (1879-1973 M.) diakui sebagai rekonstruktor pertama yang menyajikan kajian *Maqāshid* secara mandiri yang terpisah dari *ushūl al-Fiqh*. Ulama asal Tunisia ini menuangkan ide-idenya dalam karya berjudul *Maqāḥid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Ia melakukan penyederhanaan tema-tema ilmu *Maqāshid* dari sistematika al-Syāhibī yang menurutnya terlalu panjang.¹³⁹ Ibn Ashur menuliskan tiga pokok bahasan utama: (a) penegasan eksistensi *Maqāshid al-Syarī'ah*, termasuk landasan dan metode perumusannya; (b) tujuan-tujuan universal hukum Islam (*Maqāṣidal-'Ammah*), dan; (c) tujuan-tujuan partikular

¹³⁸Sepeninggal al-Shātibī *Maqāshidal-Sharī'ah* mengalami stagnan hingga lima abad kemudian, setelah al-Shātibī tidak ada ulama lain yang membahas dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori *Maqāshid*, selain menyajikan pemikiran al-Shātibī dengan format yang berbeda, seperti dengan menjadikannya dalam nazam atau ringkasan dalam format bait-bait syair. Stagnansi pemikiran *Maqāshid* disebabkan karena: (1) munculnya klaim dari banyak kalangan atas pemikiran al-Shatibi yang dianggap merusak tatanan normatif usul *al-Fiqh* yang telah diakui sebagai metodologi penetapan hukum selama berabad-abad lamanya; dan (2) hilangnya kitab al-Muwafāqāt dari peredaran pasca Perang Salib dan baru diketemukan di Eropa pada abad 19 oleh Muhammad 'Abduh. Baca- Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Alagatuhā bi al-Adilal al-Shar'iyyah*, hlm. 70-71. *Bandingkan- Hamadī al-Abīdī, al-Shātibī wa Maqāshid al Sharī'ah*, 277-dst.

¹³⁹Muhammad Tahir ibn Ashūr, *Maqāshidal-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 174.



dalam beberapa bidang hukum (*Maqāshid al-Juz'iyah*). Mengenai tujuan-tujuan universal hukum Islam, Ibn 'Ashūr tidak lagi berbicara tentang *dharūriyyāt al-Khams* sebagaimana diwacanakan ulama klasik. Tetapi mengaktualisasi pada konteks peradaban modern, yaitu berupa: pemeliharaan rasionalitas sebagai fitrah penciptaan manusia, toleransi, kemaslahatan, kesetaraan derajat, dan kebebasan.¹⁴⁰

Demikian pula yang dilakukan oleh 'Allāl al-Fāsī (w. 1973), ulama dari kota Fas Maroko. Ia menyaksikan kajian *Maqāshid* secara khusus dalam bukunya *Maqāshida l-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* yang ditulis pada tahun 1963.¹⁴¹ Gagasan al-Fasi sebenarnya tidak jauh beda dengan Ibn Ashur yang mengaktualisasi *Maqāshid* kepada nilai-nilai kemanusiaan, hanya saja al-Fāsī lebih jauh melintasi wacana pemikiran Barat dengan melakukan studi komperatif antara konsep hukum Romawi dan filsafat hukum modern yang berkembang di Barat dengan *Maqāshid al-Syarī'ah*.¹⁴²

Kedua: Rekontruksi *Maqāshid* dalam bentuk perumusan satuan-satuan metodologi ijtiḥad berbasis *Maqāshid*. Rekonstruksi ini diproyeksikan untuk menjadikan ilmu *Maqāshid* sebagai instrumen teori hukum Islam alternatif karena memandang usul *al-Fiqh* yang semula berfungsi sebagai teori hukum Islam tidak mampu merespin problematika hukum di era global. Upaya ini diprakarsai oleh beberapa tokoh, seperti Aḥmad al-Raysūnī (Maroko) dan Nūr al-Dīn al-Khādīmī (Tunisia).

¹⁴⁰Ibid., hlm. 259-390

¹⁴¹Allāl al-Fāsī, *Maqāshid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makārimuhā* hlm. 6.

¹⁴²Ahmad al-Raysūnī, *Muhādarah fī Maqāshid al-Shari'ah*, (Mansurah Dar al-Kalimah, 2013), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1999 al-Raysūnī menulis sebuah buku berjudul *al-Fikr al-Maqāshidi* yang berisi kaidah-kaidah dasar untuk melakukan ijtihad berbasis *Maqāshid*. Menurut al-Raysūnī kesadaran untuk implementasi *Maqāshid* dalam ijtihad praktis sudah semakin tinggi, namun belum ada rumusan konkret yang bisa dijadikan sebagai patokan berpikir yang berbasis *maqāshid*. Sebagai solusinya, al-Raysūnī menawarkan empat rumusan kaidah yang patut menjadi prinsip dalam berijtihad *Maqāshid*, yaitu: (1) Prinsip bahwa semua ketentuan hukum syariat pasti mu'allil (memiliki alasan, tujuan dan maksud); (b) Prinsip dalam menentukan *Maqāshid al-Syarī'ah* harus berlandaskan dalil; (3) Prinsip melakukan penimbangan secara adil dalam mengukur maslahat dan mafsadat; (4) Prinsip membedakan antara *Maqāshid* (tujuan hukum) dan *wasā'il* (pengantar tujuan) dalam penetapan hukum.¹⁴³

Ide al-Raysūnī di atas mengawali maraknya dialog para pakar mengenai pentingnya sistematika metodologi *ijtihād-dharuriyat al-Maqāshidi*. Upaya serupa kemudian dilakukan oleh Nūr al-Dīn al-Khādimī dengan penulisan buku berjudul *Ijtihad al-Maqāshidi* pada tahun 1998. Rumusan al-Khādimī tampak lebih lengkap. Ia membagi metodologi ijtihad *Maqāshid* menjadi dua katagori, yaitu (1) kaidah-kaidah umum mengenai prinsip-prinsip dasar berpikir secara *Maqāshidi*, dan (2) kaidah-kaidah khusus mengenai cara kerja ijtihad praktis.¹⁴⁴ Wacana seputar metodologi *ijtihād Maqāshidi* saat ini semakin marak dikaji di beberapa

¹⁴³ Ahmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāshidi Qawa'iduhu wa Fawā'riduhū*, (Ribāt: Matba'ah al-Najāh al-Jadīdah- Dār al-Baydā', 1999), hlm. 39, 59, 68 dan 77.

¹⁴⁴ Lihat lebih jauh metodologi ijtihad *Maqāshidi* Nūr al-Dīn al-Khādimī pada telaah-Nahrun Jauhari, "Magāsid al-Shari'ah sebagai Pendekatan Ijtihad Perspektif Nūr al-Dīn al-Khādimī" dalam Al-Adalah: *Jurnal*



instansi pendidikan, seperti oleh Khālil Thahir akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul *Ijtihād Maqāshidi*.

Ketiga: Rekontruksi *Maqāshid* dalam bentuk aktualisasi konsep *Maqāshid*, perumusan metodologi dan implementasi *Maqāshid* dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, seperti kajian fiqh minoritas, fiqh prioritas, fiqh lingkungan, fiqh Archimedes, dan filsafat hukum Islam. Upaya ini diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Tāha Jabir al Alwani (Maroko), Yusuf al-Qaradawi (Mesir), dan Jaser Audah (Mesir)

Beberapa tokoh tersebut selangkah lebih progresif dari para rekonstruktor sebelumnya. Al-'Alwānī misalnya, telah mengkampanyekan sebuah paradigma tentang filosofi hukum Islam tertinggi yang berlaku sebagai hakim pemikiran *Maqāsid al-Sharī'ah*, ia menyebutnya dengan istilah "*Maqāshid al-'Ulyā al-Hākimah*". Al-Alwānī menyatakan bahwa tujuan-tujuan syariat tertinggi itu adalah: keTauhidan (*al-Tawhīd*), Pensucian Jiwa (*al-Tazkiyyah*), dan Peradaban Dunia (*al-Umrān*).¹⁴⁵ Menurut al-'Alwānī, tiga nilai filosofi ini menjadi inti sari dari seluruh wacana *Maqāshid* yang berkembang dan merupakan antitesa dari pembacaan wahyu dan alam.¹⁴⁶ Ia pun menyebutkan bahwa tiga hal tersebut merupakan nilai makro yang menjadi prinsip fundamental atas semua syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Dasar logisnya ialah berupa sebuah pandangan

¹⁴⁵Tāha Jābir al-'Alwānī, *Maqāsid al-Sharī'ah (Kitāb Qaḍāyā al-Sharī'ah al-Mu'āṣirah)*, (Beirut: Dār al-Hādī, 2001), hlm.145.

¹⁴⁶Ibid., hlm. 135.

bahwasannya Allah SWT. adalah Zat yang telah menetapkan penciptaan alam, manusia dan kehidupan.¹⁴⁷

Tiga nilai filosofis di atas adalah bersifat integral sebagai tujuan yang harus dicapai dalam upaya memperoleh hakekat kemaslahatan pada tingkatan pertama. Untuk tingkatan kemaslahatan kedua adalah keadilan dan kebebasan. Sedangkan untuk tingkatan ketiga adalah berupa *kullīyyāt al-Khams* sebagaimana yang digagas oleh ulama terdahulu.¹⁴⁸ Dalam rangka mencapai tiga nilai filosofis tersebut, al-'Alwānī merancang sejumlah metodologi yang benar-benar dianggap relevan dan sangat dibutuhkan di zaman ini, yaitu berupa kajian fiqh prioritas (*fiqh al Awlāwiyyāt*), *fiqh* minoritas (*fiqh al-Aqalliyyāt*) dan metodologi penelitian hukum sosiologis.¹⁴⁹

Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī juga cukup progresif dalam mengaktualisasi nilai-nilai *maqāṣid* ke dunia global. Misalnya mengenai tujuan-tujuan universal (*maqāshid al 'Ammah*) dalam pikiran al-Qaradhāwī adalah berupa: prinsip memberikan kemudahan (*al-Taysīr*), prinsip keadilan, prinsip penghambaan prinsip dakwah, dan prinsip memelihara fitrah manusia.¹⁵⁰ Secara metodologis, al-Qaradhāwī merumuskan dua macam metode ijtihad yaitu:

¹⁴⁷Ibid., hlm. 136.

¹⁴⁸Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm 249.

¹⁴⁹Metodologi penelitian hukum sosiologis rumusan al-'Alwānī ditulis bersama istrinya dalam buku berjudul *Nahwa l'ādah bīna' 'Ulūm al Ummah*, (Kairo: Dār al-Salām, cet. 1. 2000). Sedangkan kerangka metodologi fiqh prioritas dan minoritas termaktub dalam buku *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

¹⁵⁰Jāsir Awdah, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Shaykh Yūsuf al Qaradāwī*, (Doha-Qatar: Funduq Ridazkālurtūn, 2007), hlm. 48-58. Bandingkan- Aḥmad al-Raysūnī, "Yūsuf al-Qaradāwī Faqih al-Maqāṣid dalam Yusuf al-Qaradāwī Kalimat fī Takrīmihi wa Buḥūth fī Fikrihi wa Fiqhihi, jilid 1, (Kairo: Dār al-Salām, 2004, hlm. 111.

al-Ijtihād al-Inshā'i sebagai metode pencapaian maslahat dan *al-Ijtihād al-Intiqā'i* sebagai metode penimbangan maslahat.¹⁵¹

Bersama gagasan maqasichya al-Qaradawi telah melahirkan kajian-kajian *fiqh* kontemporer seperti: *fiqh* prioritas (*fiqh al-Awlawiyyat*), *fiqh* pertimbangan (*fiqh al Muwazanat*), *fiqh* minoritas (*fiqh al-Aqalliyyat*), *fiqh* peradaban (*fiqh al-Hadari*), *fiqh* lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) dan *fiqh Arcimedes* (*fiqh al-Sunan al-Ilahiyyah*). Namun yang disayangkan, pemikiran *maqāshid* tokoh ini tidak terkumpul dalam satu buku, tetapi terpecah pada hampir semua karyanya baik di bidang hukum Islam, dakwah dan peradaban. Ada satu buku yang bertuliskan judul *Dirasah fī Fiqh Maqāshid al-Syari'ah* (2005), namun belum mewakili pandangan utuh dari sosok al-Qaradhāwī yang cukup progresif.¹⁵²

Tokoh terakhir yang cukup inspiratif adalah Jāsir 'Awdah. Cendekiawan Mesir ini adalah seorang *associate professor* pada jurusan Islamic Studies di Universitas Qatar. Pemikiran penting Jāser yaitu upaya sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak, maksud dan tujuan Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis. Dengan kata lain, Jāser bermaksud untuk membumikan hukum Islam dengan menerjemahkan *maqāshid al-Sharī'ah* yang tertuang dalam *adillah al-Shar'iyyah* secara lebih humanis dan kontekstual. Jasser melalui bukunya *Maqāshid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan pendekatan hukum Islam yang multidisipliner-integratif

¹⁵¹ Jasir 'Awdah, *Maqāshid al-Shari'ah* inda al-Shaykh Yusuf al Qaradawi, hlm. 112 dan 118.

¹⁵² Karya berjudul *Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Sharī'ah* lebih banyak berbicara mengenai macam-macam aliran dalam pemikiran *maqāshid*. Sedangkan pemikirannya tentang konsepsi *maqāshid* banyak tertuang dalam beberapa buku seperti: *Madkhal ilā Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (1993), *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (1990), *Khaṣā'is al-'Ammah li al-Islām* (1977), dan buku-buku lainnya dalam silsilah Sawah Islamiyyah.

dan relevan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti filsafat hukum Islam dan teori sistem sebagai basis pendekatan.¹⁵³

Maqāshid diartikan sebagai tujuan, sasaran, maksud, dan cita-cita. Dengan demikian *maqāshid* dalam hukum Islam bermakna tujuan atau sasaran di balik peraturan atau keputusan yang ada dalam Islam.¹⁵⁴ *Maqāshid* kadang-kadang juga digunakan dalam pengertian *mashlahah*. Hal ini senada dengan yang dituliskan al-Syathibī: hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Islam Jaser mengklasifikasi *maqāshid* dalam hal yang bersifat teknis aplikatif; *maqāshid* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan.¹⁵⁵

Berdasarkan tinjauan dimensi-dimensi di atas Jaser mengklasifikasi *maqāshid* menjadi tiga macam, sebagai berikut: (1) *Maqāshid al-'Ammah*, yaitu tujuan-tujuan universal yang dapat diamati melalui keseluruhan hukum Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan dan kemudahan-kemudahan (2)

¹⁵³ Pendekatan sistem yang dimaksud Jaser adalah sebuah pendekatan holistik, di mana sebuah entitas merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Menurut Jaser, Islam merupakan supra-sistem yang salah satu sistem cakupannya adalah *fiqh* dengan *usūl al-Fiqh* sebagai perangkat pengembangannya. Sebagai pengembang *fiqh*, *usūl al-Fiqh* dengan perangkatnya menyediakan seperangkat sistem yang mengatur untuk itu, yaitu berupa sub sistem; seperti sumber hukum baik wahyu maupun akal (*ijtihad*), *qawā'id fiqhiyyah*, dan *maqāsid al-Sharī'ah*. Masing-masing sub-sistem tersebut memiliki unit dan elemen yang masih dapat diuraikan lagi menjadi unit dan elemen yang lebih kecil. Satu hal yang pasti di sini adalah bahwa setiap sistem, sub-sistem, unit, dan elemen memiliki dan menjalankan fungsi yang berbeda dalam mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan teori sistem, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah: (1) Memvalidasi semua pengetahuan; (2) Meninggalkan pendekatan atomistik dan reduksionis menuju pendekatan holistik; (3) Senantiasa terbuka dan memperbaiki pengetahuan; (4) Selalu melihat sesuatu dari perspektif yang multidimensi, dan bukan dari perspektif kategorisasi yang *binary*; (5) Memperhatikan *purposefulness* sebagai prinsip berpikir. Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, terj. Arab: 'Abd al-Latīf al-Khiyāt, *Maqāsid al-Sharī'ah Falsafah al-Tashri al-Islami: Ru'yah Manzumiyyah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 10-11.

¹⁵⁴ Ibid., hlm. 15.

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 17

Maqāshid al-Khassah, yaitu tujuan-tujuan spesifik-parsial yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, menghindari tindak kriminal dalam hukum kriminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi finansial. (3) *Maqāshid al-Juz'iyah*, yaitu tujuan-tujuan parsial merupakan maksud di balik peraturan, seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi kasus keadilan.¹⁵⁶

Seluruh *maqāshid* atas dihadirkan sebagaimana mereka muncul dalam pikiran dan persepsi para jurisdiktor. Tidak ada dari klasifikasi (klasik dan kontemporer) dan struktur tersebut yang dapat mengklaimnya sebagai “keinginan Tuhan yang orisinal”. Karena jika merujuk kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan struktur alami yang dapat merepresentasikannya dalam bentuk siklus, piramida, atau kotak, sebagaimana yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan beberapa entitas. Untuk itulah, sebaiknya *maqāshid* digambarkan sebagai sebuah struktur yang multi-dimensional.

C. Klasifikasi *Maqāshid al-Syarī'ah*

1. *Maqāshid al-Syarī'ah* Berdasarkan Sumber Tujuannya

a. *Maqāshid dal-Syarī'* (Tujuan Tuhan)

Maqāshid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan Allah SWT. Sebagai *al-Syarī'* (Pencipta hukum) dalam menetapkan syariat hukum Islam.¹⁵⁷ Para ulama telah menyatakan kata sepakat bahwa tujuan Allah SWT. mensyariatkan aturan aturan

¹⁵⁶Ibid., hlm. 18.

¹⁵⁷Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2, hlm.8.

hukum Islam adalah untuk menciptakan “kemaslahatan”, yakni kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.¹⁵⁸ Tujuan-tujuan pensyariaan tersebut disampaikan Allah SWT. melalui pernyataan-pernyataan wahyu atas keberadaan aturan hukum Islam.¹⁵⁹ Untuk itu, sebagian ahli menyebut *maqāshid al-Sharī'* dengan istilah *maqāshid al-Kalām* (tujuan firman Allah) atau *maqāshid al-Khithāb* (tujuan ketetapan Allah).¹⁶⁰

Menurut al-Syāhibī, *maqāshid al-Syarī'* ini dapat diamati meliputi empat aspek tinjauan, yaitu:

1. *Qashd al-Syārī' fī Wadh' al-Syarī'ah Ibtidā'an*. Yaitu tujuan awal yang dikehendaki Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ketentuan syariat (*taklīf*) diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini menunjukkan pada sebuah pemahaman bahwa yang menjadi sebab dan alasan mendasar (*ta'īl*) peletakan aturan-aturan hukum syariat itu adalah kemaslahatan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al Qur'an dan Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Dalam hal ini, al-Syāhibī menjelaskan lebih lanjut, bahwa ketentuan hukum syariat (*taklīf al-Syarī'ah*) sesungguhnya ditetapkan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat tersebut untuk kepentingan manusia. Tujuan-tujuan syariat ini meliputi tiga aspek, yaitu (1) *Maqāshid al-Dharūriyyah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang menjadi

¹⁵⁸Ibid., Jilid 2, hlm. 9.

¹⁵⁹Abd Allah Darāz, dalam anorasi kitab *al-Muwātaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2. hlm. 8-9.

¹⁶⁰Aḥmad al-Raysūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāsid al-Sharī'ah*, him. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keniscayaan yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat; (2) *Maqāshid al-Ḥājiyyah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang keberadaannya untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan manusia; (3) *Maqāshid al-Taḥsīniyyah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang keberadaannya untuk menyempurnakan kedua tujuan syariat sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan dalam aspek adat dan akhlak mulia.¹⁶¹

2. *Qashd al-Syārī fī Wadh' al-Syarī'ah li al-Ifhām*. Yaitu tujuan pemahaman dalam penciptaan syariat, artinya penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini terkait dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami, sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

Dalam hal ini ada dua poin penting yang dikemukakan al-Syāthibī, yaitu:

(1) untuk memahami syariat dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab, karena al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa tersebut; (2) orang yang menguasai dan memiliki jiwa kebahasaan Arab dianggap lebih mudah memahami tujuan-tujuan syariat.¹⁶²

Pemahaman *maqāshid al-syarī'ah* dapat diwujudkan dengan pengakajian kandungan al-Qur'an dan Sunnah Namun demikian, pemahaman *maqāshid* tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan *lafzhiyyah* (verbal), akan tetapi pendekatan *ma'nawiyyah* (substansial) juga penting untuk diperhatikan.

¹⁶¹ Abū Ishāg al-Shātibī, *al-Muwafāqāt il Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid2. Jilid 2, hlm.17 dan 22. Lihat juga- Ahmad al-Rayūnī, *Naẓariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al- Shātibī*, hlm. 145-146.

¹⁶² Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Shātibī* hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Qaṣd al-Shāri' fī Waḍ' al-Sharī'ah li al-Taklīf bi Muqtaḍāhā*. Yakni tujuan penetapan syariat sebagai hukum *taklīfī* yang memiliki daya paksa untuk dilakukan dan bersifat mengikat.¹⁶³ Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Pembebanan hukum *taklīf* dalam perspektif *maqāshid* dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: (1) pembebanan hukum *taklīf* di luar kemampuan manusia, dan (2) pembebanan hukum *taklīf* yang di dalamnya terdapat kesulitan (*masyaqqah*). Untuk jenis pertama, syariat tidak mungkin menetapkan pembebanan hukum *taklīf* di luar batas kemampuan manusia, karena tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila ada suatu ketetapan hukum yang dipandang berada di luar batas kemampuan manusia, maka hal tersebut kembali kepada cara pandang manusia itu sendiri dalam menerima dan memahami suatu ketetapan hukum. Sedangkan untuk jenis kedua, yaitu pembebanan hukum *taklīf* yang di dalamnya terdapat kesulitan (*massaqqah*), ini bukan berarti syariat menetapkan suatu hukum yang menimbulkan beban atau kesulitan bagi manusia, tetapi dibalik kesulitan tersebut terdapat nilai manfaat (maslahat) bagi manusia, yang seringkali tertutup oleh pemahaman dangkal manusia itu sendiri.¹⁶⁴ Karena pada

¹⁶³Hukum *taklīfī* yaitu hukum yang menghendaki dilaksanakannya suatu perkara oleh manusia *mukallaf*, atau larangan untuk ditinggalkannya, atau pilihan antara melaksanakan dan meninggalkannya. Hukum *taklīfī* ini meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. *Abū Ishāq al-Shātibī, al-Muwafāqāt fī Uṣul al-Sharī'ah*, jilid 1. hlm. 93.

¹⁶⁴Ahmad al-Raysuni, *Nazriyya al-Maqāsid 'inda al-Imam al-Shātibī* hlm. 150-151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya ditetapkan hukum *taklif* itu sesuai dengan fitrah atau tabiat penciptaan manusia.¹⁶⁵

4. *Qashd al-Syārī'fi Dukkūl al-Mukallaf taḥta Ahkām al-Syarī'ah*. Yaitu tujuan syariat untuk membawa manusia ke dalam naungan aturan hukum syariat. Hal ini dimaksudkan untuk membawa manusia ke dalam perlindungan hukum. Aspek ini terkait erat dengan pertanyaan: "mengapa manusia harus melaksanakan hukum syariat?" Menurut Abd Allah Darṛāz, pertanyaan ini dapat dijawab dengan dua jawaban: pertama, karena peletakan hukum syariat itu bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat; dan kedua, karena manusia dituntut untuk patuh dan taat kepada aturan syariat, bukan mengikuti hawa nafsunya.¹⁶⁶ Sebagaimana pula pernyataan al-Syāḥibī, bahwa tujuan peletakan syariat adalah untuk mengeluarkan manusia dari pengaruh hawa nafsunya, sehingga ia menjadi manusia yang mampu berupaya, bukan manusia yang terpedaya.¹⁶⁷ Contoh sederhana dapat kita pahami pada setiap amal perbuatan terkait erat dengan tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Tendensi setiap amal perbuatan, jika tidak berdasarkan syariat, maka perbuatan tersebut erat dengan hawa nafsu.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Ibn 'Ashūr menjelaskan bahwa penetapan hukum syariat itu dibangun dasar sifat syariat yang paling agung, yaitu "Fitrah". Dan dengan Fitrah itu Allah Swt, menciptakan manusia (QS Al-Rūm 30), sehingga ditetapkan syariat pasti sesuai dengan tabiat rasionalitas dan kondisi manusia. Baca lebih jauh-Muhammad Ṭāḥir ibn 'Ashūr, *Maqāṣd al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 259.

¹⁶⁶ Abd Allah Darṛāz, dalam anorasi kitab *al-Muwafāqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* Jilid 1. hlm. 128.

¹⁶⁷ Abū Ishāq al-Shi'ātibī, *al-Muwafāqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 1 hlm.128.

¹⁶⁸ *Aḥmad al-Raysūnī, Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, hlm. 155-156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari empat aspek tinjauan di atas saling terkait dan terhubung dengan *al-Syari'* (Allah Swt.) sebagai Pencipta syariat. *Al-Syari'* tidak akan menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut akan terwujud dengan adanya pemberlakuan hukum (*taklif al-Syari'ah*) kepada manusia. *Taklif al-Syari'ah* akan terlaksana jika dipahami dan dimengerti oleh setiap manusia. Oleh karena itu, seluruh *maqāshid* akan tercapai, apabila manusia dalam perilakunya berada di bawah naungan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

b. *Maqāshid al-Mukallaf* (Tujuan Manusia)

Maqāshid al-Mukallaf yaitu tujuan-tujuan yang dikehendaki manusia dalam setiap perilakunya baik pada keyakinan, ucapan maupun perbuatan.¹⁶⁹ Segala perilaku manusia itu ditentukan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari perilaku tersebut. Segala perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk, sebagai ibadah atau adat kebiasaan, sebagai pengamalan ajaran agama atau kepatuhan terhadap norma sosial, semua itu dilihat dari segi niat dan tujuannya. Misalnya perbuatan mencuci muka, tangan dan kaki dapat bernilai ibadah apabila dimaksudkan sebagai wudlu, atau sekedar sebagai adat kebiasaan seseorang saat bangun pagi.

Hidup bahagia, tentram dan sejahtera merupakan bentuk maslahat yang menjadi tujuan bagi setiap manusia. Hal tersebut juga menjadi tujuan Allah Swt. dalam menciptakan aturan hukum syariat, bahkan kemaslahatan yang sejati di dunia dan di akhirat. Tujuan manusia (*maqāshid al-Mukallaf*) hendaknya selaras

¹⁶⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafāqāt fī Usūl al-Sharī'ah*, Jilid 2, hlm.326.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan tujuan Allah (*maqāshid al-Syāri*). Karena tujuan manusia cenderung terbatas oleh jangkauan akal yang seringkali terpedaya hawa nafsu dan kepentingan sesaat, sedangkan tujuan Allah dalam memelihara manusia lebih bersifat universal. Pencapaian sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud awal pensyariatannya (*maqāshid al-Syāri Ibtidā'an*), maka sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.¹⁷⁰

Maslahat dunia dan akhirat menjadi tujuan syariat untuk kepentingan manusia, tujuan ini pun selaras dengan tujuan manusia yang selalu berupaya untuk meraih kesejahteraan hidup. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat untuk manusia ini dibatasi dalam lima perkara, meliputi: agama (*al-Dīn*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-Nasal*) dan harta (*al-Māl*). Setiap perkara yang mengandung proteksi atas lima hal tersebut disebut “maslahat”, dan setiap perkara yang membuat hilangnya lima perkara tersebut disebut “mafsadat”.¹⁷¹ Beberapa ulama berpandangan bahwa maslahat untuk manusia terpisah menjadi dua, yaitu: (1) maslahat akhirat yang dijamin oleh aspek akidah dan ibadah, dan (2) maslahat dunia yang dijamin oleh aspek muamalah. Pandangan ini menuai kritik dari beberapa kalangan karena tidak ditemukan korelasi yang mengharuskan pembagian *maqāshid* ke dalam maslahat dunia dan maslahat akhirat. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya segala hal yang terkait dengan aspek akidah, ibadah dan muamalah dalam syariat Islam, menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷²

¹⁷⁰Ibid., hlm. 324

¹⁷¹Muhammad Sa'īd Ramḍān *al-Būtī*, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Muttaḥidah, 1992), hlm. 110.

¹⁷²Ibid., hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penetapan syariat adalah untuk *taklif* (dibebankan) pelaksanaannya kepada manusia dari berbagai aspek. *Taklif* tersebut didasarkan atas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sehingga, suatu perkara yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia, maka hal tersebut tidak dibebankan oleh syariat. Ketika setiap perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, maka pada dasarnya syariat akan membawa manusia ke dalam naungan hukum Allah, yang tidak akan bercampur antara yang haq dan batil. Dengan demikian, ketika hukum-hukum syariat itu dijalankan, maka hal tersebut akan membawa maslahat untuk manusia sebagaimana yang menjadi tujuan pokok syariat (*maqāshid al-Syarī'ah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

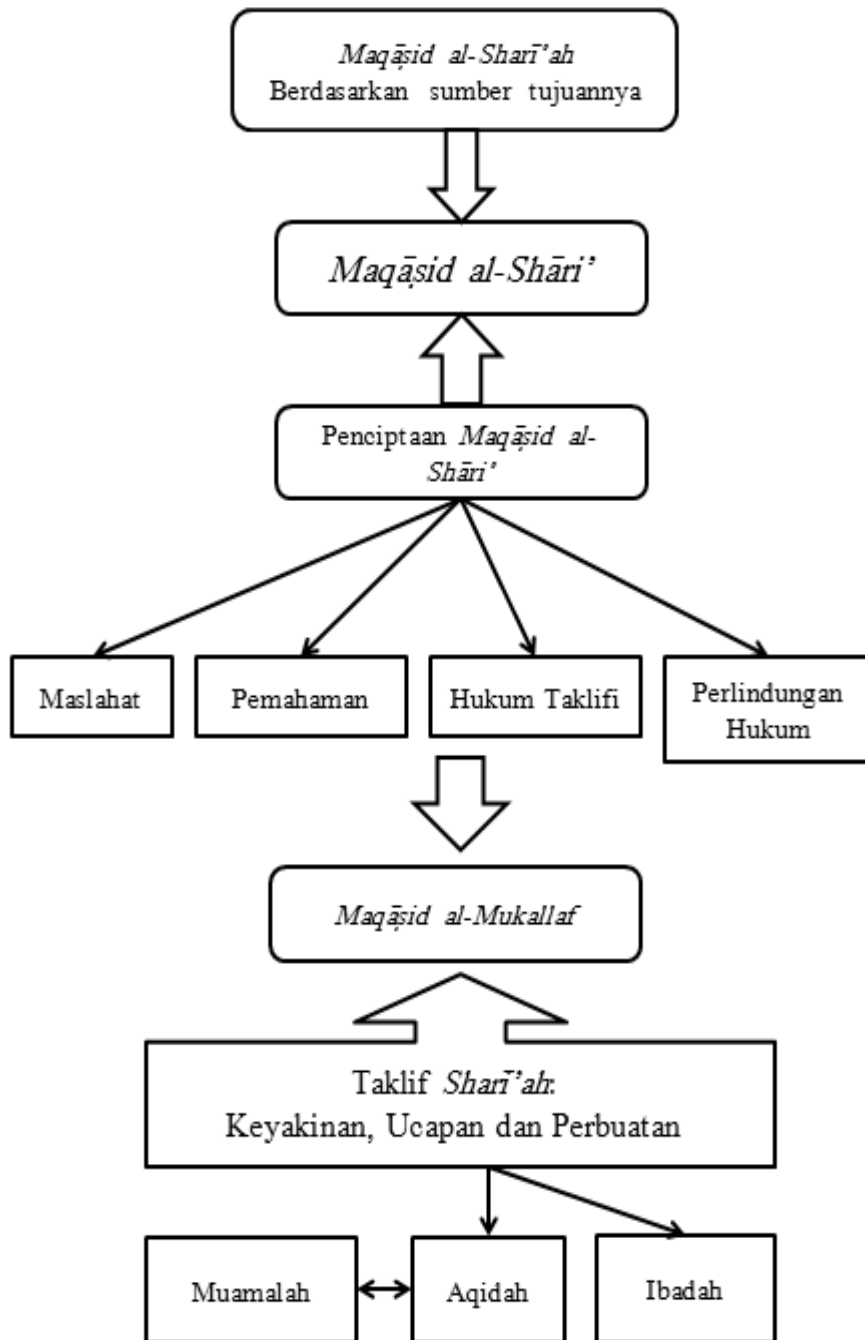


Diagram 2: Skema Klasifikasi *Maqāsid al-Sharī'ah* Berdasarkan sumbernya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Maqāshid al-Syarī'ah* Berdasarkan Skala Prioritas

Hukum *syarī'ah* memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam *maqāshid al-Syarī'ah*. Berdasarkan skala prioritas menurut tingkatan tingkatannya. Dalam hal ini maqasid al-Syari'ah dapat dirumuskan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a. *Maqāshid al-Dharūriyyah*

Maqāshid al-Dharūriyyah yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap penetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁷³ Ketiadaan *maqāshid* jenis ini akan menjadikan kemaslahatan dunia mengalami ketimpangan, bahkan dapat menghancurkan dan memusnahkan kehidupan manusia. Dengan ungkapan lain, bila *maqāshid al-Dharūriyyah* tidak terpenuhi, maka akan dapat mengancam keselamatan umat manusia dan mendatangkan kerusakan yang nyata. *Maqāshid al-Dharūriyyah* ini ditentukan berdasarkan sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah) dan *isṭiqra'* (penelitian) secara induktif terhadap realitas sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.¹⁷⁴

Dharūriyyah atau kebutuhan primer dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus ada atau niscaya, yang ketiadaannya akan berakibat pada hancurnya kehidupan manusia secara total. Oleh karenanya, *dharūriyyah* merupakan prioritas pertama. *Maqāshid al-Dharūriyyah* terwujud dalam pemeliharaan terhadap lima perkara yang harus dan selalu dipelihara syariat dalam setiap penetapan hukum.

¹⁷³ Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2, hlm. 8.

¹⁷⁴ Nūr al-Dīn al-Khādīmī, *ʿIlm al-Maqāsid al-Sharʿiyyah*, him. 71.

Adapun lima perkara daruri atau yang lebih dikenal dengan sebutan *dharūriyyāt al-Khams* yaitu sebagai berikut:

1. *Hifzh al-Dīn* (pemeliharaan agama)
2. *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa-raga)
3. *Hifzh al-'Aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hilzh al-Nasal* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifzh al-Māl* (pemeliharaan harta)¹⁷⁵

Sebagian ahli *ushūl al-Fiqh*, seperti dalam perspektif *al-Qarāfī*, menambahkan *hifzh al-'Ird* (pemeliharaan kehormatan) selain dari lima perkara *dharūriyyah* tersebut.¹⁷⁶ *Maqāshid al-Dharūriyyah* ini merupakan prioritas pertama keberlangsungan hidup manusia dalam aspek agama dan dunia tergantung kepada *maqāshid* ini. Oleh karenanya, melestarikan lima atau enam hal tersebut adalah sebuah keharusan dan keniscayaan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

b. *Maqāshid al-Hājiyyah*

Maqāshid al-Hājiyyah adalah *maqāshid* yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. *Maqāshid al-Hājiyyah*

¹⁷⁵Lima perkara *darūriyyāt* di atas adalah mengikuti tata urutan al- Ghazālī sebagaimana diakui dan banyak menjadi rujukan mayoritas ahli *uṣūl* lainnya. Namun perlu diingat, bahwa tidak ada kata sepakat di kalangan ulama mengenai keharusan menetapkan urutan lima *darūriyyāt* tersebut dengan graduasi tertentu untuk menimbang skala prioritas Lihat kembali pada Bab 2 sub bahasan "Fase Perkembangan *Maqāsid al-Sharī'ah*".

¹⁷⁶Lihat kembali argumentasi al-Qurāfī pada Bab 2 sub bahasan "Fase Perkembangan *Maqāsid al-Sharī'ah*" Selain al-Qurāfī, penambahan *darūriyyāt* keenam yaitu *hifdh al-'Ird* juga dilontarkan oleh Tāj al-Dīn al-Subukī dalam *Jam al-Jawāmi'* dan Yusūf al-Qaraḍāwī di era kontemporer.

merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia dan dapat memberikan kemudahan baginya, sehingga menjauhkannya dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan dan kesukaran.¹⁷⁷ Sementara itu, al-Juwayni mendefinisikan *maqāshid al-Hājiyyah* dengan *maqāshid* yang terkait dengan kebutuhan umum, yang tidak sampai pada batasan *dharūriyyah*.¹⁷⁸

Hājiyyah atau kebutuhan sekunder dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori *daruriyyah*. Jika hal-hal *hājiyyah* tidak terpenuhi, maka tidak akan menghancurkan kehidupan manusia tersebut, tetapi akan mengurangi kesempurnaan dan menimbulkan kesulitan bagi manusia. *Maqāshid al-Hājiyyah* ini menempati pada prioritas yang kedua setelah *maqāshid al-Darūriyyah*.

c. *Maqāshid al-Taḥsīniyyah*

Maqāshid al-Taḥsīniyyah yaitu *maqāshid* yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan kemuliaan, serta berlaku sebagai tuntutan muru'ah (etika/moral), dan akan mendatangkan maslahat untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang. *Maqāshid* ini disebut juga dengan *maqāshid* pelengkap atau penyempurna kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, *mu'āmalah* dan adat kebiasaan, seperti: bersuci, menutup aurat, etika makan dan minum.¹⁷⁹ *Maqāshid* ini dibutuhkan agar kehidupan manusia berada dalam kenyamanan serta keindahan dengan nilai-nilai etika dan moral.

¹⁷⁷ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2. him. 10

¹⁷⁸ Lihat kembali argumentasi al-Juwaynī pada Bab 2 sub bahasan "Fase Perkembangan *Maqāsid al-Sharī'ah*"

¹⁷⁹ Nūr al-Dīn al-Khādimī, *Ilmal-Maqāsid al-Shar'iyyah*, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsīniyyah atau kebutuhan tersier dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang keberadaannya bersifat memperindah atau menghiasi perwujudan kepentingan kepentingan *ḍarūriyyah* dan *ḥājiyyah*. Jika hal-hal *taḥsīniyyah* tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan timbulnya kehancuran dan mempersulit kehidupan manusia, tetapi akan mengurangi sisi keindahan dan estetika. *Maqāṣidal-Taḥsīniyyah* ini menempati prioritas terakhir.

Dari tiga *maqāṣid* tersebut, *maqāṣid al-Dharūriyyah* merupakan perkara esensial bagi kehidupan manusia. Mayoritas ulama berpandangan, bahwa *maqāṣid al-Ḍarūriyyah* merupakan "sasaran di balik setiap hukum syariat". Sedangkan *maqāṣidal-Ḥājiyyah* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Adapun *maqāṣid al-Taḥsīniyyah* adalah *maqāṣid* yang memperindah *maqāṣid* yang berada pada tingkatan sebelumnya. Tiga tingkatan *maqāṣid* tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan. Al-Shāṭibī menjelaskan, bahwa masing masing tingkatan akan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih mendasar. Seperti perbuatan yang termasuk dalam tingkatan *ḥājiyyah* berfungsi sebagai pelindung bagi tingkatan *dharūriyyah*, demikian pula tingkatan *taḥsīniyyah* terhadap tingkatan *ḥājiyyah*.¹⁸⁰

¹⁸⁰Jasser Auda, *Maqāṣid Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

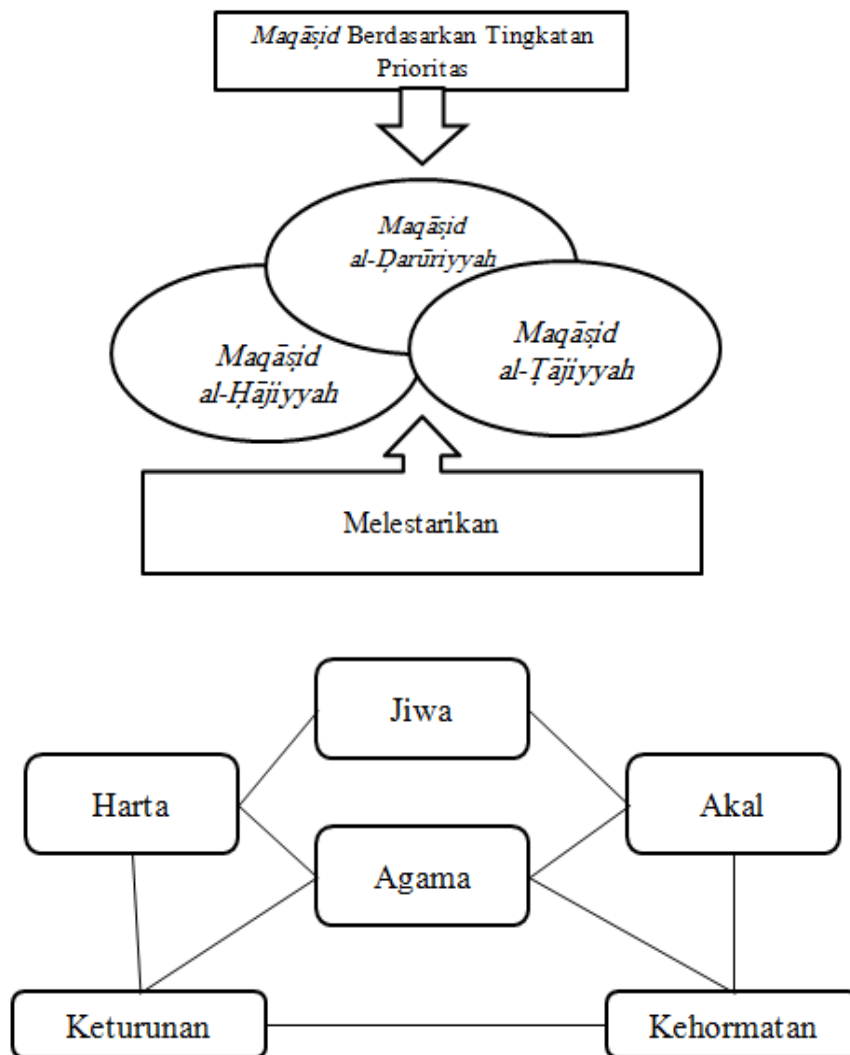


Diagram 3 :Klasifikasi *maqāṣid* berdasarkan tingkatan Prioritas

3. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Berdasarkan Ruang Lingkupnya

a. *Maqāṣid al-'Ammah* (Tujuan Umum)

Maqāṣid al-'Ammah yaitu makna-makna dan hikmah hikmah yang dikehendaki oleh Allah Swt. dalam penetapan seluruh atau sebagian besar hukum syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja.¹⁸¹ Dengan demikian termasuk pengertian *maqāṣid* ini adalah sifat-sifat atau karakteristik hukum syariat

¹⁸¹Muhammad Ṭāhir ibn Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 251.



dan tujuan-tujuan umum hukum syariat.¹⁸² *Maqāṣid al-'Ammah* juga dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat pada seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya.¹⁸³ *Maqāṣhid* ini dapat ditelaah pada seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan proteksi terhadap *daruriyyāt al-Khams*, yaitu perlindungan agama, jiwa-raga, akal, keturunan dan harta, penyebaran rahmat bagi semesta alam, penegakan keadilan, menghilangkan kesulitan, dan mendatangkan kemudahan.¹⁸⁴

b. *Maqāṣhid al-Khāṣṣah* (Tujuan Khusus)

Maqāṣid al-Khāṣṣah yaitu tujuan-tujuan syariat yang dikhususkan pada bidang-bidang atau bab-bab tertentu dari ketetapan hukum Islam.¹⁸⁵ Ibn 'Ashūr menyebutkan bentuk bentuk *Maqāṣid al-Khāṣṣah* seperti: tujuan khusus pada bidang hukum keluarga, bidang hukum perdata transaksi, bidang hukum ketenaga-kerjaan, bidang hukum peradilan dan kesaksian, bidang hukum perdata tabarru (pelimpahan harta non kompensasi), dan bidang hukum pidana.¹⁸⁶ Tujuan-tujuan khusus ini secara lebih rinci dapat dicermati pada bab lima buku ini.

c. *Maqāṣhid al-Juz'iyyah* (Tujuan Parsial)

Maqāṣid al-Juz'iyyah yaitu tujuan-tujuan syariat pada masing-masing hukum Islam partikular (*far'iyyah*). *Maqāṣid* ini terkait erat dengan hukum *taklīfī*, seperti wajib, sunah, mubah, makruh dan haram, serta hukum *wadh'ī* seperti

¹⁸²Ibid., 251

¹⁸³Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*, hlm.13

¹⁸⁴Ibid., hlm. 14. Bandingkan Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 36.

¹⁸⁵Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*, hlm.13

¹⁸⁶Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* hlm. 430-dst.

syarat dan *māni'*.¹⁸⁷ *Maqāsid* al-Juz'iyah juga dapat diartikan sebagai maksud maksud di balik suatu *nash* atau hukum tertentu, seperti: maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyarat akan jumlah saksi untuk kasus hukum tertentu: maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberi makan kepada orang fakir miskin dalam larangan menimbun daging kurban.¹⁸⁸

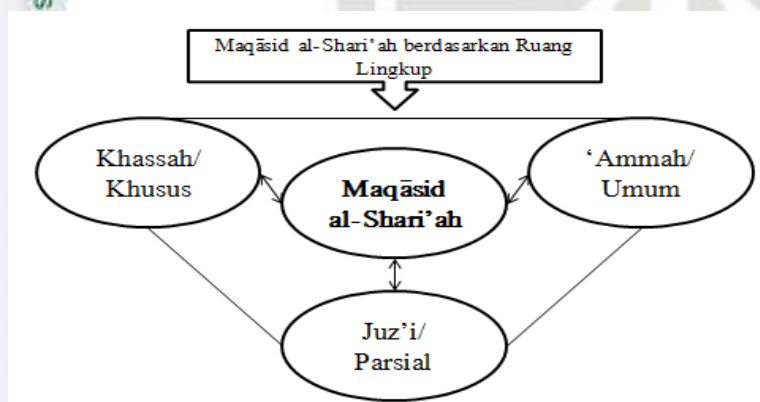


Diagram 4: Skema Maqāsid Berdasarkan ruanglingkup

4. *Maqāsid al-Syari'ah* Berdasarkan Sifatnya

a. *Maqāsid al-Qaṭ'iyyah*

Maqāsid al-Qaṭ'iyyah yaitu *maqāsid* yang ditetapkan kemaslahatannya karena didukung oleh dalil-dalil atau prinsip-prinsip hukum Islam dan nas-nas syariat.¹⁸⁹ Dalil dalil tersebut seperti prinsip kemudahan (*al-Taysīr*), prinsip keamanan (*al-Amn*), dan proteksi terhadap lima kemaslahatan (*ḍarūriyyāt al-Khams*). *Maqāsid al-Qaṭ'iyyah* merupakan *maqāsid* yang ditunjukkan oleh dalil

¹⁸⁷ Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal ilā Maqāsid al-Shari'ah*, hlm. 15.

¹⁸⁸ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm.

37.

¹⁸⁹ Nūr al-Dīn al-Khādimī, *Ilm al-Maqāsid al-Shariyyah*, hlm. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mungkin mengandung takwil, atau *maqāṣid* berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang dilakukan melalui *istiqrā'* (penelitian induktif), atau akal secara mudah dapat dipahami adanya maslahat.¹⁹⁰ *Maqāshid al-Qath'iyyah* dapat berupa maslahat dengan disyariatkannya suatu perkara yang disebutkan secara eksplisit dari *naṣ* (al-Qur'an dan Sunnah) yang menetapkan hukum tersebut.

b. *Maqāṣid al-Zhanniyyah*

Maqāṣid al-Zhanniyyah yaitu *maqāṣid* yang diputuskan oleh dugaan akal, *maqāṣid* yang ditunjukkan oleh dalil zanni dari dalil-dalil syariat.¹⁹¹ *Maqāshid al-Zhanniyyah* juga dapat dimaknai sebagai tujuan disyariatkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *naṣ*, tetapi terdapat tanda atau isyarat lain untuk mengetahui maksud dan tujuannya tersebut.

Perbedaan *maqāṣid* berdasarkan validitas makna menjadi *qat'i* (pasti) dan *zannī* (dugaan)., menurut Ibn 'Ashūr, dipengaruhi oleh banyaknya dalil pada masing masing hukum syariat yang diteliti *maqāshid* nya, karena sangat memungkinkan untuk suatu hukum tertentu mempunyai dalil yang lebih banyak daripada hukum lainnya, tergantung waktu dan keadaan yang melatarbelakangi proses pembentukan hukum tersebut. Upaya mujtahid untuk mengungkap *maqāṣid* adalah dilakukan dengan meneliti cara kerja syariat dan dikomparasikan dengan pendapat pendapat para mujtahid generasi sebelumnya yang telah berinteraksi dengan kaidah-kaidah syariat dengan intensitas yang tinggi. Dari upaya tersebut ada kalanya menghasilkan kesimpulan yang *qat'i*, dan terkadang

¹⁹⁰Muhammad Ṭāhir ibn 'Ashūr. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm 415.

¹⁹¹Nūr al-Dīn al-Khādimī, *Ilm al-Maqāṣid al-Shar'īyyah*, hlm. 73.

berupa kesimpulan *ẓanni*. Pada dasarnya kesimpulan *ẓhanni* dapat ditetapkan sebagai *maqāṣidal-Sharī'ah* bilamana validitasnya mendekati *qath'i*.¹⁹²

c. *Maqāṣidal-Wahmiyyah*

Maqāṣidal-Wahmiyyah yaitu *maqāshid* yang dikhayalkan akan dapat dicapai, namun pada dasarnya hal tersebut dapat mendatangkan bahaya (*maḍarah*) dan kerusakan (*mafsadah*).¹⁹³ *Maqāṣid al-Wahmiyyah* juga dapat diartikan sebagai *maqāṣid* yang diduga mengandung kemungkinan maslahat, akan tetapi masih mengandung *maḍarah*. Ini yang biasa disebut dengan *maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat.¹⁹⁴ *Maqāshid al-Wahmiyyah* dapat dimaknai sebagai tujuan disyariatkannya hukum terhadap suatu perkara yang tidak disebut kan secara jelas oleh pernyataan eksplisit *naṣ* dan tidak ada tanda atau isyarat untuk mengetahuinya, maksud dan tujuan tersebut akan diketahui setelah dilakukan *istiqrā'* lebih lanjut.

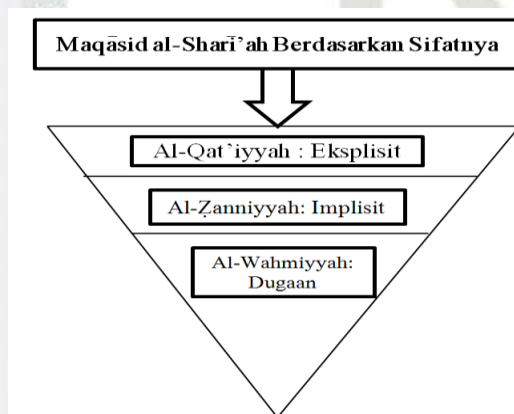


Diagram 5 : Skema *Maqāṣidal-Sharī'ah* Berdasarkan Sifatnya

¹⁹²Muhammad Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm., 231-234.

¹⁹³Wahbah al-Zuhayfī, *Usul al-Fiqh al-Islāmi*. (Beirut: Dar al-Fikr.1986), hlm. 1023.

¹⁹⁴Nur al-Din al-Khadimi. ' *Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyyah*, blm. 74.

D. Kriteria *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Untuk mengetahui bahwa suatu ketentuan syariah itu memiliki *maqāṣid*, maka ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman antara lain:¹⁹⁵

a. Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud (*maqāṣid*)

Sesungguhnya Allah *subhānahu wa ta'ala* tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu. Ia juga memberi atau tidak memberi kecuali untuk target tertentu, begitu pula ia tidak menambah atau mengurangi sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula.¹⁹⁶

Ketentuan tersebut berlaku dalam seluruh bagian/bidang dalam syariat Islam, baik itu ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, akhlak dan bidang lainnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Imam *al-Syātibī* dan Ibn 'Asyur, “sesungguhnya secara prinsip, ketentuan ibadah itu memiliki ‘*illat*, walaupun dalam ketentuan detilnya lebih banyak tidak dijelaskan ‘*illat*nya”.

Jadi tidak hanya ketentuan-ketentuan muamalah yang memiliki ‘*illat* dan tujuan (*maqasid*), tetapi juga ketentuan-ketentuan ibadah seperti yang ada dalam Q.S. al-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹⁹⁵Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 52-59.

¹⁹⁶Ahmad al-Raisuni. *al-Fiqru al-maqāṣidi: Qawā'iduhu wa dawābiṭuhu*, hlm. 35.



Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa zakat disyariatkan untuk tujuan tertentu yaitu pembiasaan diri untuk selalu memberi dan bersedekah.¹⁹⁷

Ketentuan ibadah yang tidak ber'illat seperti di contoh di atas sesungguhnya bukan karena ketentuan tersebut tidak memiliki tujuan, tetapi karena tidak dijelaskan oleh Allah *subhānahu wa ta'ala* untuk tujuan ketundukan hamba kepada al-Khaliq.

b. Menentukan *maqāshid* harus berdasarkan dalil

Tidak boleh menetapkan atau menafikan *maqāshid al-syarī'ah* kecuali atas dalil.

Oleh karena itu menyandarkan suatu tujuan hukum (*maqāshid*) atas hukum tertentu dalam syariat Islam itu sama halnya menisbatkan sebuah perkataan dan hukum kepada Allah *subhānahu wa ta'ala*.

Karena syariat ini adalah syariat Allah *subhānahu wa ta'ala* dan setiap target dalam syariat Islam itu adalah target Maha Pencipta syariat tersebut. Maka jika *maqāshid al-syarī'at* itu tidak berdalil, maka itu sama halnya berdusta kepada Allah *subhānahu wa ta'ala*. Karena menetapkan sesuatu yang bukan hukum Allah kepada Allah adalah terlarang, seperti ditegaskan dalam Q. S. al-Isra' (17): 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْ ؕ وَلَا

¹⁹⁷Al-Raisuni. *Naẓariyyatu al-Maqāshid lil imām al-Syātibi*, hlm 5 dan Ismail Hasan. *Naẓariyyatu al-Maqāsi di 'inda al-Imām al-Ṭahir ibn 'Asyūr*, hlm. 114 dan hlm. 118.

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.

c. Menertibkan maslahat dan mafsadat

Dalam hukum Islam, maslahat dan mafsadat itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya dalam lima kebutuhan daruriyat (asasi) manusia itu juga berbeda-beda tingkat kepentingannya. Hajat manusia akan harta itu ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder dan yang bersifat pelengkap/tertier. Hal serupa terjadi pula terhadap mafsadat yang berbeda-beda pula tingkat kerusakannya.

Jika *maqāsid* itu bertingkat-tingkat dan berbeda tingkat kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada *wasāil* (sarana). Karena setiap ada tujuan, maka harus ada sarana yang menghantarkan kepada tujuan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada *nash* al-Qur'an dan Hadits. Bahwa ketentuan-ketentuan syariat ini tidak sama, tetapi berbeda-beda kepentingannya. Ada yang tidak penting, kurang penting, penting, dan lebih penting.¹⁹⁸

Sebagaimana dinyatakan dalam Q. S. al-Hujurat (49): 7.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
 الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ

“Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”.

¹⁹⁸ Ahmad al-Risuni. Al-Fikr al-maqasidi: Qawa'iduhu wa dawabituhu, hlm. 57-63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini Allah *subhānahu wa ta'āla* menyebutkan beberapa bentuk dosa, yaitu kufur, kefasikan dan maksiat secara berurutan yang menunjukkan bahwa kufur adalah dosa yang paling besar, kefasikan berada di bawahnya, dan kemaksiatan paling kecil dosanya di antara dosa-dosa di atas. Dalam ayat ini disebutkan bentuk-bentuk mafsadat secara berurutan sesuai tingkat kemudaratannya.

Kemudian Allah *subhānahu wa ta'āla* memberikan tugas dan kewajiban kepada manusia berdasar tingkat masalah dan mafsadatnya. Atau dengan kata lain Allah menjadikan setiap perintah dan larangan tau ketentuan lainnya sesuai dengan tingkatan masalah dan mafsadatnya.

Imam *al-Syāthibi* menjelaskan hal ini seperti berikut: “Setiap perbuatan dipandang oleh syara’ berdasarkan maslahat atau mafsadat yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Oleh karena berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun;
- 2) Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar;
- 3) Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan;
- 4) Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil;



Dengan cara seperti ini bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan *furu'* (cabang).¹⁹⁹

Kesimpulan *al-Syātibī* ini sungguh sangat berharga dalam kajian *maqāshid al-syarī'ah*, bahwa seluruh rukun itu berisi maslahat yang besar bagi manusia, dan setiap dosa besar itu berisi mafsadat yang besar pula bagi manusia. Sedangkan ihsan itu berisi maslahat yang kecil, dan begitu pula dosa kecil berisi mafsadat yang kecil pula. Kesimpulan ini setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan bahkan menjadi pedoman dalam berijtihad dan berfatwa pada masalah-maslah kontemporer. Tidak menghukumi sesuatu dengan wajib kecuali berisi maslahat yang besar, dan tidak pula menghukuminya haram kecuali berisi mafsadat yang besar.

d. Membedakan antara *maqāshid* dan *wasā'il*

Di antara kaidah penting dalam bab *maqāshid al-Syarī'ah* adalah membedakan antara rumpun maqasid dan rumpun wasa'il dengan cara meletakkan ketentuan syari'at ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. Yang dimaksud dengan sarana (*wasā'il*) adalah sesuatu yang harus dilakukan ataupun ditinggalkan bukan karena perbuatan tersebut, tetapi karena hal lain yaitu target perbuatan tersebut. Selanjutnya, wasilah adalah perbuatan yang menghantarkan kepada tujuan perbuatan tersebut. Ketentuan-ketentuan syariat ini bisa dibedakan menjadi dua hal:

¹⁹⁹ Al-Syatibi. Al-Muwaffaqat, 1/213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Ketentuan Allah baik perintah atau larangan adalah maslahat atau mafsadat. Maksudnya perintah atau larangan tersebut berfungsi sebagai sarana sekaligus sebagai tujuan.

2) Ketentuan Allah baik perintah atau larangan adalah untuk menghantarkan pada satu tujuan syara'. Maksudnya perintah atau larangan tersebut adalah sarana yang diperintahkan untuk dikerjakan karena akan memenuhi maslahat atau sarana yang harus ditinggalkan karena akan menyebabkan mafsadat.

Berkenan hal ini dalam Q. S. al-Jumu'ah (62): 9 menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Ayat ini menegaskan perintah dan larangan, yaitu agar bergegas ke masjid serta melarang berjual beli saat sholat Jum'at. Perintah bergegas ke masjid sesungguhnya bukan menjadi tujuan dalam ayat ini, tetapi yang menjadi tujuan adalah mengingat Allah *subhānahu wa ta'āla*. Oleh karena itu orang yang tinggal di masjid yang tidak perlu bergegas berangkat ke masjid itu tetap harus bersegera mengingat Allah untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Begitu juga larangan berjual beli pada saat sholat Jum'at, bukan karena jual belinya semata, karena jual beli tersebut dikhawatirkan akan melalaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat Jum'at atau terlambat menunaikannya atau meninggalkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tujuan (*maqāṣid*) memiliki sarana atau banyak sarana (*wasā'il*) baik terlihat dengan jelas ataupun tersamar, baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah menentukan mana ketentuan hukum yang berstatus *wasīlah/wasā'il* dan mana yang *maqshad/maqāshid*, maka perintah atau larangan terhadap suatu perbuatan itu harus disesuaikan dengan *maqāshid* nya. Hukum setiap sarana itu mengikuti status dan hukum maqasidnya, wasilah menjadi baik jika tujuannya (maqsad) baik, dan sebaliknya wasilah menjadi buruk jika tujuannya (maqsad) buruk sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim: “Sebuah tujuan tidak bisa dicapai kecuali dengan sebab-sebabnya, maka sebab-sebab tersebut menjadi bagian dari tujuannya. Hukum sesuatu yang menjadi penyebab kepada maksiat dan perbuatan haram, tergantung pada tingkat kepastian faktor penyebab tersebut menimbulkan hukum haram. Dan begitu juga hukum sesuatu yang menjadi penyebab kepada ketaatan, tergantung pada tingkat kepastian faktor penyebab tersebut menimbulkan ketaatan”.

Dalam fiqh *maqāṣid*, *maqṣad* lebih menjadi prioritas dari *wasilah*. Maka perhatian terhadap *maqṣad/maqāṣid* harus lebih besar dari pada perhatian terhadap *wasā'il*. *Wasā'il* bisa bersifat *murūnah* (fleksibel) dan berubah-ubah, sedangkan *maqāshid* bersifat tetap.²⁰⁰

²⁰⁰ Ahmad al-Risuni. *al-Fikr al-maqasidi: Qawa'iduhu wa dawabituhu*, hlm. 64-72. Ismail Hasani. *Nazariyatu al-maqasid 'inda al-Imam al-Tahir 'ibn Asyur*, hlm. 369.

Seperti diketahui bahwa Allah *Swt.* dalam setiap syariatnya bermaksud untuk memenuhi hajat manusia dan menghindarkan mafsadah darinya. Oleh karena itu, setiap nass baik al-Qur'an dan Hadits harus ditafsirkan berdasarkan *maqāṣid* nya sebagaimana ditegaskan oleh seluruh *maḥab* (madrasah pemikiran) dalam *istinbath* (menghasilkan ketentuan hukum) yang mereka lakukan.

Di antara contoh penafsiran *nash* berbasis *maqāṣid/maṣlaḥah* seperti tercantum Q. S. al-Baqarah (2): 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Imam Ghazali menjelaskan, andaikan syar'i tidak mewajibkan atau tidak mensyaratkan seorang saksi itu harus adil, maka kami tetap akan mensyaratkannya karena tujuan syar'i memberlakukan persaksian adalah untuk menetapkan hak seseorang (*itsbātu al-huqūq*), dan *huqūq* tidak bisa ditetapkan oleh seorang fasiq.

Faqih atau *mujtahid* harus menguasai *maqāṣid al-syarī'ah* seperti halnya seseorang sah mewakili dan mengatasnamakan orang lain jika mengetahui maksud dan kehendak orang yang diwakilinya.

Oleh karena itu baik *maqasid* ataupun *maslahat* berfungsi menjadi dalil dalam masalah tertentu ketika tidak ada nass yang menjadi sandaran hukum. Di antara contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah *Mashlahah Mursalah*.²⁰¹ *Maslahah Mursalah* adalah penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam hukum. Di antaranya, Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam melarang praktik jual beli yang terdapat unsur *jahalah* dan spekulasi karena merugikan pihak-pihak yang berakad. Oleh karena itu setiap transaksi akad Harus jelas baik dalam harga ataupun barang. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki *'illat*. Akan tetapi, ada beberapa kondisi dalam transaksi bisnis yang tidak mungkin diterapkan syarat-syarat di atas, sehingga menuntut toleransi dan kelonggaran. Di antaranya larangan terhadap jual beli *bai' al-ḥadir lil badi talaqqi rukban* bertujuan melindungi hajat pelaku pasar, dan larangan *talaqqi rukban* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum sehingga mereka bisa mendapatkan bahan makanan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²⁰²

Penerapan *maṣlahah al-mursalah* dapat dilihat dalam beberapa contoh muamalah, salah satunya misalnya investasi dalam *mudharabah*. Jika seseorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka ia harus bekerja dan mengelolanya sendiri. Dan jika usaha berhasil, maka seluruh keuntungan menjadi haknya. Namun jika seseorang memiliki harta dan ternyata tidak mampu mengelolanya sendiri, maka ia harus menyerahkan kepada pihak lain untuk mengurusnya. Ini adalah

²⁰¹ *Maṣlahah Mursalah* yaitu setiap maslahat dan hajat manusia yang tidak ada penetapan atau penolakannya dalam nass.

²⁰² Al-Risuni. *Nazariyyatu al-maqāṣid li al-imām al-Syātibi*, hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu cara yang termasuk kedalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* atau *maṣlahah*.²⁰³

Dalam jual beli juga dilarang jika ada unsur gharar, yaitu di antara kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu. Akibatnya kedua belah pihak akan dirugikan.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam aqad yang ada unsur gararnya hukumnya adalah haram. Seperti hadits Rasulullah yang artinya, “Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar”.

Selain dari contoh pengharaman gharar di atas, gharar juga diharamkan karena adanya bahaya (*dharar*) berupa potensi perselisihan dan permusuhan antar pelaku bisnis karena objek aqadnya tidak pasti dan tidak pasti pula diterima pembeli, dan juga sebaliknya harga dan uang tidak pasti diterima penjual. Akibatnya tujuan dari yang bertransaksi tidak tercapai. Padahal tujuan asalnya adalah pembeli mendapatkan barang tanpa cacat dan sesuai keinginan, dan penjual mendapatkan keuntungan.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai keterbukaan informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dicurangi ataupun dirugikan. Inilah *maqashid* atau tujuan dilarangnya gharar, agar tidak ada pihak-pihak yang

²⁰³Husein Hamid Hasan. *Maqasid al-Syari'ah fi al-hayat al-iqtisadiyyah*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak timbul perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Ketentuan tersebut sesuai dengan *maṣlahah*, bahwa setiap pihak bisa mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan mendasar (minimalnya) sehingga bisa menunaikan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu setiap modal yang dimiliki baik itu uang atau *skill* harus dikelola menjadi modal usaha, baik sebagai pemodal maupun pengelola.

2) Kaidah *Saddu Zarā'i*.²⁰⁴ Kaidah *saddu zarā'i* sesungguhnya berdiri di atas *maqāṣid dan maṣlahah*. Jika ketentuan dalam syariat ini digunakan untuk melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakannya di luar tujuan yang sudah ditetapkan, maka syara' menganggapnya tidak sah karena akan mengakibatkan maqasid tidak tercapai.

Di antara contoh *saddu zarā'i* antara lain:

- a) Dilarangnya hibah dengan tujuan agar penghibah terhindar dari wajib zakat. Hibah itu akad yang legal dan dianjurkan dalam Islam, tetapi ia terlarang jika si pemberi hibah yang berniat menghibahkan sesuatu kepada orang lain agar tidak menjadi wajib zakat dengan cara setelah selesai masa haul, ia tarik kembali pemberiannya. Akad seperti ini tidak dibolehkan karena bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hibah yaitu ta'awun dan empati kepada orang lain, dan juga karena transaksi seperti ini menimbulkan mafsadat yaitu menghindarkan kewajiban zakat.

²⁰⁴ Menutup setiap sarana yang mengakibatkan kepada hal-hal yang diharamkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Dilarangnya *Shani'* penjamin. Imam Malik berpendapat bahwa *shani'* (penerima pesanan pembuat barang) dalam akad istisna' menjadi *dhamin* (penjamin) dan bertanggungjawab terhadap barang yang dipesan. Tadmin ini harus berdasarkan dalil, karena jika tidak maka telah membebankan pihak yang seharusnya tidak bertanggungjawab statusnya menjadi bertanggungjawab. Tetapi dalam kasus ini dibolehkan dengan alasan saddu al-zari'ah, karena jika *sani'* tidak bertanggungjawab, maka berakibat pada barang-barang yang dipesan menjadi tidak aman, dan kemungkinan hilang atau rusak.

c) Akad jual beli. Akad jual beli dibolehkan dalam Islam karena untuk memenuhi hajat pembeli untuk memiliki barang dan jasa, selain itu juga memenuhi hajat penjual mendapatkan keuntungan. Tetapi jika barang dijual tidak tunai dengan jangka waktu tertentu, kemudian setelah jatuh tempo, penjual membeli kembali barang secara tunai, maka transaksi seperti ini tidak dibolehkan karena *ma'alāt* (pertimbangan jangka panjang). Akad seperti ini statusnya menjadi pinjaman berbunga.

Dalil-dalil di atas menunjukkan contoh penerapan *maqāsid al-syarī'ah* bahwa maslahat bisa menjadi sumber hukum bagi para mujtahid dan mufti dalam menetapkan hukum dalam maslah-masalah kontemporer yang tidak dijelaskan dalam *naṣṣ*.

Oleh karena itu kemampuan mujtahid atau mufti mengetahui maqasid ini menjadi keniscayaan agar fatwa yang dikeluarkannya sesuai dengan tujuan Allah *subḥānahu wa ta'āla* dalam menurunkan syari'at. Konsekwensinya seorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mufti tidak boleh menafsirkan *nash* yang tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah *subhānahu wa ta'āla* dengan cara memaksakan penafsiran (*takalluf*) terhadap *nash* tersebut. Sebagai contoh misalnya suatu perkara *daruriyyat* dihukumi oleh mujtahid menjadi sunnah (*istiṣḥāb*) atau sebaliknya suatu masalah yang termasuk kategori *taḥsiniyyāt* (kebutuhan pelengkap), kemudian dihukumi oleh mujtahid menjadi wajib.²⁰⁵

Berkaitan hal ini al-Risuni menegaskan bahwa syarat menjadi seorang mujtahid adalah menguasai *maqāṣid al-Syarī'ah*, seperti dikatakannya: “Seseorang dikatakan berkompeten mewakili dan mengatasnamakan orang lain apabila ia mampu menguasai maksud dan tujuan perkataan orang lain tersebut. Sedangkan syarat-syarat selain itu adalah syarat-syarat pelengkap. Oleh karena itu seorang mujtahid yang berfatwa atas nama Allah *subhānahu wa ta'āla*, pertama-tama selain harus mengetahui dengan benar tujuan Allah *subhānahu wa ta'āla*, juga harus mengetahui masalah yang menjadi objek ijtihad tersebut”.²⁰⁶

Said Ramadhan Buthi menegaskan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* ataupun *maṣlaḥat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Tetapi ia adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber dari dalil-dalil syar'i. *Maqāṣid* adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *furu'* yang bersumber dari dalil-dalil hukum. Maksudnya hukum-hukum fiqh dalam masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi

²⁰⁵ Yusuf al-Qardawi. *Dirasāt fi Maqāṣid al-Syarī'ah baina al-Maqāṣid al-kulliyah wa nuṣūṣ al-fuz'īyyah*, hlm. 155.

²⁰⁶ Ahmad al-Risuni. *Nazariyyatu al-maqāṣid lil al-imām al-Syātibi*, hlm. 284. Ismail Hasani. *Nazariyyatu al-maqāṣid 'inda al-Imam al-Tahir 'ibn Asyur*, hlm. 372.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melindungi *maṣlahat* hamba di dunia dan akhirat. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum, sedangkan hukum-hukum *furu'* yang bersumber dari dalil-dalil syari'ah adalah *furu'*.

Oleh karena itu maqasid (maslahat) harus memiliki sandaran dalil, baik dari al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, atau setidaknya tidak ada dalil yang menentanginya. Jika ia berdiri sendiri, maka *maṣlahat* menjadi tidak berlaku dan *maṣlahat* tersebut tidak berlaku pula serta tidak dapat dijadikan sandaran. Maslahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum *tafṣili* (terperinci dan khusus), tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i.²⁰⁷

Maqāshid al-Syarī'ah merupakan manifestasi hukum Islam. Adapun tujuan dari hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bertujuan bukan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kebahagiaan di dunia saja.

Maṣlahah dan *maqāṣid al-Syarī'ah* tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan usul fiqh. Oleh karena itu, menurut Oni Sahroni *maqāṣid al-syarī'ah* atau *maṣlahah* memiliki dua kedudukan yaitu:

Pertama, maslahat adalah sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash*. Sebagai contoh dalam

²⁰⁷Ramadhan al-Buthi. *Ḍawabiṭ al-maṣlahah fī al-syarī'ah al-Islamiyyah*, hlm. 107-108.



masalah, banyak transaksi yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Oleh karena itu, dalil-dalil masalah seperti *maṣlaḥah mursalah*, *sad zari'ah*, *'urf*, dan sebagainya adalah sumber hukum penting.

Kedua, masalah adalah target hukum. Maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariat harus dipastikan memenuhi aspek maslahat dan hajat manusia. Atau dengan kata lain masalah menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* bukan dalil berdiri sendiri tetapi menjadi dalil yang memiliki *nash* yang menjadi sandarannya. Dan dalam proses ijtihad, setiap proses *istinbath* (menghasilkan kesimpulan) hukum harus disesuaikan dengan *maqshad* (tujuan) dari *nash* hukum tersebut. Oleh karena itu seorang faqih atau mufti wajib mengetahui *maqshad* suatu *nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah *subhānahu wa ta'āla* dalam setiap syariatnya baik perintah maupun larangan, agar fatwanya sesuai dengan tujuan pembuat syariah (*al-Syārī'*). Dengan tujuan, agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang seharusnya dihukumi wajib karena kedaruratannya, dihukumi sunnah atau mubah karena kekurangan hati-hatian dalam mengetahui maqasid suatu hukum.

Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, hukum Islam harus dapat menghadapi hal-hal atau masalah baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu memberikan jawaban terhadap problematika kehidupan dari zaman ke zaman. Dengan demikian kajian filsafat hukum Islam akan menghasilkan hukum



Islam yang manifestasinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau *maqāshid al-Syarī'ah*.

Atas alasan itulah, pengkajian ilmu filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Dengan tegak dan berhasilnya filsafat hukum Islam, dapat dibuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban tantangan sepanjang zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alam.²⁰⁸

Filsafat hukum Islam dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penerapannya²⁰⁹, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan hukum Islam tersebut di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqāshid al-Syarī'ah*, karena memberikan manfaat dengan mensyaratkan sebagai berikut:²¹⁰

- a. Bisa memahami *nash* al-Qur'an dan al-Hadits beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat *fuqaha* berdasarkan *maqāshid al-Syarī'ah* sebagai salah satu standar (*murajjihāt*).

²⁰⁸ Harun al-Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 87-89.

²⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1992, hlm. 16.

²¹⁰ Keputusan Sidang Majma' Fikih Islam Internasional OKI no. 167 dalam konferensinya yang ke-11 di Kualalumpur tahun 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Memahami *ma'alāt* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-usul hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah adalah setiap kaidah dasar atau *mabda'*, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Quran, Hadits, pendapat sah, tabi'in, ijma ulama, fatwa, dan sebagainya. Filsafat hukum Islam dapat diartikan pula dengan hikmah *tasyrī'*.

Terkait hal di atas, dapat dikatakan bahwa ada dua hal yang membuat pakar filsafat hukum Islam dituntut untuk memikirkan hukum Islam. *Pertama*, kepentingan masyarakat yang mendambakan keselamatan dan kesejahteraan umum, hidup damai dan perlakuan adil secara merata yang mendorong timbulnya hukum agar kehidupan menjadi stabil. *Kedua*, tekanan-tekanan yang langsung atau tidak langsung karena terjadinya perubahan ukuran atau nilai-nilai dari kepentingan masyarakat itu sendiri akibat kemajuan teknologi, selera, dan nilai-nilai, yang pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian atau perubahan hukum yang mengaturnya menuju ketertiban sosial.²¹¹

Seperti diketahui kebanyakan filsuf muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim filsafat. *Fuqahā'* menggunakannya sebagai rahasia umum (*asrār al-hukm*). Oleh sebab itu filsafat hukum Islam tidak hanya mencakup hal-hal

²¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 23.



seperti hikmah sholat dan hikmah puasa misalnya, tetapi juga *uṣūl aḥkām* (pokok-pokok hukum) dan *qawā'id al-aḥkām* (kaidah-kaidah hukum).

Mustafa Abd al-Raziq ahli fikih kontemporer Mesir misalnya mengemukakan bahwa filsafat hukum Islam itu terdiri atas sumber hukum, kaidah dan tujuannya. Maka melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam itulah ada ulama yang menamakan filsafat hukum Islam dengan *maqāṣid al-tasyrī'* atau *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah swt. Tujuan itu ada yang disebut langsung oleh Allah dalam firman-firmanNya, dan adapula yang tersembunyi sehingga diperlukan upaya penggalian yang sungguh-sungguh untuk mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilosafatan (*philosophical activities*).

Kalangan ulama *uṣūl fiqh*, mendefinisikan hikmah dengan suatu motivasi dalam pensyariaan hukum dalam rangka meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan/kemudharatan. Kebolehan melakukan jual beli, misalnya dalam rangka mendapatkan manfaat, yaitu mencukupi kebutuhan masyarakat. Begitu juga diharamkan zina dalam rangka memelihara keturunan. Diharamkan minuman keras dalam rangka memelihara keturunan, diharamkan mencuri, korupsi, berjudi, pemborosan adalah dalam rangka memelihara harta, diharamkan membunuh dalam rangka menjaga nyawa sendiri atau nyawa orang lain.²¹²

²¹² WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, dalam Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 153-154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli *uṣūl fiqh*, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu *falsafah tasyrī'* dan *falsafah syarī'ah*.²¹³

Falsafah tasyrī' adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. Filsafat tasyrī' terbagi kepada: Pertama, dasar-dasar hukum Islam (*dā'im al-aḥkām*), kedua, prinsip-prinsip hukum Islam (*mabādi' al-aḥkām*), dan ketiga, pokok-pokok hukum Islam (*uṣūl al-aḥkām*), keempat, tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-aḥkām*), dan kelima, dan keenam kaidah-kaidah hukum Islam (*qawā'id al-aḥkām*).

Falsafah syarī'ah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan uqubah. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pembagian falsafah syariah: Pertama, rahasia-rahasia hukum Islam (*asrār al-aḥkām*), kedua, ciri-ciri khas hukum Islam (*khas al-aḥkām*), ketiga, keutamaan-keutamaan hukum Islam (*mazāyā al-aḥkām*), keempat, karakteristik hukum Islam (*thawab al-aḥkām*).

Dalam menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh umat Islam maka jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkan hukum adalah dengan melihatnya dalam al-Quran dan as-Sunnah, karena sumber utama hukum Islam adalah al-Qura'an dan as-Sunnah. Terhadap segala permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berjihad dengan menggunakan akal mereka dengan menggali sumber hukum lain guna

²¹³ Harun al-Rasyid. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 87-88.



menemukan ketentuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum utama itu.

Islam merupakan agama yang mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya sebagaimana disinyalir dalam al-Quran. (*Dan Dia tiada sekali-kali menjadikan untuk kamu kesulitan dalam agama*). Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat seperti ditegaskan dalam Q.S. Yunus (10): 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Mengacu kepada tujuan tasyri' di atas, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa syariat merupakan keadilan, rahmat, maslahah, dan hikmah secara universal.²¹⁴ Jika ada yang menyimpang dari kriteria tersebut, maka bukan merupakan syariah. Kriteria dan nilai-nilai yang dimaksud adalah yang dituju oleh *maqāṣid al-syarī'ah al-khamsah* yang juga merupakan metode filsafat hukum Islam.

Oleh karena itu, yang menjadi hakikat dari disyariatkannya (dilandangkannya) hukum Islam itu adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara pasti, baik di dunia maupun di akhirat. Inti utama

²¹⁴Abdurrahman Kasdi. “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam”. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, apapun bentuknya semua hal yang membawa mudharat harus dihindari atau dicegah terjadinya kepada manusia. Di mana didapati kemaslahatan, maka disitu ada syariat, dan di mana ada kemudharatan harus dihilangkan, sekecil apapun adanya, dengan prinsip pencegahan atau *daf'u al-darār*. Secara umum prinsip-prinsip pokok yang harus menjadi landasan dan sasaran dalam hukum Islam dapat dikelompokkan kepada dua hal.²¹⁵ Kedua hal tersebut, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (*jalbul maṣāliḥ wa dar'ul mafāsīd*) dan memberikan kemudahan dan menolak kesukaran (*jalbut taisyir wa daf'ul ḥaraj*).

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan adalah inti atau prinsip paling utama dalam pensyariaan hukum Islam. Perilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada pula yang berimplikasi pada kemafsadatan. Karena itulah syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur supaya seluruh perilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat sekaligus. Apa saja yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dunia, akhirat atau kedua-duanya adalah diperintahkan oleh syariat Islam. Dan begitu juga berlaku bagi apa saja yang mengandung kemafsadatan adalah dilarang oleh syariat Islam.

Dalam mencapai kemaslahatan itu ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan. Pertama, kemaslahatan pada yang diperbolehkan (*maṣāliḥ al-mubāḥāt*); kedua, kemaslahatan pada yang dianjurkan (*maṣāliḥ al-mandubāt*); dan ketiga, kemaslahatan pada yang diwajibkan (*maṣāliḥ al-wājibāt*).

²¹⁵ Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 147-151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan. Pertama, kemafsadatan pada yang makruh (*mafāsīd al-makruhāt*); kedua, kemafsadatan pada yang diharamkan (*mafāsīd al-muharromāt*).²¹⁶

Adapun pengetahuan pada kemaslahatan kemafsadatan di dunia, sebagian besarnya dapat diketahui dengan akal dan ada yang hanya diketahui dengan berpedoman pada dalil/nash. Sedangkan nilai kemaslahatan dan kemafsadatan di akhirat tidak dapat dianalisis dengan akal melainkan dengan menggunakan dalil *naqli* (*nash*).

Selanjutnya ulama juga menetapkan salah satu kaidah pokok lainnya yaitu memberikan kemudahan dan menolak kesukaran (*jalbut taisīr wa daf'ul ḥaraj*), di mana semua hal yang membuat segala sesuatu menjadi sempit dan sulit harus dihilangkan, karena agama diturunkan oleh Allah untuk menghilangkan kesulitan (*'adamul ḥaraj*), melainkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia (*jalbut taisīr*).

Hal ini sesuai juga dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi (*almasyaqqotu taḥlīb al-taisīr*), kesulitan itu mendatangkan kemudahan.²¹⁷

Kaidah di atas diambil dari *nash* al-Quran dalam Q. S. al-Baqarah (2): 185. “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Dan juga Q. S. al-Hajj (22): 78. “Dan Allah tidak menjadikan agama sebagai hal yang menyulitkan buat manusia”.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.... ﴿١٨٥﴾

²¹⁶ Izzuddin Abdul aziz bin Abdussalam. *Al-Qawa'id al-Kubra al-mausum bi qawa'id al-ahkam fi islah al-anam*. Damaskus: Darulqolam, 1421 H/200 M, juz 1, hlm. 11-12.

²¹⁷ Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-nazhair fi Qawa'id wa furu' fiqh al-wafi'iyah*. Riyadh: Nazar Musthafa al-Baz, 1997. Juz 1, hlm. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Q. S. al-Baqarah (2): 185”.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.
Q. S. al-Hajj (22): 78.

Oleh karena itu Allah telah menjadikan syariat Islam berdiri di atas asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang sangat mudah untuk diaplikasikan, sesuai dengan fitrah manusia, dan memperhatikan semua aspek keselamatan dalam setiap waktu dan tempat. Semua asas dan prinsip dasar tersebut dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut.²¹⁸

1. Memperhatikan kemaslahatan orang banyak.

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang, yaitu dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau kegiatan manusia atau sebuah kejadian kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam, dikaji dengan cara pandang yang luas dan mendalam. Seperti yang ditegaskan dalam Q. S. Al-Anbiya' (21): 107, “Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat sekalian alam”.

Syariat Islam juga menjelaskan hikamah dan maslahat diwajibkannya beberapa ibadah, seperti sholat, puasa, qishah, dan sebagainya. Tentang sholat diterangkan dalam Q. S. Al-Ankabut (29): 45, “Sesungguhnya sholat itu dapat

²¹⁸ Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009, hal. 22-31.



mencegah perbuatan keji dan munkar”. Tentang puasa diterangkan dalam Q. S. al-Baqarah (2): 183, “Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertaqwa”. Tentang qishah diterangkan dalam Q. S. al-Baqarah (2): 179, “Dan bagi kalian dalam hukum *qishas* itu ada kehidupan wahai orang-orang berakal agar kalian bertaqwa”.

Syariat Islam selalu mengaitkan hukum dengan ada tidaknya maslahat. Dengan kata lain, syariat Islam memiliki ‘latar belakang, sebab dan alasan (*‘illat*) yang berkorelasi dengan ada tidaknya hukum serta jenis hukum yang berlaku. Nash-nash syariat banyak sekali menjelaskan tentang *‘illat* (alasan, sebab, latar belakang, motif) dan argumentasi mengapa Allah menetapkan sebuah hukum di antaranya seperti tertera di bawah ini.²¹⁹

- a. Allah berfirman tentang pembagian harta rampasan perang yang didapat oleh pasukan Islam dari musuh mereka orang-orang kafir yang ditinggalkan tanpa ada peperangan dan pertempuran. Harta ini dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, tidak untuk kelompok tertentu, atau satu generasi tanpa generasi yang lain sehingga tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin.

Hal ini diterangkan dalam Q. S. Al-Hasyr (59): 7, “Apa saja harta rampasan (*fā’i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang

¹⁹ Rasyad Hasan Khalil. *Oc. Cit.*, hlm. 24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Dalam hal pemotongan tangan diberlakukan pada saat ada pencurian. Namun bila tidak ada pencurian, maka tidak ada pemotongan tangan. Hal ini diterangkan dalam Q. S. Al-Maidah (5): 38, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Bahwa cara penetapan suatu syariat (hukum) tidaklah sama dengan hukum yang lainnya sesuai dengan perubahan maslahat yang ada. Jika sebuah hukum menjelaskan tentang satu kemaslahatan yang tetap, tidak berubah maka ia termasuk hukum yang tetap dan wajib diamalkan dalam setiap zaman dan waktu, seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta beberapa aturan yang terkait dengan pernikahan, talak, harta warisan, termasuk juga hukuman bagi pelaku kejahatan, di mana mudharatnya tidak akan pernah berubah sepanjang zaman seperti membunuh, mencuri, berzina, menuduh zina tanpa bukti (*qadzaf*), dan merampok.²²⁰

Namun jika hukum menjelaskan tentang maslahat yang sudah tetap, tetapi bisa berubah sejalan dengan perubahan tempat, zaman dan waktu, maka syariat akan menetapkan satu aturan atau kaidah dasar dan tidak

²²⁰ Rasyad Hasan Khalil. *Loc. Cit.*, hal. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perinciannya kepada para ulama mujtahidin, sehingga syariat bisa sesuai dengan perubahan dan perkembangan manusia. Contohnya adalah semua bentuk transaksi jual beli atau hubungan sosial, aturan perundang-undangan dan tatakelola pemerintahan, serta hubungan bilateral.

Perlu juga diperhatikan bahwa mengaitkan sebuah hukum atau aturan dengan adanya kemaslahatan telah menempatkan adat kebiasaan (*al-'urf*) mendapat posisi tertentu dalam tinjauan syariat Islam, sebab kebiasaan adalah dari sebuah keperluan, bisa melahirkan kemaslahatan, sehingga perlu untuk kita bisa mengubah sebuah hukum yang didasarkan kepada adat kebiasaan ketika ada perubahan.

2. Mewujudkan keadilan sosial.

Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia untuk menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Syariat Islam tidak pernah membedakan antara berbagai warna kulit, ras, bahasa, dan tidak ada keistimewaan bagi seseorang terhadap orang lain kecuali dengan taqwa dan amal saleh. Bahwa keadilan sosial Islam merupakan dasar penting bagi tegaknya syariat, mercusuar utama yang akan menerangi alam sekitarnya baik sebagai syariat yang mengikat dan undang-undang yang wajib ditaati. Allah memerintahkan dalam ayatnya, memotivasi dan mengingatkan supaya tidak meninggalkannya terutama dalam hal penetapan hukum dan menegakkan keadilan, seperti ditegaskan dalam Q. S. an-Nahl (16): 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْغِيِّ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam ayat lain yaitu Q. S. an-Nisa’ (4): 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Keterpautan syariat Islam dengan sifat berkeadilan menjadikannya sebagai aturan yang umum yang disyariatkan Allah tegak di atas dasar keadilan. Oleh sebab itu tidak ada keadilan tanpa syariat Allah yang menjamin semua hak tanpa perbedaan dan rasa sungkan.²²¹

3. Tidak memberatkan dan sedikit beban.

Tidak memberatkan berarti menghilangkan kesusahan yang tidak mungkin kita akan tetap konsisten dalam ketaatan ketika ia masih ada. Maka syariat datang

²²¹ Rasyad Hasan Khalil. *Loc. Cit.*, hal. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dalam batas kemampuan seorang mukallaf, tidak di luar batas kemampuan dan sulit diemban. Dan ini tidak bertentangan dengan tabiat manusia, sebab semua pekerjaan dalam hidup ini pasti ada *masyaqqah* (beban kesulitan dan kepenatan). Semua beban ini dapat kita laksanakan dan jika ada perintah syariat, adalah sebagai ujian untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat, serta untuk melihat siapa yang beriman dan siapa yang kafir.

Syariat Islam sangat memperhatikan prinsip ini ketika memberikan perintah kepada mukallaf dan hal ini dapat dilihat dalam banyak kejadian yang berbeda-beda untuk menunjukkan hal itu, seperti dinyatakan dalam Q. S. alBaqarah (2): 286, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”, dan Q. S. al-Baqarah (2): 285, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”, begitu juga dalam Q. S. alHajj (22): 78, “Dan Dia tiada sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

Sementara itu ketika mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Mudahkanlah jangan dipersulit, berikan kabar gembira dan jangan memberitakan kabar pertakut”. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat ketika Allah swt mewajibkan haji, seorang sahabat bertanya kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, “apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Baginda menjawab, seandainya aku mengatakan ya, pastilah ia menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup, biarkanlah aku terhadap apa yang kutinggalkan karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu celaka disebabkan banyak bertanya dan berselisih pendapat dengan nabi mereka”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip menghilangkan beban berlaku untuk semua perbuatan baik ibadah, adat kebiasaan, jual beli, dan *jinayah* (kriminalitas). Dalam ibadah Allah mensyariatkan beberapa keringanan (*rukhsah*). Dia mengurangi setengah rakaat bagi sholat yang empat untuk seorang musafir dan tetap mendapat pahala sempurna agar tidak terhimpun beban yang berat berupa penatnay perjalanan.

Allah juga membolehkan bagi musafir untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan dan menggantinya setelah pulang, sama halnya dengan orang sakit agar tidak terhimpun baginya beban puasa dan letihnya perjalanan dan sakit. Sebagaimana Dia juga memberikan keruingan bagi yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dengan menggunakan tanah yang bersih. Syariat yang bijak ini juga membolehkan sholat dengan cara duduk bagi yang tidak mampu berdiri, dan jika tidak sanggup duduk karena kondisi yang sangat lemah maka cukup dengan isyarat kepala, sebagaimana syariat juga menggugurkan kewajiban haji bagi yang tidak memiliki bekal dan kendaraan.

Alam hal adat kebiasaan, Allah membolehkan bagi seorang mukallaf untuk memakan rezeki yang baik apapun yang ia suka, memakai baju yang ia suka, sebagaimana boleh memakan bangkai sebatas menyambung hidup jika memang tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa dimakan untuk menyelamatkan hidupnya, dan boleh meminum sesuatu yang haram sekedarnya jika memang tidak ditemukan air sama sekali. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul (fiqh) yang berbunyi *al-darūratu tubīh al-mahzūrāt. Wa al-darūratu tuqoddaru biqadariha* (keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya adalah dilarang, dan keadaan darurat itu diberlakukan sekedar keperkuannya).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Allah juga menghilangkan beban dalam hal muamalat, seperti jual beli salam yaitu menjual sesuatu yang tidak ada pada waktu aqad agar bisa memenuhi hajatnya dan orang kaya tetap bisa mengembangkan uangnya. Perlu diketahui bahwa *rukhsah* yang merupakan hukum pengecualian dalam syariat Islam bukan sebuah kecacatan dalam agama, namun ia sama posisinya dengan hukum asal, dan Allah sangat menyukai jika para hamba menerima pemberianNya. Nabi Muhammad *salallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai jika *rukhsah*nya diterima sebagaimana Dia juga menyukai jika yang wajib dikerjakan”. Mengambil kemudahan akan membuat seseorang hamba langgeng dalam beribadah, sehingga ketaatannya terus bertambah dan tetap konsisten dengan syariat.²²²

Tidak memberatkan sebagai asas bagi bangunan syariat Islam menuntut sedikitnya beban, sebab jika beban tetap banyak pastilah akan terjadi kontradiksi dengan prinsip menyedikitkan beban. Dan akibatnya manusia akan terjermus dalam kesusahan dan kesempitan, hal seperti niscaya tidak akan pernah ditemukan dalam prinsip syariat Islam yang mulia ini. Orang yang menelusuri semua bentuk hukum syariat akan mendapati bahwa ia dapat diketahui dan mudah untuk dilaksanakan, tidak memberatkan, dan tidak pula melahirkan rasa bosan. Jadi semua ibadah yang telah diwajibkan Allah adalah sangat sedikit dan mudah dilaksanakan. Misalnya sholat yang dikerjakan hanya menghabiskan waktu sedikit, berpuasa wajib hanya diberlakukan satu bulan

²²² Rasyad Hasan Khalil. *Loc. Cit.*, hal. 29.

saja dalam setahun, zakat hanya dikeluarkan sebagian kecil saja dari harta yang dimiliki, dan berangkat haji ke baitullah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Dan hal-hal yang diharamkan juga terbatas dan sudah dijelaskan dengan *nash*, sedangkan yang mubah tidak terhitung dan tidak terbatas. dalam Q. S. Al-Maidah (5): 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ هُمْ وَأَحْشَوْنَ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَالْمُؤَقَّدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْا إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”.

Kemudian Allah berfirman tentang hal-hal yang mubah seperti dalam Q. S. al-Maidah (5): 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka?. Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik”. Jadi Allah tidak membatasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang halal bagi kita, namun Dia menjadikannya bersifat umum selain dari apa yang sudah dijelaskan keharamannya.

Ada beberapa prinsip dasar hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain seperti dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil, antara lain:²²³

1. Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (*'adam al-ḥaraj*)

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaan dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati.

Manusia tidak bergerak mengikuti perintah kecuali kalau perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika. Hal ini adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha untuk memenuhi kehendak fitrahnya. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*".

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam ada dikenal istilah *rukhsah* (keringanan hukum), seperti dibolehkan berbuka bagi musafir yang tidak kuat berpuasa. Juga ada istilah *ḍarurat* (hukum keringanan yang berlaku pada saat keterpaksaan), misalnya dibolehkan memakan makanan yang haram dikonsumsi apabila terjadi dalam keadaan terpaksa. Dalam ayat al-Qur'an ditunjukkan bahwa beban kewajiban manusia tidaklah pernah bersifat memberatkan, seperti dinyatakan oleh Q. S. Al-baqarah (2): 286, "Allah tidak memberatkan

²²³ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal. 43-57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seseorang, kecuali dalam kemampuan untuk memikulnya, “Allah menghendaki keringanan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran Q.S. Al-Baqarah: (2): 185), “Allah tidak menghendaki untuk menjadikan suatu kesempitan bagi kamu (al-Maidah (5): 6, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Q.S. al-Hajj (22): 78.

2. Meniadakan beban (*taqlīl al-takālif*).

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi ﷺ justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum, yang sedikit tersebut justru memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk berinovasi (berijtihad). Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi manusia. Hal ini seperti ditegaskan dalam Q. S. al-Maidah (5): 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْ ءَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُم مِّن شَيْءٍ ءَلَوْ عَنهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْءَانُ تُبَدَّلَ لَكُم مِّن شَيْءٍ ءَلَوْ عَنهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ ءَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistis. Suatu ketika Nabi ditanya apakah kewajiban haji itu dilaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap tahun. Beliau menjawab, kalau pertanyaan itu saya jawab ya, maka akan menjadi kewajiban bagiku, karena itu biarkan saja selama aku meninggalkanmu. Sungguh telah rusak beberapa kaum kamu sekarang, karena terlalau banyak bertanya dan berselisih mengenai nabi-nabi mereka. Karena itu ditegaskan dalam Q. S. al-Baqarah (2); 185, “Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menhendaki kesukaran” dan Q. S. an-Nisa’ (4): 48, “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Maksudnya bahwa dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat sebagaimana dipikulkan pada bani Israil. Misalnya, menyariatkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qishah pada pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak tanpa membolehkan membayar diyat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau mengguntin kain yang terkena najis, dan sebagainya.

3. Ditetapkan secara bertahap (*tadrijiyyan*)

Tiap-tiap bangsa dan tempat memiliki kebiasaan, adat, atau tradisi. Tradisi itu ada yang bersifat mendalam, mendarah daging ataupun dangkal saja. Begitu juga halnya, bangsa Arab ketika Islam datang mempunyai tradisi atau adat yang sukar dihilangkan dalam sekejap mata. Apabila dihilangkan sekaligus akan menimbulkan konflik, kesulitan dan ketenangan batin.²²⁴

²²⁴ Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang, 1991, hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang sosiolog Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, apalagi hal baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada.

Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yangasing sama seklai bagi mereka Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, situasi dan kondisi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkan lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah menaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.²²⁵

Karena perjudian dan minuman keras telah berurat berakar dalam tradisi Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syairnya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur. Mula-mula diturunkan firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah (2): 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

²²⁵Ibid, hlm. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini belum memberikan larangan yang tegas bagi peminum khamar, tetapi baru memberitakan bahwa kerugiannya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian setelah jiwa mereka dapat mempertimbangkan untung ruginya minuman khamar, maka turun lagi Q. S. al-Nisa' (4): 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Baru setelah turun kedua ayat tersebut, Allah menurunkan ayat yang dengan tegas mengharamkan minuman keras, seperti ditegaskan dalam Q. S. al-Maidah(5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Begitu juga tentang haramnya riba yang dilakukan secara bertahap. Sebagaimana telah diketahui bahwa riba telah berlaku luas di kalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.²²⁶

Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Menurut para *mufasssir* mengatakan bahwa proses keharaman riba dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif seperti dinyatakan dalam Q. S. al-Rum (30): 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, dan para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan.

Tahap kedua, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini disampaikan dalam Q. S. al-Nisa' (4): 161. "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya,

²²⁶Ibn Abidin. *Radd al-Mukhtar 'ala add-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid IV, hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu riba yang bersifat berlipat ganda, dengan larangan yang tegas. Seperti dinyatakan dalam Q. S. Ali Imran (3): 130.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Menurut para ahli tafsir yang dimaksud riba pada ayat ini adalah riba nasikh. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mesyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat/karakteristik dari praktik membungakan uang saat itu. Dalam hal ini, Ath-Thabari menjelaskan bahwa adh’afan mudha’afatan dapat terjadi atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berutang akan memberi kelebihan ataupun pemberi utang itu sendiri meminta kelebihan atas piutangnya.²²⁷ Dengan demikian berlipat ganda sekalipun kecil, bunga tersebut tetaplah riba. Demikian pula ayat ini perlu dipahami secara komprehensif dengan surat al-Baqarah ayat 278-279.

Tahap terakhir, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surah al-Baqarah (2): 275, 276, dan 278. Dalam ayat 275 Allah menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba, dalam ayat 276 Allah menyatakan memusnahkan riba, dan dalam ayat 278 Allah menyuruh orang-orang beriman untuk meninggalkan kebiasaan riba dengan segala macam bentuknya. Keharaman riba secara total ini menurut para *fuqaha* terjadi pada akhir abad ke delapan atau awal abad ke sembilan Hijriah.

Secara lengkapnya bunyi Q. S. al-Baqarah (2): 275-279 adalah sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

²²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ayi al-qur'an*.
Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954, Jilid IV, hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَحْزَنُونَ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan kepada 3 (tiga) sendi pokok, yaitu:²²⁸

- a. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum hukum itu;
- b. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya; dan
- c. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu yang dipandang oleh Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (tahyib) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid syariah yang terdiri dari konsep

²²⁸Hasbi Ash-Shiddieqy. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan keimanan dan ketakwaan(*dien*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), perlindungan akal (*'aql*), perlindungan harta(*māl*), dan perlindungan keturunan(*nasl*).

5. Mewujudkan keadilan yang merata

Dalam syariat Islam, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Dalam khutbah haji wada' yang pengikutnya hampir seluruh orang Arab, Rasulullah bersabda, “tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang ‘Ajam”. Hal ini senada dengan Q. S. al-Maidah (5): 8 dan Q. S. al-Nisa' (4): 135.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Q. S. al-Maidah (5): 8].

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafs karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. [Q. S. al-Nisa’ (4): 135].

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:²²⁹

- a. Mewujudkan keadilan;
- b. Mendatangkan kesejahteraan;
- c. Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat;
- d. Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.

Disamping berorientasi keadilan, hukum Islam juga berorientasi pada moralitas. Keadilan dalam Islam adalah dalam menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktifitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Larangan tersebut adalah terhadap kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhli, dzalim* (segala bentuk aktifitas yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan baik bersifat jangka pendek maupun jangka pandang), *maysir* (setiap aktifitas yang mengandung unsur judi dan untung-untungan), *gharar* (setiap transaksi yang mengandung unsur

²²⁹Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fakta Keagungan Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan akan objek transaksi), dan *haram* (setiap hal yang mengandung unsur haram baik dari segi objek maupu proses pelaksanaannya).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di atas, maka Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, menyebutkan beberapa karakteristik hukum Islam, antara lain:²³⁰

a. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan tempat. Untuk hukum-hukum yang bersifat lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan perinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.²³¹

Penetapan al-Qur'an tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

b. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis dan lentur karena meliputi segala bidang dan lapangan hidup manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan

²³⁰ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 57-62.

²³¹ Anwar Haryono. *Hukum Islam: Keleluasaan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 113; dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung di dalamnya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik di bidang muamalat, ibadah, jinayat, dan lain-lain. Meskipun demikian tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.

Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses *ijtihad*, yang menurut Iqbal disebut prinsip gerak dalam Islam. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.²³²

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam kasus jual beli yang dalam pembayarannya bisa secara tunai (*naqdan/cash*), cicilan (*taqsiṭ/installment*), maupun tangguh waktu (*muajjalah/lumpsum*).

c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non Arab (*‘ajam*) tanpa memandang ras dan warna kulit. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam mempunyai sidat yang dinamis, cocok dan sesuai untuk setiap zaman.

²³² Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore, 1975, hlm. 140 dan 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran Islam yang diturunkan oleh pemilik hukum yaitu Allah, ditampung dalam wadah bernama al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an merupakan garis kebijakan Allah dalam mengatur alam semesta termasuk manusia di muka bumi ini, seperti dijelaskan dalam Q. S. Saba' (34): 28 dan Q. S. al-Anbiya' (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”. [Q. S. Saba' (34): 28]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. [Q. S. al-Anbiya' (21): 107].

d. Sistematis

Hukum Islam itu bersifat sistematis maksudnya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.²³³

Misalnya perintah sholat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Perintah makan dan minum diiringi dengan larangan sikap berlebih-lebihan. Perintah untuk infaq diiringi larangan bersikap kikir. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak

²³³Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam*, terjemahan M. Syafruddin. Jakarta: Depag RI, 1985, hlm. 259.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Begitu juga dan manusia diperintahkan untuk mencari rezeki, tetapi dilarang bersifat imperial dan monopolistik.

Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan ekonomi masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak diberlakukan hukum rajam bagi pezina kalau lokasi pelacuran, persebaran pornografi, dan kebiasaan berpakaian menutup aurat belum ditetapkan secara ideal seperti yang dikehendaki Islam. Dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantiasa bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.

e. Hukum Islam bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*

Dalam hukum Islam terdapat dua prinsip yang berbeda, untuk ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi/ghairu ma'qulāt al-ma'na/irrasional*. Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyari'atkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu *ijtihad* bagi umat manusia. Sementara itu, bidang muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aqquli/ma'qulāt al-ma'na/rasional*. Artinya umat Islam dituntut berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.

Contoh dari ibadah yang terkandung nilai-nilai *ta'abbudi/irrasional* seperti mencium *ḥajarul aswad*. Sampai suatu ketika Umar bin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khatabradiallahu ‘anhuberkata, “*kamu adalah batu biasa, seandainya Rasul tidak menciummu tentu akupun tidak akan melakukannya*”. Aspek *irrasional* dalam ibadah ini merupakan sebagian di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia.

Dari segi hukum Islam yang bersifat ”misteri” dan irrasional, aturan aturan hukum Islam itu adalah sah karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya bukan karena rasionalitasnya. Misalnya dahulu faktor penyebab diharamkannya babi bagi kaum muslimun merupakan suatu hal yang irrasional. Tetapi ketika diketahui bahwa dalam babi terdapat unsur cacing pita dan penyakit lain, maka ia berubah menjadi rasional. Namun ketika cacing pita dan penyakit lain telah dapat dibersihkan dari daging babi tersebut, maka kembali lagi masuk dalam lingkup misteri (*irrasional*).

Sementara itu menurut Alaidin Koto ada tiga watak hukum Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah, yaitu *takāmūl* (lengkap), *wasāṭiyah* (pertengahan), dan *ḥarakah* (dinamis). Watak takamul memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah ada (tradisional), dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan perubahan (modernis).²³⁴

Watak *wasāṭiyah* menghendaki keselarasan demi keseimbangan antara unsur kebendaan dan unsur kejiwaan. Hukum Islam sangat memperhatikan kedua hal ini. Watak *ḥarakah* membuat hukum Islam

²³⁴ Alaidin Koto. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 27-28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah bergerak dan berkembang secara dinamis, senantiasa hidup dan memformulasi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan secara fiqhiyah, hukum Islam bisa berubah dengan berubahnya situasi, masa, dan tempat. Adanya aturan tentang *'azimah* (hukum asal) dan rukhsah (dispensasi), menjadikan hukum Islam bisa sejalan dengan fitrah manusia dan mudah diamalkan dalam keadaan bagaimanapun.

Disamping itu, segala hukum yang dinashkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah *ma'qulat al-ma'na* (logis), sesuai dengan akal sehat yang belum dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan tertentu.

Di antara ciri khas hukum Islam adalah sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang, baik menyangkut diri, jiwa, harta, akal, maupun keyakinan, baik perorangan maupun kelompok. Manusia yang menjadi segalasan dan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Inilah watak *anthropocentris* hukum Islam. Manusia dihargai oleh hukum Islam karena kemanusiaannya, bukan karena jabatan, harta, keturunan, dan kecantikan. Hukum Islam tidak membenarkan pelecehan hak asasi dan harga diri orang lain, mengancam dan menghilangkan jiwa orang lain, pemaksaan kehendak, dan sebagainya.

Adapun menurut Yayan Sopyan, hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan hukum-hukum lain. Karakteristik itu ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adapula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridha Allah. Di antara karakteristik tersebut antara lain:²³⁵

a. Sempurna.

Syariat atau hukum Islam akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan karena syariat Islam diturunkan dalam ketentuan umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.²³⁶

b. Universal

Syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah ras, bangsa, suku, wilayah dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terbatas pada satu masa saja seperti abad ke-7 misalnya, tetapi berlaku untuk sepanjang zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para *ahli 'aqli* dan *ahli naql*, *ahl al-ra'y* atau *ahl al-hadis*.²³⁷

²³⁵Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri'. Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: GramataPublishing, 2010, hlm. 11-14.

²³⁶Fathurrahman Djamil dalam Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri'. Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 11-14.

²³⁷Hasbi ash-Shiddiqie. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Putra Toha, 1978, hlm. 105-106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku.

Karena hukum Islam bersifat universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula dengan kesempurnaannya membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam kaku, justru akan menjadikannya tidak relevan terhadap masa dan ruang tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fiqh menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relatif yang terus berubah tersebut akibat perbedaan ruang dan waktu.²³⁸ Syariat Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum dan global. Perinciannya dapat diselesaikan dengan kebutuhan manusia dan berlaku serta diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula dapat dilihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan daya hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan melalui suatu proses yang disebut *ijtihad*. Dengan *ijtihad* - yang merupakan hak bagi setiap muslim untuk melakukannya - merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang aktif, produktif, serta konstruktif.²³⁹

Sendi-sendi hukum Islam yang dinamis itu antara lain ditunjukkan hal-hal sebagai berikut:

²³⁸ Muhammad Yusuf Musa. *Al-Islam wa hajat al-insan ilaihi*. hlm. 172.

²³⁹ Fathurrahman Djamil., *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Meniadakan kepicikan. Hukum Islam ditetapkan dengan memerhatikan kemudahan dan menjauhkan kesukaran dan dapat dikerjakan oleh manusia;
- 2) Menyedikitkan beban atau tugas. Untuk memelihara dasar inilah al-Qur'an melarang para sahabat Rasulullah untuk bertanya kepada Nabi mereka mengenal hal-hal yang belum ada status hukumnya, karena masalah tersebut akan memberatkan;
- 3) Menyari'atkan hukum secara berangsur-angsur;
- 4) Memerhatikan kemaslahatan manusia;
- 5) Mewujudkan keadilan yang merata.

d. Sistematis

Artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain berkait kelindan secara logis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Lebih dari itu, syariat Islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi, namun di sisi lain tidak menghalang umatnya untuk mengurus kehidupan dunia.²⁴⁰

Perintah sholat misalnya selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah makan dan minum diiringi dengan pesan untuk mengonsumsi yang halal lagi baik dan jangan berlebih-lebihan. Demikian juga dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang

²⁴⁰Josep Schacht. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 300.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kacau, terjadi kelaparan dan kemiskinan. Tidak akan dijatuhkan hukuman keras bagi pezina dan peminum khamar bila hukum Islam masih diterapkan sebagian dan ditinggalkan bagian yang lainnya.

Bersifat *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Warna syariat Islam dapat dibedakan dengan dua kategori yaitu *ta'abbudi* yaitu beribadah kepada Allah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khlaik. Bentuk ibadah seperti dan *ta'aqquli* yaitu sudah ditetapkan tata caranya (*mahdah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana makna yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar, irrasional.²⁴¹

Sedangkan *ta'aqquli* adalah bersifat duniawi yang maknanya bisa dipahami oleh nalar manusia. 'Illat dari mu'amalat yang bersifat *ta'aqquli* dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratannya dan diperintahkan karena adanya maslahat.²⁴²

Menegakkan maslahat

Karena seluruh hukum itu harus bertumpu kepada maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Syariat berurusan dengan perlindungan maslahat, baik dengan cara positif, misalnya dengan tindakan untuk menopang landasan-landasan *masalih*, syariat mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan *masalih* tersebut. Atau dengan cara

²⁴¹ Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996, hlm. 290.

²⁴² Abdul Wahab Khalaf. *Ushul Fiqh*. Mesir: Litthiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi, 1942, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

preventif, yaitu mencegah hilangnya masalih dengan mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak *masalih*.²⁴³

90. Menegakkan keadilan

Keadilan dalam arti perimbangan lawannya adalah ketidakadilan, kerancuan. Keadilan persamaannya adalah persmaan, tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yang kemurahan Nya dalam melimpahkan rahmatnya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.

h. Tidak menyulitkan (*'adam al-ḥaraj*).

Hukum Islam itu tidak sempit, kaku dan memberatkan. Di antara cara meniadakan kesulitan itu adalah dengan cara:

- 1) Pengguguran kewajiban, seperti gugurnya kewajiban sholat Jum'at dan gugurnya puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang bepergian dan menderita sakit.
- 2) Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti sholat qasar menjadi dua raka'at dari empat rakaa'at pada sholat zuhur, ashar, dan 'isya.
- 3) Penukaran, seperti wudhu' atau mandi wajib/besar ditukar dengan tayammum. Atau menukar kewajiban puasa di bulan Ramadhan dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan pada bulan Ramadhan.

²⁴³ Pendapat ini disadur oleh Muhammad Khalid Mas'ud dari pendapat al-Syatibi. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996, hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mendahulukan, seperti melakukan kewajiban sebelum datang waktu mengerjakannya seperti sholat *jama' taqdim*, sholat Ashar yang dilaksanakan pada waktu zuhur, melaksanakan sholat 'Isya pada waktu sholat Maghrib.
- 5) Menangguhkan atau mentakhirkan kewajiban, seperti sholat *jama' ta'khir*. Seperti melaksanakan sholat zuhur di waktu ashar, mengerjakan sholat Maghrib di waktu 'Isya'.
- 6) Mengubah dengan bentuk lain, seperti sholat khauf karena alasan keamanan atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi berpuasa dengan membayar *fidyah*.

i. Menyedikitkan beban (*taqlīl al-takālīf*).

Yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Berangsur-angsur

Hukum Islam dibentuk secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Di antara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah sholat. Pertama sekali hanya dua waktu, kemudian tiga waktu, dan akhirnya lima waktu. Contoh lain adalah pengharaman riba. Pertama sekali hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian riba yang dilarang hanya yang berlipat ganda, terakhir dikatakan haram secara mutlak. Demikian juga terhadap pelarangan minuman khamar. Di tahap awal dikatakan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, kemudian dikatakan larangan untuk mendekati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholat dalam keadaan mabuk, dan terakhir diharamkan secara mutlak bahkan dikatakan sebagai perbuatan setan.

Secara sosiologis hukum memiliki dua fungsi, pertama sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*), dan kedua sebagai alat pengatur perilaku sosial (*social kontrol*).²⁴⁴ Dalam fungsi pertama, hukum menepati posisi sebagai pengubah struktur sosial atau dengan kata lain perubahan sosial mengikuti perubahan hukum, sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peranan untuk membawa masyarakat dalam satu tatanan baru. Contoh seperti ini terlihat dalam upaya mengubah tatanan masyarakat jahiliah menjadi tatanan baru yakni masyarakat Islam. Dalam fungsinya yang kedua, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum mengikuti kepada perubahan sosial. Contoh ini terlihat di Indonesia seperti hukum pada masa kolonial Belanda masih diberlakukan ketika Indonesia merdeka.

Hukum Islam sebagai sebuah sistem yang berlandaskan wahyu ilahi tidak terlepas dari peran-peran dan fungsi di atas. Pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam masyarakat, sementara di sisi lain hukum Islam merupakan alat kontrol yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar.

²⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1988, hlm 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam posisi pertama, aturan-aturan ilahi yang terdapat di dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, yang diwujudkan dalam kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam posisi kedua, hukum Islam berfungsi menjawab segala tantangan yang muncul dalam masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat, kendati nas-nas kitab suci dan hadits-hadits jumlahnya terbatas, hukum Islam memiliki dinamika di dalam *ijtihad*. Setiap kali muncul tantangan baru, dijawab oleh para ulama dengan menggali hukum dari sumber-sumbernya dengan menggunakan *ijtihad*.²⁴⁵

Dalam konteks pembicaraan hukum Islam (*syari'ah*), tidak pernah terlepas dari teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Secara umum tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. Oleh karena itu *rahmatan lil 'ālamīn* adalah inti *syari'ah* atau *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

Atas alasan itulah, ulama hukum Islam mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi suatu konsep aplikatif seperti yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi. Menurut tujuan utama dari *syari'ah* adalah kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat secara keseluruhan.

²⁴⁵ Fathurrahman Djamil. *Op. cit.*, hlm. 62-63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa: “Syariah berlandaskan kepada kebijakan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Kesejahteraan dimaksud meliputi rasa keadilan, kasih sayang, kebaikan, serta kebijaksanaan. Apapun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, darikasih sayang ke kebencian, dari kesejahteraan ke kesengsaraan, dan dari kebijaksanaan ke kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah”.²⁴⁶

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas (penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) dibedakan menjadi tiga perangkat *ḍaruriyāt*, *ḥajiyāt*, dan *taḥsiniyāt* yang didasarkan atas tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya tatkala masalah yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *ḍaruriyāt* menempati peringkat pertama, disusul oleh *ḥajiyāt*, dan selanjutnya oleh *taḥsiniyāt*. Namun di sisi lain terlihat bahwa peringkat terendah melengkapi peringkat di atasnya, dan begitu seterusnya sampai pada peringkat tertinggi.

Yang dimaksud memelihara kebutuhan kelompok *dharuriyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Sebagai contoh, misalnya syariah mengenai kewajiban *jihād* dan *qisās*. Tujuan dari adanya jihad adalah untuk melancarkan jalan dakwah

²⁴⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *I’lām al-muwāqī’īn ‘an rabbi al-‘ālamīn*. Beirut: Dar al-Fikr, 155, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilamana terjadi hambatan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah agar terjaganya agama Allah di muka bumi. Tujuan qisas agar ancaman terhadap umat manusia dapat dihilangkan agar terjaganya jiwa atau nyawa manusia. Hal serupa juga diberlakukan terhadap pelanggaran mencuri, membunuh, dan meminumkhamar. Tujuannya agar terjamin keselamatan atau terlindungi harta, serta terpelihara jiwa, akal, dan kesehatan manusia.

Berbeda dengan kelompok *dharuriyāt*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyāt* tidaklah termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan yang ada dalam kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Dalam bidang muamalah misalnya disyari'atkan banyak aqad dan beberapa rukhsah, bertujuan agar dalam aktifitas ekonomi manusia memiliki pilihan-pilihan dalam melakukan transaksi sehingga terdapat kemudahan.

Sementara itu, kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyāt* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Rabbnya sesuai dengan kepatutan.

Pada hakikatnya, baik kelompok *daruriyāt*, *hajiyāt*, maupun *tahsiniyāt* dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok, seperti yang diwujudkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain, di mana untuk tingkat yang pertama bersifat primer,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kedua bersifat sekunder, dan tingkat ketiga bersifat *komplementer*. Sebagai contoh untuk memelihara diri, harta, keturunan, aspek *darūriyāt*nya adalah mendirikan tempat berteduh. Tempat berteduh merupakan aspek *darūriyāt*, menjelmakannya menjadi rumah merupakan aspek *hajiyyāt*, dan keharusan memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau surat izin memiliki rumah merupakan aspek *taḥsiniyāt*. Apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai memelihara kebutuhan dasar *five basic needs* secara sempurna maka ketiga tingkat maqasid di atas tidak dapat dipisahkan. Tingkat *taḥsiniyāt* adalah menyempurnakan tingkat *hajiyyāt*.

Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* berusaha menjaga harmonisasi secara mantap, integral, dan berkesinambungan antara kelima hal tersebut. Apa saja yang dapat memantapkan perlindungan kelima hal tersebut, merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Misalnya, kewajiban zakat sebagai suatu ketetapan hukum, memiliki tujuan dan hikmah sebagaimana tujuan dari suatu hukum ditetapkan, yaitu dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Persoalannya adalah bagaimana tujuan dari suatu ketetapan hukum tersebut dapat tercermin dalam legal formal (*fiqh*) membawa pada tujuan utama syariah tersebut. Pada tataran ini, peran mujtahid untuk mengungkap tujuan dan hikmah dari suatu ketetapan hukum akan sangat penting.²⁴⁷

²⁴⁷ Fathurrahman Djamil. *Op. cit.*, hlm. 66-68.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam itu sendiri dapat dipahami melalui proses penalaran atau *ijtihad*. Dalam perkembangannya, masing-masing periode terbentuknya hukum Islam memiliki corak dan dinamika tertentu, sehingga hukum Islam beserta konsep-konsepnya akan semakin kokoh dan mantap dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi manusia.²⁴⁸

Sehubungan persoalan umat semakin berkembang dan tidak mungkin semuanya tercover dalam al-Qur'an dan Hadits, maka jauh-jauh hari Rasulullah *ṣalallāhu 'alaihi wasallam* telah memberi contoh melalui dialognya dengan Mu'az ibn Jabal, bahwa penyelesaian persoalan umat itu berpedoman kepada al-Qur'andan Hadits, dan kalau tidak bisa deketemukan solusinya, maka diselesai melalui *ijtihad*²⁴⁹, yang tentu saja tidak boleh bertantangan dengan kedua sumber utama tersebut.

E. Metode-Metode Untuk Mengetahui *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Ijtihad memegang peran sangat signifikan dalam pengembangan hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Syahrastani (w. 548 H) dan Abdul Wahhab Khallaf, yang kemudian berkembang menjadi adagium di kalangan hukum Islam yaitu: “Teks-teks atau *nash* itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan *ijtihad* (*qiyās*) untuk menginterpretasi teks/nas yang terbatas, agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam teks dapat dicari pemecahannya.”²⁵⁰

²⁴⁸ Muhammad Ali al-Sayyis. *Nasy'atu al-fiqh li al-Ijtihād wa al-taṭawwuruh*. Terjemahan M. Ali Hasan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 20.

²⁴⁹ Ijtihad secara istilah artinya adalah mencurahkan segala kesanggupan oleh seorang faqih untuk memperoleh kesimpulan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'.

²⁵⁰ Al-Syahrastani. *Al-milal wa al-nihal*. Mishr: Mustafa al-baby al-halabi, 1967, hlm. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara langsung sejumlah kasus hukum dan solusinya. Dalam konteks ini, maka pintu ijtihad terbuka bagi mereka yang memiliki pemahaman ilmu agama yang diperlukan. Tujuannya untuk memberi solusi hukum bagi masyarakat Islam di setiap zaman dan generasi yang berbeda.

Dalam melakukan ijtihad, upaya yang dilakukan adalah dengan cara menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum dari dalilnya (*thuruq al-istinbat*). Ilmu yang membahas tentang istinbat hukum atau metodologi pengalihan hukum dinamakan *usūl fiqh*. Di dalamnya antara lain dibahas tentang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya. Sedangkan untuk memahami syari'at, para ahli *usūl fiqh* menggunakan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).²⁵¹

Kedua pendekatan atau metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pendekatan kebahasaan/metode bayani. Yaitu pendekatan dalam khazanah *usūl fiqh* yang sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyah al-lughawiyyah* atau *dilālāh al-lafẓ*. Yaitu metode istinbat melalui penafsiran terhadap kata-kata yang digunakan dalam *nas* dan susunan kalimatnya sendiri. Kaidah-kaidah yang dipakai ini adalah seperti yang digunakan oleh ulama/pakar bahasa Arab.²⁵²

²⁵¹Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996, hlm. xi-xiii.

²⁵²Abdul Wahab Khallaf. *Ilm usul al-fiqh*. Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* atau dikenal juga dengan metode *ta'fil*. Yaitu penggunaan metode dengan mencari dan menemukan alasan dari pensyari'atan dari suatu hukum. Hal ini berdasarkan alasan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia itu logis dan ada hikmah disebalik pensyari'atannya. Sebab Allah tidak akan menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan tertentu. Setiap perintah dan larangan memiliki alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian dari padanya disebutkan langsung di dalam al-Qur'an dan Hadits. Sebagian lagi disyari'atkan saja tanpa disebutkan alasannya (*'illat*), dan sebagian lagi perlu dicari alasannya.²⁵³

Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain bahwa setiap hukum pastilah mengandung hikmah yakni mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Allah tidak mungkin menetapkan suatu hukum, kecuali untuk kemaslahatan hambaNya.²⁵⁴

Dalam satu kaidah fiqhiyyah disebutkan: "*al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdun wa 'adaman*", artinya hukum itu ditentukan atau berputar bersama 'illatnya, jika dia (*'illat*) ada maka hukum ada, jika dia tidak ada maka hukumpun tidak ada. Secara umum *illat* artinya adalah sebab, alasan, dan latarbelakang.

Adapun menurut istilah, *illat* didefenisikan oleh para ahli usul dengan berbagai defenisi, misalnya sebagai berikut.

²⁵³ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-muwaqī'in*. Beirut: Darl Kutub al-Ilmiyyah, t.t., jilid I, 196.

²⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fī usūl al-syarī'ah*. *Al-Qahir: Mustafa Muhammad*, t.t., 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Abdul Kafi al-Subki (w. 576 H) dalam kitabnya *al-Ibhāj fi syarḥ al-minhāj* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'illat hukum ialah *al-mu'arraf*, yaitu memberitahukan, *al-'alāmah*, yaitu tanda, indikator, dan kadang-kadang 'illat disebut juga *al-muashshir fi al-hukm*, yaitu mempengaruhi lahirnya ketetapan hukum.²⁵⁵

Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifāt* menyebutkan bahwa 'illat secara bahasa berarti sesuatu yang berada di atas suatu tempat, lalu diubahnya kondisi di tempat itu. 'Illat dinamakan juga penyakit, karena ia mengubah kondisi fisik seseorang dari kuat menjadi lemah.²⁵⁶

Menurut Ibn Hajib al-Amidi, 'illat adalah motivasi atau pendorong adanya hukum yang menjadi motivator terbentuknya hukum melalui *qiyās*. Khallaf memberikan pengertian bahwa 'illat adalah suatu sifat jelas yang menetapkan dan sesuai dengan hukum.²⁵⁷

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 'illat suatu kualitas yang nyata, tampak (*zahir*), dapat diukur (*muḍābit*), dan memiliki relevansi (*munāsib*) sehingga menjadi alasan adanya suatu hukum.

Jumhur ulama memberlakukan syarat-syarat yang ketat untuk menyebut bahwa sesuatu itu bisa disebut 'illat, yaitu:²⁵⁸

Pertama, kualitas yang diajdikan 'illat harus memungkinkan diindra dan diteliti (*al-zahir*). Sebab kegunaan 'illat adalah mencari suatu kualitas pada

²⁵⁵ Ahmad Abdul Kafi al-Subki. *Syarḥ matan jāmi' al-jawāmi'*. T.tp.: Maktabah Dar Ihya', t.t., jilid II, 231.

²⁵⁶ Muhammad al-Jurjani. *Kitab al-Ta'rifāt*. Jeddah: t.p., t.th., hlm. 154.

²⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Usūl al-Fiqh*, dalam Alimuddin, "Pendekatan 'Illat Hukum dalam Penalaran Fiqh", al-Risalah, V. 10, tahun I, Mei 2010, hlm. 83-85.

²⁵⁸ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajīz fi Usūl al-fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996, cetke-5, hlm. 204-207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok (*aṣl*) untuk diterapkan pada kasus baru (*al-far'u*). Oleh karena itu suatu kualitas yang tidak dapat diindra dan diteliti tidak dapat dijadikan '*illat* apabila menggunakan penemuan hukum dengan cara *qiyās*. Sebagai contoh '*illat* memabukkan akibat meminum khamar menimbulkan hukum haram. Sifat memabukkan merupakan suatu kualitas yang tampak (*ẓahir*) karena dapat diindra, dilihat, dan diteliti.

Kedua, kualitas itu harus dapat diukur (*munḍabīṭ*). Kualitas yang tidak dapat diukur tidak dapat dijadikan '*illat*, karena bagaimana mungkin seseorang menyamakan suatu kasus dengan yang lain kalau ia tidak memiliki standar, contohnya sama seperti di atas yaitu keadaan mabuk yang menjadi standar keharaman meminum atau mengonsumsi sesuatu. Keadaan mabuk itu dapat diukur (*munḍabīṭ*).

Ketiga, kualitas yang dijadikan '*illat* harus sama atau setara (*munāsib*), dan '*illat* tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'at. Hubungan ada atau tidak adanya hukum harus sesuai dengan tujuan syara', yakni menarik atau mendatangkan masalah dan menolak mafsadat. Contoh '*illat* tentang keharaman khamar adalah keadaan memabukkan. Maka hal ini sudah sesuai dengan tujuan syara' yakni menjaga akal agar tidak rusak akibat khamar, sehingga siapa saja yang meminum ataupun memakan sesuatu yang memabukkan hukumnya haram.

Kemudian, selanjutnya isu-isu yang perlu dikembangkan agar jangkauan hukum lebih meluas dan dapat diterapkan pada kasus baru (*furu'*) adalah pada wilayah '*illat* mustanbatah. Dan untuk mengetahui kualitas suatu '*illat*, maka para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama usul fiqh mengembangkan teori-teori pengujian illat hukum yang dikenal dengan nama *masālik al-‘illah*.

Masālik al-‘illah merupakan suatu metode untuk mengetahui ‘*illat* hukum atau dengan kata lain ialah cara-cara untuk mengetahui hal-hal yang dianggap oleh syar’i sebagai ‘*illat* hukum dan yang tidak dianggap oleh syar’i sebagai ‘*illat* hukum. Para ulama *usūl al-fiqh* telah menetapkan bahwa cara untuk mengetahui sifat yang dijadikan sebagai ‘*illat* itu merupakan cara yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ada *naşş* mengenai hukumnya. *Masālik al-‘illah* ini dibutuhkan dalam penerapan suatu hukum atau dengan kata lain *masālik al-‘illah* erat kaitannya dengan ijtihad. Sebab dengan *Masālik al-‘illah* dapat diketahui apakah suatu kasus yang belum ada hukumnya dalam *naşş* dapat dihukumkan sama dengan hukum lain yang sudah ada *naşş*nya.²⁵⁹

‘*Illat* merupakan hal yang penting dan fundamental, karena merupakan barometer dalam *istinbat al-hukm*. Para ulama usul bersilang pendapat dalam menentukan *manāṭ al-hukm* (pijakan hukum) antara ‘*illat* dan hikmah. Sebagian ahli usul umumnya menegaskan bahwa hukum syara’ sejatinya tergantung pada ‘*illat*, bukan pada hikmahnya. Karena menjadi suatu keniscayaan, ketika ‘*illat* ada maka hukum ada, dan ketika ‘*illat* tidak ada maka hukum pun menjadi hilang. Mayoritas ulama tidak menjatuhkan pilihan pada hikmah sebagai ‘*illat al-hukm* dengan argumentasi bahwa hikmah kadang-kadang tersembunyi, tidak jelas, dan terkadang hikmah merupakan sesuatu yang merujuk pada penilaian orang

²⁵⁹Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Terjemahan Saifullah Maksum. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th., hlm. 373.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, dan sudah dapat dipastikan orang banyak, selalu berbeda pendapat dalam menentukan hikmah (kemaslahatan).²⁶⁰

Ulama usul fiqh menyatakan bahwa apabila disebut ‘illat, maka yang dimaksud adalah:

1. Suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Misalnya tercapainya manfaat bagi orang-orang yang melakukan jual beli, karena jual beli itu dibolehkan. Atau terpeliharanya keturunan dengan mengharamkan perbuatan zina, terpeliharanya akal manusia dengan diharamkan minum minuman khamar. Ahli usul fiqh menegaskan bahwa berdasarkan induksi terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam hadits Rasulullah *ﷺ* ‘alaihi *wasallam*, seluruh hukum untuk mencapai dan menjamin kemaslahatan umat manusia seluruhnya, baik di dunia dan di akhirat dan menghindarkan serta menolak berbagai bentuk kemudharatan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah *subhānahu wa ta’āla* dalam Q. S. al-Anbiya’ (21): 107: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Dengan demikian menurut ulama usul fiqh pada setiap hukum syara’ itu terkandung motivasi untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi menurut mereka, tolok ukur dalam menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat adalah kehendak syarak, bukan diukur dari keinginan umat manusia. Karena masing-masing umat manusia berbeda dalam menentukan kemaslahatan atau kemudharatan sesuatu

²⁶⁰Harun al-Rasyid. *Op. cit.*, hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebabkan oleh pengaruh berbagai situasi dan kondisi pribadi beserta lingkungannya. Adapun syarak dalam melihat suatu kemaslahatan atau kemudharatan, senantiasa bertolak dari kepentingan individu dan masyarakat.

2. Sifat zahir yang dapat diukur yang sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai suatu kemaslahatan, baik berupa manfaat maupun menghindari kemudharatan bagi umat manusia. Pengertian sifat yang zahir adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia dan berlaku umum untuk setiap individu. Misalnya pencurian, pembunuhan secara sengaja, dan perzinaham merupakan sifat yang dapat diukur dan dinalar oleh akal manusia dan berdasarkan sifat itu disyari'atkan hukum potong tangan bagi pencuri, qisas bagi pembunuhan sengaja, dan dera atau rajam bagi pelaku zina. Kemaslahatan yang akan dicapai dari penerapan hukum ini adalah terpeliharanya harta, jiwa, dan kehormatan seseorang, bahkan lebih jauh lagi terpeliharanya stabilitas masyarakat. Dalam jual beli, sekalipun yang menjadi unsur utamanya adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, namun karena sifat sukarela itu termasuk permasalahan batin yang sulit untuk ditangkap, maka syariat Islam menggantikannya dengan ijab dan kabul. Dari ijab dan kabul inilah diketahui sifat sukarela tersebut, sehingga ia dapat diukur.

Dari penjelasan ulama usul fiqh tentang illat dalam kedua bentuknya di atas, maka illat tersebut adalah berupa hikmah dan sifat zahir dari suatu hukum. Dengan demikian, maka yang dikatakan 'illat dalam pelaksanaan dera dalam tindak pidana perzinahan adalah untuk memelihara keturunan atau menghindari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buatan zina itu sendiri. Akan tetapi ulama usul fiqh menekankan bahwa illat itu secara khusus adalah sifat zahir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum. Adapun hikmah, menurut mereka adalah sesuatu yang muncul akibat adanya hukum itu berupa suatu kemaslahatan, baik berbentuk manfaat atau berbentuk penolakan terhadap kemudharatan.²⁶¹

Dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan *'illat*, perbedaan pendapat ulama dalam menentukan pilihan antara sifat zahir dalam suatu hukum dan hikmah suatu hukum. Jumhur ulama usul fiqh menyatakan bahwa yang dijadikan patokan itu adalah sifat zahir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum, baik sifat itu terkait dengan permasalahan batin, tetapi bisa dinalar, seperti bisa dinalar seperti sukarela dalam jual beli yang bisa langsung bisa ditangkap panca indra seperti pembunuhan dan pencurian maupun yang ditentukan oleh *'urf*, seperti persoalan baik dan buruk dalam ukuran masyarakat pada suatu tempat. *'Illat-illat* seperti inilah menurut jumhur ulama yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu hukum.

Adapun hikmah yang terdapat dalam suatu hukum, adakalanya bisa dinalar bahwa ia berkaitan dengan hukum, karena menjadi motivasi untuk menentukan suatu hukum. Akan tetapi hikmah itu sendiri terkadang sulit diukur dan ditangkap panca indra, karena berbeda antara satu individu dengan lainnya dan satu tempat dengan tempat lainnya. Oleh sebab itu, hikmah tidak bisa dijadikan patokan hukum. Misalnya jual beli itu disyariatkan dengan hikmah untuk menghindari kesulitan serta untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Akan tetapi ada jual

²⁶¹ Abdul Aziz Dahlan (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1986, hlm. 697.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli yang dilakukan bukan untuk menghindari kesulitan ataupun memenuhi kebutuhan. Bolehnya berbuka puasa bagi musafir merupakan hikmah untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dari mereka. Akan tetapi kesulitan itu sendiri bisa berbeda untuk setiap orang dan keadaan. Para hartawan yang pergi dengan menggunakan pesawat terbang tidak akan mengalami kesulitan dalam perjalanan. Berbeda dengan mereka yang menggunakan angkutan darat yang akan mengalami banyak kesulitan. Keadaan yang sama berlaku terhadap kesulitan yang dialami ketika bepergian pada musim dingin akan pasti berbeda dengan musim panas.

Ibnu Asyur merumuskan metode yang digunakan untuk mengetahui adanya *Maqāṣid al-Syarī'ah*, antara lain sebagai berikut:

1. Istiqra'. Yaitu melakukan penelitian secara cermat terhadap perbuatan-perbuatan syara', yang terbagi kepada dua macam:
 - a. Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui 'illatnya dengan berpedoman pada 'illat-'illat yang sudah ditetapkan melalui metode-metode masalik *al-'illat* (cara-cara untuk mengetahui 'illat). Karena cara semacam ini merupakan langkah termudah untuk mengetahui *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Seperti jika diketahui bahwa 'illat larangan dalam jual beli *muzabanah, jazaf* (jual beli yang tidak diketahui takaran, hitungan atau timbangannya) adalah unsur ketidaktahuan pada salah satu barang yang ditukarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan syara'nya adalah menolak spekulasi dalam transaksi mu'awadah (saling tukar menukar barang). Sehingga bisa dipahami bahwa setiap transaksi mu'awwadhah yang mengandung spekulasi, baik pada alat tukar, barang ataupun waktu yang bertempo a dihukumi batal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meneliti dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan ‘illat sehingga melahirkan kepastian bahwa ‘illat itu menjadi tujuan yang dikehendaki syar’i. Seperti ‘illat larangan menjual makanan yang belum berada dalam genggamannya adalah supaya makanan tetap tersedia dan beredar di pasaran.

Begitu pula ‘illat larangan menjual makanan dengan makanan secara bertempo adalah agar makanan tidak tetap dalam tanggungan kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga mengakibatkan kemandekan dalam peredarannya. Demikian juga ‘illat larangan penimbunan makanan adalah agar stoknya tidak berkurang beredar di pasar. Berdasarkan pada ‘illat larangan-larangan ini maka bisa dipastikan bahwa tujuan syara’ dalam masalah ini adalah supaya makanan tetap dapat beredar dan mudah diperoleh masyarakat.

- c. Menggunakan dalil-dalil al-Qur’an yang jelas *dalalahnya* sehingga menjadi jelas apa yang menjadi tujuan syara’. Al-Qur’an dari segi turunnya adalah mutawatir lafdzi bersifat qoth’i sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti, tiada keraguan lagi mengenai kebenarannya. Tetapi dari segi dalalah ia bersifat zhanni sehingga membutuhkan dalalah yang jelas untuk menghasilkan pemahaman yang kuat.

Sebab itulah jika kekuatan dzhanni al-dalalah menyatu dengan qathh’i matan maka menghasilkan tujuan syara’ yang bisa menepis persilangan pandangan di antara para fuqaha’. Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا بِكُمُ الْعُسْرَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran”.

Berbicara tentang suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan (*maqāṣid al-syarīʿah*), maka ada beberapa ayat dari al-Qurʿan dan Hadits Rasulullah *ṣallallahu ʿalaihi wasallam* yang menerangkannya antara lain:

- 1) Allah *subḥānahu wa taʿāla* menyebutkan hikmah (*maqāṣhid*) diturunkannya agama Islam, yaitu sebagai petunjuk, rahmat dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Allah berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q. S. Yunus [10]: 57).
- 2) Allah *subḥānahu wa taʿāla* menyebutkan *maqāṣid* diturunkannya syariat adalah bukan menjadi beban dan kesulitan. Akan tetapi untuk mensucikan dan menyempurnakan kenikmatanNya. Allah berfirman: “..... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q. S. al-Maidah [5]: 6).
- 3) Allah *subḥānahu wa taʿāla* menyebutkan *maqāṣid* diutusnya Nabi Muhammad *ṣallallahu ʿalaihi wasallam* adalah sebagai rahmat untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semesta alam. Seperti tertera dalam al-Qur'an: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q. S. al-Anbiya' [21]: 107).

- 4) Allah *subhānahu wa ta'āla* menyebutkan *maqāsid* diperintahkanNya sholat dalam firmanNya: "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar". (Q. S. al-Ankabut [29]: 45).
- 5) Allah *subhānahu wa ta'āla* juga menyebutkan *maqāsid* diperintahkanNya berpuasa dalam firmanNya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (Q. S. al-Baqarah [2]: 183).
- 6) Allah *subhānahu wa ta'āla* juga menjelaskan salah satu alasan disyari'atkannya zakat yaitu: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q. S. al-Taubah [9]: 103).
- 7) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyebutkan alasan kenapa dilarang memakan daging hewan qurban jika telah lewat tiga hari: "Sungguh saya melarang kalian menyimpan daging lebih dari tiga hari disebabkan paceklik. Namun sekarang makanlah, simpan, dan sedekahkanlah".²⁶²

²⁶²Sahih Muslim (3/1561) no. 1971.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyebutkan hikmah (*maqāshid*) puasa dan pernikahan bagi pemuda; “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mempunya *al-bā’ah* (kemampuan berjimak) maka hendaklah dia segera menikah, karena dengan perbuatan tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluaan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena baginya (berpuasa) menjadi tameng.”²⁶³
- 9) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyebutkan *maqāshid* meminta izin ketika bertamu: “Sesungguhnya meminta izin disyariatkan untuk menjaga pandangan”.²⁶⁴
- 10) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyebutkan *maqāshid* diharamkannya menikahi seorang wanita dan saudari ibunya (bibi) sekaligus, seperti sabdanya: “Jika kalian para wanita melakukan hal tersebut, maka kalian memutuskan tali kasih sayang di antara kalian”.²⁶⁵
- 11) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyebutkan *maqāshid* dilarangnya berbuat sesuatu yang membahayakan, seraya bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan”.²⁶⁶
- 12) Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjelaskan alasan mengapa beliau tidak ingin memugar Ka’bah, tatkala berkata kepa ‘Aisyah *radiallāhu ‘anha*: “Seandainya bukan karena kaummu baru saja terlepas

²⁶³ Sahih Muslim (2/1018) no. 1400.

²⁶⁴ Sahih al-Bukhari (5/2304) no. 5887.

²⁶⁵ Ibnu Hibban (9/426) no. 4116.

²⁶⁶ Al-Mustadrak ‘ala as-Shahihaini (2/66) no. 2345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekufuran, maka saya akan membangun Ka'bah di atas dasar-dasar yang telah dibangun oleh Ibrahim 'alaihissalam".²⁶⁷

- 13) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menuturkan alasan beliau tidak membunuh orang-orang munafik, walaupun nama-nama mereka dan kemunafikannya sudah diketahui. Beliau berkata kepada para sahabat, "Saya khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya".²⁶⁸

Masih banyak lagi *nash* al-Qur'an dan Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di mana Allah menyatakan dengan jelas hikmah atau tujuan dari suatu perintah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Allah tidak mensyariatkan sesuatu tanpa ada hikmah di balik hal tersebut. Boleh jadi hikmah tersebut dapat diketahui dan dilihat oleh akal manusia ataupun tidak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama mempunyai peran yang sangat besar dalam menyusun karya-karya khusus seputar *maqāṣid al-syarī'ah*. Di antara kutipan perkataan mereka seperti:

- 1) Imam al-Haramain al-Juwaini menjelaskan tujuan takbir dalam sholat. Pada waktu yang sama, ia mengkritisi pihak yang berpendapat bahwa tidak ada tujuan dan hikmah sama sekali di dalam takbir. Ia berkata: "Orang-orang yang berpandangan bahwa tidak ada hikmah dibalik takbir telah mendeklarasikan kejahilan diri mereka terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan

²⁶⁷ Al-Mu'jam al-Aushat (7/238) no. 7379.

²⁶⁸ Shahih al-Bukhari (4/1861) no. 4622, dan Shahih Muslim (4/1998) no. 2584.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkara-perkara *maqāṣid* yang berkaitan dengan perintah dan larangan kepada manusia”.²⁶⁹

2) Imam al-Ghazali berkata, “Terdapat lima tujuan dihadirkan syariat bagi manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan”.²⁷⁰

3) Al-‘Izzu al-Din ‘Abd al-Salam berpandangan, “Motivasi utama sebuah perintah yaitu mewujudkan *maṣlaḥat* dan sebab-sebabnya, serta menghindari *mafsadat* dan sebab-sebabnya”. Lanjutnya, “Jika kita memerhatikan dan mencermati maqasid yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, kita akan berkesimpulan bahwa Allah selalu menyeru kepada semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Kebaikan artinya mewujudkan *maṣlaḥat* dan menjauhi *mafsadat*, sementara keburukan berarti mengundang *mafsadat* dan menjauhi *maṣlaḥat*.”²⁷¹

4) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Mempelajari dan memahami analogi (*qiyas*) tentang yang benar dan yang buruk termasuk ilmu yang sangat penting. Hal ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan terhadap rahasia-rahasia *maqāṣid al-syarī’ah* yang jumlahnya tidak terhitung, mencerna dengan baik *maṣlaḥat* kemanusiaan yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada syari’at Allah itu banyak hikmah yang agung, rahmat yang luas, dan keadilan yang sempurna.

²⁶⁹ Al-Burhan, al-Juwaini (2/624).

²⁷⁰ Al-Mustashfa, al-Gazali (1/174).

²⁷¹ Al-‘Izzu al-Din ‘Abd al-Salam. Qowa’id al-Ahkam (1/7) dan (2/160).

F. Kedudukan *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam

1. Hubungan *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan Dalil-dalil Hukum lainnya

Adanya hubungan sinergis antara *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan *Uṣūl al-fiqh* merupakan suatu keniscayaan pada setiap konsep pemikiran yang dilandaskan pada syari'at Islam.²⁷² Kita akan selalu menjumpai spirit pemikiran *maqāshid* pada setiap dalil atau metode penetapan hukum yang terdapat di dalam *uṣūl al-fiqh*. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pemikiran *maqāshid* merupakan cara berpikir yang berpijak pada serangkain dalil-dalil hukum Islam yang diakui legitimasinya oleh ulama.

Adapun dalil-dalil atau sumber Hukum Islam yang menjadi semangat pemikiran *Maqāshid al-Syarī'ah* tersebut antara lain:²⁷³

- a. Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya adalah dalil yang merupakan wahyu yang menjadi sumber utama hukum Islam. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak sekedar memuat nilai-nilai *maqāshid*, melainkan menjadi muara pertama munculnya *maqāshid al-Syarī'ah*. Karena kehadiran al-Qur'an dan Sunnah mewakili kehendak, maksud dan tujuan Allah *subhānahu wa ta'ālā* dalam mensyari'atkan hukum Islam bagi umat manusia.
- b. Ijma', yaitu kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid dalam memecahkan persoalan baru yang muncul sepeninggal Nabi *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam* dan tidak direspon oleh dalil wahyu. Ijma' diakui oleh imam-imam mujtahid sebagai dalil hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah, karena apa

²⁷² Abdullah ibn Bayyah, *'Alaqah Maqasid al-Syari'ah bi Usul al-Fiqh*. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006, hlm. 44.

²⁷³ Farida Ulvi Na'imah (Eds.), *Pengantar Maqashid al-Shariah*. Malang: Literasi Nusantara 2019, hlm. 12-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi maksud, tujuan dan *illah* sudah terungkap dan disepakati oleh mujtahid pada suatu masa. Pengajuan *ijma'* sebagai acuan hukum tidak lain adalah pelandasan hukum kepada *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Qiyas. Dalil ini diakui oleh semua Imam mazhab kecuali mazhab *Zhāhiri* dan *Syi'ah*. Sebagaimana spirit *maqasid* dalam *ijma* yang menitikberatkan pada kepada *illah* hukum. Pada dalil qiyas ini keberadaan '*illah* menjadi penentu utama penetapan hukum. Konsep qiyas adalah menganalogikan hukum atas persoalan baru dengan persoalan lama yang sudah dinyatakan hukumnya oleh *nash* apabila kedua persoalan tersebut terindikasi mempunyai '*illah* yang sama.

d. Istihsan, yaitu metode ijtihad dengan meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syari'at, menuju hukum lain yang dipandang lebih relevan (kuat) menurut syari'at, yaitu hukum yang lebih menempatkan nilai kebaikan, dan tidak mempersulit atau menambah beban bagi kehidupan manusia. Pencapaian suatu kebaikan dalam metode rintisan Abu Hanifah ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan puncak *maqāṣid al-Syarī'ah*.

e. *Maṣālih mursalah*. Metode yang dirumuskan oleh Malik ibn Anas ini juga mengacu pada nilai kemaslahatan walaupun tidak dinyatakan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Nilai kemaslahatan layak dijadikan sebagai acuan hukum, subab ia tujuan universal yang mewakili substansi syariat.

f. *'Urf*. Yaitu penetapan hukum yang mengacu kepada praktik tradisi atau adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penetapan hukum berlandaskan ‘urf merupakan merupakan bentuk pengamalan *Maqāshid al-Syarī’ah* karena: 1. pengakuan terhadap suatu tradisi berartitelah mengakomodasi terciptanya kenyamanan dan ketentraman di masyarakat yang merupakan wujud nyata dari penerapan maslahat; 2. pengakuan terhadap suatu tradisi berarti mengakomodasi nilai kebaikan yang dijunjung tinggi masyarakat sebagai kearifan lokal; 3. pengakuan terhadap suatu tradisi merupakan implementasi dari prinsip memberi kemudahan (*al-taisīr*) dan menghilangkan beban (*raf al-ḥaraj*) yang menjadi tujuan hukum Islam.

g. *Sadd al-zarāi’*. Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sehingga segala hal yang dapat merusak kemaslahatan harus dihindari. *Sadd al-zarāi’* adalah tindakan preventif untuk mencegah kerusakan dalam pandangan syari’at.

2. *Maqāshid al-Syarī’ah* dan Hubungannya dengan *nash* (teks)

Yang dimaksud dengan *nash* di sini adalah teks al-Qur’an dan al-Sunnah. Al-Qur’an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah *sallahu ‘alaihi wasallam* dan disampaikan kepada kita secara mutawatir serta tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena sifat al-Qur’an yang demikian, maka seluruh umat Islam sepakat bahwa al-Qur’an merupakan sumber hukum yang utama dan asasi dalam Islam dan tak seorangpun dari mereka yang mempermasalahkannya.²⁷⁴ Sedangkan al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Kedudukan al-Sunnah yang demikian ini telah pula

²⁷⁴ Abdullah bin Abdu al-Muhsin al-Turki, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Hadisah, 1977, hlm. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh konsensus dari mayoritas umat Islam, kecuali beberapa kelompok/golongan dari mereka yang menolaknya, seperti Khawarij, Syi'ah, Mu'tazilah dan lain-lainnya.²⁷⁵

Pemikiran-pemikiran kontradiktif terhadap validitas al-Sunnah telah lama bergulir dalam sejarah dan telah menjadi bagian dari pergumulan pemikiran hukum Islam. Memang secara tekstual al-Sunnah tidaklah sama dengan al-Qur'an, ia lebih rentan terhadap perbedaan pendapat. Sungguhpun mayoritas umat Islam telah sepakat atas validitasnya, namun mereka berbeda pendapat tentang keabsahan sebagian teks-teksnya. Karena pada masa Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam al-Sunnah belum dikodifikasikan sebagaimana al-Qur'an. Disamping itu, kebanyakan teks-teksnya tidak diriwayatkan secara mutawatir dan telah terjadi usaha-usaha pemalsuan terhadapnya. Akan tetapi, walaupun demikian perhatian ulama dalam upaya filterisasi dan seleksi al-Sunnah telah menghasilkan berbagai ketentuan normatif sebagai standarisasi penerimaan sebuah al-Sunnah, seperti tentang isnad, kritik sanad dan matan, klasifikasi al-Sunnah dan lain sebagainya. Lebih dari itu, lahirnya karya-karya besar sebagai bentuk kodifikasi al-Sunnah yang kemudian populer dengan sebutan al-Kutub al-Sab'ah erupakan prestasi monumental para ulama yang eksistensinya tidak terlepas dari konteks di atas. Semua ini menunjukkan betapa serius para ulama dalam menjamin berlakunya al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, sebab dari segi validitasnya al-Sunnah tidak dapat diragukan lagi sebagaimana al-Qur'an. Apabila al-Qur'an diterima sebagai sumber hukum, maka konsekwensinya al-

²⁷⁵ Musthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa makānatuha fī al-Tasyrī' al-Islami*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985, hlm. 130.

Sunnah haruslah diterima sebagai sumber hukum pula. Dan al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan kedudukan al-Sunnah secara jelas dan sama sekali tidak memerlukan interpretasi. Memisahkan al-Sunnah dari al-Qur'an berarti memisahkan al-Qur'an dari NabiNya.²⁷⁶

Dimensi Masalah dalam *Nash*

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dipastikan mengandung kemaslahatan bagi manusia baik mengenai aqidah, ibadah, maupun muamalah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks perwujudan kemaslahatan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Yang membedakan kategori-kategori tersebut hanyalah tingkat perhatian nash terhadap dua jenis kemaslahatan di atas. Dalam bidang mu'amalah fokus perhatian nash terhadap kemaslahatan yang bersifat duniawi begitu kental, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah tidak. Tetapi bagaimanapun juga, nash dalam kedua bidang tersebut, yaitu mu'amalah di satu sisi dan akidah serta ibadah pada sisi yang lain, akan juga menjamin kemaslahatan yang bersifat ukhrawi secara simultan dan tentu dengan tingkat *stressing* yang berbeda pula.²⁷⁷

Untuk melihat bagaimana pola ekspresi *nash* dalam memperhatikan dimensi masalah, khususnya dalam bidang mu'amalah dapat kita lihat dalam poin-poin pemikiran sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an menggariskan ketentuan-ketentuan hukum perdata, pidana, administrasi hukum internasional, ekonomi dan keuangan, dan seterusnya.

²⁷⁶ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, hm. 273.

²⁷⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buth, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. T. T. Mu'assasah l-Risalah, 1973, hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah ayat yang mengatur hukum-hukum di atas tidaklah banyak, sebab yang digariskan al-Qur'an hanyalah prinsip-prinsip umum yang operasionalnya disesuaikan dengan tuntutan zaman dan lingkungan.

Dengan pola ekspresi al-Qur'an semacam ini maka peluang menetapkan hukum mu'amalah atas dasar pertimbangan masalah akan sangat besar dan hal ini merupakan sisi dari elastisitas hukum Islam dalam bidang mu'amalah.

Dalam konteks ini al-Sunnah juga mempunyai pola ekspresi yang hampir sama dengan al-Qur'an, sebab al-Sunnah mempunyai fungsi sebagai penguat dan penjelas terhadap al-Qur'an, di samping dalam kasus-kasus tertentu ia mandiri dalam menetapkan hukum. Dalam fungsinya ini al-Sunnah tidaklah membuat hukum menjadi kaku dan kehilangan dinamikanya, sebab penjelasan-penjelasan yang diberikan al-Sunnah, lebih menekankan kepada bagaimana agar ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan tersebut dapat dipahami secara utuh. Dan walaupun ternyata penjelasan-penjelasan al-Sunnah itu bersifat detil, maka lazimnya hal itu terjadi dalam hukum-hukum mengenai ibadah.

b. Dalam kebanyakan ayat-ayat al-Qur'an Allah menjelaskan hukum-hukum mu'amalah sekaligus dengan 'illat atau hikmahnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam penetapan hukum-hukum tersebut terkandung dimensi masalah yang hendak diwujudkan bagi umat manusia. Hal yang sama juga terjadi pada al-Sunnah.

Di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah terdapat beberapa teks yang menetapkan dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum sebagaimana berikut:

1) Kesulitan dapat menarik kemudahan, diambil dari Q. S. Al-Baqarah (2): 185, Q. S. Al-Nisa' (4): 28, Q. S. al-Maidah (5): 6, Q.s. al-Hajj (22): 8, dan sebagainya.

Di dalam syari'at Islam selain terdapat *'azimah* (segala ketentuan yang berlaku umum dan dalam segala kondisi) juga terdapat *rukhsah* (ketentuan yang berlaku khusus dalam kondisi tertentu). Adanya ketentuan-ketentuan ini mencerminkan dimensi *maslahah* yang sangat kental, sebab Allah membuat ketentuan semacam ini semata-mata demi kepentingan manusia yang menuntut pembebasan dari segala macam kesulitanam kondisi tertentu.²⁷⁸

Berdasarkan penelitian para ulama, terdapat 7 (tujuh) bentuk *rukhsah* yang diberikan Allah *subhānahu wa ta'āla*:

- Menggugurkan ibadah ketika terdapat uzur syar'i, seperti membatalkan haji ketika tidak memberikan jaminan keamanan;
- Pengurangan dari yang telah ditentukan, seperti *mengqashar* sholat ketika dalam perjalanan;
- Mengganti ibadah dengan ibadah yang lain, seperti mengganti wudhu' dengan tayammum;
- Mendahulukan, seperti menjama' sholat (*taqdim*) di Arafah;
- Mengakhirkan, seperti menjamak sholat (*ta'khir*) di muzdalifah;
- Mengubah bentuk pelaksanaan seperti sholat *khauf* di medan peperangan;

²⁷⁸ Saleh bin Abdillah. *Raf' al-harj fi al-syarī'ah al-islāmiyyah*. Makkah al-Mukarramah: Makaz al-bahs al-'Imi, t. t., hlm. 316.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Memberikan dispensasi, seperti memakan bangkai saat terjadi kelaparan.²⁷⁹

Keterpaksaan (*dharūrah*) dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Seperti yang terdapat dalam Q. S. al-Maidah (5): 3, Q. S. al-an'am (6): 6 dan 119, Q. S. al-Baqarah (2): 173, Q. S. al-Nahl (16): 115, dan sebagainya.

3) Segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Seperti sabda Rasulullah *shalallāhu 'alaihi wasallam*: “tidak boleh memuat sesuatu yang membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalasnya dengan cara yang serupa”.²⁸⁰

4) Di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah terdapat teks-teks yang membuat pengecualian hukum dari ketentuan umum bila peristiwa hukum terjadi karena dalam kondisi tertentu seperti karena lupa, keliru, atau terpaksa. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Q. S. Al-Maidah (5): 3, Q. S. al-an'am (6): 16 dan 19, Q. S. Al-Baqarah (2): 137, Q. S. al-Nahl (16): 106 dan 115, dan sebagainya. Demikian juga hadits Nabi Muhammad *shalallāhu 'alaihi wasallam*:

ان الله تجاوزى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه الطبراني)

“Sesungguhnya Allah tidak mencatat dari umatku dosa-dosa sebab kekeliruan, lupa dan keterpaksaan”.²⁸¹

5) Pelaksanaan taklif dibebankan Allah kepada manusia (*mukallaf*) diukur sesuai kapasitas manusia untuk melaksanakannya. Ketentuan yang berdimensi

²⁷⁹ Muhammad al-Sayis, *tarikh al-fiqh*, hlm. 26.

²⁸⁰ Jalaluddin al-Suyuthi. *Tarikh al-hawalik, syarh 'ala muwatta' Malik* v. 2. Mesir: *Dar al-ihya' al-kutub al-'arabiyah*, 1923, hlm. 218.

²⁸¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: *al-mathba'ah al-Taziyyah*, t. t., hlm. 630.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. *Maqāshid al-Syārī'ah* dan Hubungannya dengan Ijtihad

Dalam pandangan *al-Syātibi* penggalan hukum syara' akan berhasil apabila seseorang mujtahid dapat memahami *Maqāshid al-syari'ah*. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan kesungguhan secara optimal dalam menggali dan menghasilkan hukum.²⁸²

Menurutnya ijtihad itu dari segi proses kerjanya dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu *ijtihād istinbati* dan *ijtihād tatbiqi*. *Ijtiḥād Istinbati* adalah upaya untuk meneliti 'illah yang dikandung oleh nash. Sedangkan *ijtiḥād tatbiqi* yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum yang hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. Ijtihad yang disebut terakhir ini dinamakan juga dengan *tahqiqul manat* yang fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash.²⁸³

Pembagian yang dilakukan oleh *al-Syātibi* dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtiḥād istinbati*, seorang mujtahid

²⁸² Al-Syatibi, al-Muwafaqat IV, Loc. Cit.

²⁸³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memfokuskan perhatiannya pada paya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sedangkan dalam ijtiḥad tatbīqī seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan yang kongkrit. Jadi obyek kajian ijtiḥad istinbati adalah nash, sedangkan obyek kajian tatbīqī adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. Ijtiḥad ini dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide nash pada dataran kehidupan manusia, yang senantiasa berkembang dan berubah. Sehingga wajarlah bila al-Syātibī menyebut sebagai ijtiḥad yang tak akan berhenti sampai akhir zaman.²⁸⁴

Dalam mekanisme ijtiḥad menurut Asafri Jaya antara Ijtiḥad istinbati dan Ijtiḥad Tatbīqī memiliki hubungan erat yang saling membutuhkan. Dalam melaksanakan ijtiḥad tatbīqī, ijtiḥad istinbati memegang peranan penting. Karena pengetahuan tentang substansi dan ide umum suatu nash, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya. Artinya ijtiḥad tatbīqī yang disebut juga *tahqīqul manat* harus dikaitkan dengan *tahqījul manat* dan *tanqīhul manat* sebagai ijtiḥad istinbati.²⁸⁵

Apabila dipahami lebih jauh tampak bahwa ijtiḥad istinbati mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan memahami *maqāṣid al-Syari'ah*. Karena ijtiḥad istinbati tersebut merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan khithab syar'i. Oleh sebab itu sebagaimana dinyatakan sebelumnya

²⁸⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 127-128.

²⁸⁵ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ijthad istinbati dan ijthad tatbiqi mempunyai hubungan yang saling memerlukan. Ini mengisyaratkan ada kaitan antara ijthad tatbiqi dengan *maqāshid al-Syarī'ah*, walaupun tidak secara langsung. Yang jelas keterkaitan antara ijthad dan *maqāshid al-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan.

Menurut al-Syātibī ijthad pada intinya adalah upaya penggalan hukum syarak (*idrāk al-aḥkām al-syar'iyyah*) secara optimal yang akan berhasil dilakukan seorang mujtahid apabila memahami *maqāshid al-syarī'ah*. Derajat ijthad bisa dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria. Pertama, dapat memahami *Maqāshid al-Syarī'ah* secara sempurna, dan kedua, memiliki kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *Maqāshid al-Syarī'ah* itu dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua syarat ini menurut al-Syātibī saling terkait. Syarat kedua merupakan alat bantu bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan. Artinya syarat kedua ini merupakan wasilah bagi kriteria pertama sebagai tujuan atau *maqāshid al-syarī'ah*. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa ijthad dapat dilakukan dan berhasil apabila seseorang dapat memahami *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan sempurna melalui kemampuan penguasaan bahasa Arab, al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁸⁶

Ulama pada umumnya tidak menjadikan *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai syarat yang menentukan karena bagi mereka memahami *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan sendirinya termasuk dalam persyaratan umum memahami al-Qur'an dan al-Sunnah serta pemahaman kaidah kulliyah. Oleh karenanya mereka menempatkan pertimbangan *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai syarat penyempurna

²⁸⁶ Asafri Jaya Bakri, *op. Cit.*, hlm. 130.



atau pelengkap. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan *al-Syātibī* yang menempatkan *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai syarat yang menentukan keberhasilan sebuah ijtihad.

Pengetahuan dan pemahaman *Maqāshid al-Syarī'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Orang yang berhenti pada zahir ayat atau pendekatan lafziyyah serta terikat dengan nash yang juz'iyah dan mengabaikan maksud-maksud pensyri'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.²⁸⁷

Maqāshid al-Syarī'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah yang baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun terhadap kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran nilai atau perubahan sosial.

Sebagai sumber tasyri' ketiga, objek ijtihad itu adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash dan masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash, yang dalam istilah Abdul Wahab Khallaf sebagai *mālā nāssa fih*.²⁸⁸ Bertitik tolak dari objek ijtihad itu, ada dua corak penalaran yang digunakan dalam upaya penerapan *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu corak penalaran tahlili dan corak penalaran istislahi.

²⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazarat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*.

²⁸⁸ Lebih lanjut keterangan *ma la nassa fih* ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Ma'adir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nassa fih*. Kuwait: Darul Qalam, 1982).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corak penalaran ta'lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam satu nash. Berkembangnya corak penalaran ta'lili ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan al-Sunnah dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan 'illah-'illah hukumnya.²⁸⁹

Atas dasar 'illah yang terkandung di dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illah yang ada dalam nash tersebut. Dalam perkembangan ushul fiqh corak penalaran ta'lili ini adalah dalam bentuk metode qiyas dan istihsan.

Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Hadits. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadits secara langsung, tetapi dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash.

G. *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam beberapa Bidang Hukum

1. *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Bidang Hukum Ibadah

Ibadah dalam makna etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina.²⁹⁰ Sedangkan dalam terminologi syariat Islam, ibadah dimaknai pada segala perbuatan dan ucapan yang dicintai dan diridlāi oleh Allah Swt. baik yang

²⁸⁹ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981, hlm. 14-15.

²⁹⁰ Yusūf al-Qaraḍāwī, *al-'Ibādah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 24, 1995), hlm. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dikerjakan secara jasmani maupun batini.²⁹¹ Dimaknai demikian karena pengamalan ajaran Islam itu dilakukan dengan menjalankan ibadah, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt, meliputi segala perbuatan baik yang diperintahkan syariat. Hanya saja pada studi hukum Islam, obyek kajian bidang ibadah lebih dikhususkan untuk persoalan-persoalan pokok agama yang menjadi rutinitas ritual bagi setiap individu muslim, seperti bersuci, shalat, zakat, puasa dan haji.²⁹²

Bidang hukum ibadah merupakan persoalan yang pokok dalam agama. Ketetapan hukum ibadah berpijak pada prinsip ke Tuhanan, yang menuntut manusia sebagai makhluk untuk berlaku taat, patuh dan tunduk terhadap segala perintah Allah Swt. sebagai Sang Pencipta. Oleh sebab itu, ketetapan perintah ibadah; seperti shalat, zakat, puasa dan haji selalu ada pada semua agama yang disyariatkan Allah Swt.²⁹³ Walaupun ada perbedaan mengenai tata cara pelaksanaannya.

Ketetapan hukum-hukum ibadah itu bersifat dogmatis (*tawqīfī*) dan tidak bertendensi (*ghayr al-Mu'allil*). Artinya bahwa kedudukan Allah Swt. sebagai Sang Pencipta memegang hak penuh untuk mengatur bagaimana tata cara manusia menjalankan ketaatan kepada-Nya. Manusia tidak mempunyai hak sama sekali untuk membuat, menambah ataupun merubah tata cara pelaksanaan ibadah

²⁹¹ *Ibid.*, hlm. 31

²⁹² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. 2, 1985), hlm. 82.

²⁹³ Perintah beramal kebajikan, shalat dan zakat disyariatkan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad (QS. Al-Anbiyā': 73), demikian pula dengan perintah puasa (QS. Al-Baqarah: 183), dan perintah haji (QS. Al-Hajj: 26-27). Lihat lebih jauh- Yūsuf al-Qaradāwī, *al-'Ibādah fī al-Islām*, hlm. 215-216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut. Untuk itu dalam kaidah *maqāshid al-Syari'ah* dinyatakan: Tidak ditetapkan sebuah ibadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan).²⁹⁴

Pernyataan hukum-hukum ibadah bersifat dogmatis dan tidak bertendensi di atas bukan berarti pensyariatan ibadah tidak memiliki nilai-nilai *maqāsid*. Pensyariatan ibadah tetap memiliki nilai-nilai *maqāsid* baik itu berupa tujuan pencapaian kemaslahatan, hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang dapat dipahami dan dicerna oleh akal pikiran manusia.²⁹⁵ Adapun yang menjadi maksud dari pernyataan hukum ibadah bersifat dogmatis adalah untuk menegaskan bahwa ketetapan ibadah itu selamanya berlaku statis yang tidak dapat dirubah atau ditambah oleh pihak manusia selaku makhluk ciptaan Allah. Semuaketetapan ibadah memiliki tendensi dan nilai-nilai *maqāsid* berupa alasan-alasan pensyariatan, hikmah hikmah dan faedah-faedah bagi manusia baik secara individu maupun kolektif untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun tendensi dan nilai-nilai *maqāsid* dari pensyariatan ibadah ini meliputi dua hal.

Pertama: Ketetapan ibadah memiliki maksud dan tujuan pensyariatan secara umum untuk mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang menjadi maksud dan tujuan syariat ibadah ini adalah berupa bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan manusia sebagai makhluk kepada *Khāliq*, Allah Swt. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa, *maqāsid* hukum-hukum ibadah itu adalah kepatuhan manusia kepada Allah, menghadap kepada-Nya, merendahkan diri kepada-Nya dengan menjalankan semua ketetapan

²⁹⁴ 13 Nūr al-Dīn al-Khādimī, *Ilm Maqāsid al-Shar'iyah*, hlm. 166.

²⁹⁵ 199 Ibid., hlm. Bandingkan Aḥmad al-Raysūnī, *Maḍkhal ilā Mūqisid al-Shar'iyah*, hlm. 29-30,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumNya, juga untuk menghidupkan jiwa manusia agar selalu mengingat Allah sehingga bagi setiap hamba tidak pernah lalai untuk selalu hadir ke hadapan Allah dengan segenap hati dan raganya, dalam rangka memperoleh ridlo Allah Swt.²⁹⁶

Kedua: Untuk beberapa ketentuan ibadah memiliki maksud dan tujuan penyariatan secara terperinci yang berupa hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang nyata, yang dapat dirasakan dan dinikmati di dunia. Adapun nilai-nilai *Maqāshid* ibadah secara terinci adalah sebagai berikut:

Maqāshid Shalat

1. Untuk merealisasikan bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah agama yang paling pokok setelah iman.
2. Untuk selalu mengingat Allah Swt. dan membangun karakter yang baik pada kepribadian manusia :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Ṭāha: 14)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

²⁹⁶ Abū Ishāq al-Shātibī, al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, jilid 2, hlm. 301.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-‘Ankabūt: 45)²⁹⁷

3. Untuk membangun komunikasi manusia kepada Allah Swt. demi menyampaikan segala hajat atas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Rasulullah bersabda: “seorang yang shalat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya”. HR. Bukhāri-Muslim
4. Untuk menghidupkan spirit rohani bagi seorang mukmin dengan mengungkapkan segala pujian kepada Allah Swt. dan menghaturkan doa shalwat untuk Nabi Saw. melalui bacaan-bacaan shalat.
5. Untuk memupuk kepedulian sosial dengan memanjatkan doa keselamatan untuk kaum muslimin melalui bacaan doa:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

(semoga keselamatan diberikan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh).²⁹⁸

b. Maqāṣid Zakat

1. Untuk merealisasikan bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah agama yang paling pokok setelah iman dan shalat.
2. Untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa kaum muslimin:

²⁹⁷Nūr al-Dīn al-Khādimī, *‘Ilm Maqāṣidal-Shar’iyyah*, hlm. 171

²⁹⁸Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Maqāṣid al-Tbādāt*, (Qarabis: Matba’ah al-Yamamah, 1995), hlm. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. Al-Tawbah: 103)

3. Untuk manifestasi bentuk syukur kepada Allah, menampakkan sikap dermawan, dan menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Hal ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang muslim.²⁹⁹

c. *Maqāshid* Puasa

1. Untuk merealisasikan bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah agama yang paling pokok setelah iman, shalat dan zakat.
2. Untuk membentuk kepribadian seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

²⁹⁹Muhammad Hasan Abū Yahyā, *Ahdāf al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Oman: Dār al-Furqān, 1985), hlm. 343-356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 183)

3. Untuk menghindarkan manusia dari godaan syetan dan hawa nafsu yang mengajak kemaksiyatan, membentuk jiwa yang tenang dan terdidik, serta menumbuhkan solidaritas kepada orang-orang yang kelaparan.³⁰⁰

d. Maqāshid Haji

1. Untuk merealisasikan bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah agama yang paling pokok setelah iman, shalat, zakat dan puasa.
2. Untuk mewujudkan persamaan antara sesama manusia.
3. Untuk ikut merasakan apa yang telah dialami Rasulullah ketika melaksanakan dakwahnya, dan merasakan perjalanan hidup Nabi Ibrahim dalam memperjuangkan agama Allah.
4. Untuk memberikan banyak manfaat bagi manusia baik dalam urusan agama maupun dunia. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
 آلَا نَعْمُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ

³⁰⁰ Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Maqāsid al-'Ibādāt*, hlm.35. Muḥammad Ḥasan Abū Ya'qūb, *Aḥdāf al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm.357-367.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan." (QS. Al-Hajj: 27-28).³⁰¹

2. *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam atau yang dikenal dengan *al-Aḥwāl al-Shakhshiyyah* adalah aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan urusan keluarga atau rumah tangga, yang meliputi masalah perkawinan, perceraian, pengasuhan anak dan kewarisan. Syariat Islam menjadikan perlindungan keluarga sebagai tujuan pensyariaan hukum pada tingkat keniscayaan (*dharūriyyah*), karena menjadi unsur penentu regenerasi umat manusia di bumi. Selain itu, sektor

³⁰¹Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Maqasid al-'Ibadat*, hlm. 65. Muḥammad Ḥasan Abū Yaḥyā, *Aḥdāf al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 367-378.



keluarga merupakan elemen pembentuk masyarakat, sehingga eksistensi sektor keluarga sangat menentukan tatanan kehidupan di masyarakat.

Menurut hasil analisa para ahli ada empat *Maqāshid al Sharī'ah* yang termuat dalam pensyariaan hukum keluarga Islam, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Memperkuat ikatan perkawinan (*Uṣrah al-Nikāḥ*). Perkawinan niscaya dilakukan oleh setiap makhluk hidup yang dalam penciptaannya diberi nafsu birahi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun niscaya melakukan perkawinan. Tujuan Allah Swt. mengkaruniakan nafsu birahi kepada manusia, hewan dan tumbuhan adalah agar mereka melakukan perkawinan untuk dapat beregenerasi. Namun, untuk makhluk yang diistimewakan dengan nafsu dan akal, yaitu manusia, Allah Swt. mengukuhkan perkawinannya dengan syariat pernikahan yang disertai sejumlah syarat dan rukun. Menurut Ibn 'Ashūr, disyariatkannya perkawinan dengan sejumlah syarat dan rukun tersebut memiliki dua tujuan pokok, yaitu :³⁰²

Untuk menunjukkan perbedaan antara pernikahan dan perbuatan zina. Setidaknya ada tiga ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara keduanya: (a) Wali nikah bagi wanita sebagai rukun pelaksanaan akad nikah; (b) Mahar sebagai kewajiban suami yang diserahkan kepada istri; (c) Menyiarkan perkawinan minimal dengan dua orang saksi sebagai rukun pelaksanaan akad nikah.

Untuk menunjukkan perbedaan antara akad pernikahan dan akad transaksi. Ketentuan akad dalam perkawinan adalah bersifat *ta'bīd* (selamanya), dan

³⁰² Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 435.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak dibolehkan melakukan akad untuk jangka waktu tertentu seperti halnya akad sewa menyewa. Termasuk pula dengan adanya kewajiban mahar yang diberikan suami kepada istri, bukan kepada wali dari istri. Hal ini yang membedakannya dengan akad transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik barang sebagai pengganti.

Kedua: Memperkuat ikatan nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*Uṣrah al-Nasab wa al-Qurābah*). Hubungan nasab adalah ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi yang demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif, tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan mengukuhkannya. Sebaliknya jika keautentikan nasab diragukan maka kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga terancam sirna, besar kemungkinan akan timbul konflik yang melibatkan sejumlah pihak hingga pengabaian hak-hak anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Dengan demikian aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental.

Salah satu *Maqāshid* utama dari aturan hukum kekeluargaan ialah menegaskan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab. *Maqāsid* ini secara implisit dipahami dari sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya ialah: larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

poliandri; larangan laki-laki merdeka menikahi wanita budak kecuali dalam kondisi darurat: perbedaan hukum hubungan antara budak perempuan dengan majikan laki-laki dan majikan wanita dengan budak laki-lakinya di mana laki-laki diperbolehkan menggauli budak perempuannya tetapi tidak demikian dengan wanita yang memiliki budak laki-laki; larangan bagi wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami; larangan mengizinkan orang lain memasuki kediaman tanpa izin suami; kewajiban suami menafkahi istri sehingga ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Substansi dari ketentuan-ketentuan hukum dimaksud ialah mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keabsahan nasab anak sang istri kepada suaminya.³⁰³

Ketiga: Menguatkan ikatan kekerabatan keluarga jauh (*Uṣrah al-Ṣihar*).

Ikatan ini terbina di atas perpaduan ikatan pernikahan dan ikatan nasab. Dengan ikatan kekerabatan ini menjadikan seseorang terhubung dengan keluarga pasangan nikahnya. Dalam syariat Islam hubungan tersebut dikukuhkan dengan ditetapkannya hukum kemahraman antara individu pasangan nikah dengan kerabat-kerabat dekat pasangannya: antara suami dengan ibu istri, anak perempuan istri, saudara perempuan istri, bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibu si istri; dan sebaliknya antara istri dengan ayah suami dan anak laki-laki suami.

Dengan disyariatkannya hukum kemahraman pada kekerabatan, istri tidak terisolasi dari keluarganya sehingga terputusnya silaturahmi. Kemahraman antara suami dengan ibu mertua, anak perempuan istri jika ia menikah dengan janda, dan

³⁰³ Muḥammad Ṭāhir ibn Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 441.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara perempuan istri, dan *kemahraman* antara istri dengan ayah mertua dan anak laki-laki suami jika ia dinikahi oleh duda, memungkinkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan lebih leluasa, saling berkunjung dan berada dalam satu majelis. Dengan demikian hubungan istri dengan keluarga asalnya tidak terputus, di samping ia lebih mudah beradaptasi dengan keluarga suaminya. Di sisi lain nilai sakral yang terkandung dalam *keemahraman* akan mempengaruhi psikologi masing-masing pihak untuk saling menghormati, sehingga interaksi lawan jenis di antara mereka dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan bukan dengan nafsu dan hasrat birahi.³⁰⁴

Keempat: Penyelesaian konflik dalam keluarga. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari hukum keluarga Islam berikutnya adalah aturan mengenai cara penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan, nasab dan kekerabatan. Syariat Islam menetapkan aturan pemutusan ikatan-ikatan tersebut secara etis dan manusiawi. Pemutusan ikatan perkawinan, nasab dan kekerabatan dapat dilakukan bilamana masing-masing ikatan tersebut tidak mendatangkan maslahat yang diharapkan, tetapi justru menimbulkan kerusakan (mafsadat). Pemutusan ikatan perkawinan merupakan bentuk mafsadat. Tetapi mafsadat lebih besar dapat terjadi bilamana tujuan perkawinan berupa keharmonisan dalam keluarga tidak bisa dicapai. Prinsip penyelesaian konflik dalam kondisi ini adalah dengan *Irtikāb Akhaff al-Dhararayn* (memilih bahaya yang lebih kecil untuk menghindari timbulnya bahaya yang lebih besar). Syariat memberikan tiga cara sebagai langkah alternatif penyelesaian konflik: (a) *Thalaq*, yaitu cerai gugat oleh suami

³⁰⁴Ibid., hlm. 445



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri apabila si istri mengabaikan tanggung-jawabnya; (b) melalui *khulu'*, cerai gugat oleh istri kepada suami apabila si suami mengabaikan tanggung jawabnya; (c) melalui fasakh, yaitu fonis pengadilan untuk menjatuhkan perceraian apabila salah satu pihak suami-istri atau keduanya tidak memenuhi tanggung-jawabnya dalam membina keluarga.

3. *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Bidang Hukum Perdata

Islam adalah agama kehidupan. Untuk itu, syariat Islam memberikan perhatian besar atas harta bahkan menjadikannya sebagai salah satu dari lima pemeliharaan syariat pada tingkat keniscayaan (*dharūriyyah*). Sebab harta merupakan kebutuhan logistik manusia dalam melangsungkan kehidupan di dunia. Harta juga berperan penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, dan bahkan untuk terlaksananya perintah agama seperti zakat, haji dan jihad yang membutuhkan modal berupa harta. Firman Allah Swt. dalam hadis *qudsī* menyatakan: "Sesungguhnya Kami (Allah Swt.) menurunkan harta adalah untuk dapat didirikannya shalat dan ditunaikannya zakat". (HR. Ahmad)³⁰⁵

Pemeliharaan syariat Islam atas harta secara umum tertuju dua aspek perhatian. Pertama: perhatian pada aspek pemenuhan harta dalam kehidupan manusia; dan Kedua: perhatian pada aspek perlindungan harta setelah menjadi hak milik manusia.³⁰⁶ Pemenuhan harta dalam kehidupan manusia ditempuh melalui pensyariatan perintah untuk bekerja bagi manusia sebagai sarana untuk memperoleh harta. Sedangkan perlindungan hak milik atas harta ditempuh melalui

³⁰⁵Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, jilid 4, hlm.182.

³⁰⁶Muhammad Bakar Ismā'īl, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Ta'sīlan wa Taf'īlan*, hlm. 332-333.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyariatan jenis-jenis akad dan perjanjian baik berupa akad transaksi (*tasarruf*), seperti akad jual beli, sewa menyewa, muzara'ah, mudarabah, dan lain lain, maupun akad pelimphan harta secara suka rela (*tabarru'*), seperti hibah, wakaf, pinjam meminjam dan sejenisnya.

Tujuan syariat Islam memerintahkan manusia untuk bekerja adalah demi terwujudnya kesejahteraan hidup manusia baik pada lingkup individu maupun sosial. Bekerja merupakan cara manusia memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, al-Qur'an mengajarkan dan mendorong manusia untuk bekerja dan membuka usaha, baik dengan mengelola sumber daya alam, keterampilan tangan maupun berniaga. Bahkan al-Qur'an menyatakan beberapa jenis pekerjaan, seperti melalui perdagangan (QS. Quraysh: 1-4), usaha pertanian (QS. 'Abasa: 24-32), produksi pakaian (QS. Al-A'rāf: 39), pengepulan besi (QS. Al-Hadīd: 35), dan konstruksi bangunan (QS. Al-Naml: 44).

Demi tercapainya kesejahteraan yang menyeluruh dan merata untuk seluruh manusia, Islam memberikn tuntunan dalam melakukan pekerjaan untuk berlaku adil dan menjunjung tinggi etika. Yaitu dengan tetap menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan kecurangan, pencurian, penipuan dan sejenisnya (QS. Al-Baqarah: 188), tidak serakah dan berlebihan (QS. Al-Furqān: 67), dan tidak mudah putus asa dan tidak pesimis hingga menjadikannya berpangku tangan (QS. Al-Isrā': 29).³⁰⁷

³⁰⁷Mahmud Shaltūt, *al-Islām Aqidah wa Sharī'ah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, cet. 18, 2001), hlm. 252-252. Muḥammad Ḥasan Abū Yaḥyā, *Ahdāf al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 658-661.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan pensyariaan hukum muamalah harta benda secara umum adalah sebagai berikut : ³⁰⁸

Pertama: Pendistribusian Harta (*Rawāj al-Māl*); yaitu tujuan untuk mengedarkan dan menyalurkan harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain dengan cara-cara yang benar menurut syariat. Dengan pendistribusian harta, kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat dapat terpenuhi. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, syariat mengatur sistem kehidupan yang ideal dengan aturan distribusi harta melalui akad transaksi dan ketenagakerjaan yang benar; (QS. Al-Muzammil: 20), (QS. Al-Baqarah: 198), (QS. Al-Baqarah: 282), dan beberapa hadis Nabi Saw.

Kedua: Validasi Harta (*Wuḍūḥ al-Māl*); yaitu tujuan untuk menghindari bahaya dan sengketa yang ditimbulkan dari harta dengan upaya menurut kemampuan. Untuk itu, Islam mensyariatkan untuk melakukan pencatatan akad, menghadirkan saksi dan jaminan sebagai bukti penguat validitas akad yang dilakukan. Sebagaimana hal ini dinyatakan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah: 282-283 serta pada sebuah hadis riwayat al-Turmudhī dan Ibn Mājah bahwa Rasulullah pernah melakukan pencatatan akad dengan 'Adā' ibn Khalid mengenai akad jual beli budak.

Ketiga: Pengakuan Hukum atas Harta (*Thābat al-Māl*); yaitu tujuan untuk memberikan pengakuan hukum dari hak kepemilikan seseorang atas harta. Tujuan

³⁰⁸ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 464-477. Muhammad Ḥasan Abū Yahyā, *Ahdāf al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 670-691, Ismā'il al-Ḥasanī, *Naẓariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imam Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āshūr*, (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 176-dst.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terimplementasi pada pensyariatan beberapa hukum seperti: pensyariatan kepemilikan mutlak atas obyek akad, tidak boleh ada unsur paksaan dalam melakukan akad, tidak boleh melakukan akad yang mengandung unsur riba, serta pendampingan hukum pada akad yang dilakukan anak kecil dan orang idiot.

Keempat: Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Māl*); yaitu tujuan untuk memelihara dan menjaga hak milik personal atau kelompok atas hartanya. Tujuan ini terimplementasi dalam pensyariatan hal-hal yang terdapat pada tujuan validasi harta, yaitu pencatatan akad, menghadirkan saksi dan jaminan. Selain itu tujuan ini juga terimplementasi dengan pelarangan berlaku curang baik dalam perolehan harta atau mentransaksikannya. Termasuk dengan penetapan sanksi pidana untuk pencurian, perampasan dan penipuan harta milik orang lain.

Kelima: Keadilan atas Harta; makna keadilan di sini adalah keadilan menurut Allah melalui ketetapan syariat. Keadilan atas harta meliputi: (1) keadilan dalam perolehan harta; (2) keadilan dalam mentransaksikan harta; (3) keadilan dalam memanfaatkan harta. Dalam perolehan harta, syariat melarang bentuk pekerjaan yang batil, curang dan merugikan pihak lain, termasuk tindakan suap (*risywah*) untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian pula dalam mentransaksikan harta tidak boleh merugikan pihak lain dan kepentingan umum. Sedangkan dalam pemanfaatan harta, syariat memberikan batasan untuk tidak berlebihan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang haram. Pertanggung jawaban atas hak milik harta di akhirat meliputi cara perolehan, pendistribusian dan pemanfaatannya akan berada pada neraca hisab.



4. *Maqāshid al-Sharī'ah* dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Dalam literatur ilmu fiqh para ulama sering menggunakan istilah *al-Jarīmah* untuk menyebut jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa ataupun lainnya, dan dengan istilah *al-Jināyah* untuk pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa dan pencideraan anggota tubuh. Sedangkan untuk sanksi hukumannya dikenal dengan istilah *al-'Uqūbah*.³⁰⁹ Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi pidana *qishāsh*, *ḥudūd* dan *ta'zīr*.³¹⁰

Orang yang telah melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman. Hal ini ditetapkan dalam hukum Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa manusia, baik perorangan maupun masyarakat, dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Ibn 'Ashur menyatakan bahwa pemberian hukuman atau sanksi kepada para pelaku pelanggaran pidana tidak lain merupakan upaya untuk mewujudkan keselamatan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, menurut Ibn 'Ashur, maka tujuan utama pensyariaan pidana Islam yang berupa *qisās*, *ḥudūd* dan *ta'zīr* adalah untuk memelihara sistem kehidupan manusia, suatu sistem kehidupan tidak dapat berjalan kecuali dengan membendung hal-hal yang mengancam keberlangsungan

³⁰⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 3, 2000), hlm. 12.

³¹⁰ *Qisās* adalah adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah dilakukan pelaku terhadap korbannya, misal; pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali, keluarga korban memaafkan, maka pelaku hanya akan dikenakan denda ganti rugi (*diyat*). *Hudūd* adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh al-Quran dan Sunnah, seperti zina, meminum khamr dan keluar dari Islam, dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti. *Ta'zīr* adalah sanksi pidana yang selain pidana *ḥudūd*, yang ditentukan oleh mejelis hakim, seperti penipuan, perjudian, tidak membayar pajak, dan lain-lain.

sistem tersebut. Adapun tujuan utama pensyariaan sanksi pidana *qisās*, *hudūd* dan *ta'zir* secara umum yaitu ada tiga tujuan, sebagai berikut :³¹¹

Pertama: Untuk memberikan efek jera kepada pelaku pidana. Sanksi pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan menghilangkan sifat buruk pada diri pelaku yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sanksi semisal *hudūd* tidak dijatuhkan apabila terbukti tidak sengaja melakukannya, atau adanya *shubhat*, yaitu situasi tertentu yang menimbulkan sangkaan bahwa tindakan pelaku bukan pelanggaran hukum. Tujuan memberikan efek jera dan menghilangkan sifat buruk bagi pelaku ini dinyatakan oleh Allah Swt. setelah menyebutkan bentuk sanksi. Firman Allah Swt.:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ma'idah: 39).

Kedua: Untuk memberi rasa puas bagi korban. Siap orang memiliki kecendrungan alamiah untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah menganiaya dirinya. Tindakan balas dendam mustahil dilakukan secara adil mengingat kondisi kejiwaan yang saat itu terguncang. Syariat mengatur sanksi sempal dijatuhkan kepada pelaku yang dilaksanakan oleh aparat berwenang guna mencegah tindakan pembalasan oleh pihak korban yang cukup membahayakan

³¹¹ Muḥammad Ṭāhir ibn Ashūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 516-517. Nūr al-Dīn al-Khādimī, *‘lim Maqāsid al-Shar'iyyah*, hlm. 186-187.



kemaslahatan umum. Jadi, tujuan memberi rasa puas bagi korban yang dimaksud di sini adalah untuk meredam kemarahandari pihak korban dan meminta maaf kepadanya. Sebagaimana pada sanksi *qishash* dapat diganti dengan *diyat* (denda ganti rugi), apabila dari pihak korban atau keluarga korban telah memaafkan pelaku.

Ketiga: Untuk memberi efek takut melakukan tindak pidana bagi orang lain. Syariat mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi bagi nara pidana harus dilakukan di hadapan publik (QS. Al-Nur: 2). Hal ini akan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum tentang akibat hukum yang dikenakan kepada para pelaku pidana, sehingga akan memberikan rasa takut untuk melakukan hal yang semisal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB III

KONSEP HAM NASIONAL DAN HAM ISLAM

A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini.³¹² Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Manfred Nowak menegaskan *human rights must be considered one of the major achievements of modern day philosophy*.³¹³ Ruth Gavison juga menegaskan, *the twentieth century is often described as “the age of rights.”*³¹⁴

Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi melanggar dan mengabaikan HAM, dengan sekejap mata *nation-state* di belahan bumi ini memberikan respons, terlebih beberapa negara yang dijuluki sebagai adi kuasa memberikan kritik, tuduhan, bahkan ancaman keras seperti embargo dan sebagainya.

1. HAM Antara Wacana dan Realita

Bagi Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah ke dalam benak-benak anak bangsa. HAM diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai

³¹² Abdul Muin Salim, “Al-Huquq al Insan al Asasiyah fi al-quran al-Karim”, dalam Azhar Arsyad et.al. (ed.). *Islam dan Global Peace* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 339.

³¹³ *Loc.cit.*

³¹⁴ Ruth Gavison, “On the Relationship Between Civil and Political Rights, and social and Cultural Rights, dalam Jeand-Mare Colcaud, et.al (ed.), *The Globalization of Human Rights* (Tokyo: United Nations University Press, 2003), hlm. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-politis yang berkembang.³¹⁵ Dalam konteks reformasi, pemikiran kearah bentuk jaminan HAM yang lebih kokoh semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan UUD 1945 adalah fakta sejarah sekaligus diyakini sebagai *the starting point* bagi penguatan demokrasi Indonesia yang berbasis perlindungan HAM.³¹⁶

Begitupun dalam tataran realitas, kemajuan normativitas HAM belum berjalan dengan maksimal. Pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. Eforia reformasi menyisakan problematika tersendiri. HAM acapkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut tanpa mengindahkan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan ini tidak jarang menghasilkan upaya pemaksaan kehendak bertameng kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak acapkali berujung pada perilaku kekerasan. Sulit memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM ternyata mengandung perbuatan yang justru melanggar HAM itu sendiri.

HAM berubah menjadi “dua sisi dari sebuah mata pisau.” Pada satu sisi mengedepankan dimensi humanitas manusia, tetapi pada sisi yang lain HAM dipandang terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena didalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi. Michael Freeman memberikan komentar yang tajam terhadap tajamnya disparitas konsep

³¹⁵Perbincangan HAM dalam konteks konstitusi Indonesia merupakan diskusi yang intens. Sejarah mencatat, perdebatan HAM telah dimulai pada saat perumusan negara Indonesia. Lebih lanjut baca Herbert Feith dan Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1944-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1970); Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid III (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960); Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).

³¹⁶Lihat lebih lanjut Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).



HAM dengan realitas pelanggaran HAM. Ia mengatakan, *human rights violations are facts than can be, and sometimes are, best expressed in terms of numbers, but there is uneasy relationship between our knowledge of the numbers and our understanding of what they mean.*³¹⁷

Hak asasi yang sejatinya mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan politisasi dan kebohongan.³¹⁸ Dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme kelihatan kental dalam konsep HAM.³¹⁹ Secara mendasar hal ini dikarenakan dua hal mendasar, yakni *pertama*, rendahnya pemahaman filosofis terhadap kandungan materi muatan HAM,³²⁰ dan *kedua*, bobot materi muatan

³¹⁷Michael Freeman, *Human Rights; An Interdisciplinary Approach* (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 3

³¹⁸MacIntyre mengatakan, "belief in human rights like belief in wishes and unicorn, that is to say, it is superstition." Lihat A. MacIntyre, *After Virtue* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), halaman 67. Dengan nada pesimistik Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur juga pernah berujar, "untuk berterus terang, masalah hak-hak asasi manusia semakin lama semakin menjemukan untuk diperbincangkan di negara-negara sedang berkembang. Kenyataan yang ada secara sinis menunjukkan kepada hal-hal yang tidak menggembirakan yang berlangsung dimana-mana di seluruh dunia." Lihat Abdurrahman Wahid, "Mencari Perspektif baru dalam Penegakan Hak-hak Asasi Manusia", dalam *prisma* (Jakarta: LP3ES, Nomor 12 Desember 1979), hlm. 21.

³¹⁹Terdapat perbedaan konsep mengenai HAM. Terjadi polarisasi dua kutub antara HAM yang berasal dari Barat dan yang berasal dari Timur, seperti Cina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Klaim Kesejarahan HAM dengan bukti dokumentasi sejarah terus mengundang perdebatan. Pada tataran yang lebih ekstrem muncul anggapan untuk menyudahi wacana HAM karena berasal "dari mereka," bukan "dari kita." Lihat lebih lanjut Harold Crouch, "Beberapa Catatan tentang Hak-hak Asasi Manusia", dalam Haris Munandar (Peny.), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia; Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof Miriam Budiardjo* (Jakarta: Gramedia, 1994), halaman 451. HAM di Barat mendapatkan kritik yang tajam oleh kalangan muslim. Diyakini bahwa HAM versi Barat yang cenderung *emphirical and intellectual minded* berbeda secara signifikan dengan HAM dalam perspektif Islam yang mengandung sandaran *transcendental authority* melalui wahyu Tuhan.

Lihat lebih lanjut, Irene Bloom et.al., *Religious Diversity and Human Rights* (New York: Columbia University Press, 1996), halaman 175-191, 213-239, dan 313-337; Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of expression in Islam* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn. Bhd., 1998), halaman 16-24; Abul A'la Mawdudi, *Human Rights in Islam* (Delhi: Markazi Maktaba Islam, 1982); dan Mu'tamar li al-Fikr al-Islami, *Huquq al-Insan fi al-Islam; Maqalat al-Mu'tamar al-Khamis li al-Fikr al-Islam, Teheran 1408H./1987M.* (Teheran: Manzhimat al-I'lam al-Islami, 1987). Lihat juga kompilasi tulisan yang disunting oleh Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Insitute of Objective Studies, 1993)



HAM juga ditengarai memiliki bias pemahaman akibat tajamnya intrik sosial politik yang melingkupinya. Yang terakhir ini menjadi semakin mengkristal manakala kebijakan global dinilai banyak kalangan sarat dengan kepentingan tertentu yang secara sempurna telah menciptakan ketidakadilan global.

Oleh karena itu upaya rekonstruksi konsep dasar HAM merupakan langkah pertama yang harus serius dilakukan. Lebih dari itu, penting dipahami bahwa konseptualisasi HAM muncul dalam konteks perjuangan manusia menuju puncak keadaban hidup manusia yang lebih bermartabat. Titik pandang ini merupakan *entry point* untuk melihat totalitas perjuangan manusia sampai lahirnya dokumentasi keadaban manusia dalam berbagai bentuk perjanjian internasional HAM yang selanjutnya dikenal sebagai *International Human Rights Law*.

2. Perkembangan Pemikiran HAM

The focus of human rights is on the life and dignity of human beings, demikian tegas Manfred Nowak.³²¹ Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM,³²² yaitu pertama, hak-hak alami (*natural rights*) berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that*

³²⁰Dasar inilah yang membuat Freeman menawarkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam kajian HAM. Ia mengatakan, “the social sciences have, after too long a delay, begun to take human rights seriously. We should hope that this welcome development will be accompanied by human rights activists talking social science seriously.” Lihat Michael Freeman, *op.cit.*, hlm. 178.

³²¹Manfred Nowak, *loc.cit.*

³²²Lihat lebih lanjut Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14-25

belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings).

Kedua, teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*). Pandangan ini secara nyata beerasal dari ungkapan Bentham yang mengatakan, *rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rethorical nonsense, nonsense upon still.*

Ketiga, teori relativis kultural (*cultural relativist theory*). Teori ini adalah salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan perbedaan berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, *that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings.*

Keempat, doktrin Marxis (*Marxist doctrine and human rights*). Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repository of all rights*). Hak-hak mendapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengakuan sebagai hak individual, apabila telah mendapat pengakuan dari negara dan kolektivitas. Dengan kata lain, *all rights derive from the state, and are not naturally possessed by human beings by virtue of having been born.*

Membicarakan HAM berarti membicarakan eksistensi dan proteksi terhadap kehidupan manusia. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti bahwa optimalisasi reformulasi pemikiran strategis tentang perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki manusia terus mengalami perkembangan. Jelas bahwa perbincangan ini sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan lingkup pemikirannya.

HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya, tetapi HAM telah menjadi objek kajian ilmiah yang menarik bahkan menjadi spesialisasi tersendiri.³²³ Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada disekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.

Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sejak lama.³²⁴ Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. Selain itu upaya tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya

³²³Banyak perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat dan Eropa membuka program S-2 dan S-3 dalam bidang kajian HAM. Di Asia Tenggara, Universitas Mahidol Thailand membuka program S3 (Ph.D) bidang *Human Rights and Peace Studies Programme*. Universitas Padjadjaran Bandung dan UII Yogyakarta juga membuka Program Magister bidang kajian HAM.

³²⁴Lihat Micheline R. Ishay, *The History of Human Rights; From Ancient Times to the Globalization Era* (Los Angeles: University of California Press, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari kemanusiaan yang paling intrinsik. Disinilah terlihat sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradapan manusia itu sendiri. Ishay menegaskan, *human rights are thus seen here as the result of a cumulative historical process that takes on a life of its own, sui generis, beyond the speeches and writings of progressive thinkers, beyond the documents and main events that compose a particular epoch.*³²⁵

Secara ringkas, uraian berikut akan menggambarkan kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal. Perkembangan berikut juga menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat Barat. Tonggak-tonggak momentumnya adalah sebagai berikut.³²⁶

Pertama, dimulai yang paling dini dengan munculnya Perjanjian Agung (*Magna Carta*)³²⁷ di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja Jhon (saudara Raja Richard Berhati Singa). Isi pokok dokumen itu diantaranya, hendaknya raja tidak melakukan

³²⁵*Ibid.*, hlm. 2.

³²⁶Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan", dalam *Islamika; Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kerjasama Mizan dengan Missi No.6.1995, 1995). Lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 301

³²⁷Penting ditegaskan bahwa Abul A'la al-Maududi memberikan kritik yang tajam terhadap *Magna Charta*. Menurutnya, menganggap *Magna Charta* sebagai sejarah pondasi HAM universal merupakan kekeliruan sejarah yang patut diluruskan. Inilah menurutnya salah satu kekeliruan kalangan Barat yang kerap kali bersikap apriori terhadap piagam tersebut. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut, "It is very loudly and vociferously claimed that the world got the concept of basic human rights from the Magna Charta of Britain; though the Magna Carta came into existence six hundred years after the advent of Islam. The truth of the matter is that until the seventeenth century no one even knew that the Magna Carta contained the principles of trial by jury; habeas corpus and the control of parliament on the right of taxation. If the people who have drafted the Magna Carta were living today they would have been greatly surprised if they were told that their document also contained all these ideals and principles. They had no such intention, nor were they conscious of all these concepts which are now being attributed to them." Lihat lebih lanjut Abul A'la al-Maududi, op.cit., hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat (sebenarnya cukup ironis bahwa pendorong pemberontakan para baron itu sendiri antara lain ialah dikenakan pajak yang sangat besar, dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa).

Kedua, *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal sebagai *the Gread Charter of the Liberties of England*, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum.³²⁸

Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.³²⁹

Keempat, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789. Ada lima hak yang diadopsi yaitu,

³²⁸Lihat lebih lanjut <http://www.constitution.org/eng/petright.htm>

³²⁹Konstitusi Amerika Serikat 1776 menegaskan “ We hold these truths to be self evident that all men are created equal; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happines.”



kepemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence a l'oppression*).³³⁰

Kelima, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), yang dikenal dalam Bahasa Indonesia dengan nama Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948,³³¹ yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama). Deklarasi itu, ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang susul-menyusul, telah memperkaya eksistensi perlindungan HAM sekaligus menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.³³²

Dari perkembangan histori diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Prancis memprioritaskan egalitarianisme, persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), di Rusia tidak diperkenalkan hak individu tetapi hanya mengakui hak sosial dan kolektif.

Kecuali itu, penggunaan terma *human rights* hanya ditemukan pada *Universal Declaration of Human Right*. Awalnya istilah yang ditemukan adalah *the right of men*. Istilah ini dipandang biasa karena tidak mencakup kepentingan

³³⁰Dikatakan bahwa, "Men are born and remain free and equal in rights, Social distinctions can be founded only on the common utility." Lihat lebih lanjut <http://wikisource.org/wiki/DeclarationoftheRightsofManandoftheCitizen>.

³³¹Tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari HAM Sedunia (*Human Rights Day*).

³³²Lihat lebih lanjut United Nations, *Human Rights; A Compilation of International Instrument, vol 1* (First Part) and (Second Part) (New York: United Nations, 2002).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak perempuan. Untuk menjembatani kepentingan yang lebih universal, maka ditetapkanlah istilah yang lebih baku, yakni *human beings* atau *human rights*. Harapannya adalah agar upaya perlindungan HAM berjalan secara maksimal, tidak saja laki-laki, tapi juga perempuan. Burns H. Watson dalam entri “*Human Rights*” menegaskan hal itu sebagai berikut.

*The expression “human rights” is relatively new, having come into everyday parlance only since World War II and the founding of the United Nations in 1945. It replaces the phrase “natural rights,” which fell into disavour in part because the concept of natural law (to which it was intimately linked) had become a matter of great controversy, and the later phrase “the rights of men” which was not universally understood to include the rights of women.*³³³

Salah seorang arsitek DUHAM, Eleanor Roosevelt juga menegaskan sebagai berikut. *The original words read: “All men are created equal.” As it was finally worded it reads: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” This is largely because on Committee there are a number of women who have risen to positions of importance in their own countries but who realize that majority of women may not everywhere be on a basis of equality, and they wanted to achieve equality for their sisters. They felt that if the Declaration did not apply to women, and they wanted to make quite clear that this was a Universal Declaration.*³³⁴

³³³Burns H. Weston, “*Human Rights*,” dalam Robert P. Gwinn, et.al., (ed.), *The New Encyclopaedia Britannica*, edisi kelima belas, volume 20 (Chicago: The University of Chicago, 1986), hlm. 714.

³³⁴Eleanor Roosevelt, “*Human Rights*,” dalam *the United Nations, Peace on Earth* (New York: the United Nations, 1949), halaman 67-68. Todung Mulya Lubis juga menegaskan hal yang sama, sebagaimana ditegaskan bahwa, “*The term of human rights was used by Eleanor Roosevelt*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlepas dari hal tersebut yang mendasar dipahami bahwa meski realitas lokal kesejarahan manusia memiliki karakteristik substansial, secara umum keyakinan manusia adalah bahwa dirinya membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara objektif. Dengan kata lain, rangkaian kesaksian sejarah tersebut menunjukkan bahwa HAM, meminjam istilah Bambang Sutiyoso, adalah “konstitusi kehidupan” karena HAM merupakan prasyarat yang harus ada pada setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.³³⁵

Kecuali itu, menurut catatan Mahfud MD, bahwa muatan dokumen-dokumen tersebut ternyata lebih sarat dengan hak asasi bidang politik. Kecendrungan muatan yang demikian tampaknya lebih dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang sedang hangat pada abad ke-17 dan 18, yaitu gagasan hukum alam sebagaimana dikemukakan Locke (1632-1714) dan Rousseau (1712-1778).³³⁶

when, as co-chair of the UN Commission on Human Rights, she helped draft the Universal Declaration of Human Rights. She discovered that the term rights of man as it appeared in a number of documents was not automatically understood in some parts of the world to include the rights of women. The rights of man phrase had an earlier date replace the term natural rights widely used during the Enlightenment. Human rights is, a fairly new term.” Lihat Todung Mulya Lubis, op.cit., halaman 48-49. Penting juga ditegaskan disini bahwa kmunculan UDHR tidak terlepas dari pidato yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya, ia merumuskan *the four freedoms*, yaitu (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*); (2) kebebasan beragama (*freedom of religion*); (3) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*); dan (4) kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*). Lihat Sukron Kami, Islam & Demokrasi; Telaah konseptual dan historis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), halaman 14. Lihat juga M. Luqman Hakiem (ed). *Deklarasi Islam tentang HAM* (Surabaya: Risalah Gusri, 1993, 1993), halaman 6. Lihat juga David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan”, Dalam Peter davies (ed.), *Human Rights*, edisi Indonesia oleh A. Rahman Zainuddin, *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Obor, 1994), hlm. 1-30

³³⁵Bambang Sutiyoso, “Konsep Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia,” dalam UNISIA (Yogyakarta, UII Press No. 44/XXV/I/2002), hlm. 85.

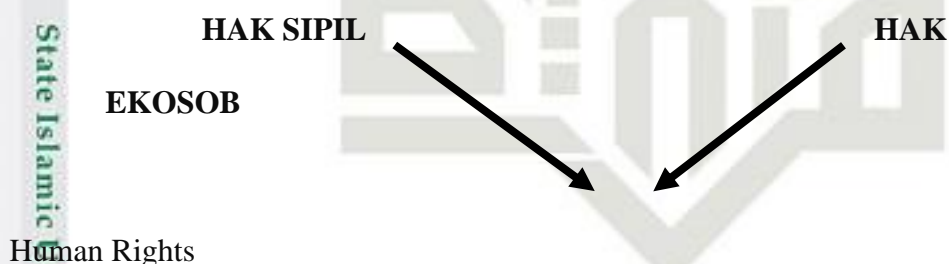
³³⁶Lihat Moh. Mahfud, “Pemahaman Hak Asasi Manusia; Sebuah Refleksi”, makalah disampaikan pada Diskusi Peringatan Hak Asasi Manusia, SEMA-FE UII, 11 Desember 1993.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendiri rujukan paling baku ialah DUHAM. Ini wajar dan merupakan keharusan karena DUHAM merupakan puncak konseptualisasi manusia sejadi yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang eksistensi HAM universal. Namun, penting pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejadi dan dinamika interaksi terbuka bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya, disadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa “ongkos” perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil.³³⁷

Selain itu, rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri. HAM merupakan satu kesatuan yang bersifat universal.³³⁸

Skema berikut menggambarkan kesatuan pandangan tentang HAM:³³⁹



- Universal: human rights apply to all people in the world

³³⁷Satya Arinanto dan Irdhal Kasim, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2009), hlm. 1-13.

³³⁸Deklarasi Wina dan Program Aksi Tahun 1993 menegaskan, “All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.”

³³⁹Dikutip dari the Center for Economic and Social Rights. Lebih lanjut dapat diakses pada www.cesr.org.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indivisible: human rights are connected, you cannot

Fulfill one human right without the others

Non-discrimination



Participation

Monitoring and information

Remedy

Jurisprudensi mempunyai kaitan erat dengan kodifikasi Hukum Islam, dan secara alami diskusi mereka tentang kebebasan adalah dari segi pandangan juridical, bukan yang metafisik. Meskipun demikian, latar belakang yang metafisis hadir dalam diskusi juridical mereka, karena mereka berhadapan dengan manusia Islam yang sama yang dituju oleh wahyu. *Jurisprudent* mempertimbangkan kebebasan manusia karena pribadi manusia yang menyerah kepada Ketuhanan, bukannya sebagai suatu hak bawaan seseorang. Menurut mereka sejak kita diciptakan Allah dan tidak punya kuasa untuk menciptakan apapun dengan diri kita sendiri (pengertian menciptakan sesuatu dari *ex nihilo*), kita secara ontologi bergantung pada Tuhan dan oleh karena itu hanya dapat menerima apa yang diberikan kepada kita oleh sumber kepunyaan.

Hak asasi manusia, menurut syari'ah adalah suatu konsekwensi kewajiban manusia dan bukan yang mendahului mereka. Kita memiliki kewajiban tertentu ke arah Tuhan, alam, dan manusia lain, sesuai yang digambarkan oleh syari'ah. Sebagai hasil pelaksanaan kewajiban ini, kita memperoleh hak dan kebebasan tertentu yang lagi diuraikan oleh hukum ilahi tersebut. Mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak punya hak yang sah, dan klaim kebebasan manapun yang mereka buat atas masyarakat atau lingkungan adalah haram dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sesuatu perebutan kekuasaan dari apa yang tidak mereka punya. Hal yang sama bahwa orang yang menolak untuk mengenali alam *theomorphic* mereka dan bertindak berkesesuaian merupakan manusia “secara kebetulan” manusia dan merampas pemerintah kemanusiaan yang menurut definisi menyiratkan sentralitas dan kekhalifahan. Islam memegang konsepsi ini tidak hanya untuk pengikut sendiri tetapi juga untuk semua agama lain yang karenanya religius minoritas diberi hak dibawah kode religius mereka sendiri.

Persepsi hak asasi manusia dalam Islam bukanlah merupakan premis tentang individu melawan kerangka *nation-state*. *Nation-state* sendiri menghadirkan suatu *superimposition* yang hanya mempunyai sedikit klaim keaslian di dalam sumber Islam yang berwenang. Alquran dan sunnah meminjamkan pendukung kepada terciptanya suatu kepemimpinan dan tatanan politik yang mempunyai tanggung jawab pada affair masyarakat dan administrasi peradilan. Bagaimanapun, pendengar dan aktor yang utama dalam semua ini adalah individu, bukan pemerintah. Alquran juga menunjuk individu dan masyarakat ketika berbicara tentang tugas hisbah, yakni “promosikan yang baik dan cegah kejahatan” (*amr bi'l ma'ruf wa nahyu al-munkar*). Masyarakat atau ummah, secara konsisten ditunjukan di dalam Alquran dengan “o kamu yang percaya” yakni kumpulan orang banyak, bukan terpisah atau badan hukum tersendiri. Setiap individu diminta untuk mematuhi *ulu al-'amr*, yakni para orang yang dipercayakan kepemimpinan kepada mereka, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat. Keseluruhan konsepsi Islam tentang organisasi politik dan pemerintah adalah jasa layanan diorientasikan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berperikamusiaan didalam pengertian bahwa individu tetap aktor utama dalam semua bagiannya. Pemerintah sebagai kesatuan bukanlah aktor yang utama, bukan pula tempat penyimpanan otoritas politis tertinggi. Ummah atau masyarakat pengikut menjadi locus tempat dari otoritas politis, yang sering diuraikan sebagai format kedaulatan eksekutif. Ini adalah suatu kedaulatan yang didelegasikan yang ditemukan di dalam doktrin quranic yakni khilafah.

Islam telah memikirkan suatu sistem kesatuan pemerintah dan hukum, dimana kedaulatan terakhir menjadi anggota hanya untuk Tuhan. Kedua-duanya individu dan pemerintah adalah tunduk kepada hukum yang sama. hak dan tugas-tugas dasar mereka ditentukan oleh sharia. Sasaran keadilan promosi tentang kesejahteraan dan pencegahan korupsi dan kejahatan (mafsadah) diharapkan untuk dikerjakan oleh kedua-duanya, dan pemerintah tidak punya otoritas untuk menolak atau menggantikan sharia, atau untuk melanggar tentang prinsip-prinsipnya. Jadi, dualitas kepentingan antara pemerintah dan individu dipertimbangkan didalam teori hak asasi manusia yang modern tidak menyajikan suatu sumber perhatian dominan untuk ahli hukum Islam. Ahli hukum dan ulama tidak meneruskan pada atas asumsi bahwa kepentingan dari pemerintah dan individu berpotensi menjadi konflik. Pandangan tersebut sebagai gantinya telah berlaku bahwa Islam itu mengasumsikan suatu keselarasan dasar antara individu dan pemerintah, yang man untuk menjadi terealisasi melalui implementasi dari sharia. Ini adalah suatu konsekwensi dari sebagian doktrin qurani tentang tahid, yang telah sangat mempengaruhi Institusi Islam dan pemikirannya. Ketika pemerintah berhasil di dalam menerapkan sharia, hal itu akan memuaskan tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar keberadaannya. Karena pemerintah dan individu diharapkan untuk berlangganan kesatuan nilai-nilai yang sama, dan pemerintah ada dalam rangka menjalankan keadilan, tidak ada konflik yang perlu diasumsikan timbul antara hak dari individu dan kekuasaan pemerintah.

Suatu skenario serupa dapat digambarkan mengenai hukum tata negara modern, yang menyerupai teori hak asasi manusia di dalam itu yang keduanya adalah predikat pada dualitas kepentingan antara individu dan pemerintah. *Constitutionalism* sebagai fenomena yang muncul dan berkembang atas asumsi bahwa *nation-state* memperkenalkan suatu ancaman terhadap hak dan kebebasan yang menyangkut warga negara itu. Hak-hak ini berpotensi menimbulkan konflik dengan kekuasaan pemerintah dan kontrol yang tak kenal lelahnya untuk mengendalikan aktivitas dan kehidupan warga negaranya. Hukum tata negara kemudian telah dikembangkan di Barat sebagai suatu instrumen untuk mengatur konflik ini. Baru-baru ini, bagaimanapun persepsi dualitas ini di dalam pabrik hukum tata negara telah dipertanyakan dan disana tengah tumbuh pengenalan menyangkut pandangan bahwa pemerintah adalah suatu pelindung dan sekutu potensi terhadap hak-hak warga negara dan kebebasan. Pergeseran ke dalam dasar persepsi hukum tata negara akan pada gilirannya, akan kelihatan untuk memerlukan paralel perubahan dalam teori dan praktek konstitusi di dalam nation-states ketika mereka berdiri, sesuatu yang telah dengan jelas belum termaterialkan suatu tantangan segar untuk masa depan perubahan hukum tata negara.

Persepsi Islam tentang kepemimpinan dan kekuasaan politis yang mengurus masyarakat dengan secara tak terpisahkan bersifat individual di dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang committed untuk melayani kepentingan yang terbaik dari individu. Pemerintah ada di bawah tugas untuk melindungi lima kepentingan yang mendasar (*dharuriyat al-khamsah*), yakni agama, jiwa, hak milik, garis keturunan dan akal, melalui penetapan pemerintah dan orde politik yang adil. Alquran telah memproklamirkan martabat manusia adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan dari individu di dalam suatu kemutlakan dan perasaan yang tak memenuhi syarat, seperti yang dibahas dibawah, dan ini kemudian menyediakan suatu acuan atau matriks untuk hak dasar lainnya.

Ketika hak asasi manusia dilihat sebagai penjelmaan rasa hormat terhadap martabat manusia, hak asasi manusia mungkin akan mempunyai suatu basis lebih asli kearah tradisi pertukaran budaya. Seperti seorang komentator mencatat, bahwa tidak ada apapun yang bisa lebih penting dibandingkan dari pada menggarisbawahi dan mempertahankan martabat dari seorang manusia.³⁴⁰ Untuk menjadikan martabat sebagai tujuan dan sasaran hak asasi manusia adalah untuk memperkaya unsur dan kaliber dari hak-hak ini.

Persepsi Islam tentang hak asasi manusia adalah pada waktu yang sama teralin dengan kewajiban manusia. Kewajiban adalah suatu konsep utama, tentu saja fokus dari syari'ah, dan hal tersebut sering menjadi prioritas diatas hak-hak. Tentu saja itu melalui pemenuhan dan penerimaan kewajiban bahwa para individu

³⁴⁰Khaled Abou El Fadel, *Islam and the Challenge of Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2002), hlm. 25-30.

memperoleh hak tertentu. Martabat menjadi suatu kenyataan ketika ada suatu penekanan keseimbangan atas hak dan kewajiban.³⁴¹

Dunia tradisi dan kultur cenderung untuk berbeda tidak hanya didalam *value-content* dari hak asasi manusia tetapi juga mengenai banyak variabel lainnya yang mempengaruhi prioritas dan tempat yang diberikan kepada hak itu. Tradisi Barat mengusulkan kebebasan dalam rangka sebagian besarnya untuk menghindari hasil suatu sistem deposito pemerintah, sedang Islam menekankan hak dan kepentingan individu. Islam memberikan prioritas kepada kepentingan kolektif pada peristiwa bila yang belakangan bertentangan dengan kepentingan dari individu. Setelah berkata ini, individu menjadi agen yang utama dan fokus di dalam Hukum Islam.³⁴²

B. Sumber dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Membicarakan hak asasi manusia (HAM)³⁴³ berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan

³⁴¹Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008), hlm. 67-72

³⁴²Abu Hasan al-Mawardi, *al-Akham al-Sultaniya* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1985), hlm. 19-21

³⁴³Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza*, itu artinya "kamu wajib melakukan seperti ini." Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Lihat Ibrahim Anis, *Mu'jam al wasith*, juz I (Beirut: dar al-Fikri, tt), h, 1815; Munir Ba'al Bahi, *al-mawrid; A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'ilmi li al-Malayin, 1979), hlm. 798. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁴⁴ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah *subhānahu wa ta'ālayang* patut memperoleh apresiasi secara positif.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada disekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.

Kini, HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ia menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini.³⁴⁵ Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Begitu derasnya kemauan dan daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM, dengan sekejap mata *nation-state* dibelahan bumi ini memberikan respon, terlebih beberapa negara yang dijuluki sebagai “adikuasa”, memberikan kritik, tudingan, bahkan ancaman keras seperti embargo dan sebagainya.³⁴⁶

³⁴⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

³⁴⁵Abdul Muin Salim, “al-Huquq al-Insan al-Asasiyah fi al-Quran al-Karim”, dalam Azhar Arsyad, *et al. (ed.), Islam & Global Peace* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 339.

³⁴⁶Jimmy Carter dalam pernyataan politiknya ketika menjadi Presiden Amerika Serikat menepatkan isu HAM sebagai kebijakan strategi globalnya. Beliau mengatakan, “*because we are free, we can*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tataran konseptual,³⁴⁷ HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya.³⁴⁸

never be indifferent dictates a clear cut preference of those societies which share with us an abiding respect for individual rights..." Lihat A. Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional* (Bandung: Alumni 1980), hlm. 17. Harkristuti dalam tulisannya berjudul "HAM dalam kerangka Integrasi Nasional dan Pembangunan Hukum", mengatakan bahwa HAM telah menjadi *keyword* dalam perkembangan Indonesia beberapa tahun terakhir ini, bahkan telah pula menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan negara donor dalam menentukan bantuannya. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, "HAM dalam Kerangka Integrasi Nasional dan Pembangunan Hukum".

<http://www.komisi-hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=33>

³⁴⁷Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM, yaitu pertama hak-hak alami (natural rights), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*). Kedua, teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*). Pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Bentham yang mengatakan, *rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rhetorical nonsense, nonsensupon still*. Ketiga, Teori relativis kultural (*cultural relativist theory*). Teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan perbedaan berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, *that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings*. Keempat, Doktrin Marxis (*Marxist doctrine and human rights*). Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repositiory of all rights*). Lihat lebih lanjut Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14-25

³⁴⁸Lihat lebih lanjut Majda El-Muhtaj, "Konseptualisasi Hak Asasi Manusia; Sebuah Penelusuran Filosofis", dalam istilah: *Jurnal Hukum, Ekonomi & Kemasyarakatan* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Vol.2 No.1, Jan-Mar, 2003), hlm. 38, lihat juga Dante C. Simbulan, "Perjuangan Hak-hak Asasi Manusia", dalam *Prisma* (Jakarta: LP3ES, No.12 Desember 1979), hlm. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam konteks Indonesia, wacana HAM masuk dengan “indah” ke dalam pemikiran anak bangsa.³⁴⁹ HAM diterima, dipahami selanjutnya diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-historis dan sosio-politis. Dalam konteks reformasi, tidak jarang juga fenomena euforia demokrasi menjadikan HAM sebagai “kendaraan” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah menjadi “dua mata pisau” yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia, tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena didalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi.³⁵⁰

Dengan dan atas nama HAM, hak asasi yang sejatinya adalah untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme yang semu.³⁵¹ Pada tatanan inilah, kemudian

³⁴⁹Perbincangan HAM dalam konteks konstitusi Indonesia merupakan diskusi yang intens. Sejarah mencatat, perdebatan HAM telah dimulai pada saat perumusan negara Indonesia. Lebih lanjut lihat Herbert Feith dan Lance Castels, *Indonesian political Thinking 1945-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1970); Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid III (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960); Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hlm. 131-254

³⁵⁰Setidaknya, terdapat tiga golongan mereka yang membicarakan HAM. Pertama, mereka yang memahami arti dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia; kedua, mereka yang coba memahami HAM; ketiga, mereka yang euforia terhadap HAM termasuk mereka yang ikut-ikutan (masih mencari popularitas) dalam HAM. Pandangan dari ketiga golongan ini, sedikit banyak berimplikasi terhadap masa depan wacana HAM itu sendiri. Lihat Romli Atmasasmita, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, dalam Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed.), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 173.

³⁵¹Klaim seperti ini sering ditujukan kepada konsepsi HAM versi Barat. Tentang hal ini, terjadi polarisasi dua kutub antara HAM yang berasal dari Barat dan yang bersal dari Timur. Ada sebuah perbedaan mendasar antara dua kutub tersebut dan perbedaan itu menjadi wacana perdebatan yang intens, yakni bahwa lokalitas budaya antara kedua spektrum, Barat dan Timur, berbeda secara signifikan. Lihat lebih lanjut Harold Crouch, “Beberapa Catatan tentang Hak-hak Asasi Manusia”, dalam Haris Munandar (Peny.), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak*



terdapat kecendrungan bahwa HAM telah mengalami distorsi dan deviasi pemahaman.³⁵²

Lalu muncul pertanyaan: apakah HAM itu sebenarnya? Kalau ia sebagai hak yang diakui secara universal, lalu bagaimana keberadaan hak yang juga diakui oleh sebuah otoritas lokal kedaerahan yang tentunya meskipun memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan signifikan? Jika demikian halnya, mengapa HAM yang diakui bersifat universal itu kerap kali mengalami reduksi dan deviasi sehingga melenceng jauh dari pesan-pesan fundamentalnya?

Sejalan dengan itu, Amirul Hadi mengatakan sebagai berikut: Secara prinsip, nilai-nilai HAM yang dikembangkan oleh dunia modern yang global dewasa ini mengacu kepada konsep Barat yang berlandaskan tradisi Judeo-Cristian. Ini bermakna bahwa secara substansi konsep HAM yang ditawarkan adalah sempit dan terbatas, dengan menafikan realitas kultural dunia lain terutama Dunia Ketiga. Dalam konteks inilah status universal HAM yang dikembangkan oleh dunia Barat dewasa ini dianggap tidak *fair* dan bahkan dicermati sebagai upaya pelestarian dominasi Barat di dunia Internasional atau *neo-imperialism*. Dalam

Asasi di Indonesia, kumpulan esai guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 451. Bahkan, dalam konteks masyarakat Asia sekalipun memandang HAM versi Barat sebagai sebuah peradaban yang berbeda dengan sosio-politik masyarakat di Asia. Pembahasan ini dapat dilihat Dante C. Simbulan, "Perjuangan Hak-hak Asasi Manusia di Asia", dalam *Prisma**loc.cit.*

³⁵²Dengan nada pesimistik, Abdurrahman Wahid pernah berujar, "Untuk berterus terang, masalah hak-hak asasi manusia semakin lama semakin menjemukan untuk diperbincangkan di negara-negara sedang berkembang. Kenyataan yang ada secara sinis menunjukkan kepada hal-hal yang tidak menggembirakan yang berlangsung diaman-mana diseluruh dunia." Lihat Abdurrahman Wahid, "Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan Hak-hak Asasi Manusia", dalam *Prisma...op.cit.*, hlm. 21. Hemat penulis, hal ini lebih dikarenakan pada dua hal: pertama, rendahnya pemahaman filosofis masyarakat terhadap kandungan materi HAM. Kedua, harus diakui bahwa bobot materi HAM juga di tenggarai memiliki bias pemahaman (baca: interpretasi) yang "dipaksakan". Yang terakhir ini menjadi semakin mengkristal manakala kebijakan global atas nama PBB mengeluarkan keputusan dan ketetapan yang dinilai banyak kalangan sarat dengan kepentingan sepihak negara "adikuasa"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya, konsep HAM sangat bersifat lokal dan merupakan respons terhadap kondisi tertentu. Disinilah kita menyaksikan bahwa pembentukan dan substansi hak-hak asasi tersebut cenderung berubah mengikuti dinamika sosial. Pada waktu yang sama, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan pembaruan yang dilakukan terhadap institusi-institusi ekonomi dan sosial memberikan pengaruh terhadap pemahaman mengenai HAM itu sendiri.³⁵³

Atas dasar itu, maka upaya kaji ulang (*reconstruction*) terhadap konsep HAM merupakan langkah pertama yang harus dengan serius dilakukan. Sebagai *the starting point* penting dipahami bahwa *Universal Declaration of Human Rights*, Deklarasi HAM Universal (*UDHR/DUHAM*) merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia dalam menerjemahkan hakikat dan eksistensi dirinya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga bangsa, bahkan warga dunia. Artinya, meskipun dalam konteks pemahaman terdapat wacana seputar universalitas HAM, tidaklah berarti bahwa hal itu membawa kepada pemikiran yang simplistik. Adnan Buyung Nasution justru mengajak masyarakat untuk menetapkan perbedaan pemahaman tentang HAM secara bijaksana dan proporsional. Selengkapnya, beliau mengatakan sebagai berikut:

Hal itu (*DUHAM*) merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Akan tetapi bisa dipertanyakan apakah konsep tersebut seluruhnya tidak sejalan dengan kebutuhan dan kecendrungan instinktif manusia didalam masyarakat dan negara-negara non-Barat? Dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat non-Barat. Namun, argumen itu sendiri memperlihatkan

³⁵³ Amirul Hadi, "Damai dan Hak Asasi Manusia; Survey Historis", makalah dalam seminar Internasional Peace and Human Rights in religious Perspectives, Medan 13-4 Desember 2003.



kenyataan bahwa latar belakang budaya dan sejarah negara-negara non-Barat berbeda satu sama lain.

Oleh karena itu, konsep *partikularistik* tersebut tak dapat digeneralisasi sebagai konsep yang berbeda secara linear hanya dengan masyarakat Barat. Kenyataan bahwa sebuah masyarakat pada dasarnya adalah individualistik dan bahkan kapitalistik, tidak otomatis berarti bahwa dengan menerima konsep universalitas hak asasi manusia, maka semua manusia dibatasi untuk menganut konsep tersebut. Hak asasi manusia merupakan rumusan berbagai hak dasar yang *inheren* dalam diri setiap manusia. Perbedaan latar belakangbudaya dan sejarahantara masing-masing bangsa tidak berarti terdapat perbedaan dalam hak asasi itu sendiri.³⁵⁴

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.³⁵⁵

³⁵⁴Lihat Adnan Buyung Nasution, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antara Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 107-8. Bandingkan Todung Mulya Lubis, "Beberapa Persepsi non-Barat Mengenai Hak Asasi Manusia", dalam Selo Soemardjan (Peny.), *Hukum Kenegaraan RepublikIndonesia: Teori tatanan, dan Terapan*, untuk memperingati kelahiran almarhum Prof. Djokosoetono, SH. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 98-9

³⁵⁵Daftar hak-hak asasi manusia yang melindungi hak-hak sipil manusia pribadi merupakan hasil suatu perkembangan yang wajar kearah demokrasi. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 304.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan semena-mena yang diperankan oleh penguasa.³⁵⁶ Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Memang persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will dan political action* dari penyelenggara negara.³⁵⁷

Disinilah wacana negara demokrasi mencuat. Yakni, negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik. Maka dalam praktik kehidupan berdemokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum.

³⁵⁶Jenkins mengatakan, “*Shocked by the experiences through wich they had passed and thus made vividly aware of the objects conditions under which millions of men lived and the abuses to which they were subjected, the nations of the world disavowed the past and proclaimed their determination to create a brighter future. Human rights are the vehicle they those to delineate the contours of this future and to spell out its most important features*”. Lihat Iredell Jenkins, *Social Order and the Limits of Law: A Theoretical Essay* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm. 250. Lihat juga A.H. Robertson dan J.G. Merils, *Human Rights inthe World* (Manchester: Manchester University Press, 1996); Adamantia Pollis dan Pter Schwab (ed.), *Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives* (New York: Praeger Publishers, 1979)

³⁵⁷A. Masyhur Effendi, *op.cit.*, hlm.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Carl Joachim Friedrich menguatkan pendirian tersebut dengan pandangannya sebagai berikut: “Dengan demikian, konstitusi harus dipahami sebagai proses di mana tindakan politik dibatasi, dan pada saat yang sama diberi bentuk. Konstitusi memiliki fungsi yang pasti dalam tubuh politik. Jaminan hak-hak dasar dan pemisahan kekuasaan, baik fungsional maupun spasial, telah menjadi batasan tersebut. Hak-hak dasar mendefinisikan suatu bidang, dalam istilah norma-norma umum, di mana otoritas pemerintah, termasuk legislatif, tidak boleh masuk semua, kecuali dalam kondisi yang sangat khusus”.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata kunci” kehidupan masyarakat modern. Maka, sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Tak dapat dinafikan, karenanya konstitusi kemudian berisikan poin-poin mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali persoalan HAM. Kehadiran konstitusi merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu didalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah).

Hal senada juga diungkapkan oleh C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* yang mengatakan, tujuan konstitusi, singkatnya, adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan untuk mendefinisikan operasi kekuasaan yang berdaulat.³⁵⁸

Begitu pentingnya kehadiran konstitusi di sebuah negara, maka adalah sulit dibayangkan bagaimana sebuah negara yang mengalami krisis terhadap konstitusinya. Secara teoritis dapat disebutkan bahwa semua bangsa bernegara, menuangkan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual mengenai pengelolaan kehidupan mereka didalam bentuk konstitusi, baik tertulis (*written constitution*) atau tidak tertulis (*unwritten constitution*).³⁵⁹ Terlepas dari perbedaan pengertian konstitusi,³⁶⁰ penulis lebih mengarah kedalam pengertian konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar (*grondwet*).

Dalam pengertian ini, maka Undang-Undang Dasar (UUD) berperan penting sebagai hukum dasar bagi sebuah negara. UUD merupakan referensi terpenting bagi kehidupan dan mekanisme ketatanegaraan. Sebagai konstitusi

³⁵⁸C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London: Sigdwick & Jackson, LTD., 1960), hlm. 10.

³⁵⁹Seorang ahli hukum konstitusi Inggris, Wheare membagi konstitusi kedalam lima klasifikasi, yaitu (1) *written constitution and no written constitution* (konstitusi tertulis dan tidak tertulis); (2) *flexible constitution and rigid constitution* (konstitusi fleksibel dan riid); (3) *supreme constitution and not supreme constitution* (konstitusi derajat tertinggi dan tidak derajat tertinggi); (4) *federal constitution and unitary constitution* (konstitusi serikat dan kesatuan); (5) *presidential executive and parliementary executive constitution* (konstitusi sistim pemerintahan presidensial dan parlementer). Lihat lebih lanjut K.C. Wheare, *Modern Constitution* (New York: Oxford University Press), 1975, hlm. 14-31.

³⁶⁰Dikalangan para ahli hukum tata negara Indonesia, terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian konstitusi. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar (UUD/*Grondwet*), dan ada pula yang berpandangan bahwa konstitusi tidak sama dengan UUD. Kelompok yang pertama dipegang oleh G.J. Wolhaff, Sri Soemantri, dan J.C.T. Simorangkir, sedangkan yang mewakili kelompok terakhir adalah Van Apeldoorn, M. Solly Lubis, Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. Lebih lanjut dapat dilihat G.J. Wolhaff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas, 1960), hlm. 19; Sri Soemantri, *Prosedur dan sitem Perubahan Konstitusi* (Bandung Alumni), 1987, hlm. 1 (catatan no.1); J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 61; M.Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 45; Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 1981), hlm. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terulis, UUD umumnya berisikan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, struktur organisasi, dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu.³⁶¹ Hal tersebut juga berlaku bagi kita bangsa Indonesia. UUD 1945 diyakini sebagai konstitusi normatif yang menjiwai dan mendasari gerak dan arah pembangunan nasional. UUD 1945 merupakan konsep dasar sistim pengelolaan kehidupan nasional.³⁶²

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia,³⁶³ pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya Undang-Undang Dasar di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen ke-4 Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis. Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-

³⁶¹Lihat Dahlan Thaib, *et al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 16-7.

³⁶²Lihat M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum* (Bandung: Mandar Maju), 1989, hlm. 1-42. Lihat juga Majda El-Muhtaj dan Diana Evrina Nasution, "Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum: Sebuah Perspektif Teoretis dalam Memosisikan *Social Change* sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional", dalam *Istilah* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Vol.1 No.2 Apr-Jun 2002), hlm. 218.

³⁶³Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. UUD RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 (18 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. UUD 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)
6. UUD 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)
7. UUD 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001-10 Agustus 2002)
8. UUD 1945 dan Perubahan I, II, III, dan IV (10 Agustus 2002-sekarang)

Lihat juga TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 102



teks konstitusi sehinggalah tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik.

Menurut Todung Mulya Lubis, kesadaran akan perlunya jaminan HAM yang lebih luas sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah negeri ini kita mencatat bahwa pernah ada konstitusi, yaitu konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948).³⁶⁴

Hanya saja, ketika UUD 1945 kembali berlaku sejak 5 Juli 1959, HAM menjadi semakin kabur dan terkesan *ambiguous*. Selain karena terlalu umumnya muatan HAM dalam UUD 1945, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kaburnya wujud implementasi dalam beberapa perundang-undangan organik.³⁶⁵ Akibatnya, isu HAM sebatas retorika buah dari tarikan penafsiran yang sempit atas pasal-pasal HAM yang juga terbatas sekali, untuk tidak mengatakan nihil.

Hal ini sedikit mengalami perubahan Pasca-perubahan (Amandemen) Kedua UUD 1945 Tahun 2000.³⁶⁶ Setidaknya dalam perubahan kedua tersebut HAM masuk kedalam pasal-pasal konstitusi dan termuat secara tegas dalam

³⁶⁴Lihat Todung Mulya Lubis, "Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan", dalam *International IDEA: Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: International IDEA, 2002), hlm. 156.

³⁶⁵Terdapat 5 (lima) pasal yang bersifat umum, yakni: (1) Pasal 27 tentang persamaan dan kesamaan di hadapan hukum serta hak mendapat penghidupan yang layak; (2) Pasal 28 tentang hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; (3) Pasal 29 tentang hak memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya; (4) Pasal 31 tentang hak akan pengajaran; dan (5) Pasal 34 tentang hak fakir miskin untuk dipelihara oleh negara. Dari jumlah dan penekanannya jelas betapa minimalnya jaminan HAM dalam UUD 1945. Lihat lebih lanjut, *ibid.*, hlm. 155.

³⁶⁶Menurut Arbi Sanit, secara fisik, perubahan UUD 1945 telah meningkatkan jumlah pasal UUD 1945 dari 37 menjadi 77, dan memperbanyak jumlah ayat, dari 77 menjadi 197. Lihat Arbi Sanit, "Ranjau Politis Amandemen UUD 1945", dalam Majalah *Tempo*, 8 September 2002.



sebuah bab tersendiri dan pasal-pasal yang relatif lebih banyak mengatur perihal HAM.³⁶⁷

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM. Istilah satu dengan lainnya masing-masing analogis, sehingga menggunakan salah satu diantaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah dimaksud adalah sebagai berikut: 1. *Human Rights*, 2. *Natural Rights*, 3. *Fundamental Rights*, 4. *Civil Rights*, 5. Hak-hak Asasi Manusia, 6. Hak Kodrati.

Berkenaan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto (1984:28), mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari sering kita dengar istilah “Hak-hak Asasi” atau biasa disebut dengan istilah *human rights*, *natural rights*, *basic and indubitable freedoms*, *fundamental rights*, *civil rights* dan lain-lain.

Prof. A. Mansyur Effendy, menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mense rechten*, dan *rechten van mens*.

Penggunaan berbagai terminologi tentang suatu objek kajian keilmuan dalam ranah akademik sudah menjadi hal yang lumrah dan diterima sebagai suatu pengayaan istilah sebagaimana halnya dengan kajian keilmuan dibidang HAM.

³⁶⁷Lihat Bab X Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J Hasil Amendemen Kedua UUD 1945 Tahun 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

Marthen Kriale (Prof. Aswanto. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum PPS UNHAS), mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.

DF. Schetens, mengemukakan HAM adalah yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".

Pengertian HAM yang diutarakan diatas, lebih menitikberatkan kepada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari kovenan HAM.

Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.

Dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari negara atau pemerintah. HAM bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi HAM adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).

Filosofi HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena tat kala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir. Prof. Aswanto, mengutip pendapat DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.³⁶⁸

C. Konstruksi Konsep Hak Asasi Manusia

1. Konsep Hak Asasi Manusia Nasional.

Tumbang nya rezim Orde Baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan hak asasi manusia (HAM). Tuntutan agar dilakukan peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu kian merebak, sementara pelanggaran-

³⁶⁸Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Isu HAM seringkali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya, sementara aparat enggan bertindak karena khawatir dituduh melanggar HAM.

Pelanggaran tidak saja dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, melainkan juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dalam suasana reformasi tidak jarang wacana HAM memicu debat politik yang tidak berkesudahan. Disamping memberikan pencerahan, debat ini juga menimbulkan kebingungan. Karena itu, kesimpangsiuran dan tendensi penyalahgunaan isu HAM tampaknya hanya dapat diurai jika pemahaman yang memadai tentang gagasan awal, konsep dan norma-norma HAM, telah dimiliki.

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM, yang dimulai sejak zaman pergerakan hingga saat ini, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian membuat konstitusi tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM. Pendiri Budi Utomo pada tahun 1908 dapat dianggap sebagai titik awal timbulnya kesadaran untuk mendirikan suatu negara kebangsaan yang terlepas dari cengkraman kolonial, yang kemudian, dalam konteks HAM dikenal sebagai perwujudan dari *the right of self-determination*. Tiga Konstitusi yang pernah berlaku sejak masa kemerdekaan (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950), memuat pasal-pasal tentang HAM dalam kadar dan penekanan yang berbeda, yang disusun secara kontekstual sejalan dengan suasana dan kondisi sosial-politik pada saat penyusunannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyusunan muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 pun tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang ada, seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta upaya mewujudkan negara berdasarkan hukum. Disamping itu, juga terdapat faktor-faktor eksternal tertentu yang turut mempengaruhi perumusan konsep dari norma-norma HAM di Indonesia.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 yang merupakan arah bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional telah menggariskan salah satu visi yang harus dilaksanakan, yakni perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAMberlandaskan keadilan dan kebenaran. Arah kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya penegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta penghargaan terhadap HAM dan kelanjutan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM.³⁶⁹

Suasana kondusif yang mulai tercipta saat ini bagi pertumbuhan dan perkembangan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai HAM perlu diindak lanjuti dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Berbagai bentuk kegiatan penyadaran dan pendalaman HAM seringkali diselenggarakan oleh berbagai

³⁶⁹Bagir Manan, dkk "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Jakarta: YHDS, 2001), hlm. 1-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan, baik sipil maupun militer, perguruan tinggi, LSM, birokrasi, aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, suatu penelitian mengenai Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia dipandang perlu untuk dilakukan.

Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan.

Ismail Suny berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu.³⁷⁰

Pertama, menjadikannya bagian yang integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada UUD 1945, sebagai yang

³⁷⁰ Ismail Suny, 'Aspek-aspek Hukum dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara' dalam Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia Nomor Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1968 hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditempuh dengan Piagam Hak-hak Warga Negara (*The Bill of Rights*), yang merupakan Amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis di mana dalam *the body of the Constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur dalam Pasal 37.

Kedua, menetapkan dalam Ketetapan MPR, keberatannya, suatu Ketetapan MPR pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar '*a declaration of general principles*', tanpa akibat hukum sama sekali.

Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya.

Dari ketiga bentuk hukum di atas tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia adalah menguraikan rincian HAM.

UUD 1945 yang pada awalnya hanya membuat enam pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada bulan Agustus tahun 2000.

Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya Perubahan. Ketentuan itu antara lain ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan ratifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain, ketetapan ini telah menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi adalah undang-undang, dan tidak boleh dalam jenis lain, misalnya Keputusan Presiden.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk menjamin HAM serta penyelesaian proses peradilan terhadap pelanggaran HAM yang belum ditangani secara tuntas. Sedangkan dalam kaitannya dengan budaya hukum, pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran HAM dalam seluruh aspek kehidupan.

Pada bagian ini akan dipaparkan perkembangan pengaturan HAM di bidang sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Paparan mengenai peraturan-peraturan dasar HAM yang meliputi perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang



HAM dan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM akan mendahului paparan mengenai berbagai pengaturan HAM di Indonesia

Pada pembahasan rancangan UUD yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancangan UUD telah menyatakan kehendak bahwa di kemudian hari akan dibuat suatu UUD baru, karena UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau yang ia namakan sebagai UUD kilat³⁷¹. Dari hal itu, tampak kearifan dari para pembentuk UUD 1945 yang menyadari bahwa UUD tersebut tidak lengkap sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang kemudian diatur dalam pasal 37.

Salah satu ketidakberhasilan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum antar lain disebabkan adanya kekosongan materi muatan, misalnya tentang HAM.³⁷²

Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul tumbanganya rejim otoriter. Pandangan kritis terhadap UUD 1945, yang dahulu Ditabukan, sejak masa reformasi membenarkan pendapat bahwa UUD tersebut tidak secara eksplisit mengatur masalah HAM. Bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa UUD 1945 tidak mengenal HAM karena di rumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM.

Walaupun telah ada UUNomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII tahun 1998, namun di masukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan

³⁷¹ Sekretariat Negara, *op.cit.*, hlm. 311-312.

³⁷² Bagir Manan, *Pembaharuan UUD 1945*, Makalah, 1998, hlm. 23-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara Konstitusional (*constitutional rights*). Pesan ini kemudian ditangkap oleh panitia Ad Hoc (PAH)I dan di rekomendasikan kepada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 agar dimasukkan ke dalam Amandemen ke-2 UUD 1945. Pasal pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam BAB XA dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Walaupun pencantuman pasal-pasal tersebut dinilai positif dari berbagai segi, namun dalam beberapa hal perlu dikritisi karena dianggap mengandung kelemahan baik dari segi perumusan, struktur dan sistematikanya. Misalnya, pengelompokan hak-hak tidak beraturan yang pada gilirannya menunjukkan bahwa para perumus kurang memahami jenis dan pengelompokan HAM yang lazim dalam instrumen hukum HAM internasional. Dari segi substansinya tampak kental dengan nuansa politis sehingga dapat mengurangi makna dari HAM itu sendiri.

Beberapa ahli hukum bahkan berpendapat bahwa pasal 28I Perubahan Kedua ini merupakan *constitutional constraint* bagi penegakan HAM di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas hukum berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, di pihak lain terdapat pendapat bahwa pasal 28I tersebut dapat diterobos melalui pasal 28J. Ketentuan dalam pasal 28J tidak dapat digunakan karena pada dasarnya pembentuk pasal ini menderogasi ketentuan yang dibuat sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari multi interpretasi ataupun masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh ketidakjelasan perumusan maka perlu dilakukan peninjauan ulang dan perombakan secara konprehensif di masa yang akan datang.

Ketetapan ini disahkan oleh rapat paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998 pada masa awal reformasi tuntutan mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemukakan dengan kuat untuk mengakomodasi keinginan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengaturnya adalah ketetapan MPR. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor:

Pertama, tampaknya nuansa keengganan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 masih cukup kuat. Pada masa awal reformasi, gagasan mengenai perlunya reformasi konstitusi sudah cukup kuat, namun gagasan itu belum cukup disambut secara antusias dalam tataran elit politik.

Kedua, secara prosedural ketetapan yang harus dipenuhi untuk sahnya Ketetapan MPR dipandang lebih mudah dibandingkan dengan perubahan UUD. Sahnya putusan MPR cukup disetujui berdasarkan suara terbanyak (Pasal 2 ayat [3] UUD 1945), sedangkan sahnya perubahan harus berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 37 UUD 1945.

Ketiga,³⁷³ dari segi persyaratan materiil perubahan UUD tidak boleh mengganggu keselarasan dan harmoni kaidah-kaidah yang tercantum dalam Pembukaannya sebagaimana terlihat pada Penjelasan Umum UUD 1945 angka III yang berbunyi, 'Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang

³⁷³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1998, hlm. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam Pembukaan di dalam pasal-pasal nya'. Dengan demikian, dalam melakukan perubahan UUD diperlukan syarat-syarat yang sangat berat sedangkan penetapan ataupun perubahan Ketetapan MPR tidak memerlukan syarat seberat bagi UUD. Hal ini dikarenakan Ketetapan MPR itu tidak secara langsung merupakan penciptaan dalam pasal-pasal dari Norma Fundamental Negara atau Pancasila.

Ketetapan ini terdiri atas tujuh pasal di mana naskah HAM yang berupa Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM serta Piagam HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan

Judul ketetapan ini mengindikasikan tidak adanya perbedaan hak-hak asasi manusia dengan hak-hak warga negara. Hal ini berbeda, apabila dibandingkan dengan Rancangan Ketetapan yang telah dihasilkan oleh MPRS pada tahun 1968 yang diberi judul Piagam HAM dan hak-hak serta Kewajiban Warga Negara yang secara jelas menganut perbedaan antara hak-hak asasi manusia dengan hak-hak serta kewajiban warga negara. Karena pada kenyataannya terdapat hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak asasi, namun hanya dapat dinikmati oleh warga negara, misalnya hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Apabila ditinjau dari sifat materinya Ketetapan ini apakah dapat dikategorikan sebagai ketetapan yang bersifat mengatur ataukah ketetapan yang isinya mengikat umum secara langsung?³⁷⁴ Tampaknya Ketetapan ini dapat

³⁷⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar membagi Ketetapan MPR berdasarkan sifat materinya menjadi:

- Yang bersifat mengatur;
- Yang sifat materinya mengikat umum secara langsung;
- Yang materinya merupakan penetapan;
- Yang materinya bersifat pernyataan

dikategorikan kedalam kedua-duanya baik yang bersifat mengatur maupun yang mengikat umum secara langsung. Ia bersifat mengatur karena menurut Dedi Soemardi dan Hamid Attamimi, Ketetapan MPR merupakan peraturan dasar dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya.³⁷⁵ Ketetapan dikatakan bersifat mengikat umum apabila ia dalam pelaksanaannya akan mengikat umum, misalnya Ketetapan tentang Pemilihan Umum ataupun Ketetapan tentang Referendum.³⁷⁶ Meskipun dalam kenyataannya, Ketetapan tidak memenuhi syarat untuk mengikat umum karena tidak diundangkan dalam Lembaran Negara.

Ketentuan yang terdapat dalam ketetapan No. XVII/MPR/1998 menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati dan menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh masyarakat. Selain itu kepada Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk meratifikasi berbagai instrumen Internasional sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan ini sekaligus menegaskan peningkatan dasar hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang semula berupa Keppres menjadi UU dan komisi ini berfungsi untuk melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.

Berkaitan dengan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, Ketetapan ini menyatakan bahwa pada dasarnya pandangan dan sikap

Lihat Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, 1987, hlm. 31-34.

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 31

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Pernyataan ini sekaligus menegaskan adanya penerimaan bahwa HAM bersifat universal serta partikular yang ditandai dengan perkataan 'budaya bangsa'.

Dalam bagian selanjutnya yang bertajuk Piagam HAM sistematisa didahului oleh Pembukaan yang pada dasarnya memuat cita-cita politis, moral dan religius.³⁷⁷ Secara umum, isi Pembukaan ini merupakan pengulangan dari bagian I yang mengungkapkan sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap HAM. Bagian ini terdiri atas sepuluh bab dengan memuat 44 Pasal.

Kategorisasi HAM yang dilakukan adalah dengan membagi menjadi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, serta hak kesejahteraan. Tidak ada alasan yang jelas mengapa kategorisasi semacam ini yang diambil. Sebagaimana umumnya, pengelompokan HAM secara tradisional sesuai dengan perkembangan HAM adalah hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain HAM, ketentuan ini juga mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Pelaksanaan hak dan kebebasan itu dapat dibatasi oleh UU. Hal esensi lainnya adalah pengaturan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga (non-derogable) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

³⁷⁷ Ismail Sunny, *op.cit.*, hlm.16.



dilakukan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Perlindungan lebih terhadap HAM menurut Ketetapan ini dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin. Selain itu, perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat harus dilindungi.

Pasal 43 menghaluskan peran yang lebih aktif dari Pemerintah dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Atau dengan kata lain, Pemerintah merupakan tulang punggung utama dalam pasal terakhir yakni Pasal 44 dinyatakan bahwa perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari Ketetapan ini. Berangkat dari aspek materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, harus dipahami bahwa peraturan pelaksanaan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang, karena bentuk undang-undang memiliki materi muatan yang mengakomodasi kehendak rakyat. Pada dasarnya hanya rakyatlah yang dapat mengatur dirinya dalam kaitan dengan HAM.

UU yang diundangkan pada tanggal 23 september 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini ternyata dalam Salah satu dasar hukumnya yang mencantumkan Ketetapan tersebut.

Pada saat UU ini sedang didiskusikan terdapat beberapa pendapat yang terbagi dalam dua kategori besar, yakni pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai UU, dan oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tidak perlu dibuat satu UU khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa pembentukan UU materi khusus tentang HAM perlu dilakukan mengingat Ketetapan MPR tidak berlaku operasional dan berbagai UU yang ada belum seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu UU tersebut akan berfungsi sebagai UU payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HAM yang sudah ada selama ini.³⁷⁸

Dilihat dari sudut ilmu perundang-undangan kritik terhadap UU ini mencakup antara lain:

Pertama, terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau kaidah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya Bab mengenai asas-asas dasar. Asas-asas dasar pada prinsipnya bukan merupakan kaidah atau norma hukum. Jadi asas tidak perlu secara eksplisit dimuat dalam UU melainkan akan menjiwai pasal-pasal yang ada dalam UU bersangkutan.

Kedua, penyimpangan terhadap dasar asas bahwa hukum tidak berlaku surut seharusnya tidak diletakkan pada Bagian Penjelasan, melainkan pada Bagian Bang Tubuh UUD. Hal ini disebabkan Penjelasan tidak memuat norma atau kaidah. Atau dengan kata lain Penjelasan tidak berfungsi untuk menciptakan kaidah hukum.

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan HAM terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak

³⁷⁸ Lihat Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita dan anak-anak. Sama halnya dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, UU ini tidak secara tegas menyatakan alasan kategorisasi HAM. Pada bagian Penjelasan hanya disebutkan bahwa penyusunan UU ini berpedoman pada DUHAM. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita. Konvensi PBB tentang hak-hak anak serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Meskipun tidak dikelompokkan secara tegas, pada dasarnya materi HAM telah mencakup HAM di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Masih berkaitan dengan substansi UU. Tampaknya UU ini membaurkan azas-azas dasar dengan ketentuan mengenai HAM itu sendiri. Apabila diteliti lebih lanjut, pasal-pasal yang memuat azas-azas dasar justru mengatur HAM, misalnya pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak yang bersifat non-derogable, hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di bidang hukum yang berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (pasal 5 ayat [1] dan [2] pasal 5 ayat [3] yang mengharuskan adanya perlindungan HAM yang lebih terhadap kelompok yang rentan

Namun, satu hal yang perlu dihargai dari UU ini adalah penempatan pengaturan mengenai HAM anak dan HAM wanita yang dilakukan secara terpisah. Penempatan ini tampaknya sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional, yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan wanita.

Selain memuat ketentuan-ketentuan mengenai HAM, UU Nomor 39 tahun 1999 juga mengatur tentang Komnas HAM mulai dari pasal 75 - pasal 99. Pada



dasarnya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi

Secara struktural Komnas HAM merupakan fungsi garis yang ditandai dengan adanya sub.komisi dan dilengkapi oleh fungsi yang ditunjukkan pada jabatan-jabatan administrasi, antara lain sekretaris jenderal, pembentukan sub komisi didasarkan pada fungsi-fungsi Komnas HAM, dan tidak didasarkan pada pengelompokan HAM, misal HAM bidang sipil dan politik HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya HAM wanita dan lain-lain

Berkaitan dengan fungsi pemantauan, Komnas melaksanakan fungsi sebagai badan penyelesaian sengketa alternatif dan ombudsman. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur wewenangnya. Dalam praktek, Komnas harus secara tegas memisahkan kedua fungsi ini.

Sekjen Komnas HAM dijabat oleh seorang pegawai negeri dan bukan merupakan anggota Komnas HAM. Ketentuan semacam ini dapat diterima mengingat jabatan Sekjen hanya berkisar pada masalah teknis administrasi Komnas HAM. Oleh karena itu para anggota Komnas HAM dapat berkonsentrasi penuh untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Berkaitan dengan fungsi pemantauan, Komnas HAM dapat bertindak sebagai badan penyelidik dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga terdapat pelanggaran HAM. Perlu dipikirkan bahwa pemantauan ini meliputi juga pemantauan terhadap kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan instrumen-instrumen hukum Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM dalam kaitan dengan fungsi mediasi yaitu penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Tampaknya karena sistem Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Indonesia bukan sistem pemerintahan parlementer, rekomendasi ini tidak mempunyai pengaruh politik. Akan lebih efektif apabila Komnas dapat mengajukan gugatan atas nama pihak lain yang HAM-nya telah dilanggar.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 dapat dianggap sebagai tonggak hukum kedua dalam penegakan HAM dalam level Undang-Undang setelah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama, yang telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebelumnya.

UU Nomor 26 tahun 2000 pada dasarnya memuat IX Bab dan 51 Pasal. Bab 1 tentang Ketentuan Umum memuat Lima pasal, yang menjabarkan tentang pengertian HAM, pengertian Pelanggaran HAM, pengertian Pengadilan HAM, pengertian “setiap orang” dan pengertian “penyelidikan”.

Bab II UU terdiri dari dua pasal, yang menjabarkan tentang Kedudukan dan Tempat Kedudukan Pengadilan HAM. Bab III terdiri dari enam pasal, menjabarkan Lingkup Kewenangan Pengadilan HAM.

Dalam Bab II UU ini juga terdapat pasal 7, 8, dan 9 yang mengatur kategorisasi pelanggaran berat HAM. Sesuai dengan pasal 7 UU pelanggaran berat HAM dibagi menjadi dua kategori, yakni kejahatan genosida dan kejahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kemanusiaan. Pasal 8 UU selanjutnya menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
- e. Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Genosida sendiri dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap komunitas tertentu, dan karenanya, memiliki karakter pembunuhan massal. Berkaitan dengan artian ini, kritik terhadap pasal ini adalah tidak adanya ketentuan eksplisit yang menyatakan jumlah minimal korban dari komunitas yang bersangkutan. Seharusnya, karakter massal, juga ditentukan secara jelas sehingga kategorisasi genosida tidak tumpang tindih dengan kategorisasi lainnya.

Kategori kedua dari pelanggaran berat HAM sendiri dijabarkan dalam pasal 9 UU, yang merinci tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal ini dikaitkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan ini adalah:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum Internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau pukulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau
- j. Kejahatan apartheid

Pasal ini tampaknya berusaha mengakomodasi segala bentuk pelanggaran berat HAM kategori kedua yang berkaitan dengan serangan secara meluas dan sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil. Karenanya, setiap jenis kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang selalu terkait dengan serangan yang meluas dan sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelemahan dari pasal ini adalah tidak adanya ketentuan tentang penyiksaan (*torture*) yang diatur secara mandiri. Sesuai dengan ketentuan hukum internasional, penyiksaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM sekalipun hal itu tidak merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.

Bab IV UU pada dasarnya mengatur tentang Hukum Acara pemrosesan pelanggaran berat HAM, yang terurai dari Pasal 10 sampai pasal 33 UU, dan dipecah dalam delapan bagian. Kedelapan bagian tersebut terdiri dari: bagian kesatu, tentang ketentuan umum, bagian kedua, tentang penangkapan, bagian ketiga, tentang penahanan, bagian keempat, tentang penyelidikan, bagian kelima, tentang penyidikan, bagian keenam, tentang penuntutan, bagian ketujuh, tentang sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc, dan bagian kedelapan, tentang pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesuai dengan bentuknya yang khusus, Pasal 10 bab ini menyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam UU ini, hukum acara perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa hukum acara Pengadilan HAM pada dasarnya bersifat sempit atau menjiwai Hukum Acara Pidana. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan pemrosesan secara khusus, sehingga jika ditentukan oleh UU ini secara residual, hukum acara yang khusus di luar Hukum Acara Pidana biasa dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus tersebut. Hal yang masih krusial untuk dipertanyakan adalah, siapakah yang akan menetapkan bahwa kasus-kasus tersebut perlu diproses menurut Hukum Acara yang bukan Hukum Acara Pidana biasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal lain yang menarik dari bab mengenai Hukum Acara ini adalah eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam Bab IV Bagian keenam tentang Penyelidikan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. Selanjutnya, dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa Komisi Nasional HAM dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komisi Nasional HAM dan unsur masyarakat. Dalam kaitan ini, tampak jelas bahwa eksistensi badan kepolisian sebagai aparat penyelidikan dalam lembaga peradilan umum digantikan oleh Komisi Nasional HAM. Lebih jauh lagi, Komisi Nasional HAM dapat membentuk tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat. Sayangnya, keterlibatan unsur masyarakat, khususnya yang terkait dengan syarat-syarat anggota masyarakat yang dapat mewakili unsur masyarakat, belum diatur. Hal ini berbeda dengan eksistensi tim penyidik ad hoc dalam ketentuan selanjutnya.

Dalam Bab IV Bagian kelima tentang Penyidikan Pasal 21 ayat (1) ditentukan bahwa penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama dijabarkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat. Pasal 21 ayat (5) melengkapi ketentuan-ketentuan tersebut dengan syarat-syarat seseorang yang dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc, yakni:

- a. Warga negara RI
- b. Berumur minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Berpendidikan SH atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- f. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM

Meskipun kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 merupakan syarat yang dapat sangat elastis, ketentuan-ketentuan tentang tim penyidik ad hoc ini dapat dikatakan lebih lengkap daripada ketentuan-ketentuan tentang tim penyelidik ad hoc.

Bab V UU selanjutnya mengatur tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Aspek ini amat tepat untuk diatur mengingat banyaknya saksi kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang potensial untuk mendapat tekanan ekstra karena sifat kasus yang seringkali bernuansa politis. Dalam Pasal 34 ayat (1) bab ini dinyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Selanjutnya, ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Pasal ini kemudian diakhiri dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kaitannya dengan ayat terakhir ini, peraturan pemerintah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud sebaiknya diletakkan sebagai salah satu prioritas utama pembuatan. Di dalamnya, ketentuan tentang penghargaan atau sebaliknya, sanksi bagi aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang lalai menjalankan tugas yang diwajibkan dalam ayat (2), jika tidak menjadi ayat tambahan dalam pasal ini, harus juga diatur. Hal ini untuk menghindari lemahnya penerapan pasal ini karena tugas penegak hukum dan aparat keamanan tersebut harus dilakukan secara cuma-cuma.

Bab VIUU selanjutnya mengatur tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya.

Bab VIII UU pada dasarnya merupakan khusus tentang ketentuan pidana. Secara garis besar, Bab VIII pasal 36 UU mengatur tentang sanksi pidana bagi genosida, sedangkan Pasal 37, 38, 39, dan 40 UU menetapkan sanksi pidana bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal yang menarik dari pasal-pasal ini adalah bahwa pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum internasional, dan kejahatan apartheid, dijatuhi sanksi yang sama berat dengan pelaku genosida. Kesamaan sanksi ini tentu menjadikan kategorisasi antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi agak kabur. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam praktek.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, sebelum Bab IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup, Bab VIII UU ini mengatur tentang eksistensi Pengadilan HAM ad hoc. Dalam bab VIII Pasal 43, diatur ketentuan yang kontroversial yakni ketentuan tentang kemungkinan asas hukum berlaku surut. Secara umum, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen kedua, ketidakmungkinan seseorang untuk dikenakan sanksi hukum yang berlaku surut, pada dasarnya merupakan HAM. Karenanya, pasal ini memerlukan pengkajian lebih jauh.

Selanjutnya, dalam ayat (1) Pasal 43 UU ini dikatakan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ayat (2) Pasal ini kemudian menyatakan bahwa Pengadilan HAM ad hoc termaksud dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) berdasarkan peristiwa tertentu, dengan Keputusan Presiden. Pengadilan HAM ad hoc ini sendiri, merujuk ayat (3) Pasal 43 ini, berada di lingkungan Peradilan umum.

Kelebihan yang berkaitan dengan eksistensi DPR dalam Pasal 43 UU ini adalah karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, maka rakyat sebagai pemangku HAM yang sebenarnya akan memiliki akses untuk menentukan kualitas pelanggaran kasusK kekurangannya, karena DPR merupakan lembaga politis, pengadilan HAM ini akan sulit mengelak dari nuansa yang terlalu politis, sehingga potensi politisasi lembaga pengadilan akan tetap ada.

Secara khusus, eksistensi Pengadilan HAM ad hoc menurut Pasal 43 UU ini pun harus diklarifikasi lebih jauh. Dengan asumsi bahwa identitas ad hoc menandakan sifatnya yang sementara, maka kesementaraannya harus dijabarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejara jelas. Kesementaraan di sini bisa berorientasi pada kasus, jadi Pengadilan HAM ad hoc itu hanya dibentuk karena suatu kasus tertentu, atau berorientasi pada fungsi, yakni khusus mengadili tiap kasus yang terkena azas berlaku surut. Jika tidak ada kasus yang berkaitan. Pengadilan ini berhenti menjalankan fungsinya. Pilihan terhadap orientasi fungsi tampaknya lebih menjamin legitimasi badan ini sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif yang mandiri.

Hal yang juga patut dipertanyakan adalah bentuk Keppres bagi eksistensi Pengadilan HAM ad hoc. Pembuatan Keppres, sesuai dengan TAP MPR Nomor III Tahun 2000, merupakan kewenangan penuh presiden. Meskipun pembentukan Komisi Nasional HAM yang pertama juga berlandaskan Keppres dan telah terbukti bahwa Komisi Nasional HAM dapat bertindak independen, pembentukan suatu lembaga yudikatif melalui kewenangan eksekutif tampaknya akan membuka peluang intervensi yang terlalu jauh dari lembaga kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden, terhadap lembaga kekuasaan yudikatif. Padahal pelaku pelanggaran berat HAM biasanya erat kaitannya dengan lembaga eksekutif.

Jika hal ini dikaitkan juga dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai Wakil pemerintah dalam penuntutan pelanggaran berat HAM secara umum, kontrol tampaknya juga diperjelas secara yuridis. Hal ini dikarenakan, secara historis kasus terbanyak dari pelanggaran berat HAM memang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintahan. Jika tidak ada kontrol, penuntutan oleh pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap unsur pemerintah sendiri dapat menjadikan proses Pengadilan HAM amat bias politik.³⁷⁹

Penting pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dengan segala dinamikanya memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikiran, khususnya dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia. Disadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa “ongkos” perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Selain itu, rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri.

Jika kita melirik hal ikhwal ketatanegaraan Indonesia, maka hal yang pertama dan terpenting dilakukan adalah menoleh ke dalam seluk beluk konstitusi Indonesia, yang di akui sebagai hukum dasar bagi ketatanegaraan Indonesia. Menariknya, dalam aturan normatif konstitusional Indonesia, ditemukan berbagai variasi ketentuan dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. UUD 1945

UUD 1945 sering disebut dengan “UUD Proklamasi”. Dikatakan demikian karena kemunculannya bersama dengan lahirnya negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran, khususnya pengaturan

³⁷⁹Bagir manan, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia” (Jakarta: YHDS), hlm. 80-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAM dalam konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI.³⁸⁰

Satu hal menarik bahwa meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara (HAW).

³⁸¹

Diakui bahwa proses Perumusan UUD 1945 sangat Terseka-gesa.³⁸² Waktu yang tersedia dirasakan sangat pendek apalagi dalam kenyataan dihadapkan dengan momentum Proklamasi Kemerdekaan RI. Atas dasar itu, Presiden Soekarno menandakan bahwa UUD 1945 adalah “UUD kilat”, yang karenanya harus dilakukan perubahan pada saat

³⁸⁰Lihat Moh Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* vol 1 (Jakarta: Yayasan Prapanca 1959); Saifroeddin Bahar, et.al. (Peny.) *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995)

³⁸¹ HAM jenis ini disebut oleh Mahfud MD sebagai HAM yang di partikularistik. Antara HAM dan HAW adalah dua konsep yang berbeda. Yang pertama mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, dimanapun mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil dan dialihkan, sementara yang terakhir hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara. ketentuan yang bernada HAW atau HAM partikularistik ini dapat dijumpai pada pasal 26, 27, 28, dan 29. Lebih lanjut lihat Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi...*, op.cit., hlm. 165-6

³⁸²Penyusunan rancangan UUD 1945 yang berlaku saat ini resmi dirampungkan oleh BPUPKI selama 40 (empat puluh) hari, yaitu sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Waktu yang relatif singkat ini setidaknya memberikan pertimbangan bahwa UUD 1945 lahir dari proses pembahasanyang “superkilat”. Lihat Sri Soemantri, *Prosedur...*, hlm.226. Lihat juga Mardah El-muhtaj, “Indonesia dan Konstitusi 2002; Mencermati Hadirnya Komisi Konstitusi versi MPR dan koalisi untuk Konstitusi Baru”, dalam *Istilah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan* (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU Vol I No. 4, okt-Des, 2002), hlm. 448.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merdeka.³⁸³ Jelas kelihatan bahwa pengaturan HAM berhasil di rumuskan dalam UUD 1945. itu artinya, bahwa jauh sebelum lahirnya UDHR/DUHAM versi PBB, Indonesia ternyata lebih awal telah memberlakukan sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan HAM di Indonesia.

b. Konstitusi RIS 1949

UUD RIS sering disebut dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949.³⁸⁴ UUDRIS 1949 yang disusun di bawah bayang-bayang Konferensi Meja Bundar (KMB), menurut Adnan Buyung Nasution, menjadi Konstitusi RIS dan berlaku sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Karena itu secara formal, dengan UURIS ini perjuangan kemerdekaan nasional dan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat telah tercapai.³⁸⁵ Meskipun, secara substansial politik RIS merupakan kemenangan bagi perjuangan

³⁸³Bolland mengabadikan pernyataan Soekarno sebagai berikut: *Soekarno stressed once again that this constitution was only a "Temporary Constitution", a "Lighting Constitution", a "Revolutionary Constitution", which in due time could be perfected by the elected representatives of people.* Lihat B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Insonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 37; Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1978), hlm. 8; Benhard Dahm, *Hostory of Indonesian in the Twentieth Century* (London: Pall Mall Press, 1971), hlm. 107; Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler"* tentang *Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1981), hlm. 43.

³⁸⁴Nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 secara resmi menjadi penyebutan bagi UUDRIS. Lihat J.T.C. Simorangkir, *Penetapan UUD...op.cit.*, hlm. 35. Lahirnya Konstitusi RIS 1949 menandakan babak baru sistem negara federal Indonesia. Dan akibatnya, berbagai struktur ketatanegaraan mengalami perubahan yang radikal sebagaimana ditegaskan Schiller, *"The most striking factor in the constitutional development of the Duth-occupied postions of the Indonesian archipelago during the years from 1945 to 1949 was establishment of a federal form of government. At first glauce it appears that a federal structure was at complete variance with the unitary form of government characterizing the nederlans Indies for well over a century"*. Lebih lanjut baca A. Arthur Schiller, *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949* (The Hague: W.van Hoeve Ltd., 1955), hlm. 14.

³⁸⁵Adnan Buyung Nasution, *The Inspiration...op.cit.*, hlm. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional Indonesia, namun menurut Herbert Feith, secara hukum Belanda berhasil memaksakan kehendaknya yang mengakibatkan kekacauan administrasi pemerintahan yang luar biasa.³⁸⁶

Dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal dari mulai pasal 7 sampai dengan pasal 33. Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang diakui sebagai manusia”. Selain itu, hak atas perlindungan hukum juga termuat pada pasal 13 ayat (1), “Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya beralasan atau tidak”.

c. UUD 1950

UUDS 1950 terdiri atas enam bagian dan 43 pasal. Dari tiga UUD yang berlaku sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, menurut Adnan Buyung Nasution, negara ini pernah memiliki UUD yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap daripada UDHR/DUHAM, yaitu UUDS 1945.³⁸⁷

³⁸⁶Selengkapnya Feith mengatakan, “*In political substance RUSI (Republic of United State of Indonesia) represented a victory for Indonesia nationalism, but in legal form the Dutch had succeeded in imposing their will. One effect of this discrepancy of sovereignty*”. Lihat Herbert Feith, *The Decline...op.cit.*, hlm. 59

³⁸⁷Adnan Buyung Nasution, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Tahir (ed.), *Agama...op.cit.*, hlm. 115. Lihat juga Satria Arinanto, *op.cit.*, hlm. 10-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan HAM diatur pada bagian V (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) dari mulai pasal 7 sampai pasal 33. Menariknya, pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada bagian VI (Azas-azas Dasar), Pasal 35 sampai dengan Pasal 43. Kewajiban dasar ini dapat dilihat, misalnya pada Pasal 36 yang berbunyi: "Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak yatim-piatu".

d. Kembali kepada UUD 1945³⁸⁸

Pasca keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami suasana *setback*.³⁸⁹ Dekrit tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945.³⁹⁰

e. Amandemen UUD 1945

³⁸⁸Periode kedua berlakunya UUD 1945 berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 (ditandai dengan Perubahan 1 UUD 1945).

³⁸⁹Dikatakan *Setback* karena apa yang dirumuskan oleh Majelis Konstituante melalui "persidangan marathon" sejak 1956-1959, praktis dianggap *deadlock*. Dan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan Kembali Kepada UUD 1945. Lebih lanjut lihat Departemen Penerangan RI, *Kembali Kepada UUD 1945*, (Jakarta: Penerbitan khusus Departemen Penerangan RI, tt.). Tentang Perdebatan Majelis Konstituante Dapat dibaca Adnan Buyung Nasution. *The Aspiration...*, loc. cit.

³⁹⁰Menurut M. Solly Lubis, "UUD 1945 mengandung pengakuan dan jaminan yang luas mengenai hak-hak asasi walaupun secara redaksional rumusan mengenai hak-hak itu adalah sederhana dan singkat dalam UUD". Lihat M. Solly Lubis, "Hak-hak Asasi menurut UUD 1945", dalam Padmo Wahjono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan... op.cit.*, hlm. 335.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia.³⁹¹ Perubahan UUD 1945 dilakukan sebagai buah dari amanat reformasi pembangunan nasional sejak turunnya rezim Soeharto (1967-1998). Terdapat empat kali perubahan yang berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Khususnya mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai pasal 28A sampai dengan 28J.³⁹² Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemajuan lain dapat dilihat pada pasal 28I yang berbunyi: Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya

³⁹¹Ni'matulhuda, *op. cit.*, hlm. 1

³⁹²Satya Arinanto, *op.cit.*, hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.³⁹³

2. Problematika Partikularisme dan Universalisme Hak Asasi Manusia

Dalam peradaban modern, wacana hak asasi manusia (HAM) sangat krusial dan penting. Hal itu terjadi karena seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan, manusia semakin menyadari hakikat diri dan hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan lepas dari sesuatu membelenggu dirinya. Tidak ada persoalan dan bidang kehidupan yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan atau HAM. Nilai-nilai kemanusiaan itu menyentuh luas berbagai bidang, seluas bidang kehidupan itu sendiri. Upaya penyadaran maupun penegakannya pun berlangsung secara serius dan sungguh-sungguh. Karenanya, dengan sendirinya setiap pribadi sangat penting memahami makna atau konsepsi tentang HAM dan kovenan-kovenannya.

Seperti kita ketahui, terminologi HAM tersusun dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata “hak” atau “haqq” berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna: benar, tepat dan sesuai tuntutan. Lawan dari “Haqq” adalah “bathil”. Hak secara semantik berarti: milik, harta, dan sesuatu yang ada secara pasti. Contoh, penggunaan kata hak Dapat dibaca dalam surah Yasin ayat ke-7: “Sesungguhnya telah pasti berlaku (haqq) perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan

³⁹³Majda El-Muhtaj, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 60-65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, tapi mereka tidak beriman”³⁹⁴. Sedang “asasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna: dasar atau fundamen. Kata ketiga adalah kata “manusia”. Pengertian yang paling mudah dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi

Dalam Islam, khususnya para fuqaha (ahli fiqih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lain yang mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi. Sebagai contoh kalimat: hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual beli.³⁹⁵

Hak bermakna suatu kekhususan yang terlindung, dalam pengertian, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu gugat. Pengertian seperti ini muncul dari pandangan ilmu Ibnu Nujaim, seorang ahli fiqih, sedangkan Fathiad-Duraini mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud dengan kekhususan disini ialah kekhususan hubungan seseorang dengan sesuatu.³⁹⁶

Dalam fiqih, perbincangan masalah hak berkaitan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan agama. Mereka membagi masalah hak dalam agama menjadi dua yaitu hak Allah (haqq-u Allah) dan hak hamba (haqq-u al-ibad). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan

³⁹⁴QS. Yasin (22):7

³⁹⁵Lihat Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlmn.67-69

³⁹⁶Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Hak ini disebut hak Allah karena mengandung manfaat dan resiko yang besar. Sedangkan hak hamba disebut hak pribadi karena hal itu berkaitan dengan kemaslahatan seseorang.³⁹⁷

Ebrahim Moosa seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia mengartikan haqq dengan “sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari”. Menurutnya, pengertian haqq memiliki kesamaan dengan “realitas” dan “kebenaran”. Bagi Ebrahim haqq merupakan lawan dari kata “kesalahan” (bathil). Baginya, makna haqq dapat mengganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Mengutip pendapat Ibn Nujaym. Ebrahim mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Argumen ini didasarkan pada pendapatnya bahwa “hak” merupakan “kemampuan” atau “kapasitas” yang dianugerahkan kepada perseorangan atau kelompok. Karena itu, perseorangan atau kelompok akan menjadi subjek dari suatu hak.³⁹⁸ Menurut Ebrahim, sejak periode awal Islam, periode pertengahan, kaum intelektual muslim telah melakukan tipologi hak dan tuntutan. Pertama, hak Tuhan (haqq-u Allah), kedua, hak manusia (haqq-u al-ibad), dan “hak bersama” antara Tuhan dan manusia.³⁹⁹

Menurut para ahli, hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu 1) pemilik hak; 2) ruang lingkup penerapannya; 3) pihak yang bersedia dalam penerapannya. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang

³⁹⁷ Ibid

³⁹⁸ Ebrahim Moosa, *Islam Profresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam*, ICIP, 2004, hlm.15-19.

³⁹⁹ Ibid

hak.⁴⁰⁰ Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap pribadi. Setiap manusia yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan hak kebebasan dalam proses interaksi antara individu atau hubungannya dengan lembaga.⁴⁰¹

Terma hak asasi manusia dikenal di Barat pertama kali dengan istilah *right of man* yang sebelumnya adalah *natural right*. Namun paralel dengan semangat yang ingin ditegakkannya, oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan terma human rights karena pokok terma the right of man menafikan right of women. Bagi Roosevelt terminologi *Human Rights* bersifat netral dan universal.⁴⁰²

Pengertian hak asasi manusia dalam pandangan Barat jelas-jelas melekat pada setiap manusia. Tanpa memiliki hak ini manusia atau seseorang mustahil hidup sebagai layaknya manusia. Nampaknya pandangan ini berasal dari John Locke yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan sebagai kodrat sejati manusia. Inilah hak yang didasarkan pada pemberian sejati alam dalam diri manusia. Istilah teknis dalam wacana HAM, konsep ini disebut dengan “hukum kodrat”.⁴⁰³ Inilah yang mendasari Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB mengatakan “Human Rights could be generally defined as those rights which inherent in our nature and without which can not live as human being.” (hak asasi manusia adalah hak-hak

⁴⁰⁰ Lihat buku Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Tim ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 199.

⁴⁰¹ Ibid

⁴⁰² Ibid

⁴⁰³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang melekat pada setiap manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).⁴⁰⁴

Semakna dengan pandangan di atas, Abdullahi Ahmed Al-Naim, intelektual muslim kontemporer asal Sudan, memahami HAM sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia. Bagi Al-Naim, karakteristik krusial utama dari HAM adalah bahwa hak itu dimiliki setiap orang, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain.⁴⁰⁵ Pandangan serupa ditandakan oleh Bassam Tibi, yaitu bahwa hak asasi manusia tidak terbatas pada suatu komunitas tertentu, termasuk komunitas agama tertentu. Hak asasi manusia itu bersifat universal untuk seluruh manusia. Untuk itu, Bassam menyarankan agar komunitas agama apa pun bersedia membangun aliansi dan konsensus mengenai hak asasi manusia. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara orang Islam dan orang nonmuslim. Mereka sama-sama manusia.⁴⁰⁶

Isu paling mendasar dalam wacana HAM berkaitan dengan Islam adalah bagaimana memposisikan doktrin-doktrin dalam literatur klasik Islam? Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian ajaran dalam konstruksi klasik ini bersifat diskriminatif, bias gender, dan bersemangat mengancam komunitas nonmuslim. Konstruksi ini bukan mengada-ngada tanpa dasar justifikasi; sebaliknya, basis pembenarannya jelas-jelas diambil dari teks-teks Alquran dan Hadits. Tragisnya, konstruksi-konstruksi yang diskriminatif, bias gender, dan

⁴⁰⁴Ibid

⁴⁰⁵Charles Kurzman (Editor), Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu Isu Global, Paramadina, 2001, hlm.369

⁴⁰⁶M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Editor), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Paramadina, 1996, hlm. 147.

memojokkan komunitas non muslim itu dianggap syariah, yang berarti dianggap sebagai ajaran pokok Islam yang tidak boleh diubah dan disanggah.

Sekedar contoh, para ahli fikih Islam dan tafsir Al-Quran sampai sekarang masih berdebat tentang kebolehan perempuan menjadi pimpinan puncak pemerintahan dan imam salat, karena teksnya berbunyi “al-rijaalu qawwamuna ada al-nisa”. Kesaksian dua perempuan sebanding dengan seorang laki-laki. Waris perempuan setengah dari bagian laki-laki. Selain itu, masih ada konsep ahl-al-Kitab dan al-Dzimmi yang dalam perspektif hukum Islam, status, hak, dan kewajibannya berada dan diperlakukan tidak setara dengan orang Islam. Tafsir terhadap ayat-ayat perbudakan masih menyisakan masalah berat bila dikaitkan dengan semangat HAM modern yang non diskriminatif karena perbedaan ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Sementara itu, HAM modern juga memuat semangat kesetaraan hak dan kewajiban bagi kelompok-kelompok minoritas.⁴⁰⁷

Lantas Bagaimana rumusan konsep HAM yang ada dalam Universal Declaration of Human Right, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? konsep HAM universal dalam piagam yang berisi “pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia”. Kemudian dinyatakan secara tegas tentang konsep HAM sebagai berikut:

(Pasal 1) “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi Nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”

⁴⁰⁷ Untuk mengetahui detail penjelasannya bisa dibaca atikel “Syariah dan Isu-Isu HAM” oleh Abdullahi Ahmed an-Naim dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, Charfles Kurzman (Editor), Paramadina, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pasal 2)“Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam setiap pernyataan ini, tanpa terkecuali macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya”.

Selanjutnya dalam pasal pasalnya terkandung semua hak yang dimiliki oleh setiap manusia seluas bidang kehidupan manusia modern.⁴⁰⁸

Berbicara tentang HAM, masyarakat internasional menjadikan rumusan-rumusan HAM dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) PBB pada tahun 1948 sebagai standar etis normatifnya. Bahkan pada tahun 1966, PBB mengesahkan dan meratifikasi dua kovenan (perjanjian) internasional untuk hak-hak asasi manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jadi berkaitan dengan hak-hak asasi manusia terdapat tiga dokumen: satu berupa “deklarasi”, dua berupa “kovenan”(perjanjian). Inilah perangkat normatif internasional hak-hak asasi masyarakat dunia. Masih ada lagi karena pada tahun 1984, PBB kembali meratifikasi Konvensi tentang Perlawanan terhadap Penganiayaan dan Penghukuman atas Tindakan-tindakan Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia.⁴⁰⁹

Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa kritik muncul dan penolakan terjadi atas konsepsi HAM PBB dan kovenannya dari sebagian negara

⁴⁰⁸Peter Davis, Hak-hak Asasi Manusia (edisi terjemahan), Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Ober, 1994, hlm. Pengantar.

⁴⁰⁹Ibid., hlm. 1-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dunia Ketiga dan negara-negara berasaskan Islam. Bagi negara-negara tersebut, deklarasi itu tidak bisa berlaku universal. Dunia Ketiga dan dunia Islam memiliki rumusan dan pemahaman khas sesuai tradisi dan budaya mereka. Inilah yang disebut dengan istilah penolakan atas dasar perbedaan budaya (culture based resistance to rights). Bahkan mereka mengatakan bahwa deklarasi PBB itu merupakan “deklarasi sekuler”. Langkah nyata mereka lakukan pada konferensi Islam internasional september 1980, di mana mereka mendeklarasikan “The Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR). Di Afrika muncul The Banjul Charter and Human and People Rights yang dirumuskan oleh organisasi negara-negara Afrika pada tahun 1981. Di Asia perjuangan dengan dasar relativisme cultural dalam penerapan HAM melahirkan dokumen-dokumen penting: The Jakarta Message tahun 1992. Di Kuala Lumpur Declaration oleh Asean Inter-Parliamentary Organization (AIPO), bahkan pada tahun 1993 terjadi The Bangkok Declaration yang disiapkan untuk menghadapi konferensi HAM dunia di Viena.⁴¹⁰

Benang merah perbedaan pemahaman ini sesungguhnya berakar pada cara pandang dunia dan paradigma yang berbeda. Bagi negara-negara Barat, HAM itu bersifat mutlak dan universal. Alasan mereka adalah karena itu melekat pada manusia, karena ia “manusia” dan ia lepas dari aspek kultur, ras, suku, agama, dan regional. Hak ini sama sekali tidak berkaitan dengan suku, ras, budaya, dan agama. Wacana ini didasarkan pada pandangan mereka mengenai hukum “kodrat natural” (*natural law*).

⁴¹⁰Moosa, Loc. Cit., hlm. 28; Tamara dan Taher, Op. Cit., hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi berbeda diambil oleh negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara yang berasaskan Islam. HAM itu bagi mereka bersifat particular, karena menyangkut perbedaan budaya, adat istiadat, agama, pandangan politik dan nilai-nilai kebangsaan.⁴¹¹ Lebih fundamental lagi, negara-negara Islam kurang sepeham dengan mukadimah Piagam Deklarasi PBB yang sama sekali tidak menyebutkan nama Tuhan, padahal Tuhan merupakan sumber nilai, norma, dan the ultimate worshipness manusia. Negara-negara Islam menuduh konsep HAM PBB itu mencerminkan psikologi dan jiwa masyarakat Barat yang cenderung atheis dan sekuler.⁴¹²

Perbincangan berbasis dua paradigma yang lahir dari cara pandang dunia (weltanschauung) yang berbeda itu telah menjadi debat klasik. Tak mengherankan bahwa Sampai saat ini pun perdebatan dan perbedaan krusial ini tetap berlangsung, baik dalam kelompok diskusi kecil, seminar-seminar di kampus, lokakarya lokal, bahkan dalam konferensi-konferensi internasional. Karena itu, penulis merasa sangat tertarik untuk memperjelas dan menarasikan titik perbedaan-perbedaan itu.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam wacana HAM berkembang beberapa pokok permasalahan, berkisar pada masalah perbedaan perspektif, perbedaan pemahaman tentang kata hak dan kewajiban, konsep manusia dan perbedaan nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dimaksud bisa berupa budaya, tradisi, agama. Hal lain adalah masalah bentuk negara (pemerintahan).

⁴¹¹Ibid., hlm. 10-12; Ibid, hlm. 107-110.

⁴¹²Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butir-butir di atas akan menghasilkan perbedaan apresiasi dan upaya penegakan yang berbeda. Masalahnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

Salah satu problem krusial wacana HAM yang sampai saat ini belum ada konsensus nya adalah definisi HAM itu sendiri. Semua deklarasi, memorandum atau kovenan tentang HAM berupa rumusan atau pemahaman tentang hak-hak manusia. Beberapa cendekiawan mengomentari bahwa sebagian besar definisi HAM yang ada bersifat abstrak. Contoh-contoh keabstrakan itu sebagai berikut: Maurice Cranston, filsuf politik Amerika mendefinisikan HAM sebagai: “Sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat”. Oleh sebab itu, definisi hak asasi manusia tidak dapat diuji kebenarannya seperti kita menguji kebenaran hak yang diperoleh atau didapat melalui pembentukan peran-peran khusus dengan undang-undang; hak hak asasi manusia tidak bisa dibeli, dan tidak pula diciptakan oleh pelaksanaan perjanjian khusus lainnya. Hak-hak asasi manusia dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia.⁴¹³

Sementara Hedley Bull, ilmuwan politik Australia menamakan hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang melekat pada diri manusia itu saja, bukan melekat pada golongan manusia ini dan itu”. Hak asasi manusia dipandang dimiliki oleh segenap manusia, dan dimiliki oleh hanya manusia, dan dimiliki oleh manusia secara adil. Thomas Paine dalam *The Rights of Men* menulis, “Hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Di antara hak-hak jenis ini tercakup segala hak intelektual, atau hak berpikir, juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan

⁴¹³ Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York, 1973, hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan kebahagiaannya sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi orang lain”. Inilah beberapa definisi atau pemahaman makna HAM yang kita kenal dari banyak ilmuwan.⁴¹⁴

Karena sulitnya mendefinisikan HAM itu, sebagian cendekiawan mengatakan bahwa HAM mengacu kepada hak yang dimiliki segenap manusia dan hak itu memiliki statusnya sendiri. Hak asasi dipandang lebih penting daripada semua hak lainnya. Atas dasar inilah hal itu disebut hak asasi manusia atau hak manusia.⁴¹⁵

Bicara definisi HAM, kita akan dihadapkan pada perspektif dan perbedaan konsepsi tentang manusia. Definisi HAM modern menekankan kedaulatan individu, otoritas mutlak perbuatan manusia, dan kebebasannya dari apapun, termasuk dari intervensi Tuhan. Tekanan pada individu merupakan khas konsep HAM Barat (sekuler).⁴¹⁶

Pandangan HAM Barat seperti itu dikuatkan oleh Ebrahim Moosa yang mengatakan, “HAM dalam konteks ini (Barat) merupakan hak yang tidak dapat dianggu oleh siapapun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak mutlak”.⁴¹⁷ Sebaliknya, negara-negara Dunia Ketiga, khususnya negara-negara berasaskan Islam, lebih mengedepankan posisi manusia berhadapan dengan hak Tuhan dan pemenuhan kewajiban kepada-Nya.⁴¹⁸

⁴¹⁴ Hedley Bull, “Human Rights and Worls Politic”, dalam Ralp Pettman (ed), *Moral Claims in World Affair*, London; Croom Helm, hlm.79.

⁴¹⁵ Petter R. Baerhr, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negri*, (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm.4.

⁴¹⁶ Ibid

⁴¹⁷ Ibrahim Moosa, Loc. Cit., hlm. 14.

⁴¹⁸ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks negara kita, KOMNAS HAM Indonesia mendefinisikan HAM sebagai berikut. Hak asasi adalah “hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya. Pengembangan hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.”⁴¹⁹

Jadi, mengenai definisi HAM sampai saat ini belum ada konsensus; belum ada batasan pengertian yang disepakati secara universal. Belum ada definisi yang mencakup karakter kemanusiaan dari Barat sampai Timur, Selatan sampai Utara. Namun demikian, masyarakat dunia menyepakati bahwa rumusan-rumusan HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan seluruh kovenan, traktat, dan perjanjian internasional lain yang menyertainya, merupakan patokan standar pengakuan hak-hak manusia dan acuan normatif moral-politik penegakan HAM di seluruh dunia.

Sementara itu, Nurcholish Madjid juga tidak secara tegas membuat definisi tentang HAM, kecuali bahwa dia memberikan penegasan penting sebagai berikut. Ditengah berbagai gejolak sekitar perdebatan dan perbedaan pandangan tentang esensi pokok hak asasi manusia itu, beberapa hal sudah jelas, yaitu suatu pengertian tentang hak asasi manusia diperlukan sebagai ukuran minimum untuk menjamin harkat dan martabat pribadi tanpa memandang perbedaan kulturalnya. Beberapa hal paling pokok dapat disebutkan di sini, yaitu kebebasan beragama (freedom of conscience) yang meliputi kebebasan beragama dan keyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat;

⁴¹⁹Baca buku HAM dan Pluralisme Agama, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman penyiksaan (torture); dan suatu jaminan untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak.⁴²⁰

Penegasan Nurcholis di atas, meski tidak membuat suatu batasan (definisi) tentang HAM, jelas memuat beberapa pokok nilai HAM yang sangat mendasar, sekaligus berupa penegasan posisinya. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa nilai HAM sangat penting untuk dijadikan acuan bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, suatu nilai asasi yang dimiliki setiap manusia. HAM menurutnya dapat ditegakkan secara menyeluruh dan universal bila manusia diperlakukan sama dan adil (egaliter), tanpa diskriminasi. Inilah salah satu basis paling dasar pandangan universalisme HAM Nurcholish Madjid. Artinya, bila kita memperlakukan orang lain, melepaskan sekat-sekat suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, harta, pangkat sosial-politik, kebangsaan dan agama, maka seorang manusia adalah manusia seperti kita juga. Intinya, pada prinsipnya manusia adalah sama.

a. Hak Tuhan dan Kewajiban Manusia

Problema perspektif tentang hak dan kewajiban tampak pada wacana para ahli hukum (fuqaha) Islam awal maupun kontemporer.⁴²¹ Menurut Ibn Nujaim, ahli Fiqih Islam, hak adalah “suatu kekhususan yang terlindung”. Artinya hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu, atau kaitan seseorang dengan orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini misalnya tampak dalam batasan mengenai “perbuatan para mukallaf (orang yang terbebani) kewajiban

⁴²⁰Baca makalah Nurcholish Madjid untuk forum KKA ke-139/Tahun XIII/1998, hlm.6.

⁴²¹Moosa, Loc. Cit., hlm. 17-19.

syarak(agama)".Seperti yang kita ketahui, dalam konteks ini ada dua hak: yaitu hak Allah dan hak hamba (adami).

Hal yang sama dilakukan oleh Fathi ad-Durani, ahli Fiqih Islam.Bagi Fathi hak adalah "suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu, atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu". Lebih jauh Fathi menjelaskan adanya "hak yang bersifat umum dan hak yang bersifat khusus",namun semua hak ini mesti mengacu kepada ketentuan agama. Bagi Fathi tidak ada hak yang di luar ketentuan agama. Hak dan kewajiban mesti bersumber dari agama.⁴²²

Atas dasar itu menurut Ebrahim Moosa, para ahli Fiqih Islam membagi hak itu dalam tiga ranah: huquq Allah (hak Aallah), huquq al-ibad(hak manusia), dan huquq baina Allah wa al-ibad (hak bersama antara Allah dan manusia). Bagi pejuang hak asasi di benua Afrika ini, pemenuhan kewajiban dalam lima rukun Islam merupakan hak-hak Tuhan. Berbagai bentuk tindakan pelayanan kepentingan umum, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemasalahan, anuran berbuat kebaikan dalam segala pemaknaan, juga merupakan "hak-hak Tuhan".⁴²³

Uraian di atas memberikan sedikit gambaran perspektif problematika wacana hak-hak Tuhan dan kewajiban manusia yang berkembang dalam dunia Islam. Jelas, dualisme hak dan kewajiban di atas tidak terdapat dalam wacana HAM Barat yang titik berangkat pemikirannya tidak bertumpu pada agama.Inilah yang kemudian menyebabkan adanya label "HAM sekuler" dari para pemikir atau

⁴²²Ensiklopedi Islam, Op.Cit

⁴²³Moosa, Op. Cit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

cehdekiawan muslim.Artinya, bagi mereka, HAM Barat terpisah dan tidak bersumber dari nilai-nilai sakral keagamaan.Menurut mereka, HAM Barat sama sekali tidak memberi ruang untuk nilai-nilai agama.

b. Hak Individu dan Kewajiban Sosial

Ada perbedaan apresiasi terhadap hak individu antara Barat dan Timur, Selatan dan Utara. Konsep HAM Barat memberikan penekanan yang sebebas-bebasnya pada hak individu. Individu adalah segala-galanya. Inilah asal muasal tuduhan negara-negara Dunia Ketiga, negara sosialis, dan negara berasaskan Islam, bahwa konsep HAM Barat sangat individualistik, egois, dan antisosial. Konsep HAM Barat merupakan cermin dari pandangan Barat yang berlebihan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Inilah yang disebut dengan *la securite* dan *les jouissances privess* (keamanan dalam menikmati hidup secara pribadi).⁴²⁴

Sebaliknya menggunakan perspektif negara-negara sosialis yang menekankan tujuan pemerataan sosial-ekonomi tentu sangat membatasi hak-hak individu. Negara memiliki otoritas untuk memberikan atau menahan sesuatu yang mengganggu kebersamaan. Semua aktivitas termasuk hak-hak yang di Barat sangat dihargai dan dilindungi, di negara sosialis bisa dibatasi. Kondisi berbeda juga akan terjadi di negara-negara Dunia Ketiga dan di negara-negara berasaskan Islam.⁴²⁵

c. Perbedaan Mengenai Konsepsi HAM

Antonio Cassessemenjelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai konsepsi filsafat manusia dan hak asasi manusia.Menurutnya, negara-negara Barat

⁴²⁴ AntoniCassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Yayasan Obor Indonesia, 1994, hlm. 73.

⁴²⁵ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sangat mempertahankan pemikiran mereka bahwa hak asasi manusia bersifat “alami” atau natural. Artinya, hak asasi manusia secara inheren telah ada dan melekat pada manusia lebih awal daripada rumusan HAM yang ada. Bagi negara-negara Barat, HAM telah tertanam dalam diri individu, dan merupakan faktor intrinsik dalam “kualitas diri manusia”. Hak asasi manusia telah ada, jauh lebih awal daripada bentuk komunitas, masyarakat, suku bangsa, apalagi negara. Karenanya menjadi keharusan negara untuk menghormati dan melindungi keberadaan hak-hak yang memang melekat dalam diri manusia itu.⁴²⁶

Sebaliknya, bagi negara sosialis, hak-hak asasi manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan negara, juga sampai batas negara mengakuinya. Hal ini terjadi karena hak asasi manusia belum muncul sebelum lahirnya negara. Karena negara lahir, hak asasi manusia muncul, sekali lagi, karena negara memberinya. Karenanya, negara berhak memberikan sekaligus membatasinya bila negara menghendaki. Begitu pula terjadi di wilayah dan benua lainnya, bahwa hak asasi manusia mengikuti bentuk negara, pemilik dan pemegang otoritas HAM.⁴²⁷

d. Perbedaan Kultural dan Agama

Problem lain sehubungan dengan universalisme HAM adalah perbedaan budaya dan agama. Di negara-negara Barat, pola ungkap budaya menghormati orang tua jelas berbeda dengan pola bahasa penghormatan orang tua di negara-negara Dunia Ketiga, apalagi negara-negara berasaskan Islam. Budaya berkunjung di Barat, jelas berbeda dengan budaya saling mendatangi di negara-negara belahan dunia lainnya. Yang jelas dan paling krusial adalah perbedaan perspektif HAM

⁴²⁶Ibid

⁴²⁷Ibid



karena menyangkut perbedaan agama. Dalam konsepsi Buddha, masyarakat memiliki pola seperti keluarga: pemimpin politik (pemerintahan) menyerupai posisi seorang ayah di keluarga. Ia bertanggungjawab, tak ubahnya sebagai kepala keluarga.⁴²⁸

Tentu konsepsi HAM ini akan berbeda bila seseorang, masyarakat atau mayoritas penduduk beragama Hindu. Sistem kasta dalam agama ini tentu berpengaruh dalam memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai HAM. Konfusianisme di Jepang dan negara-negara berasaskan Islam tentu memiliki perspektif tersendiri.⁴²⁹

e. Perbedaan Bentuk Negara (Pemerintahan)

Dalam mengapresiasi prinsip dan nilai HAM tentu ada perbedaan bila seseorang atau masyarakat berada dalam negara yang demokratis, negara sosialis, atau kerajaan. Dalam negara-negara demokratis seperti di Barat, penghormatan terhadap prinsip dan nilai-nilai HAM tentu berbeda jauh dari negara-negara sosialis. Di negara-negara dengan sistem kerajaan (monarki) seperti Arab Saudi tentu penerapan dan penghormatan nilai-nilai HAM berbeda dari negara-negara sosialis, seperti Rusia atau Korea Utara. Jadi setiap bentuk dan sistem kenegaraan akan beri implikasi terhadap apresiasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai sakral HAM.⁴³⁰

Sebagai penutup dalam perdebatan tentang universalisme dan partikularisme HAM ini, dikedepankan pemikiran yang melatarbelakangi munculnya perdebatan itu, sekaligus bagaimana kita akan menempatkan posisi

⁴²⁸Ibid

⁴²⁹Ibid

⁴³⁰Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atas perdebatan itu. Titik pangkal penolakan universalisme HAM modern yang dikenal dengan istilah culture based resistance to rights ini bermuara pada tesis “relativisme budaya” yaitu keyakinan bahwa suatu budaya tidak dengan sendirinya dapat ditetapkan di tempat lain diterapkan di tempat lain, sekaligus suatu budaya tidak bisa digunakan untuk mengukur keberadaan budaya masyarakat lain. Suatu budaya tidak bisa diklaim lebih Superior atas budaya lain. Misalnya, budaya Barat tidak serta merta lebih unggul dan modern atas budaya negara-negara Dunia Ketiga atau negara-negara berbasis ajaran Islam.⁴³¹

Namun demikian, apakah karena adanya paham relativisme budaya ini kita akan menolak kebaikan dan kemaslahatan HAM modern dan kovenan-kovenannya? Apakah hasrat untuk memformulasikan rumusan HAM khas negara berkembang atau HAM khas Islam menjadi mutlak adanya? Benarkah HAM modern bias, khas Barat, sekuler, dan bertentangan dengan ajaran agama (Islam) sehingga kemudian kita harus menentukan pilihan untuk mengadvokasi HAM modern atau HAM Islam?.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam diatas, penting bagi kita mempertimbangkan hasil pengamatan Alizabeth Mayer, pengamat perilaku HAM di negara-negara Islam sebagai berikut:

Pertama, konsep HAM modern tidak lahir dari konstruksi budaya-budaya tradisional. Ia juga bukan produk ritus, ritual dan ibadah-ibadah keagamaan. Konsep ini muncul dari kesadaran mengenai kebebasan diri dan pembebasan manusia dari dominasi dan hegemoni kekuasaan negara (state) yang paska PD II

⁴³¹Baca Jurnal Islamika, No.2 Oktober-Desember 1993, hlm. 90-98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarah kepada otoritarianisme. Konsep ini bertujuan luhur untuk melindungi kebebasan individual berhadapan dengan kekuatan politik. Konsep ini sama sekali tidak diformulasi untuk melindungi komunalisme, komunitarianisme, apalagi bersifat kesukuan (etnisitas).

Kedua, apa yang selama ini diklaim sebagai konsep HAM versi Islam tidak lebih dari sekedar hasil transplantasi (cangkok) atau adopsi bagian-bagian HAM modern dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan bahasa lain, konsep ini tidak benar-benar genuine, asli dari intisari ajaran Islam. Apalagi bila yang disebut konsep HAM itu diambil dari literatur Fiqih Islam. Tentu kita tahu dalam Islam ada empat mazhab. Pertanyaannya, pandangan dari mazhab manakah yang akan dijadikan representasi dari konsep yang murni Islam? ada tragika bahwa kadangkala upaya “pencarian” HAM Islami itu dilakukan oleh rezim-rezim penguasa yang sesungguhnya hanya menggunakan simbol keislaman untuk sekedar mempertahankan legitimasinya.⁴³²

Ketiga, konsep relativisme budaya yang dikembangkan oleh negara-negara Islam ternyata tidak lebih dari sebuah dalil-dalil yang dijadikan dalil demi kepentingan politik belaka. Fakta konkritnya, dengan mengembangkan konsep relativisme budaya, penguasa dan rezim di Iran, Arab Saudi, Sudan dan Pakistan akan dengan mudah menolak parameter penegakan HAM modern saat keempat negara di atas memberangus musuh-musuh politiknya dengan label “anti-Islam”. Negara-negara ini dengan dalih menggunakan Nizam Islami, atau klaim bersendikan Syariah Islam, justru dalam realitanya memberangus kebebasan

⁴³²Komaruddin Hidayat, Anas Urbaningrum, “Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 35-39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

warga dan rakyatnya, sesuatu yang sama sekali tidak Islami. Intinya, Islam dipakai tidak lebih dari sekedar alat legitimasi bagi kekuasaan.⁴³³

Al-Maududi memiliki pandangan berbeda yang tidak mengakui persejajaran Makna Charta di Inggris sebagai dasar HAM yang hadir 600 tahun setelah Islam datang. Hingga abad ke-17, tidak ada satupun yang bermimpi bahwa the Makna Charta akan menjadi dasar-dasar pengadilan yang dipegang hakim, Habeas Corpus dan kontrol parlemen terhadap pajak. Jika drafter the Magna Charta kata Al-Maududi masih hidup, ia akan merasa heran bila dokumen tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang dianut hari ini. Al-Mawdudi menambahkan bahwa sejauh pemahamannya, Barat belum mempunyai konsep hak-hak sipil hingga abad ke-17 Masehi. Kondisi kehampaan konseptual ini terjadi hingga abad ke-18 ketika mengambil konsep pragmatis dalam konstitusi Amerika dan Perancis.

Di sisi praktis, Al-Mauwududi berpandangan bahwa HAM yang dideskripsikan dalam konstitusi negara hanya sekedar ada dalam lembaran catatan semata. PBB telah melahirkan UDHR dan menghasilkan resolusi untuk mengutuk genosida dan dibuat aturan untuk itu, tetapi tidak ada satu resolusi pun menurut Al-Mawdudi yang dapat diterapkan jika sebuah negara concern hendak melakukan langkah preventif terhadap genosida. Tidak ada sanksi terhadap pelaku genosida, baik itu sanksi fisik atau moral. Oleh karena itu, pelanggaran HAM tetap saja terjadi sepanjang kehidupan ini.

⁴³³Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak dapat dimungkiri bahwa sejumlah kekerasan terjadi di belahan dunia Muslim yang berdampak pada pelanggaran HAM. Secara konseptual, HAM menjadi core ajaran Islam sejak kehadirannya. Selanjutnya, bagaimana seorang muslim memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata menjadi sisi menarik untuk dikaji dalam ranah keilmuan hari ini. Artinya, kemampuan membaca seorang muslim terhadap problematika kontemporer berhajat kepada kearifan dan aspek-aspek ilmiah.

Negara negara non muslim hari ini berbangga dengan penegakan HAM, yang hakikatnya harus menjadi fondasi utama sejak berupa janin dalam rahim ibu. Kemudian pasangan laki laki dan perempuan melakukan pernikahan, lalu lahir “calon” Khalifah dalam kehidupan ini, di sini perlu adanya norma atau aturan yang menegakkan al-mawaddah wa al-rahmah dan al-takaful yang menjadi keluarga dari aspek-aspek yang merusak.

Sebagian menanggapi dengan sikap skeptis sekaligus konservatif, tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia yang universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat.⁴³⁴

D. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

1. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip adalah sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam “menghadapi perkembangan

⁴³⁴Fauzi,Zulihafnani (Editor), “Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 7-8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntunan zaman”. Menurut Masdar F. Mas’udi, lima prinsip hak-hak asasi manusia dapat ditilik dari konsep *dharuyaiyah al-khams* yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup
- b. Perlindungan keyakinan
- c. Hak perlindungan terhadap akal pikiran
- d. Perlindungan terhadap hak milik
- e. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Sedang prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, yang kini telah terdapat pada hampir semua perjanjian internasional dan telah diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. beberapa prinsip hak asasi manusia akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip kesetaraan
- b. Prinsip non diskriminasi
- c. Kewajiban Negara
- d. Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam untuk dilindungi, ada beberapa macam sebagaimana pembagian yang diutarakan oleh para ahli. Diantaranya pendapat M. Tahir Azhari mengemukakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditekankan pada 3 hal utama, yakni:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Persamaan manusia
- b. Martabat manusia
- c. Kebebasan manusia

Mengenai kebebasan manusia Azhari mengemukakan lima kebenaran yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu adalah:

- a. Kebebasan beragama
- b. Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikiran
- c. Kebebasan memiliki harta benda
- d. Kebebasan untuk memilih tempat tinggal
- e. Kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta benda.

Menurut Dr. Musthafa As-Siba'i, hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup
- b. Hak kemerdekaan
- c. Hak mencari pengetahuan
- d. Hak atas penghargaan
- e. Hak mempunyai milik.

Manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan dan kedamaian.

Namun demikian manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud itu, disebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh yang lain, walaupun sudah bermacam-macam konsepsi yang dirumuskan untuk menjamin kebebasan dasar itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian itu manusia harus kembali kepada ajaran Al-Qur'an. dengan Al-Qur'an dapat diatur dan menjamin kesejahteraan hidup manusia dari segala aspeknya. Al-Qur'an yang diturunkan beberapa puluh abad yang lalu telah mengandung dan menjamin segala hak-hak asasi manusia. Ia bersumber dari khalik maha pecipta dan ia tetap tegak dan terlaksana, bukan seperti konsepsi yang dibuat oleh manusia.

Di antara ajaran Al-Qur'an tentang hak asasi adalah:

- a. Hak hidup
- b. Hak mendapatkan pekerjaan
- c. Hak mendapatkan pendidikan
- d. Hak kemerdekaan
- e. Hak kebebasan beragama
- f. Hak kebebasan berpendapat
- g. Kemerdekaan harta benda
- h. Hak persamaa

3. Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah

Piagam madinah atau bisa juga disebut konstitusi madinah merupakan konstitusi yang berfungsi menjadi dasar hidup bersama yang disepakati antara masyarakat madinah yang heterogen di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada paruh akhir tahun 1 Hijriah. Piagam madinah merupakan sebuah perjanjian formal antara Nabi Muhammad SAW dengan semua suku-suku yang ada di yastrib (madinah) pada tahun 622 M (abad ke-7 M). Tujuan dan maksud dari piagam madinah ini adalah penghormatan /saling menghormati terhadap



kaum muslimin yang pada waktu hijrah mekkah ke madinah terhadap warga madinah yang pada waktu itu sebagian besar penduduknya adalah kaum yahudi dan penyembah berhala.

Piagam madinah lahir di jazirah arab yang sebelumnya diliputi tradisi kemusyrikan, konflik antar suku, permusuhan kaum kafir Quraisy dengan umat islam. Ketidakjelasan batas satu negara dengan negara lainnya, dan belum dikenalnya hukum internasional. Dalam pada itu, semangat Nabi Muhammad SAW. Dan para pengikutnya untuk menegakkan ajaran tauhid dan syariah menyala-nyala. Keinginan bersatu di kalangan orang-orang arab yang telah masuk islam tumbuh begitu kuat. Tekat Nabi SAW untuk membangun tatanan hidup sangat mantap dan realistis, dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Itulah tampaknya motivasi dibuatnya Piagam Madinah.

4. Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia

Menurut Al-Maududi tentang ortodoksi hak asasi manusia sebagai berikut yaitu:

a. Hak hidup

Al-Maududi menegaskan bahwa hak asasi manusia yang paling utama hak untuk hidup.

b. Hak untuk mendapatkan keselamatan

Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang hampir mati karena kelaparan, maka kewajiban kitalah untuk memberinya makanan.

c. Hak penghormatan terhadap kesucian perempuan

Dalam perspektif Al-Maududi, unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diakui islam adalah kesucian seorang manusia harus di hormati dan dilindungi setiap saat, termasuk perempuan.

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Berbicara tentang hak-hak ekonomi, Al-Maududi menegaskan bahwa konsep hak-hak ekonomi telah diatur dengan baik dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam firmanya:

Artinya: dan diantara harta benda mereka sesungguhnya terdapat bagian dari kaum peminta-minta dan orang miskin (51: 19)

e. Hak Individu atas kemerdekaan dan kebebasan

Al-Maududi dalam karyanya *human right is islam* menegaskan bahwa islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak untuk diperjualbelikan, perihal ini secara tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagai berikut: *artinya: ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Dari ketiganya ini, salah satu adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan dari hasil penjualannya* (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

An-Na'im mengabaikan perbedaan fiqh dan syari'at tersebut. Obsesinya terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan HAM mengantarkannya untuk menilai syari'at berdasarkan konteks sejarahnya. Ia berpendapat bahwa syari'at muncul ketika belum ada gagasan HAM universal di mana pun saat itu. Apa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan syari'at adalah melakukan perbaikan sebisa mungkin untuk mengurangi dampak negatif perbudakan dan diskriminasi yang berbasis gender dan perbedaan agama.

Posisi yang diambil An-Na'im dalam melihat syariat ditentukan oleh konteks sejarah tersebut. Ia berpendapat bahwa keberadaan syari'at historis adalah untuk memperbaiki situasi yang ada saat ini. Ketika situasi yang ingin diperbaiki tersebut sudah tidak ada, maka syari'at tidak lagi bisa menjustifikasi dalam konteks sekarang yang telah berubah secara drastis.

Ada tiga kasus yang menjadi perhatian An-Na'im ketika menilai relevansi syari'at historis dengan konteks sekarang, yaitu: a. Masalah perbudakan, b. Diskriminasi wanita, c. Diskriminasi non muslim

Tiga kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang menjadi persoalan yang menjadi titik temu syari'at islam dengan HAM internasional. Meskipun An-Naim menyadari telah ada upaya dari pada penulis islam kontemporer untuk merumuskan HAM versi lain, ia tetap melihat usaha tersebut tidak memadai karena masih memandang rendah persoalan perbudakan dan diskriminasi terhadap wanita dan non muslim.

UIN SUSKA RIAU

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkembangan pelaksanaan Hak Asasi Manusia Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Pelanggaran HAM masih ditemui secara acak di berbagai tempat dan waktu dengan objek, pelaku dan korban yang beragam. Meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan HAM sudah dibuat dan diratifikasi oleh negara untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dengan modal demografi penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim, langkah dan kebijakan apa yang bisa diupayakan untuk menjamin terciptanya perlindungan, pemajuan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Tak lain dan tak bukan adalah dengan menerapkan dan mereaktualisasikan nilai-nilai ajaran atau syari'at Islam ke dalam materi muatan Undang-Undang HAM. Tujuannya adalah untuk membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan bagi setiap warga negara atau anggota masyarakat yang menjalankannya. Perwujudan dari penerapan nilai ajaran atau syari'at Islam ini dikenal dengan nama *Maqāshid al-Syari'ah*.

Ajaran Islam menentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya khususnya kekerasan seksual. Hal ini dilandasi oleh *Maqāshid al-Syari'ah*, khususnya *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs*



(menjaga jiwa atau menolak kekerasan fisik dan psikis), *hifzh al-māl* (menjaga harta), *hifzh al-aql* (menjaga akal) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan atau menolak kekerasan seksual).

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* tersebut secara umum sudah tercermin dalam UU PKDRT (UU No. 23 tahun 2004). Kelima aspek (*dharurat al-khamsah*) ini jika dikaitkan dengan eksistensi UU PKDRT, sudah termanifestasikan dalam materi muatan dalam undang-undang tersebut, meskipun batasan dan pengaturannya belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan syari'at Islam. Terutama dalam menentukan batasan kekerasan, jenis dan bentuknya, penetapan sanksi pidana dan denda sesuai dengan tingkat kekerasan ringan, sedang, atau berat, serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berdampak secara ekonomi dan sosial.

Kelemahan lainnya juga berkaitan dengan tata cara pelaporan oleh korban kepada kepolisian terhadap hal yang sifatnya privat. Tidak terdapat juga pasal yang menerangkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap lansia, misalnya penelantaran atau kelalaian dalam memberikan nafkah, kurang memperhatikan kesehatan mereka, mengantar mereka ke panti jompo karena tidak mau bersusah payah merawat, dan berbagai macam bentuk penelantaran lainnya. UU ini tidak melampirkan penjelasan yang menerangkan kandungan pasal-pasal nya, termasuk pasal-pasal yang multi tafsir. Oleh karena itu sangat terbuka peluang untuk merevisi undang-undang ini dengan mengusulkan perubahannya kepada DPR dan Pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari isi materi muatan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa secara umum semangat *Maqāshid al-Syari'ah* sudah termanifestasikan ke dalam UU ini. Hanya saja perumusan dan penjabarannya secara terperinci dan khusus sesuai situasi, kondisi, dan keadaan anak, masih harus dikembangkan sesuai tuntutan zaman.

Di sinilah perlu dilakukan pengembangan, pembaruan, dan pengayaan implementasi *Maqāshid al-Syari'ah* (Reaktualisasi Maqashid Syariah) ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah.

Suatu undang-undang apabila benar-benar dibentuk dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudaratannya baik berkaitan dengan kepentingan keluarga, apalagi kepentingan umum/masyarakat dengan menentukan secara cermat prioritas masing-masing kepentingannya sesuai dengan *Maqāshid al-Syari'ah*, maka akan menentukan efektifnya undang-undang tersebut. Sebab materi muatan undang-undang yang berangkat dari roh/jiwa syari'at pasti akan membawa kepada kemaslahatan bagi rakyat. Semakin dekat undang-undang tersebut kepada roh syariat, maka akan semakin terwujud kesejahteraan rakyat.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Legislatif dan Pemerintah agar membuat rumusan undang-undang, khususnya undang-undang yang mengatur atau terkait Hak-hak



Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip dan nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah*.

2. Implementasi *Maqāshid al-Syarī'ah* yang dirumuskan tersebut, harus dituangkan ke dalam materi muatan UU HAM melalui pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah, yang ditegakkan secara terus menerus (*law enforcement*), baik sekarang maupun yang akan datang, sesuai dengan zamannya,

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mencari rumusan yang tepat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terkait Hak-hak Asasi Manusia secara khusus, dan undang-undang lainnya secara Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah bin Bayyah, *Alaqah Maqasid al-Syari'ah bi Usul al-Fiqh*. London: Markaz Dirasat Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, 2000.
- Abu al-Husein Ahmad bin Faris bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jail, t.t., vol. V.
- Al-Badawiy, Yusuf Ahmad. 1999. *Maqashid al Syariah 'Inda Ibnu Taimiyyah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan *Dawabit Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 2000.
- Al-Fasi, Alal, 1993, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah.
- Al Ghazali, Abu Hamid. 1413. *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*. Madinah: Al Jami'ah al Islamiyah al Madinah al Munawarah.
- Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al Asyqar, Beirut: Al-Resalah, 1997 M/1418 H
- Al-Juwaini, *al-Burhan* (t.p., t.t.), vol. II.
- Al-Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim Zaid, *Qawa'id al-Maqashid 'inda Imam al-Syatibi 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000).
- Al-Khadimi, Nuruddin. 2001. *Ilmu al Maqashid al Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah al Ubaikan.
- Al-Khalifi, Riyadh Manshur. 2004. *Al Maqashid al Syar'iyah wa Atsaruha fi Fiqh al Mu'amalat*. Mekkah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah*. Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Pustaka Al Kautsar
- Al-Raisuni, Ahmad, *al-Bahs fi Maqasid al-Syari'ah; Nasy'atuhi wa Tawwuruhi wa Mustaqbaluhu*, makalah disampaikan dalam seminar tentang "Maqashid Syariah" di London tanggal 1-5 Maret 2005.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1999. *Al Fikr al Maqashidi Qawaiduh wa Maqashiduh*. Riyadh: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baidha'.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Raisuni Ahmad, *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamy: 1995.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. tt. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*. Mesir: Maktabah al Tijariyah al Kubra.

Al-Youbiy, Muhammad bin S'ad bin Ahmad bin Mas'ud. 1998. *Maqashid al Syariah wa 'Alaqtuha bi al Adillah al Syar'iyah*. Riyadh: Dar al Hijrah.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa al-nazhair fi Qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah*. Riyadh: Nazar Musthafa al-Baz, 1997.

Anis, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasith, juz. I*. Beirut: Dar al-Fikri, tt.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang, 2013.

Aziz, Abdul bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah. 2002. *Ilmu Maqashid al Syariah*. Riyadh: al Mamlakah al 'Arabiyyah al Saudiyyah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Darussamin, Z., "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'Ah," *Al-Ahwal* 1, No. 1 (2019): 84–98.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1994.

Fuad, Ahmad Nur dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: Madani, 2010.

Haib, Muhammad Bakr Ismail. 2003. *Maqashid Asy Syariah Ta'shilan wa Taf'ilan*. Makkah: Rabithah al Alam al Islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, Budi Rahmat dan Herlinawati Herlinawati, "Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid Al-Syariah)," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, No. 1 (April 4, 2021).

Hamid, Shalih bin Abdullah bin. (2004). *Raf'u al haraj fi al syari'ah al islamiyah dhawabathah wa tadhbiqatuh*: Shalih bin Abdullah bin Hamid. Riyadh: Maktabah al Ilmiyah.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fakta Keagungan Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hassan, Roffat, *Religious Human Rights and Qur'an*, dalam Ahmad Nur Fuad dkk., *Hak Asasi Manusia*.

Hidayat, Komaruddin, dan Anas Urbaningrum, "Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 35-39.

Ibn 'Ashur, Muhammad Tāhir. *Maqāsid al-shārī'ah al-Islāmiyyah*, Tunis: al-Shirkah al-Tunīziyyah li al-tawzi', t.th.

Izzuddin bin Abdissalam. 2000. *Qawa'id Ahkam fi Mashalih al Anam* atau *Qawaid al Kubro*. Damaskus: Dar al Qalam.

Izzuddin Bin Zughaibah. 1996. *Al Maqashid al Ammah li al Syari'at al Islamiyah*. Kairo: Dar al Shafwah.

Jasser Auda, *Fiqh Maqasid; Inayah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*. London: al Ma'had al Alami li al-Fikr al-islami, 2007, cet. III.

Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law (Membumikan Islam Melalui Maqasid Syariah)*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2015.

Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah Inda al-Syaikh al-Qardawi*. Qatar: t.p., 2007.

Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*. London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2008.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010)

Ju'ni, Muwaffiq, Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | Istimbath: *Jurnal Hukum*, Vo. 14, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasdi, Abdurrahman, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam". *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.

Khallaf, Abdul Wahab, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nassa fih*. Kuwait: Darul Qalam, 1982).

Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Koto. Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Koto, Alaidin, *Hikmah Di Balik Perintah dan Larangan Allah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid*. Jakarta: Grasindo, 2012.

Muhammad bin Mukarrom bin Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., vol. VIII.

Muhammad, Gema Etika, "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Progam Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri," (2017).

Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996, hlm. 236-237.

Salih, Muhammad Usman, *al-Islam huwa Nizam Syamil li Himayat wa Ta'ziz Huquq al-Islam* (Makalah di International Conference on Islam and Human Rights, Khourtum, 2006).

Syaltut, Mahmud, *al-Islām Aqidah wa Sharī'ah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, cet. 18, 2001).

Shidiq, Ghofar *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV NO. 118, Juni-Agustus 2009.

Supono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001.

Umar bin Shalih bin Umar. 2003. *Maqashid al Syariah 'Inda al Imam al 'Izz bin Abd al Salam*. Urdun: Dar al Nafais li al Nasr wa al Tauzi'.

United Nation High Commision for Human Rights (UNHCR), tersedia di www.unhcr.cah/Huridoca.nsf.

Yamani, Ahmed Zaki, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Zaman Kini*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.

B. Jurnal

Andiko, Toha, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Toha Andiko Dkk," *Manhaj* 3, no. 3 (2017): 14.

Hayat, Aay Siti Raohatul. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 5, No. 2, 2020.

Kania, Dede, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015): 716–734.

Mansyur, Zaenuddin "Pembaruan Masalah Dalam Maqasid al-Shari'ah": Telaah Humanis Tentang al-Kulliyat al-Khamasah, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.

Maulidi, "Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 49 No.2, Desember 2015.

Opwis, Felicitas, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005.

Puri, Ayu Dian, Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2019), 229-256, 1(2)



Samsidar, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al- Syari'h " *Jurnal Supremasi XII* (2017): 78-89.

Umar, M. Hasbi dan Ma'ani B, Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Risalah* (2018) 17(02).

Widayani, A. Risnawaty, "Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Ri Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah, (2013).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.